



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS**

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2024
DI TALANG UBI**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI PALEMBANG**

Nomor : 44.B/LHP/XVIII.PLG/05/2025

Tanggal : 25 Mei 2025

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PIFA2AAF.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2024**

Nomor : 44.B/LHP/XVIII.PLG/05/2025

Tanggal : 25 Mei 2025

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
BAB I HASIL PEMERIKSAAN.....	3
A. Penyusunan Laporan Keuangan	3
1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten PALI Belum Memuat Kebijakan Properti Investasi	3
B. Belanja.....	6
1. Klasifikasi Penganggaran Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah pada Sembilan SKPD Tidak Tepat.....	6
2. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tidak Sesuai Ketentuan	10
3. Pembayaran Tunjangan Perumahan Melebihi Ketentuan.....	12
4. Pembayaran Belanja Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan.....	15
5. Realisasi Belanja Jasa Kantor pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan.....	19
6. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada 13 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	21
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tidak Sesuai Ketentuan	26
8. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan.....	31
9. Realisasi Belanja Kegiatan Pelatihan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya.....	35
10. Pembayaran Biaya Langsung Personel atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Tidak Sesuai Ketentuan	37
11. Kekurangan Volume atas 29 Paket Pekerjaan Kontraktual Belanja Barang dan Jasa pada Dua SKPD	42
12. Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tidak Sesuai Ketentuan.....	44

13. Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi dan <i>Landscape</i> Wisma PKK Kabupaten PALI Tidak Sesuai Ketentuan...	49
14. Perencanaan, Pemilihan Penyedia, dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten PALI Tidak sesuai Ketentuan	55
15. Denda Keterlambatan Belum Dikenakan terhadap Enam Paket Pekerjaan Kontraktual di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	61
C. Aset	62
1. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten PALI Tidak Memadai.....	62
BAB II IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA.....	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penyajian Aset Non Lancar pada Neraca Tahun 2024.....	3
Tabel 1.2	Rincian Tanah Hotel Srikandi	4
Tabel 1.3	Rincian Gedung dan Bangunan Hotel Srikandi.....	4
Tabel 1.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten PALI TA 2024	6
Tabel 1.5	Penganggaran Belanja Modal yang Tidak Tepat.....	6
Tabel 1.6	Kegiatan Pemeliharaan yang Tidak Menambah Umur Aset Tetap yang Dianggarkan di Belanja Modal.....	7
Tabel 1.7	Pengadaan Hibah Barang untuk Pihak Lain Dianggarkan di Belanja Modal.....	7
Tabel 1.8	Kegiatan yang Menghasilkan Aset Tetap Dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa	8
Tabel 1.9	Perhitungan Ulang BPO KDH/WKDH Tahun 2024.....	10
Tabel 1.10	Kelebihan Bayar Tunjangan Perumahan	13
Tabel 1.11	Kelebihan Pembayaran Honorarium PA	15
Tabel 1.12	Kelebihan Pembayaran Honorarium PPK	16
Tabel 1.13	Kelebihan Pembayaran Honorarium KPA, Bendahara Pengeluaran, dan PPTK	16
Tabel 1.14	Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Advertorial.....	20
Tabel 1.15	Uang Harian Fullboard Tidak Sesuai Ketentuan.....	23
Tabel 1.16	Biaya Penginapan secara Lumsun Tidak Sesuai Ketentuan.....	23
Tabel 1.17	Peserta Perjalanan Wawasan Kebangsaan.....	26
Tabel 1.18	Rincian Biaya yang Ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran.....	27
Tabel 1.19	Rincian Uang yang Diterima oleh PT AMH	28
Tabel 1.20	Rincian Belanja Paket Umroh pada Sekretariat Daerah	31
Tabel 1.21	Rincian Bonus yang diterima pihak Sekretariat Daerah.....	32
Tabel 1.22	SP2D TU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024.....	35
Tabel 1.23	Rincian Realisasi Belanja Bahan Material Pelatihan dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya	35
Tabel 1.24	Kelebihan Pembayaran atas Personel yang Waktu Penugasannya Tidak Sesuai Volume Kontrak.....	37
Tabel 1.25	Kelebihan Pembayaran atas Personel yang Tidak Bekerja Sesuai Kontrak	38
Tabel 1.26	Kelebihan Pembayaran atas Kualifikasi Personel Tidak Sesuai dengan Persyaratan KAK pada Dinas PUTR.....	39
Tabel 1.27	Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran atas Belanja Pemeliharaan.....	42
Tabel 1.28	Rekapitulasi Kekurangan Volume Pekerjaan	44
Tabel 1.29	Rekapitulasi Pekerjaan Fisik yang menjadi Sampel Pemeriksaan Tender	45
Tabel 1.30	Sampel Paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dinas PUTR	49
Tabel 1.31	Rincian Evaluasi Ulang atas Proses Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dinas PUTR	49
Tabel 1.32	Perbandingan Harga <i>Diesel Generator Set</i>	50

Tabel 1.33	Perbandingan Harga 13 Jenis Tanaman	51
Tabel 1.34	Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan	52
Tabel 1.35	Perbandingan Perubahan Harga Satuan Pekerjaan	56
Tabel 1.36	Perbandingan Perubahan Harga Satuan Item Pekerjaan pada HPS Tender dan Kontrak	57
Tabel 1.37	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa	61
Tabel 1.38	Rincian Paket Pekerjaan yang Belum Dikenakan Denda Keterlambatan	61
Tabel 1.39	Rincian Aset Tetap TA 2024 dan TA 2023	62
Tabel 1.40	Rincian Aset Tetap dengan Masa Manfaat Tidak Sesuai Kebijakan Akuntansi	64
Tabel 1.41	Dampak salah saji Aset Tetap dengan Masa Manfaat Tidak Sesuai Kebijakan Akuntansi terhadap Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan	64
Tabel 1.42	Rincian Aset Tetap dengan Nilai Perolehan Dibawah Nilai Satuan Kapitalisasi	65
Tabel 1.43	Rincian Aset Tetap yang Belum Dikapitalisasi ke Aset Tetap Induknya	65
Tabel 1.44	Rincian Aset Tetap Tanah dengan Nilai Rp0,00	66
Tabel 1.45	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan Nilai Rp0,00	66
Tabel 1.46	Rincian Kendaraan Dinas Pinjam Pakai yang Telah Habis Masa Pinjam Pakai	67
Tabel 1.47	Rincian Aset Tetap Kendaraan Dinas Pinjam Pakai yang Tidak Didukung Perjanjian Pinjam Pakai	68
Tabel 1.48	Rincian Aset Tetap Kendaraan Dinas Pinjam Pakai di Luar Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah	68
Tabel 1.49	Rincian Kendaraan Dinas yang Belum Bayar Pajak dan STNK Hilang	68
Tabel 1.50	Rincian Peta Jabatan Subbidang Pengelolaan Aset Daerah	69
Tabel 1.51	Rekapitulasi Sebaran PNS dan PPPK Diploma III dan Strata I Akuntansi	70
Tabel 2.1	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten PALI per 31 Desember 2024	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Kesalahan Penganggaran Antar Subrekening Belanja Modal
Lampiran 2	Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dari Belanja Modal
Lampiran 3	Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Hibah dari Belanja Modal
Lampiran 4	Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dari Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 5	Rincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Lampiran 6	Rincian Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Perjalanan Dinas pada Empat SKPD
Lampiran 7	Rincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Dilaksanakan ASN
Lampiran 8	Rincian Kelebihan Pembayaran Biaya Personel Jasa Konsultansi
Lampiran 9	Rekapitulasi Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Kontraktual
Lampiran 10	Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Lampiran 11	Rekapitulasi Ketidaksesuaian Dokumen Kualifikasi Penyedia
Lampiran 12	Rekapitulasi Ketidaksesuaian Penawaran Penyedia dengan LDP
Lampiran 13	Rincian Pemahalan Pekerjaan <i>Landscape</i> Wisma PKK
Lampiran 14	Rincian Pemahalan Harga Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten PALI
Lampiran 15	Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Daerah
Lampiran 16	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Belum Dikapitalisasi ke Aset Induknya
Lampiran 17	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang Belum Dikapitalisasi ke Aset Tetap Induknya
Lampiran 18	Rincian Aset Tetap Tanah yang Belum Didukung dengan Informasi Sertifikat Kepemilikan
Lampiran 19	Rincian Aset Tetap Kendaraan Dinas yang Belum Didukung dengan Informasi Nomor Rangka/Nomor Mesin/Nomor Polisi/Nomor BPKB
Lampiran 20	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Belum Didukung dengan Informasi Lokasi
Lampiran 21	Rekapitulasi Aset Tetap Jaringan, Irigasi, dan Jaringan yang Tidak Didukung dengan Informasi Lokasi
Lampiran 22	Rincian Aset Tetap Kendaraan Dinas yang Tidak Hadir saat Pemeriksaan Kendaraan
Lampiran 23	Rincian Aset Tetap yang Hilang dan Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran 24	Rincian Aset Tetap Kendaraan Dinas yang Masa Pinjam Pakai Kendaraan Telah Habis

- Lampiran 25 Rincian Aset Tetap Kendaraan Dinas Pinjam Pakai di Luar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Lampiran 26 Rincian Aset Kendaraan yang Belum Dibayar Pajak dan STNK Hilang
- Lampiran 27 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati

DAFTAR SINGKATAN

A

AHS	: Analisa Harga Satuan
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBD-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
ASDP	: Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ATK	: Alat Tulis Kantor

B

Balitbangda	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Bangub	: Bantuan Gubernur
Bapenda	: Badan Pendapatan Daerah
BAST	: Berita Acara Serah Terima
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BKPSDM	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BMD	: Barang Milik Daerah
BOQ	: <i>Bill of Quantity</i>
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPO	: Biaya Penunjang Operasional

C

CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i>
----	-------------------------------------

D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
Dekranasda	: Dewan Kerajinan Nasional Daerah
Dinas Dukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Perindag	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Perkim	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas PUTR	: Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinkes	: Dinas Kesehatan
Disdik	: Dinas Pendidikan
Dispora	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
DP	: <i>Down Payment</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPMPSTP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPPA	: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
DWP	: Dharma Wanita Persatuan

G

Genset	: <i>Generator Set</i>
--------	------------------------

H

HPS : Harga Perkiraan Sendiri

I

IKP : Instruksi Kepada Peserta

IUJK : Izin Usaha Jasa Konstruksi

J

JFT : Jabatan Fungsional Tertentu

JFU : Jabatan Fungsional Umum

K

K3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kabid : Kepala Bidang

Kadis : Kepala Dinas

KAK : Kerangka Acuan Kerja

KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

KDH : Kepala Daerah

KESBANGPOL : Kesatuan Bangsa dan Politik

KIB : Kartu Inventaris Barang

KIR : Kartu Inventaris Ruang

KJPP : Kantor Jasa Penilai Publik

KKN : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

L

LDP : Lembar Data Pemilihan

LDK : Lembar Data Kualifikasi

LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPP : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

O

OB : Orang/Bulan

OP : Orang/Paket

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

P

PA : Pengguna Anggaran

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PALI : Penulak Abab Lematang Ilir

Paskibraka : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Pemkab : Pemerintah Kabupaten

PHO : *Provisional Hand Over*

PKK : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

PLN : Perusahaan Listrik Negara

Plt : Pelaksana Tugas

PMK : Peraturan Menteri Keuangan

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Pokja : Kelompok Kerja

PP : Pejabat Pengadaan

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen

PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPK SKPD : Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah
PPPK : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSAP : Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSU : Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
PT : Perseroan Terbatas

R

RAB : Rencana Anggaran Biaya
RKA : Rencana Kerja dan Anggaran
RKK : Rencana Keselamatan Konstruksi
RPD : Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah

S

SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja
SBU : Sertifikat Badan Usaha
SDM : Sumber Daya Manusia
Setda : Sekretariat Daerah
SIMDA BMD : Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah
SIP : Surat Izin Penghunian
SK : Surat Keputusan
SKK : Sertifikat Kompetensi Kerja
SKP : Sisa Kemampuan Paket
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKT : Sertifikat Keterampilan Terampil
SKTJM : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMAN : Sekolah Menengah Atas Negeri
SMK3 : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SPJ : Surat Pertanggungjawaban
SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
SPT : Surat Perintah Tugas
SPSE : Sistem Pengadaan Secara Elektronik
STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan

T

TA : Tahun Anggaran
TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TDF : *Treasury Deposit Facility*
TPST : Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TU : Tambah Uang

W

WKDH : Wakil Kepala Daerah



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2024 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 44.A/LHP/XVIII.PLG/05/2025 tanggal 25 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten PALI Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Klasifikasi penganggaran Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah pada sembilan SKPD tidak tepat, mengakibatkan realisasi LRA Pemerintah Kabupaten PALI tidak menggambarkan keadaan sebenarnya sebesar Rp108.698.003.213,00;
2. Realisasi belanja kegiatan pelatihan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak sesuai kondisi sebenarnya, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp964.603.123,00;
3. Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak sesuai ketentuan yaitu penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, rincian HPS terindikasi diketahui penyedia, dan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai volume dan spesifikasi kontrak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp8.872.798.410,38;
4. Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi dan *Landscape* Wisma PKK Kabupaten PALI tidak sesuai ketentuan, yaitu penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, rincian HPS terindikasi diketahui penyedia,

terdapat pemahalan harga dan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.484.429.071,00; dan

5. Perencanaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten PALI tidak sesuai ketentuan, yaitu penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, rincian HPS terindikasi diketahui penyedia, terdapat pemahalan harga dan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebesar Rp2.766.694.201,22.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI, antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mengevaluasi usulan anggaran kegiatan SKPD dan memverifikasi rancangan DPA/DPPA SKPD;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp964.603.123,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah atas:
 - a) Pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp8.872.798.410,38; dan
 - b) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi dan *Landscape* Wisma PKK Kabupaten PALI sebesar Rp1.484.429.071,00.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.766.694.201,22 dan menyetorkan ke kas daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palembang, 25 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penaung Jawab Pemeriksaan,



Rio Tirta, S.E., M.Acc., CSFA

BAB I HASIL PEMERIKSAAN

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2024 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 17 temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

A. Penyusunan Laporan Keuangan

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten PALI Belum Memuat Kebijakan Properti Investasi

Neraca Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI menyajikan saldo Aset Non Lancar per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penyajian Aset Non Lancar pada Neraca Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang	
	Investasi Permanen	19.934.451.558,00
2	Aset Tetap	
	Tanah	108.354.966.462,50
	Peralatan dan Mesin	522.379.504.889,12
	Gedung dan Bangunan	888.460.748.065,64
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.084.412.237.080,37
	Aset Tetap Lainnya	50.173.404.912,78
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.205.738.466,11
	Akumulasi Penyusutan	(1.979.190.230.936,25)
3	Aset Lainnya	
	Aset Tidak Berwujud	32.127.028.352,61
	Aset Lain-lain	513.820.979.882,60
	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	41.021.181.000,00
	Jumlah Aset Non Lancar	3.309.700.009.733,48

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi disebutkan bahwa PSAP Nomor 17 Properti Investasi digunakan dalam menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2022. Properti investasi diklasifikasikan dalam Aset Non Lancar dan disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya. Selanjutnya pada Tahun 2022, Pemkab PALI menyusun Kebijakan Akuntansi dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi yang ternyata tidak mengatur Properti Investasi.

Hasil pemeriksaan atas pencatatan Aset dan hasil konfirmasi dengan BPKAD Kabupaten PALI menunjukkan bahwa terdapat Aset Tanah sebesar Rp1.391.609.195,00

dan Aset Bangunan sebesar Rp52.478.290.899,00 yang memenuhi kriteria Aset Properti Investasi, namun masih dicatat sebagai Aset Tanah dan Aset Gedung Bangunan, yaitu.

- a. Dua Aset Tanah yang dijadikan lokasi pembangunan Hotel Srikandi, yaitu:

Tabel 1.2 Rincian Tanah Hotel Srikandi

No	Lokasi	Uraian Aset	Nilai (Rp)
1	Jalan Kelurahan Handayani Mulya	Tanah Lapangan Apel/Upacara	1.250.609.195,00
2	Jalan Kelurahan Handayani Mulya	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	141.000.000,00
Jumlah			1.391.609.195,00

- b. 10 Aset Gedung Bangunan yang difungsikan untuk operasional Hotel Srikandi, yaitu:

Tabel 1.3 Rincian Gedung dan Bangunan Hotel Srikandi

No	ID Pemda	Uraian Aset	Nilai
1	05030010013000024	Pembangunan Wisma PKK Tahap 3 TA 2022	24.642.168.704,00
2	05030010013000050	Pembangunan Rumah Genset Wisma PKK TA 2023	986.378.815,00
3	05030010013000059	Pembangunan Gedung Laundry & Kantor Wisma PALI TA 2023	2.971.503.380,00
4	05030010013000063	Pembangunan Pagar Wisma PKK TA 2024	1.780.596.000,00
5	05030010013000064	Landscape Wisma PKK TA 2024	13.298.727.000,00
6	05030010013000077	Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisma PALI	199.656.000,00
7	05020010013000082	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.581.396.000,00
8	05020010013000118	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	3.041.450.000,00
9	05020010013000187	Asrama Permanen	2.983.543.000,00
10	05020010013000201	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	992.872.000,00
Jumlah			52.478.290.899,00

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kabupaten PALI menyatakan bahwa belum mengetahui Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, Konstruksi Dalam Pengerjaan yang difungsikan untuk operasional Hotel Srikandi termasuk dalam kategori Properti Investasi.

Nilai Aset sebesar Rp53.869.900.094,00 (Rp1.391.609.195,00 + Rp52.478.290.899,00) telah dikoreksi dan disajikan sebagai Aset Properti Investasi dalam Neraca Pemkab PALI Tahun 2024.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi pada:

1) Pasal 5 menyatakan bahwa PSAP Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2022;

2) Lampiran Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi dalam paragraf:

a) Definisi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

(1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa/untuk tujuan administratif; atau

(2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Pengakuan

Properti Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

(1) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset Properti Investasi; dan

(2) biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

c) Pengukuran saat Pengakuan Awal

Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

d) Pengukuran setelah Pengakuan Awal:

(1) Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan.

(2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

e) Penyajian Properti Investasi menyatakan bahwa sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti Investasi diklasifikasikan dalam Aset Non Lancar. Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Permasalahan di atas mengakibatkan risiko salah saji atas akun Aset Tetap dan Properti Investasi.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala BPKAD kurang cermat dalam menyusun Kebijakan Akuntansi terkait Properti Investasi; dan

b. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD kurang cermat menyajikan Aset yang memenuhi kriteria Properti Investasi.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar memerintahkan Kepala BPKAD untuk menyusun Kebijakan Akuntansi terkait Properti Investasi yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

B. Belanja

1. Klasifikasi Penganggaran Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah pada Sembilan SKPD Tidak Tepat

Pemerintah Kabupaten PALI menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah pada Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 1.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten PALI TA 2024

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Barang dan Jasa	621.389.040.356,36	565.408.834.081,00	90,99
2.	Belanja Modal	438.072.225.853,00	426.818.764.718,00	97,43
3.	Belanja Hibah	34.642.579.184,00	34.321.188.403,00	99,07

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen penganggaran, register SP2D, laporan pertanggungjawaban, dan kertas kerja Aset Tetap menunjukkan terdapat klasifikasi penganggaran Belanja Modal, serta Belanja Barang dan Jasa yang tidak tepat sebesar Rp108.698.003.213,00, dengan uraian sebagai berikut.

a. Ketidakesesuaian penganggaran subrekening Belanja Modal pada tiga SKPD sebesar Rp5.022.924.012,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban diketahui terdapat Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap dianggarkan pada kode rekening yang tidak sesuai. Hal tersebut terjadi pada Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebesar Rp5.022.924.012,00, dengan rincian pada **Lampiran 1** dan rekapitulasi pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Penganggaran Belanja Modal yang Tidak Tepat

No	Rekening Anggaran dan Realisasi	Rekening Anggaran Seharusnya	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Disdik	199.899.000,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Dinas PUTR	897.024.000,00
		Belanja Modal Tanah	Dinas PUTR	3.531.601.012,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	394.400.000,00
Jumlah				5.022.924.012,00

b. Kegiatan yang tidak menambah nilai Aset Tetap pada empat SKPD sebesar Rp93.510.675.741,00 dianggarkan pada Belanja Modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban diketahui terdapat terdapat kegiatan yang tidak memenuhi klasifikasi untuk diakui sebagai Aset Tetap, tetapi dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Modal, yaitu:

- 1) Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp3.268.766.323,00

Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan yang tidak menambah umur Aset seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa. Rincian pada **Lampiran 2** dan rekapitulasi pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Kegiatan Pemeliharaan yang Tidak Menambah Umur Aset Tetap yang Dianggarkan di Belanja Modal

No	Rekening Anggaran dan Realisasi	Rekening Anggaran Seharusnya	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Barang dan Jasa - Pemeliharaan	Dinas Kesehatan	253.254.800,00
			Dinas PUTR	1.554.790.550,00
			Disdik	1.360.904.473,00
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Belanja Barang dan Jasa - Pemeliharaan	Dinas PUTR	99.816.500,00
Jumlah				3.268.766.323,00

- 2) Kegiatan pengadaan barang untuk hibah kepada instansi lain dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp90.241.909.418,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban menunjukkan terdapat pengeluaran dari Belanja Modal berupa pengadaan barang untuk hibah kepada instansi vertikal, sekolah-sekolah swasta, BUMD, rumah ibadah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa. Belanja ini terjadi pada Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) sebesar Rp90.241.909.418,00. dengan rincian pada **Lampiran 3** dan rekapitulasi pada tabel berikut.

Tabel 1.7 Pengadaan Hibah Barang untuk Pihak Lain Dianggarkan di Belanja Modal

No	Rekening Anggaran dan Realisasi	Rekening Anggaran Seharusnya	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Disdik	7.151.174.058,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Dinas PUTR	17.553.510.600,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Dispora	395.846.800,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Belanja Hibah	Dinas PUTR	49.997.689.090,00
5.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Belanja Hibah	Dinas Perkim	99.846.500,00
6.	Belanja Modal Tanah	Belanja Hibah	Dinas Perkim	3.674.100.000,00
7.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Hibah	Dinas PUTR	8.645.157.550,00
8.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Hibah	Disdik	539.384.820,00
9.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Hibah	Disdik	2.185.200.000,00
Jumlah				90.241.909.418,00

- c. Kegiatan yang menambah nilai Aset Tetap pada tujuh SKPD sebesar Rp10.164.403.460,00 dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban diketahui bahwa terdapat pengeluaran yang menghasilkan Aset Tetap seperti belanja jasa konsultansi konstruksi, dan belanja pengadaan Aset Pemerintah Kabupaten PALI tetapi dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa pada tujuh SKPD sebesar Rp10.164.403.460,00, dengan rincian pada **Lampiran 4** dan rekapitulasi pada tabel berikut.

Tabel 1.8 Kegiatan yang Menghasilkan Aset Tetap Dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa

No	Rekening Anggaran dan Realisasi	Rekening Seharusnya	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1.	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Dinas Perkim	1.507.435.800,00
		Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Dinas Perkim	199.584.000,00
2.	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Dinkes	436.560.000,00
			Dinas PUTR	3.235.125.300,00
			Disdik	1.855.527.060,00
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	276.223.500,00
			Dinas Perkim	99.140.300,00
3.	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	BPBD	997.256.000,00
			Dinas PUTR	1.389.020.500,00
			Dinas Perkim	99.017.000,00
4.	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah	Dinas Perkim	49.548.000,00
5.	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Bapenda	19.966.000,00
Jumlah				10.164.403.460,00

Hasil dari kegiatan tersebut memenuhi klasifikasi untuk dikapitalisasi dengan Aset Tetap atau menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan, sehingga lebih tepat untuk dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD diketahui bahwa kesalahan penganggaran dikarenakan masih kurangnya pemahaman SDM *inputer* pada SKPD. Selain itu, Bidang Anggaran baru melakukan verifikasi penginputan anggaran pada saat penyusunan APBD-P Kabupaten PALI.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang antara lain menetapkan Paragraf 37, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran C Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait;
 - 2) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya; dan
 - 4) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab V Klasifikasi Menurut Jenis Belanja Bagian C Contoh Jenis Belanja, Penganggaran, dan Pelaporannya, pada:
- 1) Poin 1.b Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan;
 - 2) Poin 2.a. Kriteria Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:
 - a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
 - b) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Permasalahan di atas mengakibatkan realisasi LRA Pemerintah Kabupaten PALI tidak menggambarkan keadaan sebenarnya sebesar Rp108.698.003.213,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kurang cermat dalam mengevaluasi usulan anggaran kegiatan SKPD dan memverifikasi rancangan DPA/DPPA SKPD; dan
- b. Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala BPBD, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Kepala Satpol PP kurang mematuhi ketentuan klasifikasi jenis belanja sesuai SAP dalam menyusun RKA SKPD.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati PALI agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mengevaluasi usulan anggaran kegiatan SKPD dan memverifikasi rancangan DPA/DPPA SKPD; dan

- b. Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala BPBD, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Satpol PP selaku Pengguna Anggaran untuk mematuhi ketentuan klasifikasi jenis belanja sesuai SAP dalam menyusun RKA SKPD.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

2. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten PALI menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp363.308.689.959,64 dan Rp332.257.716.798,00 atau sebesar 91,45%. Di dalamnya terdapat anggaran dan realisasi Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebesar Rp543.725.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati PALI Nomor 078/KPTS/SETDA/2024 tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024 diketahui pembagian besaran Belanja Dana Penunjang Operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan masing-masing sebesar Rp380.607.500,00 dan Rp163.117.500,00.

Hasil pemeriksaan menunjukkan besaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) KDH/WKDH Tahun 2024 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Bupati PALI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati PALI. Pada kedua peraturan tersebut dinyatakan bahwa besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Kabupaten PALI tahun 2023 sebesar Rp70.614.288.221,04 masuk dalam klasifikasi di atas Rp50 miliar s.d. Rp150 miliar, sehingga BPO yang dapat diberikan paling rendah sebesar Rp400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%. Perhitungan ulang atas batasan besaran BPO Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.9 Perhitungan Ulang BPO KDH/WKDH Tahun 2024

Realisasi PAD Tahun Sebelumnya (TA-1)	Pembayaran BPO Tahun 2024	Nilai Batas BPO paling rendah	Batas BPO Paling Tinggi	
			Persentase	Nilai
a	b	c	d	e = d x a
70.614.288.221,04	543.725.000,00	400.000.000,00	0,40%	282.457.152,88

Berdasarkan perhitungan nilai BPO, maka BPO yang diberikan seharusnya berada dalam rentang Rp282.457.152,88 s.d. Rp400.000.000,00. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran Belanja BPO KDH/WKDH sebesar Rp143.725.000,00 (Rp543.725.000,00 - Rp400.000.000,00).

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPO mengakui bahwa pembayaran BPO Bupati dan Wakil Bupati tidak mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 meskipun PPTK mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut. PPTK hanya melaksanakan pembayaran Belanja BPO sesuai pagu anggaran.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku KPA mengakui bahwa penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 hanya mengikuti besaran

yang ditentukan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah sebelumnya. Selain itu, tidak pernah ada revidi atau koreksi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas usulan anggaran BPO KDH/WKDH yang diajukan Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah: di atas Rp50 miliar s.d. Rp150 miliar paling rendah Rp400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
- b. Peraturan Bupati PALI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati PALI pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah: di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40%.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp143.725.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Sekretaris Daerah kurang mengawasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sesuai ketentuan;
- b. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku KPA tidak memedomani ketentuan penganggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH; dan
- c. PPTK tidak memedomani ketentuan pembayaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati PALI agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk:

- a. Mengawasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sesuai ketentuan;
- b. Menginstruksikan KPA Belanja Dana Operasional KDH/WKDH supaya mematuhi ketentuan dalam mengusulkan perhitungan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- c. Menginstruksikan KPA agar menugaskan PPTK Belanja Dana Operasional KDH/WKDH supaya mematuhi ketentuan dalam pembayaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH; dan
- d. Memproses kelebihan pembayaran Belanja Dana Operasional KDH dan WKDH Tahun Anggaran 2024 dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp143.725.000,00.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

3. Pembayaran Tunjangan Perumahan Melebihi Ketentuan

Pemerintah Kabupaten PALI menganggarkan Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp363.308.689.959,64 dan Rp332.257.716.798,00 atau sebesar 91,45%. Dari realisasi tersebut digunakan untuk membayar Tunjangan Perumahan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp3.102.000.000,00.

LHP LKPD Kabupaten PALI Tahun 2024 Nomor 46.A/LHP/XVIII.PLG/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah mengungkap temuan tentang Pembayaran Tunjangan Perumahan Tahun 2023 melebihi ketentuan sebesar Rp714.231.540,00. Temuan tersebut menyoroti perhitungan Tunjangan Perumahan yang tidak memiliki dasar perhitungan serta nilai Tunjangan Perumahan yang melebihi hasil perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara. Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekretaris DPRD untuk lebih cermat dalam menghitung dan mengusulkan besaran Tunjangan Perumahan kepada TAPD, serta memproses kelebihan pembayaran tunjangan dan menyetorkannya ke kas daerah. Hasil pemantauan tindak lanjut per Semester II 2024 menunjukkan rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti.

Selanjutnya, realisasi pembayaran Tunjangan Perumahan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati PALI Nomor 28 Tahun 2024, dengan nilai sebesar Rp11.000.000,00 per bulan. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa perhitungan nilai Tunjangan Perumahan tersebut tidak memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. PPTK Tunjangan Perumahan Sekretariat DPRD menerangkan bahwa nilai Tunjangan Perumahan ditentukan dengan menyamakan besaran nilai tunjangan perumahan pada Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp11.000.000,00. Penentuan nilai ini tanpa didukung dengan hasil survei harga sewa rumah di Kabupaten PALI atau kajian atas besaran nilai tersebut.

Hasil perhitungan ulang dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara menunjukkan besaran nilai standar harga sewa rumah negara sebesar Rp9.548.550,00, dengan formulasi sebagai berikut.

$$Sb = 2,75\% \times (Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb$$

$$Sb = 2,75\% \times (150 \text{ m}^2 \times \text{Rp}6.430.000,00 \times 60\%) \times 60\%$$

$$Sb = \text{Rp}9.548.550,00.$$

dimana:

- Luas bangunan (Lb) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang mengatur rumah jabatan untuk pejabat kabupaten/kota setara dengan Eselon II dengan ukuran maksimal luas bangunan sebesar 150 m²;
- Harga sewa (Hs) bangunan berpedoman dengan Keputusan Bupati Nomor 1391/KPTS/DPUTR/2022 tentang Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara, dan Pagar Tahun 2022 yang mengatur harga satuan pembangunan Rumah Negara per m² untuk rumah tipe B adalah sebesar Rp6.430.000,00

(Lampiran Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 mengatur bahwa luas bangunan di bawah 185 m² adalah rumah negara tipe B);

- c. Nilai sisa (Ns) digunakan sebesar 60% (Lampiran Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 mengatur bahwa nilai sisa bangunan layak huni adalah sebesar 60%); dan
- d. Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (Fkb), berpedoman dengan Lampiran Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 mengatur bahwa bumi A24 memiliki Fkb sebesar 60%. (Penggolongan Kelas Tanah untuk Pasar Baru Pendopo – Kecamatan Talang Ubi adalah Rp262.000,00 s.d. Rp308.000,00 setara dengan Kelas Bumi A24).

Dengan menggunakan hasil perhitungan rumah sewa negara untuk Kabupaten PALI sebesar Rp9.548.550,00 tersebut, maka diperoleh nilai Tunjangan Perumahan seharusnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.692.691.100,00. Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Perumahan Tahun 2024 sebesar Rp409.308.900,00 (Rp3.102.000.000,00 – Rp2.692.691.100,00).

Dalam rangka menilai Tunjangan Perumahan, pada bulan Oktober Tahun 2024 Sekretariat DPRD melakukan perikatan kerja sama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sugianto Prasodjo dan Rekan. Kerja sama tersebut antara lain untuk mengkaji besaran harga sewa rumah dinas pada Sekretariat DPRD. Hasil kajian KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan nomor 00217/2.0131-09/PI-KAJI/11/0532/1/XIII/2024 yang terbit tanggal 17 Desember 2024 menunjukkan harga sewa rumah dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten PALI per bulan sebesar Rp6.800.000,00. Hasil kajian ini belum diterapkan pada pembayaran Tunjangan Perumahan Tahun 2025. Sampai dengan akhir pemeriksaan di Bulan Mei 2025, Tunjangan Perumahan tetap dibayarkan sebesar Rp11.000.000,00 per bulan. Merujuk pada hasil kajian ini, jika Pemerintah Kabupaten PALI tidak segera merevisi nilai Tunjangan Perumahan tersebut mengikuti hasil kajian ini, maka nilai kelebihan pembayaran pada tahun 2025 akan semakin tinggi.

Selama proses penyusunan LHP, Pemkab PALI telah menyetor kelebihan pembayaran Tunjangan Perumahan ke Kas Daerah sebesar Rp1.451.450,00 pada tanggal 20 Mei 2025, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp407.857.450,00. Rincian kelebihan pembayaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.10 Kelebihan Bayar Tunjangan Perumahan

(dalam rupiah)

No	Bulan	Realisasi Pembayaran Tunjangan Perumahan	Tunjangan Seharusnya	Kelebihan Pembayaran	Nilai Dikembalikan ke Kas Daerah	Kelebihan Pembayaran Belum Dikembalikan
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5-6
1	Januari	242.000.000,00	210.068.100,00	31.931.900,00	0,00	31.931.900,00
2	Februari	242.000.000,00	210.068.100,00	31.931.900,00	0,00	31.931.900,00
3	Maret	242.000.000,00	210.068.100,00	31.931.900,00	0,00	31.931.900,00
4	April	242.000.000,00	210.068.100,00	31.931.900,00	0,00	31.931.900,00
5	Mei	242.000.000,00	210.068.100,00	31.931.900,00	0,00	31.931.900,00
6	Juni	242.000.000,00	210.068.100,00	31.931.900,00	0,00	31.931.900,00
7	Juli	242.000.000,00	210.068.100,00	31.931.900,00	0,00	31.931.900,00
8	Agustus	242.000.000,00	210.068.100,00	31.931.900,00	0,00	31.931.900,00
9	September	242.000.000,00	210.068.100,00	31.931.900,00	0,00	31.931.900,00
10	Oktober	330.000.000,00	286.456.500,00	43.543.500,00	1.451.450,00	42.092.050,00
11	November	297.000.000,00	257.810.850,00	39.189.150,00	0,00	39.189.150,00

No	Bulan	Realisasi Pembayaran Tunjangan Perumahan	Tunjangan Seharusnya	Kelebihan Pembayaran	Nilai Dikembalikan ke Kas Daerah	Kelebihan Pembayaran Belum Dikembalikan
12	Desember	297.000.000,00	257.810.850,00	39.189.150,00	0,00	39.189.150,00
	Jumlah	3.102.000.000,00	2.692.691.100,00	409.308.900,00	1.451.450,00	407.857.450,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pada Pasal 17:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Ayat (3) menyatakan bahwa besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon;

- b. Lampiran Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara bahwa Rumus Perhitungan Sewa Rumah Negara yaitu $2,75\% \times Lb \times Hs \times Ns \times Fkb \times Fk$

Lb : Luas bangunan dalam m²

Hs : Harga satuan bangunan per m²

Ns : Nilai sisa bangunan

Fkb : Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi

Fk : Faktor keringanan sewa untuk PNS

- c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah pada Romawi III, Huruf B, angka 1 Rumah Instansi/Rumah Dinas Untuk Pejabat Eselon II/Anggota DPRD dengan ukuran maksimal:

1) Luas bangunan 150 m²;

2) Luas tanah 350 m².

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran Tunjangan Perumahan sebesar Rp407.857.450,00.

Hal tersebut disebabkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran tidak cermat dalam menghitung dan mengusulkan besaran Tunjangan Perumahan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar:

- a. Melakukan penyesuaian Peraturan Bupati mengenai besaran nilai tunjangan perumahan sesuai standar harga setempat yang berlaku; dan
- b. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran Tunjangan Perumahan sebesar Rp407.857.450,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

4. Pembayaran Belanja Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten PALI menganggarkan Belanja Honorarium sebesar Rp4.432.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.985.090.000,00 atau 89,90% dari anggaran. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban honorarium menunjukkan ketidaktepatan realisasi pembayaran dengan uraian sebagai berikut.

a. Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan tidak menggunakan standar yang tepat sebesar Rp422.178.000,00

Hal tersebut diketahui pengujian dokumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Honorarium Pengguna Anggaran (PA)

Terdapat realisasi pembayaran honorarium PA yang dibayarkan dengan tarif honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan satuan orang/bulan (OB). Seharusnya Honorarium PA dapat diberikan dengan menggunakan satuan orang/paket (OP) dalam hal PA menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang dan jasa dengan nilai pagu paling rendah di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada paket pengadaan yang ditetapkan PA dengan nilai pagu tersebut sehingga terdapat kelebihan pembayaran pada lima SKPD sebesar Rp205.955.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.11 Kelebihan Pembayaran Honorarium PA

No	SKPD	Honor yang dibayarkan (Rp)	Honorarium seharusnya	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	Dinas Perkim	33.641.000,00	0,00	33.641.000,00
2	Dinas PUTR	40.545.000,00	0,00	40.545.000,00
3	Dinas Pendidikan	43.947.000,00	0,00	43.947.000,00
4	Sekretariat DPRD	39.168.000,00	0,00	39.168.000,00
5	BPKAD	48.654.000,00	0,00	48.654.000,00
Total				205.955.000,00

2) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Terdapat realisasi pembayaran honorarium PPK pada Dinas Pendidikan yang dibayarkan dengan tarif honor KPA dan sebanyak jumlah kegiatan pada DPA dengan menggunakan satuan orang/bulan. Seharusnya PPK tidak dapat dibayarkan honorarium karena tidak diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp18.513.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.12 Kelebihan Pembayaran Honorarium PPK

No	SKPD	Honor yang dibayarkan (Rp)	Honorarium seharusnya (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	Dinas Pendidikan	18.513.000,00	0,00	18.513.000,00
Total				18.513.000,00

3) Honorarium KPA, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan PPTK

Terdapat realisasi honorarium untuk KPA, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan PPTK yang dibayarkan sebanyak jumlah kegiatan pada DPA dengan menggunakan satuan Orang/Bulan. Seharusnya Honorarium KPA, Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPTK dibayar sesuai total pagu seluruh kegiatan yang dikelola pada DPA, tidak untuk masing-masing kegiatan. Kelebihan pembayaran terdapat pada tiga SKPD sebesar Rp197.710.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.13 Kelebihan Pembayaran Honorarium KPA, Bendahara Pengeluaran, dan PPTK

No	SKPD	Honor yang dibayarkan (Rp)	Honorarium seharusnya (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	Dinas Perkim	303.038.000,00	166.318.000,00	136.720.000,00
2	Dinas PUTR	165.357.000,00	122.664.000,00	42.693.000,00
3	Dinas Pendidikan	62.681.000,00	44.384.000,00	18.297.000,00
Total				197.710.000,00

b. Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan melebihi ketentuan sebesar Rp39.780.000,00

Hal tersebut diketahui berdasarkan pemeriksaan atas pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan pada lima SKPD yaitu Sekretariat Daerah, BPKAD, Badan Kesbangpol, Dinas PUTR, dan Dinas Ketahanan Pangan yang menunjukkan terdapat enam pegawai pada lima SKPD yang menerima honorarium melebihi batas maksimal untuk Pejabat Eselon II sebesar Rp39.780.000,00.

PPTK Honorarium dari masing-masing SKPD menyatakan bahwa PPTK tidak mengetahui penentuan besaran yang digunakan dalam pembayaran honorarium pengelola keuangan tidak tepat dan PPTK juga tidak mengetahui jumlah maksimal SK yang dapat dibayarkan untuk honorarium tim pelaksana kegiatan.

Selama proses penyusunan LHP, Pemkab PALI telah menyetor kelebihan pembayaran atas:

- Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebesar Rp194.831.000,00, yang terdiri atas Dinas Perkim sebesar Rp121.249.000,00, BPKAD sebesar Rp48.654.000,00 dan Dinas PUTR sebesar Rp24.928.000,00, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp227.347.000,00. Rincian masing-masing penerima honorarium pada SKPD terkait dapat dilihat pada **Lampiran 5**.
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (lunas) sebesar Rp39.780.000,00, yang terdiri atas Sekretariat Daerah sebesar Rp2.550.000,00, BPKAD sebesar

Rp21.377.500,00, Badan Kesbangpol sebesar Rp6.927.500,00, Dinas PUTR sebesar Rp4.462.500,00, dan Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp4.462.500,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan, pada:
 - 1) Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Regional berfungsi sebagai:
 - a) batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b) estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
 - 2) Lampiran 1 angka 1 tentang Satuan Biaya Honorarium yang menyatakan bahwa honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - 3) Lampiran 1 angka 1.2.3. tentang Honorarium Pengguna Anggaran yang menyatakan Honorarium Pengguna anggaran diberikan dalam hal:
 - a) Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b) Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Lampiran 1 angka 1.5. tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat Eselon I, pejabat Eselon II, pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- b. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga

Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024 pada:

- 1) Lampiran 1 angka 1 tentang Satuan Biaya Honorarium yang menyebutkan bahwa honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diberikan kepada:
 - a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - c) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - d) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - e) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 2) Lampiran 1 angka 1 tentang Satuan Biaya Honorarium yang menyatakan bahwa honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 3) Lampiran 1 angka 1.2.3. tentang Honorarium Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa honorarium Pengguna anggaran diberikan dalam hal:
 - a) Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b) Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebesar Rp227.347.000,00 dengan rincian:

- a. Sekretariat DPRD sebesar Rp39.168.000,00;
- b. Dinas PUTR sebesar Rp58.310.000,00;
- c. Dinas Perkim sebesar Rp49.112.000,00;
- d. Dinas Pendidikan sebesar Rp80.757.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala BPKAD, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran kurang mengawasi pelaksanaan belanja honorarium pada satuan kerjanya;
- b. PPTK SKPD terkait kurang memedomani ketentuan Standar Harga Satuan dalam melakukan perhitungan pembayaran honorarium; dan
- c. Bendahara Pengeluaran SKPD terkait tidak mematuhi ketentuan Standar Harga Satuan dalam melakukan pembayaran honorarium.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar memerintahkan Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Kepala BPKAD, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan belanja honorarium pada satuan kerjanya;
- b. Menginstruksikan PPTK SKPD lebih cermat memedomani ketentuan Standar Harga Satuan dalam melakukan pembayaran honorarium;
- c. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran supaya mematuhi ketentuan Standar Harga Satuan dalam melakukan pembayaran honorarium; dan
- d. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp227.347.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp39.168.000,00;
 - 2) Dinas PUTR sebesar Rp58.310.000,00;
 - 3) Dinas Perkim sebesar Rp49.112.000,00; dan
 - 4) Dinas Pendidikan sebesar Rp80.757.000,00.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

5. Realisasi Belanja Jasa Kantor pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten PALI pada Tahun 2024 menganggarkan Belanja Jasa Kantor sebesar Rp111.846.726.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp97.978.512.188,00 atau 87,60% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban bukti pembayaran, hasil konfirmasi dan klarifikasi dengan PPTK SKPD terkait diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp71.733.628,00 untuk pembayaran Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dengan uraian sebagai berikut.

a. Bukti pertanggungjawaban Belanja Tagihan Listrik tidak sesuai kondisi sebenarnya

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Tagihan Listrik Tahun 2024, hasil konfirmasi kepada PLN ULP Pendopo, dan permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian menunjukkan bahwa terdapat bukti pertanggungjawaban pembelian token listrik Prabayar yang tidak sesuai kondisi sebenarnya yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp13.045.500,00 (Rp1.003.500,00 x 13 bukti pembelian).

Atas hal tersebut, Bendahara Pengeluaran mengakui bahwa tidak ada transaksi atas pembelian token listrik tersebut dan bukti pembayaran yang dipertanggungjawabkan dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya.

b. Kelebihan pembayaran atas kekurangan advertorial pada Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp58.688.128,00

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban berupa kontrak, bukti pembayaran dan lampiran advertorial menunjukkan terdapat kekurangan volume advertorial yang

disajikan oleh penyedia pada Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp58.688.128,00 pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistika dan Persandian serta Sekretariat DPRD dengan rincian berikut.

Tabel 1.14 Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Advertorial

No	Media	No. Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Kekurangan Advertorial	Kelebihan Bayar (Rp)
A Dinas Komunikasi Informasi Statistika dan Persandian					
1	PT DGI	900/173/SP-DISKOMINFOST APER/2024	180.000.000,00	1	441.441,00
2	PT IWM	900/252/SP-DISKOMINFOST APER/2024	12.000.000,00	1	2.648.649,00
3	PT RCM	900/165/SP-DISKOMINFOST APER/2024	39.960.000,00	1	8.820.000,00
4	PT MNB	900/239/SP-DISKOMINFOST APER/2024	130.000.000,00	4	35.315.315,00
5	PT NPC	900/261/SP-DISKOMINFOST APER/2024	50.000.000,00	1	8.828.829,00
Jumlah (A)					56.054.234,00
B Sekretariat DPRD					
1	PT AGM	-	2.990.000,00	1	2.633.894,00
Jumlah (B)					2.633.894,00
Total (A+B)					58.688.128,00

Perhitungan kelebihan pembayaran atas Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistika, dan Persandian serta Sekretariat DPRD telah dibahas dan disepakati bersama dengan PPK, PPTK, dan pihak penyedia serta dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Perhitungan Hasil Pemeriksaan.

Selama proses penyusunan LHP, Dinas Pertanian telah menyetor lunas atas kelebihan pembayaran Belanja Tagihan Listrik ke Kas Daerah sebesar Rp13.045.500,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Peraturan Bupati PALI Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintahan Daerah melalui Media Massa pada:
 - Pasal 16 ayat (5) menyatakan bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan; dan
 - Pasal 16 ayat (6) menyatakan bahwa pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Kantor sebesar Rp58.688.128,00 dengan rincian:

- Sekretariat DPRD sebesar Rp2.633.894,00; dan

- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian sebesar Rp56.054.234,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian kurang mengawasi pelaksanaan Belanja Jasa Kantor pada satuan kerjanya;
- b. PPK SKPD terkait kurang cermat dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban pembayaran atas Belanja Jasa Kantor;
- c. PPTK terkait kurang cermat dalam mengajukan dokumen pertanggungjawaban atas Belanja Jasa Kantor; dan
- d. Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian tidak memedomani keabsahan bukti yang menjadi dasar pembayaran atas Belanja Jasa Kantor sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati PALI agar memerintahkan Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan Belanja Jasa Kantor pada satuan kerjanya;
- b. Menginstruksikan PPK SKPD terkait lebih cermat dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban pembayaran atas Belanja Jasa Kantor;
- c. Menginstruksikan PPTK terkait lebih cermat dalam mengajukan dokumen pertanggungjawaban atas Belanja Jasa Kantor;
- d. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian memedomani keabsahan bukti yang menjadi dasar pembayaran atas Belanja Jasa Kantor sesuai ketentuan; dan
- e. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp58.688.128,00 dan menyetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp2.633.894,00; dan
 - 2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian sebesar Rp56.054.234,00.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

6. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada 13 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten PALI menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp104.979.297.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp89.140.403.376,00 atau 84,91% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dan hasil konfirmasi kepada instansi tujuan/penyelenggara acara dan penyedia akomodasi yang tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, serta keterangan dari

pelaksana perjalanan dinas menunjukkan bahwa terdapat Belanja Perjalanan Dinas pada 13 SKPD yang tidak sesuai ketentuan dan kondisi sebenarnya sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas sebesar Rp924.972.369,00, dengan uraian sebagai berikut.

a. Bukti pertanggungjawaban penyeberangan kapal tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp39.383.600,00

Hal tersebut diketahui berdasarkan pemeriksaan silang *database* penyeberangan kapal PT ASDP Indonesia dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, diketahui bahwa terdapat 16 pelaksana perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD yang menggunakan fasilitas penyeberangan PT ASDP. Akan tetapi *booking code*, nomor tiket, plat kendaraan pelaksana perjalanan dinas tersebut tidak tercatat pada *database* tersebut sehingga terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp39.383.600,00.

Pelaksana perjalanan dinas dalam keterangannya mengakui atas kelebihan tagihan biaya perjalanan dinas tersebut dan bersedia mengembalikannya ke Kas Daerah.

b. Pelaksanaan perjalanan dinas tidak sesuai jumlah hari pada surat tugas sebesar Rp41.870.000,00

Hal tersebut diketahui berdasarkan pemeriksaan atas *database* penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry diketahui bahwa terdapat 12 pelaksana perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD melakukan perjalanan dinas sesuai dengan hari yang tertera pada Surat Tugas. Diantaranya berangkat satu hari setelah hari surat tugas dan pulang sebelum hari surat tugas berakhir. Atas kondisi tersebut, telah dilakukan perhitungan ulang atas biaya perjalanan dinas sesuai dengan jangka waktu kondisi yang sebenarnya yang menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp41.870.000,00.

Pelaksana perjalanan dinas dalam keterangannya mengakui atas kelebihan tagihan biaya perjalanan dinas tersebut dan bersedia mengembalikannya ke Kas Daerah.

c. Bukti penginapan tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp223.800.364,00

Hal tersebut diketahui berdasarkan konfirmasi ke hotel/penginapan yang digunakan pelaksana perjalanan dinas diketahui bahwa terdapat 13 pelaksana perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD yang melampirkan bukti penginapan tidak sesuai dengan biaya yang seharusnya pada dokumen pertanggungjawaban. Biaya yang ditagihkan pada dokumen pertanggungjawaban tidak sesuai dengan harga dan jumlah hari menginap sehingga terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp223.800.364,00.

Pelaksana perjalanan dinas dalam keterangannya mengakui atas kelebihan tagihan biaya perjalanan dinas tersebut dan bersedia mengembalikannya ke Kas Daerah.

d. Realisasi komponen uang representasi pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp566.200.000,00

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD menunjukkan uang representasi dibayarkan sebesar Rp250.000,00 per hari. Seharusnya uang representasi perjalanan dinas tersebut dibayarkan sebesar Rp150.000,00 per hari.

Dalam keterangannya, PPTK Perjalanan Dinas mengakui terdapat kekeliruan dalam membayar uang representasi. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran biaya representasi sebesar Rp566.200.000,00.

e. Realisasi uang harian *fullboard* tidak sesuai ketentuan sebesar Rp9.060.000,00

Hal tersebut diketahui berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas *fullboard* pada empat SKPD menunjukkan bahwa pembayaran uang harian *fullboard* tidak sesuai Peraturan Bupati PALI Nomor 1 Tahun 2024.

Uang harian yang dibayarkan adalah sebesar Rp380.000,00, sedangkan seharusnya sebesar Rp120.000,00. Atas kondisi tersebut, telah dilakukan perhitungan ulang uang harian yang seharusnya dibayarkan yang menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp9.060.000,00. Rincian nilai per SKPD pada tabel berikut.

Tabel 1.15 Uang Harian *Fullboard* Tidak Sesuai Ketentuan

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	740.000,00
2	Sekretariat Daerah	3.080.000,00
3	Badan Pendapatan Daerah	620.000,00
4	BKPSDM	4.620.000,00
	Jumlah	9.060.000,00

Pelaksana perjalanan dinas pada empat SKPD tersebut dalam keterangannya mengakui atas kelebihan tagihan biaya perjalanan dinas tersebut dan bersedia mengembalikannya ke Kas Daerah.

f. Realisasi pemberian biaya penginapan secara lumsum tidak sesuai ketentuan sebesar Rp44.658.405,00

Hal tersebut diketahui berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada 13 SKPD yang menunjukkan bahwa terdapat tagihan biaya penginapan lumsum sebesar 30%, padahal perjalanan dinas yang dilaksanakan merupakan paket *fullboard meeting*. Pada paket *fullboard meeting* tersebut, penginapan peserta perjalanan dinas telah disediakan dan ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, sehingga terdapat pembayaran biaya penginapan secara lumsum yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar Rp44.658.405,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.16 Biaya Penginapan secara Lumsum Tidak Sesuai Ketentuan

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	1.957.700,00
2	Sekretariat Daerah	23.473.200,00
3	Badan Pendapatan Daerah	1.867.500,00
4	Bappeda	1.344.679,00
5	BKPSDM	6.063.300,00
6	Dinas Perindag	1.459.200,00
7	Dinas Dukcapil	3.271.026,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	471.300,00
9	Balitbangda	258.300,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	924.900,00
11	Dinas Perhubungan	1.200.900,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	924.900,00
13	DPMPTSP	1.441.500,00
	Jumlah	44.658.405,00

Pelaksana perjalanan dinas pada 13 SKPD tersebut dalam keterangannya mengakui atas kelebihan tagihan biaya perjalanan dinas tersebut dan bersedia mengembalikannya ke Kas Daerah.

Selama proses penyusunan LHP, Pemkab PALI telah menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp83.150.529,00 dengan rincian berikut:

- Sekretariat DPRD sebesar Rp37.312.424,00 dengan sisa yang belum disetor Rp836.639.240,00;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp22.766.800,00 dengan sisa yang belum disetor Rp3.786.400,00;
- Bapenda sebesar Rp2.487.500,00 (lunas);
- Bappeda sebesar Rp1.344.679,00 (lunas);
- BKPSDM sebesar Rp10.683.300,00 (lunas);
- Dinas Perindag sebesar Rp1.459.200,00 (lunas);
- Disdukcapil sebesar Rp3.271.026,00 (lunas);
- Balitbangda sebesar Rp258.300,00 (lunas);
- Dinas Perhubungan sebesar Rp1.200.900,00 (lunas);
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp924.900,00 (lunas); dan
- DPMPTSP sebesar Rp1.441.500,00 (lunas).

Sisa belum disetor sebesar Rp841.821.840,00 dengan rincian kelebihan pembayaran untuk masing-masing pelaksana perjalanan dinas dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - Pasal 121 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Lampiran I Standar Harga Satuan Regional yang Berfungsi sebagai Batas Tertinggi

dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Angka 2 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada: Bagian 3.2. paragraf pertama yang menyatakan bahwa satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7. uraian nomor 4, 8, 11, 13,14, 16, dan 17;

- c. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Lampiran IX Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir poin B. Uang Representasi Perjalanan Dinas.

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	Tingkat Perjalanan Dinas
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000,00	125.000,00	A1
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000,00	100.000,00	A2
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000,00	75.000,00	A2

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada 13 SKPD sebesar Rp841.821.840,00, yang terdiri atas:

- Sekretariat DPRD sebesar Rp836.639.240,00;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp3.786.400,00;
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp471.300,00; dan
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp924.900,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- 13 Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan perjalanan dinas pada satuan kerjanya;
- PPK SKPD terkait tidak cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas; dan
- PPTK Perjalanan Dinas terkait tidak cermat dalam mengajukan dokumen pertanggungjawaban atas Belanja Perjalanan Dinas.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar memerintahkan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Kepala DPMPTSP selaku Pengguna Anggaran untuk:

- Melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan perjalanan dinas pada satuan kerjanya;
- Menginstruksikan PPK SKPD terkait lebih cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas;

- c. Menginstruksikan PPTK Perjalanan Dinas terkait lebih cermat dalam mengajukan dokumen pertanggungjawaban atas Belanja Perjalanan Dinas; dan
- d. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp841.821.840,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp836.639.240,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp3.786.400,00;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp471.300,00; dan
 - 4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp924.900,00.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten PALI menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp999.476.669,00 atau 99,95% dari anggaran. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tersebut dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melalui kegiatan Perjalanan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Keputusan Bupati Penulak Abab Lematang Ilir Nomor 441/KPTS/KESBANGPOL/2024 tentang Peserta Perjalanan Wawasan Kebangsaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten PALI Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama delapan hari dari tanggal 28 Oktober s.d. 4 November 2024 yang diikuti sebanyak 80 orang dengan rincian berikut.

Tabel 1.17 Peserta Perjalanan Wawasan Kebangsaan

No	Rincian Peserta	Jumlah Peserta
1	Pegawai Kesbangpol	18
2	Pendamping Rombongan terdiri dari: Staf Ahli Bupati, Sekdin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabid Pariwisata dan Promosi Disbudpar, Kadis Perhubungan	4
3	Wartawan	4
4	Purna Paskibraka Indonesia/Pamong	2
5	Tim Medis	2
6	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	2
7	Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1
8	Pemuda/Pemudi Berprestasi	12
9	Paskibraka Kabupaten PALI Tahun 2023	1
10	Paskibraka Kabupaten PALI Tahun 2024	34
Total		80

Berdasarkan telaah dokumen pertanggungjawaban pada Badan Kesbangpol diketahui hal-hal berikut.

a. Sisa uang atas belanja perjalanan dinas ke luar negeri yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp228.991.000,00

Hasil permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Kepala Badan Kesbangpol terkait pencairan SP2D dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri diperoleh informasi sebagai berikut.

- 1) Rincian biaya pada dokumen pertanggungjawaban merupakan estimasi awal pengeluaran perjalanan dinas luar negeri berdasarkan standar biaya dan menyesuaikan anggaran Kabupaten PALI dengan besaran pengeluaran sebesar Rp12.500.000,00 per peserta.
- 2) Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol bekerjasama dengan PT AMH, yaitu *travel agent* yang berlokasi di Batam. *Itinerary* selama perjalanan dinas luar negeri ditentukan oleh pihak Badan Kesbangpol dan tidak ada kesepakatan/kontrak secara tertulis antara Badan Kesbangpol dan PT AMH.
- 3) Realisasi pencairan belanja perjalanan dinas luar negeri dilakukan melalui mekanisme TU oleh Bendahara Pengeluaran dengan SP2D Nomor 16.12/04.0/000076/TU/8.01.1.05.0.00.05.0000/PR/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebesar Rp999.476.669,00. Agar uang TU keluar dari rekening Bendahara Pengeluaran dan untuk keperluan SPJ, Bendahara Pengeluaran kemudian mentransfer uang TU dari rekening Bendahara Pengeluaran kepada penerima sebagai berikut.

Tabel 1.18 Rincian Biaya yang Ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Tanggal Transfer	Biaya (Rp)	Jumlah Orang	Total (Rp)
1	Uang Harian Paskibraka Tingkat Kabupaten PALI	23/10/2023	6.862.500,00	31	212.737.500,00
2	Uang Harian Paskibraka Tingkat Kabupaten PALI	23/10/2023	6.859.500,00	3	20.578.500,00
3	Transfer ke Rekening PPTK	24/10/2025	192.150.000,00	1	192.150.000,00
4	Uang Harian Pegawai Kesbangpol	23/10/2023	6.862.500,00	18	123.525.000,00
5	PT AMH	21/10/2023	450.997.100,00	1	450.997.100,00
Total Transfer Bendahara Pengeluaran					999.988.100,00
Nominal TU					999.476.669,00
Selisih Nominal TU dan Transfer					(511.431,00)

Atas selisih tersebut, Bendahara Pengeluaran tidak dapat menjelaskan penyebab selisih antara pencairan TU dan total transfer uang rekening pengeluaran.

- 4) Kepala Badan Kesbangpol melalui Bendahara Pengeluaran meminta kembali uang harian Paskibraka, uang harian pegawai Badan Kesbangpol, dan uang yang ditransfer ke PPTK sebesar Rp548.991.000,00 (Rp212.737.500,00 + Rp20.578.500,00 + Rp192.150.000,00 + Rp123.525.000,00). Uang tersebut dikembalikan secara tunai oleh Paskibraka, pegawai Badan Kesbangpol, dan PPTK kepada Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya, uang diserahkan Bendahara Pengeluaran kepada Kepala Badan Kesbangpol secara tunai.

Hasil konfirmasi kepada perusahaan *travel agent* PT AMH diperoleh informasi sebagai berikut.

- 1) PT AMH dihubungi oleh Kepala Badan Kesbangpol untuk dapat mengkoordinir kegiatan perjalanan wawasan kebangsaan sebagai *travel agent* yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober s.d. 4 November 2024;
- 2) PT AMH menerima uang transfer dari Badan Kesbangpol sebesar Rp770.997.100,00 untuk biaya perjalanan dinas luar negeri dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.19 Rincian Uang yang Diterima oleh PT AMH

Uraian	Tanggal Transaksi	Nilai yang Diterima (Rp)
Transfer dari Sdr. NAs (Staf Kesbangpol)	16 Oktober 2024	50.000.000,00
Transfer dari Bendahara Pengeluaran	21 Oktober 2024	450.997.100,00
Setor bank dari Sdr. NAs (Staf Kesbangpol)	24 Oktober 2024	270.000.000,00
Jumlah		770.997.100,00

- 3) PT AMH memberikan fasilitas berupa transportasi menggunakan bus di setiap daerah dan negara, tiket penyeberangan, tiket penerbangan, makan siang dan makan malam, seluruh biaya penginapan, serta tiket wahana.

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Kesbangpol dan Sdr NAs diketahui hal berikut.

- 1) Uang harian hanya diberikan kepada pegawai Badan Kesbangpol dan Paskibraka Kabupaten PALI agar dapat dikoordinir untuk diserahkan kembali kepada Kepala Badan Kesbangpol;
- 2) Uang tunai sebesar Rp548.991.000,00 yang dikuasai oleh Kepala Badan Kesbangpol diberikan ke Sdr. NAs selaku Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kesbangpol sebesar Rp338.500.000,00 tanpa tanda terima pada tanggal 23 Oktober 2024;
- 3) Sisa uang pada Kepala Badan Kesbangpol adalah sebesar Rp210.491.000,00 (Rp548.991.000,00 - Rp338.500.000,00) digunakan untuk pengeluaran lain-lain tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah;
- 4) Sisa uang pada Sdr. NAs sebesar Rp18.500.000,00 (Rp338.500.000,00 - Rp50.000.000,00 - Rp270.000.000,00) digunakan untuk pengeluaran lain-lain tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah.
- 5) Kepala Badan Kesbangpol menyatakan bertanggung jawab dan bersedia mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah.

b. Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilaksanakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sesuai ketentuan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri yang dilaksanakan Badan Kesbangpol tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Jumlah peserta perjalanan dinas melebihi ketentuan yaitu paling banyak lima orang;
- 2) Terdapat 14 orang ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tidak didukung dengan izin dari Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 3) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilaksanakan Badan Kesbangpol tidak memenuhi kriteria, tujuan dan hasil sesuai ketentuan, serta tidak didukung

dengan surat undangan/surat balasan kunjungan dari negara atau tempat yang dituju/surat konfirmasi dari KBRI; dan

- 4) Tidak terdapat laporan perjalanan dinas. Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yang ada hanya berupa Surat Perintah Tugas (SPT), rincian biaya, bukti pembelian tiket transportasi udara, penginapan, dan paspor.

Berdasarkan dokumen kuitansi dari PT AMH diketahui tagihan biaya perjalanan per orang sebesar Rp9.700.000,00. Atas permasalahan tersebut, terdapat kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas ke luar negeri untuk 14 orang ASN yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp135.800.000,00 (14 orang x Rp9.700.000,00).

Selama proses penyusunan LHP, Badan Kesbangpol telah menyeter kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Kas Daerah sebesar Rp228.991.000,00 yaitu pada tanggal 16 Mei 2025 sebesar Rp15.000.000,00 dan pada 20 Mei 2025 sebesar Rp195.000.000,00 dan Rp18.991.000,00. Sehingga terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp135.800.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 7**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- b. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah BAB II Bagian Kedua pada:

1) Pasal 4:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), wajib mendapatkan izin dari menteri;
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam memberikan izin perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.

2) Pasal 10:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas;
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas, surat persetujuan Perjalanan Dinas, Paspor Dinas yang masih berlaku, *Exit Permit*; dan Visa untuk negara tertentu.

3) Pasal 11:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri.

- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa surat permohonan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: surat undangan/surat balasan kunjungan dari negara atau tempat yang dituju/surat konfirmasi dari KBRI, kerangka acuan kerja, salinan daftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran, jadwal pelaksanaan kegiatan, rincian biaya perjalanan dinas, data personil peserta, Surat keterangan keabsahan dokumen dari unit kerja; dan keterangan urgensi keikutsertaan peserta.
- c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat: nama dan jabatan, nomor induk pegawai bagi PNS, tujuan kegiatan, manfaat, kota/negara yang dituju, waktu pelaksanaan; dan sumber pendanaan.
- 4) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disertai dengan lampiran berupa dokumen yang sesuai dengan tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- 5) Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Peserta Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling banyak 5 (lima) orang termasuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan Daerah.
- 6) Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa jangka waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- 7) Pasal 33:
- a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan Daerah melaporkan hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama;
- b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa laporan hasil Perjalanan Dinas disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah selesai melakukan Perjalanan Dinas.
- c. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Huruf A Ketentuan Umum:
- 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk diterbitkan melalui Sekretariat Negara.
- 3) Angka 3 yang menyatakan bahwa permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan.
- 4) Angka 4 yang menyatakan bahwa apabila sampai dengan tanggal keberangkatan yang diusulkan belum mendapat persetujuan tertulis dari Presiden atau pejabat

yang ditunjuk yang bersangkutan tidak diizinkan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Badan Kesbangpol sebesar Rp135.800.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Badan Kesbangpol, PPK SKPD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran tidak mematuhi ketentuan pelaksanaan belanja perjalanan dinas luar negeri.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar memerintahkan Kepala Badan Kesbangpol untuk:

- Mematuhi ketentuan pelaksanaan belanja di lingkungan kerjanya;
- Menginstruksikan PPTK Perjalanan Dinas Luar Negeri, PPK SKPD, dan Bendahara Pengeluaran supaya melaksanakan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai ketentuan; dan
- Memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp135.800.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

8. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten PALI menganggarkan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp110.631.150.850,00 dengan realisasi sebesar Rp107.906.427.615,00 atau 97,54% dari anggaran. Realisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat tersebut diantaranya terdapat pada Sekretariat Daerah dengan nilai realisasi sebesar Rp9.788.140.000,00.

Sekretariat Daerah merealisasikan belanja tersebut berupa Belanja Paket Umroh untuk masyarakat yang dilaksanakan sebanyak tiga kali selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.20 Rincian Belanja Paket Umroh pada Sekretariat Daerah

No	Paket	Waktu Pelaksanaan	Penyedia	No. Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1.	Umrah Syawal Sukari Quad 9 hari	11 s.d. 20 April 2024	PT SAW	027/19/SPK/II/Setda-PALI/PL/2024	3.086.640.000,00
2.	Umroh Sukari Quad 9 hari	27 Agustus s.d. 5 September 2024	PT SAW	027/42/SPK/II/Setda-PALI/PL/2024	4.734.000.000,00
3.	Reguler Eksklusif 10 hari	16 s.d. 25 November 2024	PT EPW	027/51/SPK/Setda-PALI/II/2024	1.967.500.000,00
Jumlah Kontrak					9.788.140.000,00

Hasil pemeriksaan atas kronologi pengadaan melalui e-katalog, dokumen kontrak, dokumen pertanggungjawaban belanja, serta hasil wawancara dengan pihak penyedia, PPK dan PPTK diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan dilakukan secara proforma.

Selanjutnya, diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan umroh tersebut penyedia memberikan bonus kepada pihak Sekretariat Daerah Pemkab PALI. Bonus tersebut berupa keberangkatan umroh secara cuma-cuma atau gratis untuk satu orang dalam setiap pelaksanaan umroh dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.21 Rincian Bonus yang diterima pihak Sekretariat Daerah

No	Nomor Kontrak	Penyedia	Nilai Bonus (Rp)
1	027/19/SPK/II/Setda-PALI/PL/2024	PT SAW	38.583.000,00
2	027/42/SPK/II/Setda-PALI/PL/2024	PT SAW	39.450.000,00
3	027/51/SPK/Setda-PALI/II/2024	PT EPW	39.350.000,00
	Jumlah		117.383.000,00

Dalam keterangannya, PPK menjelaskan bahwa umroh gratis tersebut diberikan kepada pegawai Sekretariat Daerah dan tokoh masyarakat. Bonus umroh sebesar Rp117.383.000,00 telah dikembalikan seluruhnya ke Kas Daerah tanggal 14 s.d. 19 Mei 2025.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16 pada angka (4) yang menyatakan bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 yang menyatakan PNS dilarang pada huruf b yang menyatakan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 5 huruf (b) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa meliputi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - 2) Pasal 6 huruf (a) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien;
 - 3) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika antara lain:
 - a) Huruf g yang menyatakan bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - b) Huruf h yang menyatakan bahwa tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
 - 4) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c) Menetapkan HPS;
- 5) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan;
- 6) Pasal 18 ayat (7) yang menyatakan bahwa perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
- a) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b) Penyusunan perkiraan biaya/RAB.
- 7) Pasal 80 pada:
- a) Ayat (1) yaitu pada huruf c yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
 - b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain dikenakan:
 - (1) Huruf b: Sanksi Daftar Hitam;
 - (2) Huruf c: Sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing*;
 - (3) Huruf d: Sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik;
 - c) Ayat (4) huruf a yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun; dan
 - d) Ayat (5) yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK.
- d. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 16 yang menyatakan bahwa penyedia katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bertanggung jawab atas:
- 1) Huruf a: Seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada Katalog Elektronik;
 - 2) Huruf b: Pelaksanaan surat pesanan *e-purchasing* katalog; dan
 - 3) Huruf c: Kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.

- e. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, pada Lampiran 1 huruf e, angka 1), huruf d) yang menyatakan bahwa PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga. Pengumpulan referensi harga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, angka (1) yang menyatakan referensi harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:

- 1) Huruf (a) yaitu mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi;
- 2) Huruf (b) yaitu mencari harga pembandingan produk sejenis di luar aplikasi katalog elektronik (apabila ada);
- 3) Huruf (c) yaitu informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian/Lembaga/pemerintah daerah (apabila ada); dan
- 4) Huruf (d) yaitu dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).

Permasalahan di atas mengakibatkan Sekretariat Daerah:

- a. Tidak dapat memperoleh harga belanja paket umroh yang bersaing dan kompetitif; dan
- b. Tidak dapat memanfaatkan bonus umroh.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Sekretaris Daerah selaku PA kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. KPA, PPK, PPTK Sekretariat Daerah kurang optimal mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa belanja paket umroh.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati PALI agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku PA untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan anggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. Menginstruksikan KPA, PPK dan PPTK kegiatan umroh supaya lebih optimal mengawasi dan mengendalikan melaksanakan belanja kegiatan paket umroh sesuai ketentuan.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

9. Realisasi Belanja Kegiatan Pelatihan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya

Pemerintah Kabupaten PALI mengalokasikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp621.389.040.356,36 dan telah direalisasikan sebesar Rp565.408.834.081,00 atau 90,99% dari anggaran. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya direalisasikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Perindag) melalui mekanisme Tambah Uang (TU) sebesar Rp2.740.166.000,00 untuk kegiatan pelatihan selama 2024.

Pada tahun 2024, Dinas Perindag melaksanakan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang di dalamnya terdapat kegiatan pelatihan sebanyak sembilan kali yaitu pelatihan rajut, songket, jumputan, pelatihan anyaman dan kayu, pelatihan pewarnaan alam indigofera, pelatihan jahit, pelatihan batik tulis dan pelatihan tenun songket. Peserta pelatihan tersebut melibatkan pengurus dan pengrajin binaan Deskransda Kabupaten PALI. Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban belanja kegiatan pelatihan melalui SP2D TU sebanyak empat kali sebesar Rp2.740.166.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.22 SP2D TU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024

No TU	Kegiatan	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Pelatihan songket, pelatihan rajutan, pelatihan jumputan	16.12/04.0/000019/TU/3.30.3.31.0.0 0.25.0000/M/4/2024	22 April 2024	804.621.000,00
2	Pelatihan anyaman pandan, pelatihan kerajinan kayu	16.12/04.0/000029/TU/3.30.3.31.0.0 0.25.0000/M/6/2024	6 Juni 2024	656.849.000,00
3	Pelatihan pewarnaan alam indigofera, pelatihan batik tulis, pelatihan menjahit	16.12/04.0/000040/TU/3.30.3.31.0.0 0.25.0000/M/7/2024	8 Juli 2024	932.696.000,00
4	Pelatihan songket	16.12/04.0/000067/TU/3.30.3.31.0.0 0.25.0000/PPR1/10/2024	30 Oktober 2024	346.000.000,00
	Jumlah			2.740.166.000,00

Nilai SP2D TU kegiatan pelatihan tersebut direalisasikan untuk komponen belanja bahan material pelatihan, belanja barang diserahkan kepada masyarakat, belanja ATK, belanja perjalanan dinas, dan honor narasumber. Belanja bahan material pelatihan adalah pembelian bahan material yang digunakan saat pelatihan, sedangkan belanja barang diserahkan kepada masyarakat adalah pembelian bahan material yang dibawa pulang peserta setelah pelatihan.

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja bahan material pelatihan dan belanja barang diserahkan kepada masyarakat menunjukkan bahwa terdapat pertanggungjawaban belanja tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp973.853.123,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.23 Rincian Realisasi Belanja Bahan Material Pelatihan dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya

(dalam rupiah)

Nomor TU	Nilai SPJ	Pajak	Nilai bukti sebenarnya	Selisih
1	2	3	4	5 = (2-3-4)
TU 1	489.000.000,00	52.130.629,00	99.898.000,00	336.971.371,00
TU 2	356.000.000,00	40.090.090,00	80.445.042,00	235.464.868,00
TU 3	459.000.000,00	51.689.188,00	88.193.500,00	319.117.312,00
TU 4	156.425.000,00	17.615.428,00	56.510.000,00	82.299.572,00
Jumlah	1.460.425.000,00	161.525.335,00	325.046.542,00	973.853.123,00

Berdasarkan keterangan dan klarifikasi Plt. Kepala Dinas Perindag, PPTK, Bendahara Pengeluaran, perusahaan penyedia diketahui hal berikut.

- a. Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa atas perintah Plt. Kepala Dinas Perindag proses pembayaran belanja bahan material pelatihan dan belanja barang menggunakan rekening pihak ketiga. Adapun rekening pihak ketiga yang digunakan adalah rekening CV RB, CV GWK, CV PGM, dan CV RPS. Selanjutnya, pembayaran tersebut ditarik tunai oleh masing-masing perusahaan dan diserahkan kepada PPTK atau Plt. Kepala Dinas Perindag. Uang yang dikembalikan oleh perusahaan tersebut terdapat yang dipotong oleh komisi perusahaan sebesar 5% dan ada yang tidak dipotong.
- b. Empat perusahaan yang dipinjam rekeningnya yaitu CV RB, CV GWK, CV PGM, dan CV RPS mengakui bahwa perusahaan dipinjam oleh Plt. Kepala Dinas Perindag untuk melakukan transaksi pencairan uang belanja.
- c. Seluruh belanja pada CV RB, CV PGM, dan CV RPS dan beberapa belanja pada CV GWK untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh Dinas Perindag bukan oleh perusahaan.
- d. CV RB, CV PGM, dan CV RPS memperoleh *fee* 5% dari nilai yang ditransfer setelah dipotong pajak untuk biaya peminjaman rekening perusahaan senilai Rp50.333.723,00.
- e. PPTK dan Plt. Kepala Dinas Perindag mengakui menerima uang tunai dari keempat perusahaan tersebut. Sebagian dari uang tersebut dibelanjakan oleh PPTK dan Plt. Kepala Dinas Perindag untuk membeli bahan-bahan material pelatihan dan material yang dibawa pulang setelah pelatihan. Selanjutnya atas perintah Plt. Kepala Dinas perindag, sisa uang sebesar Rp923.519.400,00 diserahkan kepada Plt. Kepala Dinas Perindag.

Selama proses penyusunan LHP, Dinas Perindag telah menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp9.250.000,00 pada tanggal 20 Mei 2025, sehingga sisa yang belum disetor sebesar Rp964.603.123,00 (Rp973.853.123,00 - Rp9.250.000,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

- a. Pasal 121 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; dan
- b. Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindag sebesar Rp964.603.123,00.

Hal tersebut disebabkan oleh Plt. Kepala Dinas Perindag, PPTK, Bendahara Pengeluaran Dinas Perindag tidak mematuhi ketentuan pelaksanaan belanja.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar memerintahkan Kepala Dinas Perindag untuk:

- Memedomani ketentuan pelaksanaan belanja;
- Menginstruksikan PPTK dan Bendahara Pengeluaran supaya mematuhi ketentuan pelaksanaan belanja; dan
- Memproses kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindag sebesar Rp964.603.123,00 dan menyertorkan ke Kas Daerah.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

10. Pembayaran Biaya Langsung Personel atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten PALI menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp621.389.040.356,36 dengan realisasi sebesar Rp565.408.834.081,00 atau 90,99% dari anggaran, diantaranya direalisasikan untuk Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi masing-masing sebesar Rp15.523.245.572,00 dan Rp1.788.844.090,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dan Belanja Jasa Non Konstruksi diketahui terdapat waktu penugasan personel tidak sesuai volume yang dipersyaratkan, personel tidak bekerja sesuai kontrak, dan kualifikasi personel tidak sesuai dengan persyaratan kerangka acuan kerja (KAK), dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Waktu Penugasan Personel Tidak Sesuai Volume yang Diperkirakan

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, bukti pertanggungjawaban, rekapitulasi personel, dan permintaan keterangan, pada Dinas PUTR dan Dinas Perkim diketahui terdapat kelebihan pembayaran biaya langsung personel atas personel yang waktu penugasannya tidak sesuai volume kontrak pada tujuh paket pekerjaan sebesar Rp120.291.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.24 Kelebihan Pembayaran atas Personel yang Waktu Penugasannya Tidak Sesuai Volume Kontrak

(dalam rupiah)

No.	Nama Paket	Penyedia	Lebih Bayar Biaya Personel
1	2	3	4
A	Dinas PUTR		
1	Peningkatan Jalan Handayani - Talang Anding - Sumberejo (DAK)	CV AMS	63.000.000,00
	Jumlah A		63.000.000,00
B	Dinas Perkim		
1	Konsultan Perencanaan Jalan Lingkungan	CV REK	6.500.000,00
2	Konsultan Pengawasan Lampu Tenaga Surya	CV SK	13.300.000,00
3	Konsultan Perencanaan DED Kawasan Kumuh	CV SK	8.092.000,00

No.	Nama Paket	Penyedia	Lebih Bayar Biaya Personel
4	Konsultan Penyusunan DED Kawasan Kumuh	CV SK	8.092.000,00
5	DED Kawasan Perumahan Alam Pendopo	CV SK	6.307.000,00
6	Konsultan Perencanaan DED Kawasan Kumuh	CV SK	15.000.000,00
	Jumlah B		57.291.000,00
	Total Jumlah A + B		120.291.000,00

Atas kelebihan nilai ini telah dilakukan klarifikasi dan disetujui oleh penyedia, PPTK, dan KPA. Serta penyedia bersedia mengembalikan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Adapun, KPA, PPTK, dan Pejabat Pengadaan juga telah menyatakan bahwa apabila personel yang waktu penugasannya tidak sesuai volume yang dipersyaratkan maka hal tersebut tidak sesuai ketentuan.

b. Personel Tidak Bekerja Sesuai Kontrak

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, bukti pertanggungjawaban, dan permintaan keterangan pada Dinas PUTR, Dinas Perkim, dan BPBD diketahui terdapat kelebihan pembayaran biaya langsung personel pada 14 paket pekerjaan sebesar Rp694.582.000,00. Kelebihan pembayaran tersebut disebabkan adanya personel yang tercantum dalam kontrak yang tidak bekerja dan hanya dipinjam namanya untuk administrasi pengadaan dan kontrak. Rincian kelebihan pembayaran pada tabel berikut.

Tabel 1.25 Kelebihan Pembayaran atas Personel yang Tidak Bekerja Sesuai Kontrak
(dalam rupiah)

No.	Nama Paket	Penyedia	Lebih Bayar Biaya Personel (Rp)
A	Dinas PUTR		
1	Konsultan Perencanaan Kantor Dinas Lingkungan Hidup	CV CBC	42.000.000,00
2	Konsultan Perencanaan Kantor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	CV AQCA	21.000.000,00
3	DED TPST Pendopo Kecamatan Talang Ubi	CV HMK	115.000.000,00
4	Konsultan Perencanaan Kantor Dinas Kesehatan	CV HMK	21.000.000,00
5	Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Penantian - Karang Tanding	CV PK	84.000.000,00
6	Konsultan Pengawasan Gedung OPD dan Rehab Rumah Sakit Tanah Abang	CV CBC	18.000.000,00
	Jumlah A		301.000.000,00
B	Dinas Perkim		
1	Konsultan Penyusunan DED Kawasan Kumuh	CV SK	15.000.000,00
2	DED Kawasan Perumahan Alam Pendopo	CV SK	25.500.000,00
3	Konsultan Perencanaan Drainase Lingkungan	CV MR	18.000.000,00
4	Konsultan Perencanaan PSU Lainnya	CV MA	7.500.000,00
5	Konsultan Perencanaan Sarana dan Prasarana	CV MA	17.000.000,00
	Jumlah B		83.000.000,00
C	BPBD		

No.	Nama Paket	Penyedia	Lebih Bayar Biaya Personel (Rp)
1	Jasa Konsultasi Perencanaan Sodedan Sungai Penukal Ke Kawasan Danau Burung	CV UPM	232.575.000,00
2	Jasa Konsultasi <i>Database</i> Warga yang Terdampak Bencana Banjir di Kecamatan Talang Ubi	CV HMS	48.760.000,00
3	Jasa Konsultasi <i>Database</i> Warga yang Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten PALI	CV UPM	29.247.000,00
	Jumlah B		310.582.000,00
	Total Jumlah A + B + C		694.582.000,00

Atas kelebihan nilai ini telah dilakukan klarifikasi dan disetujui oleh penyedia, PPTK, dan KPA. Serta penyedia bersedia mengembalikan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Adapun, KPA dan PPTK juga telah menyatakan bahwa apabila personel tidak bekerja, maka hal tersebut tidak sesuai ketentuan sehingga tidak dapat dibayarkan.

c. Kualifikasi Personel Tidak Sesuai Dengan Persyaratan KAK

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, bukti pertanggungjawaban, KAK, rekapitulasi personel, dan permintaan keterangan, di Dinas PUTR diketahui terdapat kelebihan pembayaran biaya langsung personel pada dua paket pekerjaan sebesar Rp56.000.000,00. Kelebihan pembayaran tersebut disebabkan karena adanya personel yang kualifikasi pengalaman kerjanya tidak sesuai dengan persyaratan KAK, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.26 Kelebihan Pembayaran atas Kualifikasi Personel Tidak Sesuai dengan Persyaratan KAK pada Dinas PUTR

(dalam rupiah)

No.	Nama Paket	Penyedia	Lebih Bayar Biaya Personel (Rp)
1	Konsultan Pengawasan Pembangunan Kawasan Wisma PKK	CV CBC	42.000.000,00
2	Konsultan Penagwasan <i>Landscape</i> Kantor Kejaksaan dan Fasilitas Penunjang Lainnya	CV CBC	14.000.000,00
	Total Kelebihan Pembayaran (Rp)		56.000.000,00

Atas kelebihan nilai ini telah dilakukan klarifikasi dan disetujui oleh penyedia, PPTK, dan KPA, serta penyedia bersedia mengembalikan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Atas kelebihan nilai ini telah dilakukan klarifikasi dan disetujui oleh penyedia, PPTK, dan KPA. Serta penyedia bersedia mengembalikan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Adapun, KPA dan PPTK juga telah menyatakan bahwa apabila personel tidak bekerja maka hal tersebut tidak sesuai ketentuan sehingga tidak dapat dibayarkan.

Selama proses penyusunan LHP, CV SK pada Dinas Perkim telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp91.291.000,00 pada tanggal 22 Mei 2025, sehingga sisa yang belum disetor sebesar Rp779.582.000,00. Rincian kelebihan pembayaran biaya langsung personel pada **Lampiran 8**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

1) Pasal 17 pada:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

2) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

3) Pasal 78 pada:

- a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal penyedia:

- (1) Huruf a: tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
(2) Huruf d: melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan
(3) Huruf e: menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit.

Peserta pemilihan dikenakan sanksi administratif.

- b) Ayat (4) huruf (d) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa: sanksi ganti kerugian.

- b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran IV Poin 29.6 Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha:

1) Huruf a yang menyatakan bahwa apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama pada paket pekerjaan lain/ yang sedang berjalan maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang (untuk metode evaluasi kualitas dan biaya, Pagu Anggaran, dan biaya terendah) atau pemenang/ peringkat teknis terbaik (untuk metode evaluasi kualitas), apabila setelah dilakukan klarifikasi Tenaga Ahli tersebut tidak terikat/ sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket tersebut saat memulai pelaksanaan pekerjaan pada paket yang sedang diseleksi; dan

2) Huruf c yang menyatakan bahwa ketentuan pada huruf a dan huruf b hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang (untuk metode evaluasi kualitas dan biaya, Pagu Anggaran, dan biaya terendah) atau pemenang/ peringkat teknis terbaik (untuk metode evaluasi kualitas) pada 1 (satu) paket jasa konsultansi, dikecualikan: 4).

pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan dengan ketentuan personel yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (*overlap*).

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dalam Pasal 32, pada:

- 1) Ayat (4) yang menyatakan bahwa cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsom sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya personel dan biaya nonpersonel; dan
- 2) Ayat (6) yang menyatakan bahwa cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan: a). pembayaran biaya personel dilakukan dengan remunerasi sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume penugasan aktual dan ketentuan dalam Kontrak.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp779.582.000,00 yang terdiri atas:

- a. Dinas PUTR sebesar Rp420.000.000,00;
- b. Dinas Perkim sebesar Rp49.000.000,00; dan
- c. BPBD sebesar Rp310.582.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala BPBD kurang mengawasi pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi di lingkungan kerjanya; dan
- b. KPA dan PPTK Jasa Konsultansi masing-masing pekerjaan kurang cermat dalam memeriksa kesesuaian pelaksanaan kontrak jasa konsultan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar memerintahkan Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Perkim dan Kepala BPBD untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi di lingkungan kerjanya;
- b. Menginstruksikan KPA dan PPTK Jasa Konsultansi lebih cermat dalam memeriksa kesesuaian pelaksanaan kontrak jasa konsultan; dan
- c. Memproses kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp779.582.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas PUTR sebesar Rp420.000.000,00;
 - 2) Dinas Perkim sebesar Rp49.000.000,00; dan
 - 3) BPBD sebesar Rp310.582.000,00.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

11. Kekurangan Volume atas 29 Paket Pekerjaan Kontraktual Belanja Barang dan Jasa pada Dua SKPD

Pemerintah Kabupaten PALI menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp621.389.040.356,36 dengan realisasi sebesar Rp565.408.834.081,00 atau 90,99% dari anggaran, diantaranya direalisasikan untuk Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan masing-masing sebesar Rp221.319.555.799,00 dan Rp7.698.631.039,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak dan fisik pekerjaan pada Dinas Perkim dan Dinas PUTR yang dilakukan bersama dengan KPA, PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Penyedia, serta didampingi oleh Inspektorat diketahui terdapat kekurangan volume sebesar Rp603.527.868,03 dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 1.27 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran atas Belanja Pemeliharaan

No	SKPD	Jumlah Paket yang Diperiksa	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	Dinas Perkim	27 Paket	490.644.128,49
2	Dinas PUTR	2 Paket	112.883.739,54
Jumlah		29 Paket	603.527.868,03

Metode perhitungan dan nilai kelebihan pembayaran masing-masing pekerjaan telah dibahas bersama KPA, PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, dan Penyedia, serta diketahui oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Hasil pembahasan kelebihan pembayaran pekerjaan telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Perhitungan Hasil Pengujian Fisik. Rincian perhitungan kelebihan pembayaran dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada:
 - 1) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas, huruf c, ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
 - 2) Pasal 78 yaitu pada:
 - a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Penyedia, pada huruf d yang menyatakan melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit.
Penyedia dikenai sanksi administratif.
 - b) Ayat (5) yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada, ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang menyatakan bahwa:

- 1) huruf a, Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) huruf b, Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 3) huruf c, Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang, antara lain Bahan dan/atau peralatan (*material on site*) yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan; dan
 - 4) huruf d, Bahan dan/atau peralatan (*material on site*) yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan dengan ketentuan, antara lain berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya.
- c. Klausul kontrak pekerjaan yang menyangkut daftar kuantitas dan volume pekerjaan serta pembayaran prestasi pekerjaan.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp603.527.868,03 dengan rincian pada:

- a. Dinas Perkim sebesar Rp490.644.128,49 dan
- b. Dinas PUTR sebesar Rp112.883.739,54.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas PUTR selaku PA kurang mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya; dan
- b. KPA, PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan Dinas Perkim dan Dinas PUTR kurang cermat dalam mengawasi dan memeriksa volume dan spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar memerintahkan Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas PUPR selaku PA untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya;
- b. Menginstruksikan KPA, PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan pada SKPD terkait supaya lebih cermat dalam mengawasi dan memeriksa volume dan spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak; dan
- c. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp603.527.868,03 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Perkim sebesar Rp490.644.128,49; dan
 - 2) Dinas PUTR sebesar Rp112.883.739,54.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

12. Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten PALI mengalokasikan Belanja Modal sebesar Rp438.072.225.853,00 dengan realisasi sebesar Rp426.818.764.718,00 atau 97,43% dari anggaran.

LHP LKPD Kabupaten PALI Tahun 2023 Nomor 46.A/LHP/XVIII.PLG/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, BPK telah mengungkapkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan/atau kekurangan volume pekerjaan 102 paket sebesar Rp33.769.383.405,52. Di antaranya terdapat nilai kekurangan volume pada 61 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak berpedoman pada dokumen pemilihan, indikasi kerja sama antar penyedia, indikasi kerja sama penyedia dengan pokja, dan indikasi HPS tidak rahasia. BPK merekomendasikan antara lain memerintahkan kepada Bupati PALI agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp33.918.799.958,73 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah. Hasil pemantauan tindak lanjut per Semester II 2024 menunjukkan nilai rekomendasi tersebut belum disetor seluruhnya karena masih terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp32.988.137.904,66.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Modal diketahui bahwa pelaksanaan Belanja Modal pada Dinas PUTR berikut proses pengadaannya tidak sesuai ketentuan dengan uraian sebagai berikut.

a. Kekurangan volume 51 paket pekerjaan sebesar Rp8.872.798.410,38

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik atas pekerjaan belanja kontraktual bersama PPK, Pengawas, Penyedia, dan Inspektorat menunjukkan hal berikut.

Tabel 1.28 Rekapitulasi Kekurangan Volume Pekerjaan

No	Jenis Belanja Modal	Jumlah Paket	Nilai Temuan (Rp)
1	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
	a. Jalan dan Jembatan	27	6.212.783.580,44
	b. Irigasi	10	435.866.086,43
	c. Jaringan	2	313.604.591,03
2	Gedung dan Bangunan	11	1.895.188.139,23
3	Peralatan dan Mesin	1	15.356.013,25
Jumlah			8.872.798.410,38

Kekurangan volume pekerjaan fisik berupa ukuran ketebalan pekerjaan jalan beton dan aspal yang tidak sesuai spesifikasi, kualitas beton dan aspal yang tidak sesuai spesifikasi, ukuran drainase, dan tebal timbunan serta pekerjaan konstruksi gedung bangunan yang tidak sesuai kontrak. Rincian kekurangan volume atas 51 paket pekerjaan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Atas nilai kekurangan volume tersebut telah dilakukan klarifikasi nilai perhitungan bersama PPK, Pengawas SKPD, dan pihak Penyedia. Berdasarkan hasil klarifikasi,

semua pihak menyatakan sepakat dengan hasil pengujian fisik, pengambilan sampel, dan metode perhitungan hasil pemeriksaan fisik. Kesepakatan tersebut dimuat dalam Berita Acara Pembahasan Perhitungan Hasil Pemeriksaan Fisik.

Berdasarkan permintaan keterangan dengan KPA merangkap PPK Pekerjaan Jalan, KPA merangkap PPK Pekerjaan Gedung dan Bangunan, dan PPTK Pekerjaan Gedung dan Bangunan diketahui bahwa.

- 1) PPK Pekerjaan Jalan menyatakan telah melakukan pengujian volume terpasang, namun titik titik pengujian merupakan titik yang ditentukan oleh penyedia. Titik titik pengujian tersebut ketebalannya telah disesuaikan dengan ketebalan kontrak. Sehingga apabila dilakukan pengujian pada titik titik tersebut akan sesuai dengan volume kontrak. Pihak Dinas PUPR pernah melakukan pengujian ketebalan tidak mengikuti titik yang ditentukan penyedia, dan hasil ketebalan terpasang sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK;
- 2) PPK Pekerjaan Jalan mengakui bahwa *back up data* pekerjaan jalan yang menjadi dasar pembayaran dibuat secara proforma menyesuaikan volume kontrak dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. PPK mengakui bahwa seharusnya proses pembayaran sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan *back up data* yang dibuat secara proforma ini tidak sesuai dengan ketentuan.
- 3) PPK Pekerjaan Gedung dan Bangunan menyatakan bahwa verifikasi *progress* pekerjaan dilakukan oleh PPTK. KPA hanya memproses berkas kemajuan pekerjaan yang telah diverifikasi oleh PPTK tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 4) PPTK Pekerjaan Gedung dan Bangunan menyatakan PPTK menyetujui *back up data* dibuat oleh penyedia meski mengetahui beberapa volume yang dimuat dalam *back up data* tidak logis. PPTK mengakui tidak menguji *back up data* secara rinci, hanya menilai pekerjaan gedung secara visual.

b. Proses pemilihan penyedia melalui tender pada paket pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan

Dari 39 paket pekerjaan Jalan Irigasi Jaringan yang ditemukan kekurangan volume pekerjaan, dilakukan pemeriksaan atas proses pengadaan 14 paket pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.29 Rekapitulasi Pekerjaan Fisik yang menjadi Sampel Pemeriksaan Tender

No	Penyedia	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1	CV HNB	Peningkatan Jalan Simpang 5 Pendopo - Talang Akar - Batas Kabupaten Muba	8.219.881.000,00	237.129.380,74
2	CV DP	Peningkatan Jalan Penantian - Karang Tanding	8.041.641.000,00	252.004.294,34
3	CV DW	Lanjutan Peningkatan Jalan Penantian - Karang Tanding	7.341.672.000,00	703.984.400,10
4	CV KNZ	Peningkatan Jalan Simpang 4 Sungai Ibul - Babat (DAU)	6.176.319.000,00	402.903.957,74
5	PT KJP	Peningkatan Jalan Tanah Abang - Purun	5.750.789.000,00	567.964.521,96
6	CV DA	Pembangunan Jembatan Air Deras Kota Baru (Bangub)	5.736.786.000,00	807.108.906,67
7	CV Gjm	Peningkatan Jalan Handayani - Talang Anding - Sumberejo (DAK)	5.642.287.000,00	122.138.118,49

No	Penyedia	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
8	CV NU	Peningkatan Jalan Kecamatan Abab	4.776.049.000,00	673.026.620,89
9	CV HNB	Peningkatan Jalan Simpang 3 Talang Ojan - Simpang 4 Sungai Ibul - Tanjung Baru	3.765.568.000,00	200.678.520,25
10	CV KNZ	Peningkatan jalan dalam kota	3.370.602.000,00	232.933.108,30
11	PT KJP	Peningkatan Jalan Handayani - Talang Anding - Sumberejo	3.280.956.000,00	357.436.521,57
12	CV HNB	Peningkatan Jalan Desa Sungai Baung	2.984.806.000,00	44.844.680,97
13	PT KJP	Peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Tanah Abang	2.970.061.000,00	209.246.302,93
14	CV RJ	Peningkatan Jalan Simpang Suka Damai - Kota Baru (Bangub)	1.866.823.000,00	327.275.484,28
Total Jumlah			69.924.240.000,00	5.138.674.819,23

Berdasarkan analisis komparasi dokumen PPK dan Analisa Harga Satuan (AHS) penyedia yang diunggah pada laman SPSE, diketahui terdapat kesamaan antara dokumen HPS PPK dan AHS penyedia pada 14 paket pekerjaan tersebut. Hal ini mengindikasikan HPS PPK tidak rahasia dan bocor ke penyedia.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan evaluasi Pokja Pemilihan atas dokumen penawaran dan kualifikasi untuk 14 paket pekerjaan tersebut diuraikan sebagai berikut.

- 1) Persyaratan teknis untuk peralatan utama dalam dokumen pemilihan mempersulit calon peserta pengadaan. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis dalam dokumen pemilihan berdasarkan KAK yang dibuat PPK. Peralatan yang disyaratkan sebanyak 9 s.d. 16 jenis dengan jumlah unit peralatan jenis *dump truck*, mesin potong rumput, *truck mixer* lebih dari tiga unit. Hal ini bertentangan dengan dokumen Instruksi Kepada Peserta (IKP) yang mensyaratkan jumlah maksimal jenis peralatan hanya sebanyak enam jenis, dengan jumlah setiap jenis peralatan maksimal tiga unit.
- 2) Pokja Pemilihan memenangkan penyedia meskipun dokumen kualifikasi dan teknis tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Lembar Data Pemilihan (LDP). Pokja Pemilihan mengakui bahwa ketidaksesuaian atas kelengkapan dokumen kualifikasi dan teknis yang disampaikan oleh peserta tender seharusnya mengakibatkan peserta gugur dalam evaluasi kualifikasi dan teknis, dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi harga. Rincian ketidaksesuaian dokumen kualifikasi dan teknis masing-masing penyedia dengan dokumen LDK dan LDP dapat dilihat pada **Lampiran 11 dan Lampiran 12**.

Selain itu, terdapat bukti kepemilikan peralatan sewa yang bukan atas nama pemberi sewa, namun Pokja Pemilihan tidak mengklarifikasi ketidaksesuaian bukti kepemilikan peralatan tersebut.

Atas kondisi permasalahan yang ditemukan pada proses evaluasi 14 paket pekerjaan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan tidak mengetahui praktik Pokja Pemilihan yang meluluskan peserta tender meskipun penawaran yang disampaikan tidak sesuai LDP dan LDK. Apabila dokumen kualifikasi dan penawaran peserta yang disampaikan tidak sesuai LDP dan LDK, maka peserta tersebut seharusnya dinyatakan tidak lulus evaluasi. Tender dinyatakan gagal apabila

tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan LDP dan LDK dan dilanjutkan dengan tender ulang.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
 - b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada:
 - 1) Lampiran II tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia pada angka IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi dan angka 4.2.8 mengenai Penetapan Calon Pemenang dan huruf a Ketentuan Umum yang menyatakan bahwa penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
 - 2) Lampiran 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang menyatakan bahwa:
 - a) huruf a, pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - b) huruf b, pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - c) huruf c, dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang, antara lain Bahan dan/atau peralatan (*material on site*) yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan; dan
 - d) huruf d, bahan dan/atau peralatan (*material on site*) yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan dengan ketentuan, antara lain berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya.
 - c. Klausul kontrak masing-masing pekerjaan yang mengatur kewajiban penyedia dan volume pekerjaan.
 - d. Dokumen Pemilihan Tender dalam BAB I Umum pada huruf D yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK).
 - e. Dokumen Pemilihan Tender dalam BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada:
 - 1) huruf C angka 17.3 menyatakan bahwa pokja pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.2.b dalam LDP; dan
 - 2) huruf E angka 29.11 menyatakan bahwa pokja pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 29.11 dalam LDK.
- Permasalahan di atas mengakibatkan:
- a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp8.872.798.410,38;

- b. Nilai Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan lebih saji sebesar Rp6.962.254.257,90 (Rp6.212.783.580,44 + Rp435.866.086,43 + Rp313.604.591,03);
- c. Nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Gedung dan Bangunan lebih saji sebesar Rp1.895.188.139,23;
- d. Nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Peralatan dan Mesin lebih saji sebesar Rp15.356.013,25;
- e. Risiko rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang dihasilkan pada 14 paket pekerjaan yang terindikasi tender dilaksanakan secara proforma; dan
- f. Risiko meningkatnya belanja daerah di masa depan untuk memperbaiki jalan, drainase, serta bangunan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas PUPR selaku PA kurang mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya;
- b. PPK, PPTK, dan Pengawas SKPD masing-masing paket pekerjaan kurang cermat dalam memeriksa volume pekerjaan sesuai kontrak.
- c. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tidak optimal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan; dan
- d. Pokja Pemilihan tidak cermat mempersiapkan dokumen pemilihan dan mengevaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi yang disampaikan peserta tender.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas PUTR untuk:
 - 1) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya;
 - 2) Menginstruksikan PPK untuk mematuhi proses persiapan pengadaan sesuai ketentuan;
 - 3) Menginstruksikan PPK, PPTK dan Pengawas SKPD untuk memeriksa volume pekerjaan sesuai kontrak; dan
 - 4) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp8.872.798.410,38 dan menyetorkan ke Kas Daerah.
- b. Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa supaya:
 - 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan; dan
 - 2) Menginstruksikan Pokja Pemilihan mengevaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi peserta tender sesuai ketentuan.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

13. Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi dan Landscape Wisma PKK Kabupaten PALI Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten PALI mengalokasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp137.376.149.150,00 dengan realisasi sebesar Rp135.285.705.657,00 atau 98,48%. Dari realisasi tersebut diantaranya direalisasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) berupa Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi senilai Rp4.925.230.000,00 dan Paket Pekerjaan Landscape Wisma PKK senilai Rp13.298.727.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.30 Sampel Paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dinas PUTR

No	Nama Paket	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)
1	Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi	PT KMA	4.925.230.000,00
2	Paket Pekerjaan Landscape Wisma PKK	CV API	13.298.727.000,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Proses pemilihan penyedia tidak sesuai dengan persyaratan pada dokumen pemilihan

Kedua penyedia yaitu PT KMA dan CV API seharusnya gugur dan tidak layak menang dalam proses tender. Hal tersebut diketahui berdasarkan evaluasi ulang atas proses pengadaan yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.31 Rincian Evaluasi Ulang atas Proses Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dinas PUTR

Uraian	Pekerjaan Pembangunan RSUD Talang Ubi	Pekerjaan Landscape Wisma PKK
Alasan Pelaksanaan Tender Ulang	-	Pelaksanaan tender untuk pekerjaan Landscape Wisma PKK dilakukan sebanyak dua kali karena proses tender sebelumnya dinyatakan gagal dengan penjelasan pada SPSE 'Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan'. Hasil komparasi Dokumen Pemilihan, KAK, HPS, DED Landscape Wisma PKK, Rancangan Kontrak antara paket tender gagal dan tender ulang menunjukkan tidak ada perbedaan.
Ketidaksesuaian dengan persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK)	PT KMA selaku calon penyedia tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan (Kurva S), dan tidak melampirkan izin usaha konstruksi berupa IJUK berlaku atau Sertifikat Standar terverifikasi dengan KBLI 41019.	CV API selaku calon penyedia tidak melampirkan persyaratan berikut pada dokumen penawarannya. a) Tidak melampirkan bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir. b) Tidak melampirkan bukti membuat jadwal waktu pelaksanaan (Kurva S). c) SKK yang dilampirkan adalah Petugas K3 Konstruksi berbeda dengan persyaratan LDP dan KAK yaitu SKK Ahli Muda K3 Konstruksi. d) SKK yang dilampirkan adalah Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung berbeda dengan persyaratan LDP dan KAK yaitu SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung. e) Pendidikan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran adalah Sarjana Teknik Arsitektur berbeda dengan persyaratan LDP dan KAK untuk SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung adalah Sarjana Teknik Sipil.

Uraian	Pekerjaan Pembangunan RSUD Talang Ubi	Pekerjaan <i>Landscape</i> Wisma PKK
		f) Tidak melampirkan bukti dukungan untuk pengalaman kerja yang sesuai persyaratan LDP dan KAK yaitu SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung. g) Tidak melampirkan daftar Riwayat hidup atau surat keterangan kerja dari pemberi kerja untuk pengalaman kerja Tenaga Administrasi/Keuangan dan Tukang.

Pokja Pemilihan sependapat setelah dilakukan revidi ulang seharusnya PT KMA dan CV API gugur saat evaluasi dan tender dinyatakan gagal, serta dilakukan tender ulang untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Lanjutan dan Pembangunan *Landscape* Wisma PKK.

Pokja Pemilihan tidak dapat menjelaskan lebih lanjut alasan tidak menggugurkan PT KMA dan CV API, serta tetap melanjutkan evaluasi hingga ditetapkan menjadi pemenang tender. Pokja Pemilihan hanya mengakui hal tersebut karena tidak teliti dalam mengevaluasi dokumen penawaran.

b. HPS terindikasi bocor ke calon penyedia dan terjadi pemahalan harga

1) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi

Analisis lebih lanjut atas dokumen HPS PPK dan Analisis Harga Satuan PT KMA yang diunggah ke LPSE menunjukkan terdapat kesamaan metadata *file* digital. Hal ini memperkuat indikasi HPS lanjutan pembangunan RSUD Talang Ubi tidak rahasia. Telaah lebih lanjut diketahui bahwa harga satuan 72 item pekerjaan pada dokumen penawaran PT KMA mendekati harga satuan pada HPS sebesar 98,50%. Diantara item tersebut, terdapat item pekerjaan *diesel generator set* (*genset*) yang ditawarkan dengan harga Rp1.555.764.160,00 dan pada dokumen HPS sebesar Rp1.579.456.000,00. Sedangkan, harga *genset* dari *supplier* penyedia adalah sebesar Rp820.000.000,00. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, PPK tidak dapat menunjukkan dokumen survei harga sebagai dasar penyusunan HPS untuk item pekerjaan *genset*. Atas indikasi kebocoran dan pengaturan HPS tersebut, terdapat pemahalan harga *genset* sebesar Rp735.764.160,00 sebagai berikut.

Tabel 1.32 Perbandingan Harga *Diesel Generator Set*

Uraian	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Harga Sesuai Bukti Pembelian (Rp)	Pemahalan (Rp)
<i>Diesel Generator Set</i>	1.555.764.160,00	820.000.000,00	735.764.160,00

2) Pembangunan *Landscape* Wisma PKK

Analisis lebih lanjut atas *file* HPS PPK dan Analisis Harga Satuan CV API yang diunggah ke LPSE menunjukkan terdapat kesamaan struktur dokumen seperti kolom dan baris yang disembunyikan dan yang ditampilkan. Selain itu, terdapat kesamaan sembilan digit angka di belakang koma untuk beberapa perhitungan item pekerjaan. Hal ini memperkuat indikasi HPS pembangunan *landscape* wisma PKK tidak rahasia. Selanjutnya, diketahui bahwa pemenang pengadaan terafiliasi dengan konsultan perencana yaitu CV APK. Dengan demikian CV API sebagai perusahaan yang tidak layak menang, terafiliasi dengan konsultan

perencana, dan mendapatkan rincian HPS PPK patut diduga memiliki keleluasaan memahalkan harga penawaran tanpa khawatir digugurkan Pokja Pemilihan. Sebagai contoh harga satuan tanaman rumput kucai di dokumen konsultan perencana dan HPS ditetapkan sebesar Rp59.943,75, dan di dokumen penawaran sebesar Rp58.995,00. Dari hasil konfirmasi dengan pedagang rumput diketahui harga rumput kucai berkisar antara Rp6.000,00 sampai Rp15.000,00. Selanjutnya, CV API menerangkan bahwa harga riil rumput kucai tersebut sebesar Rp40.000,00.

Atas indikasi kebocoran dan pengaturan HPS tersebut, terdapat pemahalan harga 13 jenis tanaman sebesar Rp274.245.735,07 dengan rincian pada **Lampiran 13** dan rekapitulasi pada tabel berikut.

Tabel 1.33 Perbandingan Harga 13 Jenis Tanaman

Uraian	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Harga Konfirmasi Supplier (Rp)	Pemahalan (Rp)
13 Jenis Tanaman	1.050.071.035,07	775.825.300,00	274.245.735,07

c. Pembayaran pekerjaan melebihi prestasi kerja pada RSUD Talang Ubi sebesar Rp2.262.639.919,52

Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan lanjutan pembangunan RSUD Talang Ubi tanggal 08 Maret 2025 bersama PPK, Pengawas, Penyedia, dan Inspektorat menunjukkan terdapat item pekerjaan berupa *genset* belum selesai dikerjakan sebesar Rp2.262.639.919,52 atau 50,99% dari nilai kontrak. Bobot fisik pekerjaan pada saat PHO tanggal 20 Desember 2024 hanya sebesar 49,01%, tetapi pekerjaan dianggap selesai 100% dan dibayar lunas pada tanggal 30 Desember 2024.

Permintaan keterangan kepada Kepala Dinas PUTR, PPK, dan Wakil PT KMA diketahui bahwa.

- 1) PPK menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 item pekerjaan genset dan aksesoris pendukung lainnya belum selesai dikerjakan dan sengaja melakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) dan pembayaran lunas 100%. PPK sengaja melakukan PHO pekerjaan meskipun pekerjaan yang selesai dikerjakan baru 49,01% karena penyedia jasa tidak memiliki cukup dana untuk membayar *genset*, dan *vendor genset* akan melakukan pengiriman genset setelah dilakukan pelunasan pembayaran *genset*. PPK tidak mengenakan denda atas keterlambatan pekerjaan tersebut. Kepala Dinas PUTR dalam keterangannya mengakui dan membenarkan pernyataan PPK.
- 2) Penyedia jasa menyatakan bahwa pembayaran *Down Payment* (DP) pemesanan *genset* dilaksanakan pada tanggal 08 November 2024. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2024 pihak *vendor genset* menyampaikan informasi melalui surat kepada penyedia jasa bahwa terdapat keterlambatan perakitan *genset* dikarenakan terdapat komponen *genset* masih dalam pengiriman dari Cina. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2025 pihak *vendor* menyampaikan informasi melalui surat kembali kepada penyedia jasa bahwa akan terjadi keterlambatan pengiriman dikarenakan masih adanya perbaikan pada mesin *genset*.

d. Volume pekerjaan tidak dikerjakan sesuai kontrak sebesar Rp474.419.175,93

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi dan Pembangunan *Landscape* Wisma PKK bersama KPA, Pengawas, Penyedia, dan Inspektorat menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp474.419.175,93 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.34 Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan

(dalam rupiah)

No	Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kurang Volume
1	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi	PT KMA	48.743.426,21
2	Pembangunan <i>Landscape</i> Wisma PKK	CV API	425.675.749,72
Jumlah			474.419.175,93

Kekurangan volume pekerjaan fisik berupa ukuran pekerjaan konstruksi gedung bangunan yang tidak sesuai kontrak. Atas nilai kekurangan volume tersebut telah dilakukan klarifikasi dengan PPK, Konsultan Pengawas, dan pihak Penyedia. Atas klarifikasi tersebut telah disepakati oleh PPK, Konsultan Pengawas, dan pihak Penyedia dan dimuat dalam Berita Acara Pembahasan Perhitungan Hasil Pemeriksaan Fisik.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - 1) Pasal 5 huruf (b) menyatakan bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
 - 2) Pasal 6 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
 - 3) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Barang/Jasa mematuhi etika:
 - a) Huruf (b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Huruf (c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Huruf (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa; dan

- d) Huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

4) Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal peserta pemilihan:

- a) Huruf (a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen pengadaan;
- b) Huruf (b) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; dan
- c) Huruf (c) terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam pemilihan penyedia.

Peserta pemilihan dikenakan sanksi administratif.

- c. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Angka IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi Point 4.2.7 menyatakan bahwa pokja pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- a) Evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
- b) Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

2) Indikasi persekongkolan antar peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- b) Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;
- c) Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan
- e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

d. Dokumen Pemilihan:

1) Bab III Instruksi Kepada Peserta:

- a) Huruf A.5 tentang Larangan Pertentangan Kepentingan Poin 5.1 menyatakan bahwa para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.

- b) Huruf A.6 tentang Peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam menyatakan bahwa sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila:
- (1) Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (2) Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; dan
 - (3) Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia.
- e. Klausul kontrak masing-masing pekerjaan yang mengatur kewajiban penyedia dan volume pekerjaan.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Pemkab PALI kehilangan kesempatan memperoleh barang dengan harga yang bersaing dan kompetitif;
- b. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan pemahalan harga sebesar Rp1.484.429.071,00 (Rp735.764.160,00 + Rp48.743.426,21 + Rp274.245.735,07 + Rp425.675.749,72);
- c. Nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Gedung dan Bangunan lebih saji sebesar Rp1.484.429.071,00; dan
- d. Risiko meningkatnya belanja daerah di masa depan untuk memperbaiki bangunan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas PUTR selaku PA tidak mematuhi ketentuan pembayaran atas Belanja Modal dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan kerjanya;
- b. Kepala Bidang Cipta Karya selaku KPA merangkap PPK tidak mematuhi ketentuan dalam menjaga kerahasiaan dokumen HPS dan ketentuan membayar sesuai volume pekerjaan terpasang.
- c. Pokja Pemilihan III untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi dan Pembangunan *Landscape* Wisma PKK tidak mematuhi ketentuan dalam mengevaluasi penawaran peserta tender.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas PUTR untuk:
 - 1) Mematuhi ketentuan pembayaran atas Belanja Modal dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan kerjanya;
 - 2) Menginstruksikan KPA merangkap PPK supaya mematuhi proses persiapan pengadaan sesuai ketentuan, memeriksa volume pekerjaan sesuai kontrak dan memproses pembayaran sesuai prestasi kerja; dan

3) Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan pemahalan harga sebesar Rp1.484.429.071,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

- b. Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa supaya menginstruksikan Pokja Pemilihan mengevaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi peserta tender sesuai ketentuan.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

14. Perencanaan, Pemilihan Penyedia, dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten PALI Tidak sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten PALI mengalokasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp137.376.149.150,00 dengan realisasi sebesar Rp135.285.705.657,00 atau 98,48%. Diantaranya sebesar Rp9.869.155.000,00 merupakan realisasi Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pekerjaan tersebut dilakukan tender sebanyak dua kali, setelah tender pertama dinyatakan gagal. Tender kedua menetapkan CV Chy sebagai pemenang tender dan pelaksana pekerjaan dengan kontrak Nomor 08/Perpus/PPK-SPK/GEDUNG/IV/2024 senilai Rp9.869.155.000,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya serta permintaan keterangan dengan pihak-pihak terkait diketahui permasalahan permasalahan sebagai berikut.

a. Calon Penyedia Terindikasi Terlibat Dalam Penyusunan HPS

Hal tersebut diketahui berdasarkan kronologis kejadian sebagai berikut.

- 1) Pada tanggal 02 Januari 2024 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, PPK, dan Konsultan Perencana melakukan rapat terkait pembahasan finalisasi *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten PALI. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sdr. OSR dari CV Chy selaku calon penyedia. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan, Sdr. OSR merupakan calon penyedia yang akan mengerjakan Pembangunan Gedung Perpustakaan. Pada rapat tersebut, Sdr. OSR menyatakan harga satuan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan terlalu rendah terutama harga satuan pekerjaan *bore pile*.
- 2) Selanjutnya, PPK melakukan perubahan HPS yang digunakan untuk tender kedua dengan mengakomodasi permintaan Sdr. OSR atas persetujuan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Analisis atas HPS PPK menunjukkan bahwa terdapat perubahan luas bangunan dan harga satuan. PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan menyatakan bahwa perubahan luas bangunan dan pengurangan item pekerjaan dilakukan untuk mengakomodasi kenaikan harga satuan. Lebih lanjut, PPK melakukan komunikasi dengan Sdr. OSR mengenai harga satuan pekerjaan pada HPS tender kedua. Setelah ada persetujuan dari Sdr. OSR, HPS baru di proses PPK untuk tender kedua. Analisis atas HPS PPK yang digunakan pada tender pertama dan tender kedua menunjukkan ada perubahan harga satuan yang signifikan pada item pekerjaan berikut.

Tabel 1.35 Perbandingan Perubahan Harga Satuan Pekerjaan

(dalam rupiah)

No	Item Pekerjaan	HPS I Tanggal 23 Januari 2024	HPS II Tanggal 8 Maret 2024	Selisih
1	Tiang Bor Beton, Diameter 500 mm	999.687,18	2.371.581,06	1.371.893,88
2	Bekisting Plat Lantai 2	244.937,00	489.874,00	244.937,00
3	Pek. Pas. Railing tangga bahan pipa stainless steel + kaca 5 mm	909.328,70	2.871.976,25	1.962.647,55

Analisis lebih lanjut atas, dokumen *Bill of Quantity* (BOQ) Dokumen Tender, dokumen *excel* HPS PPK dan dokumen *excel* Analisis Harga Satuan CV Chy yang diunggah ke LPSE menunjukkan terdapat kesamaan struktur dokumen seperti baris yang disembunyikan dan yang ditampilkan. Selain itu, terdapat kesamaan lima digit angka di belakang koma untuk beberapa perhitungan item pekerjaan. Hal ini menunjukkan indikasi CV Chy memiliki dokumen HPS PPK dan menggunakannya sebagai dokumen penawaran. Hal ini memperkuat indikasi adanya komunikasi dan kesepakatan antara PPK dan Sdr. OSR selaku wakil CV Chy mengenai perubahan nilai HPS, serta memberikan keistimewaan kepada CV Chy selaku calon penyedia yang tidak dimiliki oleh calon penyedia lain.

b. Proses Pemilihan Penyedia Tidak Sesuai dengan Persyaratan pada Dokumen Pemilihan

Hasil pemeriksaan atas proses pemilihan penyedia pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah dan permintaan keterangan kepada Pokja Pemilihan menunjukkan hal-hal berikut.

- 1) Pelaksanaan tender untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan daerah dilakukan sebanyak dua kali. Tender pertama dinyatakan gagal karena tidak terdapat peserta tender yang menyampaikan dokumen kualifikasi.
- 2) Hasil evaluasi ulang atas dokumen kualifikasi dan penawaran yang disampaikan CV Chy selaku pemenang tender ulang menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Lembar Data Pemilihan (LDP) antara lain:
 - a) Tidak mengunggah IUJK yang masih berlaku/Sertifikat Standar terverifikasi untuk KBLI 41016;
 - b) Tidak mengunggah SBU;
 - c) Tidak menyampaikan bukti kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir; dan
 - d) Tidak menyampaikan pengalaman kerja untuk personel dengan jabatan Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung sesuai LDP dan KAK.
- 3) Pokja Pemilihan memahami dan sependapat setelah dilakukan revidi ulang seharusnya CV Chy digugurkan pada saat evaluasi penawaran. Pokja Pemilihan menyatakan seharusnya tender dinyatakan gagal, dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah dilakukan tender ulang. Pokja Pemilihan tidak dapat menjelaskan alasan tidak menggugurkan CV Chy dan tetap melanjutkan evaluasi hingga ditetapkan menjadi pemenang tender.

c. Pemahalan harga sebesar Rp1.675.342.528,53

Hal tersebut diketahui berdasarkan komparasi analisa harga satuan dokumen penawaran CV Chy, HPS tender pertama, dan HPS tender kedua. Berdasarkan komparasi tersebut, terdapat harga satuan 55 item yang mengalami perubahan harga dari HPS tender pertama dan kedua dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.36 Perbandingan Perubahan Harga Satuan Item Pekerjaan pada HPS Tender dan Kontrak

(dalam rupiah)

Jumlah Item Pekerjaan	Total Harga Satuan Item Pekerjaan pada HPS Tender Pertama	Total Harga Satuan Item Pekerjaan pada HPS Tender Kedua	Total Harga Satuan Item Pekerjaan pada Harga Kontrak	Total Selisih Harga Satuan Item Pekerjaan Kontrak dengan Harga HPS Tender Pertama	Selisih Harga setelah penyesuaian kurang volume (<i>casing bore pile</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (4 – 2)	(6)
55	3.973.649.110,63	5.810.249.438,93	6.407.653.499,55	2.434.004.388,92	1.675.342.528,53

Permintaan keterangan kepada PPK Pembangunan Gedung Perpustakaan, Konsultan Perencana, dan Sdr. OSR selaku wakil CV Chy diketahui hal berikut.

- 1) PPK menjelaskan bahwa harga satuan pekerjaan pada HPS tender pertama diambil dari perhitungan Konsultan Perencana. Dalam melakukan perubahan harga di HPS kedua, PPK mengurangi luas bangunan dan menghapus pekerjaan-pekerjaan minor agar dapat menaikkan harga satuan pekerjaan pada beberapa item pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan Sdr. OSR dan atas persetujuan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 2) Konsultan Perencana menyatakan bahwa harga satuan telah dibuat berdasarkan kebutuhan dan perhitungan yang memadai, serta telah mempertimbangkan keamanan struktur bangunan;
- 3) Sdr. OSR menyatakan bahwa harga satuan pekerjaan pada saat rapat tanggal 2 Januari 2024 dan pada tender pertama terlalu murah/rendah terutama untuk harga pekerjaan *bore pile*. Adapun alasan Sdr. OSR menyatakan harga tersebut terlalu rendah didasarkan pada pengalaman pelaksanaan pekerjaan selama ini. Sdr. OSR menyatakan harga satuan pekerjaan yang terlalu rendah pada tender pertama tersebut telah berubah pada tender kedua. Sehingga Sdr. OSR memasukkan penawaran pada tender kedua dan ditetapkan sebagai pemenang.

Berdasarkan analisis perubahan HPS dan harga satuan pekerjaan pada kontrak serta keterangan PPK, Konsultan Perencana, dan Sdr. OSR menunjukkan adanya indikasi pemahalan harga satuan pekerjaan. Pemahalan harga satuan pekerjaan ini dilakukan untuk memenuhi permintaan Sdr. OSR selaku calon penyedia. Perubahan harga satuan tersebut tidak didasarkan kepada kebutuhan maupun pertimbangan teknis. Dalam rangka mengakomodasi permintaan Sdr. OSR, PPK mengurangi luas bangunan dan pekerjaan minor, yang apabila tidak diubah akan berdampak pada penggunaan ruangan perpustakaan serta umur rencana bangunan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada analisa harga satuan pekerjaan *bore pile* di HPS tender kedua terdapat pekerjaan *casing bore pile*. Pemeriksaan terhadap dokumentasi pekerjaan menunjukkan tidak terdapat pekerjaan *casing bore pile* tersebut. Hal ini memperkuat indikasi bahwa senyatanya *casing bore pile* tersebut

ditambahkan hanya untuk menaikkan harga satuan pekerjaan *bore pile* tetapi tidak untuk dilaksanakan.

Dengan demikian, kenaikan harga satuan pekerjaan atas 55 item pekerjaan tersebut berindikasi merugikan daerah karena tidak sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan melainkan untuk mengakomodasi kepentingan calon penyedia. Adapun rincian tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

d. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.091.351.672,69

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik atas pekerjaan belanja kontraktual pembangunan gedung perpustakaan daerah bersama PPK, Pengawas, Penyedia, dan Inspektorat menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.091.351.672,69. Kekurangan volume pekerjaan fisik tersebut berupa ukuran dan jumlah item barang pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Perpustakaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak.

Atas nilai kekurangan volume tersebut telah dilakukan klarifikasi perhitungan kekurangan volume bersama PPK, Konsultan Pengawas, dan CV Chy. Atas kekurangan volume tersebut telah disepakati oleh PPK, Konsultan Pengawas, dan CV Chy dan telah dimuat dalam Berita Acara Pembahasan Perhitungan Hasil Pemeriksaan Fisik. Adapun rincian tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - 1) Pasal 5 huruf (b) menyatakan bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
 - 2) Pasal 6 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
 - 3) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Barang/Jasa mematuhi etika:
 - a) Huruf (b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Huruf (c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Huruf (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa; dan
 - d) Huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
 - 4) Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal peserta pemilihan:

- a) Huruf (a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen pengadaan;
- b) Huruf (b) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; dan
- c) Huruf (c) terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam pemilihan penyedia.

Peserta pemilihan dikenakan sanksi administratif.

- b. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Angka IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi Point 4.2.7 menyatakan bahwa pokja pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- a) Evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
- b) Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

- 2) Indikasi persekongkolan antar peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- b) Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;
- c) Adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan
- e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

- c. Dokumen Pemilihan:

- 1) Bab III Instruksi Kepada Peserta:

- a) Huruf A.5 tentang Larangan Pertentangan Kepentingan Poin 5.1 menyatakan bahwa Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Huruf A.6 tentang Peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam menyatakan bahwa Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila:

- (1) Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- (2) Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; dan
- (3) Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Pemkab PALI kehilangan kesempatan memperoleh harga penawaran pekerjaan yang bersaing dan kompetitif;
- b. Kelebihan pembayaran atas pemahalan harga satuan pekerjaan dan kekurangan volume sebesar Rp2.766.694.201,22 (Rp1.675.342.528,53 + Rp1.091.351.672,69);
- c. Nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar lebih dari sebesar Rp2.766.694.201,22; dan
- d. Risiko meningkatnya belanja daerah di masa depan untuk memperbaiki bangunan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku PA tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan kerjanya;
- b. PPK paket pekerjaan dalam menyusun HPS tidak berpedoman dengan peraturan pengadaan barang/jasa, dan tidak cermat dalam memeriksa volume pekerjaan sesuai kontrak;
- c. Pokja Pemilihan tidak cermat dalam mengevaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk:
 - 1) Mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan kerjanya;
 - 2) Menginstruksikan PPK dalam menyusun HPS berpedoman dengan peraturan pengadaan barang/jasa dan memeriksa volume pekerjaan sesuai kontrak; dan
 - 3) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.766.694.201,22 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- b. Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa supaya menginstruksikan Pokja Pemilihan mengevaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi peserta tender sesuai ketentuan.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

15.Denda Keterlambatan Belum Dikenakan terhadap Enam Paket Pekerjaan Kontraktual di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pemerintah Kabupaten PALI mengganggu Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal	438.072.225.853,00	426.818.764.718,00	97,43
2.	Belanja Barang dan Jasa	621.389.040.356,36	565.408.834.081,00	90,99

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak, pemeriksaan fisik pekerjaan, laporan progres fisik dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) pada Dinas PUTR menunjukkan terdapat enam paket pekerjaan fisik yang terlambat dan belum dikenakan denda seluruhnya sebesar Rp286.433.086,51 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.38 Rincian Paket Pekerjaan yang Belum Dikenakan Denda Keterlambatan

No.	Paket Pekerjaan	Penyedia	Jumlah Hari Keterlambatan	Denda Keterlambatan (Rp)
A	Belanja Barang dan Jasa			
1	Rehab Total Rumah Dinas Bupati	CV FRU	56	55.504.836,29
Jumlah (A)				55.504.836,29
B	Belanja Modal			
1	Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi	PT KMA	88	199.112.313,36
2	Pematangan Lahan OPD	CV DMB	16	6.838.606,75
3	Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah Kawasan Kantor DPRD	CV RJ	41	12.139.314,71
4	Lanjutan Peningkatan Jalan Penantian - Karang Tanding	CV DW	17	9.998.013,23
5	Peningkatan Jalan Tanah Abang - Purun	PT KJP	15	2.840.002,17
Jumlah (B)				230.928.250,22
Total Jumlah (A + B)				286.433.086,51

Nilai denda keterlambatan tersebut telah dilakukan pembahasan dan disepakati dengan PPK, PPTK, Pengawas SKPD, dan pihak Penyedia serta diketahui oleh Kepala Dinas PUTR.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada:
 - Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - Huruf a, pelaksanaan kontrak;
 - Huruf b, kualitas barang/jasa;
 - Huruf c, ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - Huruf d, ketepatan waktu penyerahan; dan

e) Huruf e, ketepatan tempat penyerahan.

2) Pasal 78, pada:

- a) Ayat (3) huruf f yang menyatakan bahwa dalam hal Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif; dan
- b) Ayat (5) huruf f yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

b. Klausul masing-masing kontrak mengenai denda keterlambatan.

Permasalahan di atas mengakibatkan kekurangan penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp286.433.086,51.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas PUTR selaku PA kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran Belanja Pemeliharaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. PPK, PPTK dan Pengawas SKPD tidak mematuhi ketentuan tentang pengenaan sanksi denda keterlambatan pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar memerintahkan Kepala Dinas PUTR untuk:

- a. Lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran Belanja Pemeliharaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menginstruksikan kepada PPK, PPTK, dan Pengawas SKPD mematuhi ketentuan tentang pengenaan sanksi denda keterlambatan pekerjaan; dan
- c. Memproses pengenaan denda keterlambatan kepada penyedia sebesar Rp286.433.086,51 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

C. Aset

1. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten PALI Tidak Memadai

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI menyajikan saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.702.796.368.940,27 (setelah dikurangi akumulasi penyusutan) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.39 Rincian Aset Tetap TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/(Turun)
1	Tanah	108.354.966.462,50	102.796.296.657,50	5.558.669.805,00
2	Peralatan dan Mesin	522.379.504.889,12	518.621.424.102,40	3.758.080.786,72
3	Gedung dan Bangunan	888.460.748.065,64	668.474.282.746,48	219.986.465.319,16
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.084.412.237.080,37	2.907.611.556.491,86	176.800.680.588,51

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/(Turun)
5	Aset Tetap Lainnya	50.173.404.912,78	49.842.565.130,18	330.839.782,60
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.205.738.466,11	194.968.118.765,02	(166.762.380.298,91)
7	Akumulasi Penyusutan	(1.979.190.230.936,25)	(1.625.339.477.616,51)	(353.850.753.319,74)
	Jumlah	2.702.796.368.940,27	2.816.974.766.276,93	(114.178.397.336,66)

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten PALI Nomor 46.B/LHP/XVIII.PLG/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 mengungkapkan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu:

- Aset Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 148 bidang tanah;
- Pengelolaan Aset Peralatan dan Mesin Tidak Tertib; dan
- Pengelolaan Aset Bangunan/Gedung Pasar tidak tertib.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir agar memerintahkan:

- Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah;
- Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk segera memproses SKTJM atau SK Pembebanan yang sah atas kendaraan roda dua yang hilang;
- Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang untuk:
 - Memproses bukti kepemilikan atas 148 bidang tanah;
 - Melakukan inventarisasi untuk memastikan keberadaan atas 114 unit kendaraan dan 130 unit kendaraan dalam kondisi rusak berat;
 - Menarik kembali kendaraan dinas yang telah habis masa pinjam pakai dan dua kendaraan yang dipinjam tanpa dilengkapi berita acara pinjam pakai;
 - Menyerahkan aset SMAN kepada Pemerintah Provinsi; dan
 - Melengkapi pemanfaatan aset berupa pasar oleh pihak ketiga dengan perjanjian kerja sama pemanfaatan.

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, tetapi belum optimal antara lain:

- Telah terbit 31 sertifikat bidang tanah sedangkan 117 bidang tanah masih dalam proses pengusulan sertifikat;
- Perjanjian kerjasama pemanfaatan aset berupa pasar menunjukkan masih belum ditindaklanjuti;
- Berdasarkan hasil penelusuran KIB menunjukkan bahwa masih terdapat aset SMAN yang belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap dengan uraian sebagai berikut.

a. Terdapat Aset Tetap yang memiliki masa manfaat tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten PALI

Pemeriksaan atas Kartu Inventaris Barang (KIB) pada aplikasi SIMDA BMD tahun 2024 diketahui terdapat Aset Tetap yang memiliki masa manfaat tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemkab PALI, yang terdiri atas Aset yang tidak memiliki masa manfaat, Aset yang memiliki masa manfaat kurang dari kebijakan akuntansi, dan Aset yang memiliki masa manfaat lebih dari kebijakan akuntansi. Rekapitulasi Aset Tetap tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.40 Rincian Aset Tetap dengan Masa Manfaat Tidak Sesuai Kebijakan Akuntansi

No	Jenis Aset Tetap	Tidak Memiliki Masa Manfaat		Masa Manfaat Kurang dari Kebijakan Akuntansi		Masa Manfaat Melebihi Kebijakan Akuntansi	
		Unit	Nilai Perolehan (Rp)	Unit	Nilai Perolehan (Rp)	Unit	Nilai Perolehan (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.029	17.156.825.771,00	1.728	128.406.750.785,87	2.424	15.389.857.330,00
2	Gedung dan Bangunan	45	8.422.097.185,00	0	0,00	146	168.835.452.323,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.296	41.109.507.686,73	27	5.763.070.128,00	112	2.016.081.550.921,85

Masalah tersebut berdampak pada perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan menjadi tidak akurat. Sebagai contoh pada aset dengan masa manfaat melebihi kebijakan akuntansi terdapat Aset Tetap Jalan yang seharusnya disusutkan selama 120 bulan (10 tahun), namun dalam aplikasi SIMDA BMD disusutkan selama 600 bulan (50 tahun), yang mengakibatkan nilai Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan terlalu kecil atau kurang saji. Dampak lebih saji/kurang saji Aset Tetap dengan masa manfaat tidak sesuai kebijakan akuntansi pada perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.41 Dampak salah saji Aset Tetap dengan Masa Manfaat Tidak Sesuai Kebijakan Akuntansi terhadap Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

No	Jenis Aset Tetap	Tidak Memiliki Masa Manfaat		Masa Manfaat Kurang dari Kebijakan Akuntansi		Manfaat Melebihi Kebijakan Akuntansi	
		Unit	Kurang Saji (Rp)	Unit	Lebih Saji (Rp)	Unit	Kurang Saji (Rp)
A	Akumulasi Penyusutan						
1	Peralatan dan Mesin	7.029	(13.457.374.160,62)	1.728	58.423.171.573,75	2.424	(3.119.830.315,43)
2	Gedung dan Bangunan	45	(465.179.056,13)	0	0,00	146	(253.273.503,94)
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.296	(5.994.993.305,31)	27	671.213.434,83	112	(14.991.840.125,34)
B	Beban Penyusutan						
1	Peralatan dan Mesin	7.029	(3.365.959.242,00)	1.728	9.982.241.473,34	2.424	(2.127.595.631,43)
2	Gedung dan Bangunan	45	(170.404.352,30)	0	0,00	146	(84.246.020,66)
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.296	(1.363.510.142,17)	27	115.321.048,20	112	(55.242.487.858,62)

Berdasarkan hasil permintaan keterangan dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kabupaten PALI dan Tim Teknis SIMDA BMD BPKP diketahui bahwa permasalahan di atas terjadi karena aplikasi SIMDA BMD Pemkab PALI memiliki beberapa parameter masa manfaat. Hal ini disebabkan admin SIMDA BMD tidak menghapus parameter masa manfaat berdasarkan kebijakan akuntansi yang lama,

sebelum menginput parameter baru berdasarkan kebijakan akuntansi yang baru.

Selanjutnya untuk permasalahan penambahan masa manfaat melebihi kebijakan akuntansi pada kapitalisasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Aset Gedung dan Bangunan, Tim Teknis SIMDA BMD BPKP tidak dapat menjelaskan penyebab aplikasi SIMDA BMD yang tidak dapat menghitung tambahan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi. Akan tetapi, kendala tersebut dapat diatasi dengan perbaikan secara manual untuk setiap aset kapitalisasi. Berdasarkan hasil perbaikan tersebut, dilakukan jurnal koreksi pada nilai Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

b. Terdapat Aset Tetap dengan nilai perolehan dibawah nilai satuan kapitalisasi

Hal tersebut diketahui berdasarkan analisis *database* Aset Tetap. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemkab PALI yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 57 Tahun 2022 diketahui bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan adalah nilai per unitnya sebesar Rp10.000.000,00 ke atas. Penerapan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut berlaku mulai penyusunan laporan keuangan tahun 2022.

Terdapat 38.377 item aset tetap dengan nilai perolehan dibawah nilai kapitalisasi tetapi termasuk dalam aset dengan rekapitulasi pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.42 Rincian Aset Tetap dengan Nilai Perolehan Dibawah Nilai Satuan Kapitalisasi

Jenis Aset Tetap	Tahun Perolehan	Jumlah Aset	Nilai Perolehan (Rp)
Gedung dan Bangunan	2024	1	5.877.000,00
Peralatan dan Mesin	1974 s.d 2024	38.376	24.352.233.734,00
Jumlah		38.377	24.358.110.734,00

Seharusnya aset tetap senilai Rp24.358.110.734,00 tersebut tidak dimasukkan ke dalam neraca melainkan menjadi aset tetap *ekstrakomptabel*. Atas nilai tersebut, dilakukan perbaikan pada *database* SIMDA BMD dan jurnal koreksi pada Aset Tetap Gedung Bangunan dan Aset Peralatan dan Mesin.

c. Terdapat Aset Tetap yang Belum Dikapitalisasi ke Aset Tetap Induknya

Pemeriksaan atas Kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2024 diketahui terdapat aset tetap yang berupa rehab dan pekerjaan lanjutan belum dilakukan kapitalisasi dengan Aset Tetap Induknya. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1.43 Rincian Aset Tetap yang Belum Dikapitalisasi ke Aset Tetap Induknya

Jenis Aset Tetap	Tahun Perolehan	Jumlah Aset	Nilai Perolehan
Gedung dan Bangunan	2006 s.d 2024	101	39.589.447.076,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2005 s.d 2024	111	93.382.772.767,47
Jumlah		212	132.972.219.843,47

Rincian Aset Tetap tersebut pada **Lampiran 16** dan **Lampiran 17**.

Seharusnya, Aset Tetap senilai Rp132.972.219.843,47 diatribusikan ke aset tetap induknya atau menjadi beban jika nilai pemeliharaannya dibawah persentase yang

diatur di dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten PALI.

d. Pencatatan Aset Tetap pada KIB belum didukung informasi yang lengkap

1) Aset Tetap Tanah

(a) Aset Tetap Tanah Bernilai Rp0,00

Berdasarkan hasil pengujian KIB A Pemerintah Kabupaten PALI diketahui bahwa terdapat aset tetap tanah pada KIB A yang tercatat dengan nilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.44 Rincian Aset Tetap Tanah dengan Nilai Rp0,00

ID Pemda	Nama SKPD	Tanggal Perolehan	Nilai (Rp)
12020010011000003	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26 Februari 2016	0,00

(b) Aset Tetap Tanah yang tidak didukung dengan informasi nomor sertifikat

Berdasarkan hasil pengujian KIB A Pemerintah Kabupaten PALI diketahui bahwa terdapat aset tetap tanah pada KIB A yang tercatat belum didukung dengan informasi sertifikat kepemilikan sebanyak 127 ID Pemda dengan rincian pada **Lampiran 18**.

2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak didukung informasi nomor rangka/mesin/nomor polisi/nomor BPKB

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut pada KIB B Pemerintah Kabupaten PALI diketahui bahwa masih terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak didukung informasi nomor rangka/mesin/nomor polisi/nomor BPKB sebanyak 31 unit hasil pengadaan tahun 2003 s.d. 2024, dengan rincian pada **Lampiran 19**.

3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(a) Aset Tetap Gedung dan Bangunan Bernilai Rp0,00

Berdasarkan hasil pengujian KIB C Pemerintah Kabupaten PALI diketahui bahwa terdapat aset tetap tanah pada KIB A yang tercatat dengan nilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.45 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan Nilai Rp0,00

ID Pemda	Nama SKPD	Tanggal Perolehan	Nilai (Rp)
07010010013000044	Dinas Kesehatan	31 Desember 2012	0,00

(b) Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tidak Didukung dengan Informasi Lokasi

Hasil pemeriksaan data realisasi tersebut pada KIB C diketahui terdapat pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak didukung informasi alamat yang jelas sebanyak 261 unit hasil pengadaan dari tahun 2013 s.d. 2024 dengan rincian pada **Lampiran 20**.

4) Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Hasil pemeriksaan data realisasi tersebut pada KIB D diketahui terdapat pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak didukung informasi alamat yang jelas sebanyak 2.948 unit hasil pengadaan dari tahun 2005 s.d. 2024 pada **Lampiran 21**.

e. Terdapat 113 Unit Kendaraan Dinas yang Tidak Diketahui Keberadaannya

Berdasarkan hasil pemeriksaan kendaraan dinas yang dilaksanakan bertahap dari tanggal 26 April s.d 2 Mei 2025 diketahui hal berikut.

- 1) Terdapat 87 kendaraan dinas tidak hadir saat pemeriksaan kendaraan dan tidak ada informasi dari SKPD terkait dengan rincian pada **Lampiran 22**.
- 2) Terdapat sembilan kendaraan dinas yang masih tercatat di KIB tapi dinyatakan hilang oleh Kepala SKPD. Dari jumlah tersebut, sebanyak empat kendaraan dinas belum dilakukan proses tuntutan ganti rugi.
- 3) Terdapat 17 kendaraan dinas yang masih tercatat di KIB dan berasal dari pelimpahan Aset Kabupaten Muara Enim saat Kabupaten PALI berdiri tapi tidak diketahui keberadaannya berdasarkan pernyataan Kepala SKPD.

Rincian Aset yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya terdapat pada **Lampiran 23**.

f. Pemanfaatan kendaraan melalui pinjam pakai belum didukung dengan perjanjian yang memadai

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Hasil pemeriksaan fisik kendaraan pinjam pakai menunjukkan bahwa terdapat kendaraan yang dipinjam-pakaikan ke instansi lain yang dapat dihadirkan dan dalam kondisi baik. Namun, hasil penelaahan atas dokumentasi pinjam pakai kendaraan tersebut menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- 1) Terdapat 75 kendaraan dinas pinjam pakai pada enam SKPD kepada instansi vertikal dan lembaga organisasi kemasyarakatan dengan perjanjian pinjam pakai yang sudah habis masa pinjam pakai.

Tabel 1.46 Rincian Kendaraan Dinas Pinjam Pakai yang Telah Habis Masa Pinjam Pakai

SKPD	Jumlah Aset	Nilai Perolehan (Rp)
Bagian Umum	35	4.712.046.600,00
Dinas Kesehatan	5	1.825.098.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	32	1.449.766.718,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	599.500.000,00
Inspektorat	1	309.300.000,00
Sekretariat DPRD	1	24.085.000,00
Jumlah	75	8.919.796.318,00

Rincian pada **Lampiran 24**.

- 2) Terdapat dua kendaraan dinas pinjam pakai pada Sekretariat DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup kepada instansi vertikal dan lembaga organisasi kemasyarakatan yang tidak didukung dengan perjanjian pinjam pakai. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.47 Rincian Aset Tetap Kendaraan Dinas Pinjam Pakai yang Tidak Didukung Perjanjian Pinjam Pakai

ID Pemda	Nama SKPD	Tanggal Perolehan	Nilai (Rp)
16010010012000571	Dinas Lingkungan Hidup	07/12/2018	42.915.066,00
01010010012000012	Sekretariat DPRD	09/04/2014	17.250.200,00

- 3) Terdapat 71 unit pinjam pakai barang milik daerah di luar Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan tidak termasuk ke dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan rekapitulasi pada tabel berikut.

Tabel 1.48 Rincian Aset Tetap Kendaraan Dinas Pinjam Pakai di Luar Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

SKPD	Jumlah Aset	Nilai Perolehan (Rp)
Bagian Umum	35	621.776.500,00
Dinas Kesehatan	2	840.300.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	34	1.658.581.784,00
Jumlah	71	3.120.658.284,00

Adapun rincian aset tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

g. Terdapat Kendaraan Dinas Belum Dibayar Pajaknya dan STNK Hilang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kendaraan Dinas diketahui bahwa terdapat aset kendaraan bermotor yang belum dibayar pajaknya dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hilang dengan rekapitulasi pada tabel berikut.

Tabel 1.49 Rincian Kendaraan Dinas yang Belum Bayar Pajak dan STNK Hilang

SKPD	Jumlah Aset	Nilai Perolehan (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2	210.715.200,00
BPBD	4	96.650.000,00
BPKAD	5	1.131.974.050,00
Bagian Umum	76	9.626.215.386,00
Dinas Kesehatan	106	10.944.433.202,00
Dinas Ketahanan Pangan	3	265.050.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	215.500.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2	638.730.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	44	1.853.882.708,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2	378.037.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6	3.345.931.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	20.376.500,00
Dinas Pendidikan	10	113.175.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	787.773.890,00
Dinas Pertanian	88	4.113.392.865,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	1.111.160.000,00
Dinas Sosial	2	60.000.000,00
Kecamatan Penukal	2	31.396.000,00
Kecamatan Talang Ubi	2	36.595.000,00
Kelurahan Talang Ubi	1	7.500.000,00
Jumlah	363	34.988.488.301,00

Adapun rincian aset kendaraan bermotor yang belum dibayar pajaknya dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hilang dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

h. Aset Peralatan dan Mesin yang berada di kompleks rumah dinas Bupati dan rumah dinas Wakil Bupati (Sewa) berpotensi hilang

Hasil pemeriksaan fisik tanggal 4 Mei 2025 bersama Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bidang Aset Daerah BPKAD, dan Inspektorat atas Aset Peralatan dan Mesin yang berada di kompleks rumah dinas Bupati dan rumah dinas Wakil Bupati menunjukkan hal-hal berikut.

- 1) Rumah Dinas Bupati terakhir dihuni pada tahun 2020, sedangkan rumah dinas Wakil Bupati (sewa) terakhir dihuni pada bulan Februari 2025;
- 2) Pengurus Barang tidak pernah membuat Kartu Inventaris Ruangan untuk seluruh aset tetap peralatan di mesin di Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- 3) Tim hanya melakukan inventaris untuk peralatan dan mesin pada di kompleks rumah dinas Bupati dan rumah dinas Wakil Bupati dengan rincian pada **Lampiran 27**. Namun, hingga berakhirnya pemeriksaan tim tidak menerima data inventaris barang sebagai dasar analisa kesesuaian jenis, jumlah peralatan dan mesin dengan kondisi riil nya.

Hasil konfirmasi dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menunjukkan bahwa kedua rumah dinas tersebut sudah lama tidak dihuni dan tidak ada berita acara serah terima dari pejabat yang menghuni atas inventarisasi Aset Peralatan dan Mesin yang berada di rumah dinas.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD diketahui bahwa pengelolaan aset pada Kabupaten PALI belum optimal dilakukan karena keterbatasan jumlah personel di Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Lebih lanjut, hasil analisis dokumen peta jabatan BPKAD Kabupaten PALI menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pegawai khususnya di Subbidang Pengelolaan Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.50 Rincian Peta Jabatan Subbidang Pengelolaan Aset Daerah

JFU/JFT	Kelas Jabatan	Bezetting	Kebutuhan	-/+
Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1	1	0
Analisis Aset Daerah	7	0	1	-1
Kustodian Barang Milik Negara	7	0	1	-1
Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5	0	1	-1
Pengelola Laporan Keuangan	6	0	1	-1

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan baru satu jabatan fungsional yang terisi dari lima jabatan fungsional yang dibutuhkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis data pendidikan ASN dan PPPK pada Pemerintah Kabupaten menunjukkan sebaran pegawai dengan latar pendidikan Diploma III atau Strata 1 Akuntansi di SKPD terbanyak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.51 Rekapitulasi Sebaran ASN dan PPPK Diploma III dan Strata I Akuntansi

No	SKPD	ASN		PPPK		JUMLAH
		S1	DIII	S1	DIII	
1	Inspektorat	14	0	0	0	14
2	Badan Pendapatan Daerah	0	6	0	0	6
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2	0	1	0	3
4	Sekretariat Daerah	1	0	2	0	3
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	0	0	0	2
6	Dinas Perikanan	1	0	1	0	2
7	BKPSDM	0	0	3	1	4
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	0	1	1	2

Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah ASN dan PPPK dengan latar belakang S1/DIII Akuntansi paling banyak berada di Inspektorat dan Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan BPKAD berjumlah tiga orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya SDM di BPKAD Kabupaten PALI.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I. 08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, pada:
 - 1) Lampiran 01.8 pada definisi Aset Tetap menyebutkan bahwa Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
 - 2) Paragraf 15 menyebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - 3) Paragraf 18 menyebutkan bahwa pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - 4) Paragraf 19 menyebutkan bahwa saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

5) Paragraf 20 menyebutkan bahwa Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

6) Paragraf 49 menyebutkan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

b. Buletin Teknis SAP Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua pada BAB VI Akuntansi Aset Tetap Lainnya 6.1 Definisi Aset Tetap Lainnya menyebutkan bahwa PSAP 07 Paragraf 12 Aset Tetap lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:

1) Pasal 10, menyatakan bahwa Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab, antara lain:

a) huruf c, mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Wali Kota;

b) huruf e, mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Wali Kota atau DPRD;

c) huruf f, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan

d) huruf g, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

2) Pasal 11 ayat (3) huruf j menyatakan bahwa Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab menyusun laporan barang milik daerah.

3) Pasal 12 pada:

a) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;

b) Ayat (3) huruf c menyatakan bahwa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

c) Ayat (3) huruf e menyatakan bahwa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

4) Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab, antara lain:

- a) huruf c, melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - b) huruf l, membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan;
 - c) huruf m, memberi label barang milik daerah;
 - d) huruf n, mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - e) huruf q, melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - f) huruf r, membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- 5) Pasal 153 ayat (1) menyatakan bahwa pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- 6) Pasal 153 ayat (3) menyatakan bahwa pelaksanaan pinjam pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Wali Kota.
- 7) Pasal 157 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a) para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b) dasar perjanjian;
 - c) identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d) jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - e) tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - f) hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g) persyaratan lain yang dianggap perlu.
- 8) Pasal 160 ayat (2) menyatakan bahwa apabila Gubernur/Bupati/Wali Kota menyetujui permohonan pinjam pakai, Gubernur/Bupati/Wali Kota menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.
- 9) Pasal 160 ayat (3) menyatakan bahwa surat persetujuan Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a) identitas peminjam pakai;
 - b) data objek pinjam pakai;
 - c) jangka waktu pinjam pakai; dan
 - d) kewajiban peminjam pakai.

- 10) Pasal 161 ayat (1) menyatakan bahwa apabila Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dan Peminjam pakai.
- 11) Pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 12) Pasal 167 ayat (4) menyatakan bahwa sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.
- 13) Pasal 167 ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna Barang.
- 14) Pasal 296 ayat (2) menyatakan bahwa pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.
- 15) Pasal 317 menyatakan bahwa Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain: sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah, Surat Izin Penghunian (SIP), keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III, gambar/legger bangunan, data daftar barang dan keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Risiko kesulitan penelusuran aset yang tidak dicatat dengan informasi yang lengkap;
- b. Risiko kehilangan dan penyalahgunaan aset.
- c. Risiko kesalahan perencanaan atas aset yang dicatat dengan kondisi tidak akurat.
- d. Risiko salah saji Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang, dan Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD selaku Pengurus Barang Pengelola kurang melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah secara memadai sesuai dengan ketentuan; dan
- b. Kepala SKPD selaku pengguna barang dan Pengurus Barang tidak tertib dalam menatausahakan dan mengamankan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang agar melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah secara memadai sesuai dengan ketentuan;
- b. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang untuk mengawasi penerapan kebijakan akuntansi dalam penatausahaan Aset Tetap; dan
- c. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang untuk:
 - 1) Memproses dan menatausahakan dokumen pinjam pakai kendaraan sesuai ketentuan.
 - 2) Memproses administrasi STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan.
 - 3) Menginstruksikan Pengurus Barang supaya:
 - a) Menginventarisasi Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya, Aset kapitalisasi, Aset rusak, Aset di rumah dinas dan selanjutnya dilakukan penyesuaian pada KIB sesuai hasil inventarisasi;
 - b) Melengkapi informasi identitas dan rincian pada KIB Aset Tanah, Aset Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - c) Menelusuri aset yang tidak diketahui keberadaannya.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati PALI menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dokumen rencana aksi.

BAB II

IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten PALI Tahun 2024, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten PALI Tahun 2020 s.d. 2024. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten PALI dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Kabupaten PALI terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten PALI per 31 Desember 2024**

No.	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1.	2020	6	18	15	3	0	0
2.	2021	14	35	24	11	0	0
3.	2022	15	33	26	7	0	0
4.	2023	13	28	19	9	0	0
5.	2024	25	72	32	40	0	0
Jumlah		73	186	116	70	0	0

Pemerintah Kabupaten PALI telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain mengenai permasalahan kekurangan volume dan/atau tidak sesuai kontrak atas 102 paket pekerjaan atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp33.769.383.405,52 61 diantaranya 61 paket pekerjaan tidak berpedoman pada dokumen pemilihan, indikasi kerja sama antar penyedia, indikasi kerja sama penyedia dengan pokja, dan indikasi HPS tidak rahasia pada LHP LKPD Tahun 2023. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu agar Bupati PALI memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya, serta menginstruksikan KPA/PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan supaya lebih cermat dalam mengendalikan, melaporkan, mengawasi, dan memeriksa hasil pekerjaan terpasang di lapangan

Adapun rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut, yaitu agar Bupati PALI memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp33.918.799.958,73 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah. Dari nilai tersebut masih terdapat nilai yang belum ditindaklanjuti dan belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp32.988.137.904,66.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Rincian Kesalahan Penganggaran Antar Subrekening Belanja Modal

No	SKPD	Nama Barang	Anggaran dan Realisasi	Anggaran Seharusnya	Total (Rp)
1	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Korsik Alto Horn AH-650 DIR-Key Plate Finish T.A 2024	Belanja Modal Peralatan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.800.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Korsik Alto Saxophone Prelude PAS111 T.A 2024	Belanja Modal Peralatan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.600.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Korsik Baritone Horn BH650 Clear Lacquer T.A 2024	Belanja Modal Peralatan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.300.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Korsik Championship Bass Drum 24IN PDBMS2412 T.A 2024	Belanja Modal Peralatan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.200.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Korsik BBb Marching Tuba 4/4 Royale Nickel T.A 2024	Belanja Modal Peralatan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	57.200.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Korsik Royale Bellrya 2.0 Octave T.A 2024	Belanja Modal Peralatan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.600.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Korsik Marching Cymbal 18 IN Bravissimo T.A 2024	Belanja Modal Peralatan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.850.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Korsik Snare Drum 14IN CMS1412/C T.A 2024	Belanja Modal Peralatan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.600.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Korsik Tenor Drum 15IN PTD1512/C T.A 2024	Belanja Modal Peralatan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.600.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Korsik Bb tenor Saxophone Prelude PTS111 T.A 2024	Belanja Modal Peralatan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.300.000,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Korsik BACH Slide Trombone BTB211DIR T.A 2024	Belanja Modal Peralatan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.600.000,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Korsik BACH Terompet TR650 DIR Clear Lacquer T.A 2024	Belanja Modal Peralatan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	48.750.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pematangan Lahan OPD	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Tanah	3.531.601.012,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Atap Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pali	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	189.772.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Atap Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pali	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.988.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Plafon Ruang Rapat Kantor Sekretaris Daerah Kab.Pali	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	94.787.200,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Atap Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pali	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.988.800,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Ruang Rapat Sekretaris Daerah	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	119.308.500,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Ruang Rapat Sekretaris Daerah	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	258.501.750,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Ruang Rapat Sekretaris Daerah	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.884.750,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Ruang Staf Sekda Kab.Pali	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	189.803.350,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Ruang Staf Sekda Kab.Pali	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.989.650,00
23	Dinas Pendidikan	Pengadaan Tong Sampah di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional (Pkr)	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Peralatan Mesin	199.899.000,00
JUMLAH					5.022.924.012,00

Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dari Belanja Modal

No	SKPD	Kode Rekening Anggaran	Kode Rekening Seharusnya	Keterangan	Nilai Salah Penganggaran (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Pek. Rehabilitas Gedung Poskesdes Ds Beruge Darat	149.249.000,00
2	Dinas Kesehatan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Pekerjaan Belanja Modal Renovasi Pembangunan Poskesdes Desa Karang agung	104.005.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Pemeliharaan	Normalisasi Paye Selalung Desa Betung	99.816.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Pemeliharaan Kantor DPRD PALI	199.667.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehab Gedung RSUD Talang Ubi Kab.Pali	199.646.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Pembangunan Balai Serbaguna Bukit Tudung Kel.Tlg Ubi Barat Kec.Tlg Ubi	24.860.250,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Pengecatan Rumah Cinta	9.969.250,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Perbaikan Jaringan Listrik dan AC kantor DPRD Pali	199.666.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehab Atap Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pali	9.988.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehab Kantor Dinas PUTR	99.968.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehab Plafon Ruang Rapat Kantor Sekretaris Daerah Kab.Pali	4.988.800,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehab Ruang Rapat Sekretaris Daerah	397.695.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehab Ruang Staf Sekda Kab.Pali	199.793.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehab Rumah Sakit Pratama Tanah Abang dan Pembangunan Fasilitas Pendukung Lainnya	208.549.250,00
15	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDN 12 Talang Ubi	377.603.150,00
16	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMPN 1 Penukal Utara	134.041.200,00
17	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Pek. Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya dan rehabilitasi lapangan olahraga SMPN 1 Talang Ubi (DAK)	223.657.740,00
18	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	pekerjaan pembangunan ruang kelas 2 lokal sekolah Madrasah yopika/umar ruib tempirai selatan	24.821.200,00
19	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SDN 27 Talang Ubi	189.996.811,00
20	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN 9 Penukal	189.832.948,00
21	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah SDN 12 Tlg Ubi	19.873.850,00
22	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya dan rehabilitasi lapangan olahraga SMPN 1 Talang Ubi (DAK)	22.365.774,00
23	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDN 30 Talang Ubi	156.371.600,00
24	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMPN 1 Penukal Utara	22.340.200,00
JUMLAH					3.268.766.323,00

Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Hibah dari Belanja Modal

No	Nama SKPD	Keterangan	Kode Rekening Anggaran	Kode Rekening Seharusnya	Instansi Penerima Hibah	Nilai Salah Anggaran (Rp)
1	Dinas Kemudaan dan Olahraga	Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Desa Harapan Jaya)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	197.901.800,00
2	Dinas Kemudaan dan Olahraga	Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Desa Modong)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	197.945.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Jalan Cor Beton Simpang Bandara Samping Masjid Alfurqan	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.454.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Jalan Setapak Gg Cemara Talang Anding Kel.Talang Ubi Timur Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.562.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pekerjaan Pengadaan Mebeler Meja Di Gedung Kojari Kab.Pali	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	1.415.635.650,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Kel Handayani Mulya Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.937.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan di Kawasan Sanggar Pramuka	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.680.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Desa Tanjung Baru	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.607.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan RT.13 Kel Handayani Mulya	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	9.988.250,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Setapak Desa Tempir Selatan	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.548.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembukaan Jalan RW 05 dan 06 Kel Handayani Mulya	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.870.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Bantuan Pembangunan Atap Masjid Nurul Ikhlas Desa Sinar Dewa kec.tlg ubi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Rumah ibadah	45.636.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Bantuan Pembangunan Gapura Al-Ikhsan Kel.Talang Ubi Timur Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Rumah ibadah	99.681.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Bantuan Pembangunan Masjid Kota Baru Kec.Penukal Utara	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Rumah ibadah	99.409.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Drainase Desa Karang Agung	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	496.375.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Land Clearing Jalan Lingkungan Kecamatan Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.465.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Land Clearing Jalan Lingkungan RT 19 RW 05 Handayani Mulya Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.457.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Land Clearing Jin produksi dari SMKN Menuju tebing jagung jin batu RT7 RW2Kc Handayani Mulya Kec.Tlg Ub	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.549.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Landscape Kantor Kejari Pali	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	5.494.848.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Jalan Asrama Polres Pal seual	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.440.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Pemasangan Jaringn Listrik Desa Semangus	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	98.935.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Pembangunan Drainase Perumahan POLRES PALI	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	149.520.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Pembangunan Gapura POLRES Kab Pali	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	199.406.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Pembangunan Gedung SMA N 2 Talang Ubi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Provinsi	1.979.596.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Pembangunan jalan dusun 5 desa mangkunganegara	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.607.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Pembangunan Jalan Perumahan POLRES PALI	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	199.374.000,00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Pembangunan Jalan Samping Dinas Pertanian RT 17 RW 04 Kel Handayani Mulya	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.695.000,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Pembangunan Pipa Transmisi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	BUMD	2.348.533.000,00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Pemasangan dan Pemasangan Pipa Transmisi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	BUMD	19.699.780.000,00
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Line Clearing & Pengerasan Jin Perkebunan Warga RW 012 Kel.Tlg Ubi Barat Kec.Tlg Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	555.965.900,00
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Line Clearing dan Pengerasan Jalan Perkebunan Warga RW 012 Kel.Tlg Ubi Barat Kec.Tlg Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	238.271.100,00
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Normalisasi Paye Selatung Desa Betung	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.816.500,00
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Paket Pembangunan Tembok Penahan di kawasan Batalyon D Sat Brimob	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	187.874.288,00
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Paket Rehabilitasi Pembangunan Daerah Irigasi Sumberejo	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.612.000,00
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	peki Lanjutan Pembangunan Klat Retensi Samping 4	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	49.751.700,00
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pekerjaan drainase dan plat deuker kelurahan pasar bhayangkara	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.540.000,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pekerjaan Fisik dan Interior Ruang Direktorat Intel dan Area Tangga Pokda Sumsel	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	640.136.000,00
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pekerjaan jalan setapak desa talang buluc kec.talang ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.612.000,00
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pekerjaan Land Clearing Lahan Tempat Pembiungan Sampah di Desa Air Itam	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.473.000,00
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kolam Retensi Mako Brimob	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	49.434.250,00
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pekerjaan Pemasangan Jaringan Listrik Di Semangus	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	89.084.250,00
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Pantalewa Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.579.000,00
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pekerjaan pembangunan pelataran kantor kejar pall	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	99.801.400,00
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pekerjaan Pengadaan Mebeler Meja Di Gedung Kejar Pall	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	2.940.186.350,00
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pekerjaan Rehab Total Rumah Dinas Bupati	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	473.372.175,00
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pebaraban Jalan Gang Sukolaras	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.683.000,00
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Generator Set POLRES PALI dan Aksesoris Penunjang Lainnya	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	88.849.700,00
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan instalasi mekanikal dan elektrikal kantor kejar pall	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	273.860.950,00
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan interior kantor kejar pall	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	248.963.250,00
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Interior Kantor POLRES PALI	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	148.778.000,00
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Jaringan Listrik Desa Talang Akar	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	133.680.000,00
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Jaringan Listrik Kecamatan abab	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	113.600.000,00
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Jaringan Listrik Kelurahan Talang Ubi Timur	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	49.420.000,00
54	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Jaringan Listrik Talang Anding - Handayani Mulya	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	138.550.000,00
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Jaringan Listrik Talang Kemang	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	49.443.000,00
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Jaringan Listrik Talang Subu	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	89.000.000,00
57	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Lampu Solar Cell Desa Semangus Kecamatan Talang UBI	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	49.922.000,00
58	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Lampu Solar Cell Desa Sungai Baung Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	49.927.000,00
59	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Lampu Solar Cell Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	49.915.500,00
60	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Lampu Solar Cell di kel. pasar bhayangkara kec.tlg ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	49.906.500,00
61	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Lampu Solar Cell di Kel.Talang Ubi Selatan Kec. Tlg Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	49.919.000,00
62	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Lampu Solar Cell Di Gg padang kec. talang ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	49.914.000,00
63	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Lampu Solar Cell Kelurahan Talang Ubi Utara Kec. Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	49.943.500,00
64	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Paving Block di Desa Air Itam	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	1.301.413.000,00
65	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Paving Block di Halaman Kantor Desa Talang Akar Kec.Tlg Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	189.442.350,00
66	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Paving Block Di Halaman Kantor De Talang Akar Kec.Tlg Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	9.970.650,00
67	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Paving Block Jalan Setapak RT004/RW004 Kel.Talang Ubi Barat Kec.Tlg Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.569.000,00
68	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Paving Block Kantor Kipada Desa Betung Selatan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.356.000,00
69	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Paving Block Lapangan Bola Kasti Desa Betung Barat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.400.000,00
70	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemasangan Pipa dan Accesoris di simpang raja kel handayani	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	BUMD	199.574.000,00
71	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pemb boxculvert RT 19 RW 05 Kel Handayani Mulya Kec.Talang Ubi sesuai	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	9.969.100,00
72	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemb Dak Atap Canopi Masjid Jami De Tanjung Baru Kec.Penukal Utara	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Rumah ibadah	9.973.650,00
73	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemb Di Drainase & Tembok Penahan Tanah Samping Raja Kel.Handayani Mulya Kec.Tlg Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	496.108.000,00
74	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemb Drainase Desa Betung Barat	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.287.000,00
75	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemb Drainase Desa Pandan	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	105.699.838,00
76	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemb Drainase di Depan Rumah Iyoni Yumal Dusun 1 Desa Air Itam Timur Kec.Penukal	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.606.000,00
77	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemb Jalan & Drainase Simpang Dogan KM 10 RT 18 Kel Handayani Mulya	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.781.000,00
78	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemb Jalan Lingkar Penghubung RT 003 RW 004 Dusun II Desa Benakat Mnyek Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.566.000,00
79	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemb Jalan Lingkungan Desa Tempir Selatan	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.697.000,00
80	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemb Jalan Lingkungan Tji Nanas Kel.Tlg Ubi Timur	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.721.000,00
81	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pemb jalan setapak dusun V desa talang buluc kec.talang ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.490.000,00
82	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemb Jembatan Tlian Desa Betung Selatan Kec.Abab	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.412.000,00
83	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemb Jin Dusun 4 Pasar Inpres Ds Betung	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.599.000,00
84	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemb Jin tlian jalan puyang Kandi ds betung kec.abab	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	9.980.000,00
85	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan drainase air itam timur	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.718.000,00
86	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Desa Sungai Ibul Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.769.000,00
87	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Balai Serbaguna Desa Prabumenang Kec.Penukal Utara (Lanjutan)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.498.000,00
88	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Balai Serbaguna Ds Raja Jaya	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	42.244.500,00
89	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Bocuvert Jalan Pasar Bara Desa Betung Barat Kec.Abab	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	94.115.550,00
90	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Bocuvert Jin Pasar Bara Ds Betung Barat Kec.Abab	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	4.953.450,00
91	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pembangunan boxculvert RT 19 RW 05 Kel.Handayani Mulya Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	189.412.900,00
92	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Dak Atap Canopi Masjid Jami Desa Tanjung Baru Kec.Penukal Utara	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Rumah ibadah	189.499.350,00
93	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Kalmicakal Kel.Pasar Bhayangkara	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	9.929.750,00
94	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Kalmicakal Kel.Pasar Bhayangkara	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	188.665.250,00
95	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pembangunan drainase air itam induk	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	7.470.350,00
96	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan drainase dalam desa karang agung	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.018.000,00
97	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan drainase desa air itam	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	7.463.300,00
98	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pembangunan drainase desa air itam induk	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	141.936.650,00
99	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Desa Babat Kec.Penukal	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.149.000,00
100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pembangunan drainase desa beruge darat kec.talang ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.982.000,00
101	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pembangunan Drainase Desa Betung	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.305.000,00
102	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pembangunan drainase desa jerambah besi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	4.983.400,00
103	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	pembangunan drainase desa simpang tais	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.485.000,00
104	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Desa Suka Raja Kec.Tanah Abang	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.131.000,00
105	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Desa Suka Raja Kecamatan Tanah Abang	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	7.477.150,00
106	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan drainase desa talang akar kec.talang ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.128.000,00
107	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase di Dekat SMP N 9 Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jarring, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.354.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PIFA2AAF.

No	Nama SKPD	Keterangan	Kode Rekening Anggaran	Kode Rekening Seharusnya	Instansi Penerima Hibah	Nilai Salah Anggaran (Rp)
108	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase di Kawasan Kalima Cakak dan Sekitarnya	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.507.000,00
109	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase di Perumahan POLRES PALI	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	9.963.800,00
110	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Di Rejosari Kel. Tig Ubi Utara Kec.Tig Ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	993.489.000,00
111	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Di Sungai Baung Kec.Tig Ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	992.839.000,00
112	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Dusun 1 Desa Babat	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	98.455.000,00
113	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Dusun 2 Desa Babat	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.833.000,00
114	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Dusun V Desa Betung	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.376.000,00
115	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan drainase jalan baru bendu kec.talang ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.624.000,00
116	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan drainase jalan handayani mulya kec.talang ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.200.000,00
117	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Jin Baru Bendu Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.624.000,00
118	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Kel Handayani Mula 2	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.444.000,00
119	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Kel Talang Ubi Barat Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.504.000,00
120	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Kelurahan Pasar Bhayangkara	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.715.000,00
121	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Kelurahan Talang Ubi Timur	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.738.000,00
122	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Lingkungan Rejosari	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.495.000,00
123	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Lrg Karedek Kel Talang Ubi Selatan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.065.000,00
124	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Menuju TK Paud Tunas Muda RT.02 Kel Talang Ubi Selatan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.547.000,00
125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Simpang Raja Kel Handayani Mulya	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.809.000,00
126	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan drainase simpang SMP N 9 Tig Ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.473.000,00
127	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Tempirial Selatan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	109.750.300,00
128	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase Tempirial Selatan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	89.795.700,00
129	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Gapura Mako BRIMOB	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	7.492.400,00
130	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan gorong-gorong dan drainase desa sukadama & pasar bulukuring	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.681.000,00
131	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Al-Musyafidrah	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.718.000,00
132	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan jalan cor kelurahan talang ubi selatan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.629.000,00
133	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Depan Kantor PWI Kel Handayani Mulla	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.710.000,00
134	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Desa Sukaraja Kec.Tanah Abang	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.691.000,00
135	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan jalan di kelurahan pasar bhayangkara	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.672.000,00
136	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan di Talang Kemang Kel.Tig Ubi Selatan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	94.658.950,00
137	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Di Sukaraja Kec. Tanah Abang	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.641.000,00
138	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Kel Handayani Mulya 3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	7.482.500,00
139	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Kelurahan Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	48.833.000,00
140	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Kelurahan Talang Ubi Barat	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.688.000,00
141	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Kelurahan Talang Ubi Selatan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.641.000,00
142	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Kelurahan Talang Ubi Timur	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.666.000,00
143	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Kelurahan Talang Ubi Utara	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	49.833.000,00
144	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Talang Akar	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	74.846.500,00
145	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan jalan menuju polindes betung kec.abab	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.599.000,00
146	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Menuju TPU Talang Miring	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	9.982.750,00
147	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Produksi Desa Jerambah Besi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.687.000,00
148	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan RT.06 Kel Handayani Mulla	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	108.846.550,00
149	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan jalan RT.10 Kel Handayani Mulla	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.751.000,00
150	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan RT.12 Kelurahan Handayani Mulla	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	9.988.250,00
151	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan RT01 RW 4 Kel Talang Ubi Barat	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	4.392.200,00
152	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan RW 1 Tig Ubi Timur	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.696.000,00
153	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan RW.02 Kel Handayani Mulla	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.694.000,00
154	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan RW.03 Kel Handayani Mulla	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.651.000,00
155	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan jalan setapak di persawahan rejosari kel.talang ubi utara kec.tig ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.596.000,00
156	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan jalan setapak disamping TPU talang puyang kel.talang ubi barat kec.talang ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.662.000,00
157	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Setapak Gang Akasia Talang Anding Kel.Talang Ubi Timur	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.568.000,00
158	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan jalan setapak paving block desa pengubun kec.abab	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.467.000,00
159	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Talang Anding RT.03 RW.02 Kel.Tig Ubi Timur	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.766.000,00
160	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan jalan titian jalan puyang kandis desa betung kec.abab	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	189.620.000,00
161	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan jembatan RT.26 RW.06 Rejosari Kel.Tig Ubi Utara Kec.Tig Ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.110.000,00
162	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jembatan Titian Desa Pengubun Kec.Abab	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.513.000,00
163	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jembatan Titian Desa 2 Tanah Abang Selatan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	197.308.000,00
164	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jin Cor Baron Dusun 1 Di Betung Baarat (Jalan Lingkar)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	9.981.050,00
165	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jin dan Drainase Di Betung Kec.Abab	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.725.000,00
166	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jin Flamboyant RT.01 RW.01 Kel Handayani Mulla	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.751.000,00
167	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jin Lubuk Padau Di Tempirial	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.743.000,00
168	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jin Menuju TPU Desa Betung Barat	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	9.981.050,00
169	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jin PPKR Desa Betung	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.599.000,00
170	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jin Setapak Desa Tempirial	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.614.000,00
171	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Kalan Paye Putih Kuku Desa Betung Selatan Kec.Abab	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.747.000,00
172	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Kantor Dan WC Pasar Kalangan Desa Sungai Baung	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	201.365.325,00
173	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Lanjutan Jembatan KM.10 Kel Handayani Mulla	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.505.000,00
174	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Lapangan Bola Kaki Desa Air Itam Kec.Penukal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	1.978.670.000,00
175	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Lapangan Bola Kaki Desa Muara Sungai Kec.Tanah Abang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	620.564.375,00
176	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Lapangan Bola Kaki Di Muara Sungai Kec.Tanah Abang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	210.991.888,00
177	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Lapangan Bola Kaki Di Muara Sungai Kec.Tanah Abang oleh	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	161.346.737,00
178	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Lapangan Parkir Kantor Kejari Pali	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	398.456.000,00
179	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Pagur Perumahan POLRES PALI	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	199.505.000,00
180	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Pagur Rumah Dinas Kejari di Kelurahan Handayani Mulla	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	557.188.800,00
181	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan pagar TPU desa tanjung baru kec.penukal utara	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	995.314.000,00
182	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Parit Desa Tanjung Baru	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	24.833.400,00
183	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Pos Jaga Kantor Kejari Pali	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	9.994.300,00
184	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Kejiksaan Pali	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	7.488.550,00
185	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Spal Desa Betung Barat Kec.Abab	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.359.000,00
186	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Sumur Bor & Pasilitas Pendukung Lainnya Kel.Pasar Bhayangkara	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	7.991.800,00
187	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Sumur Bor Dusun I Di Betung Barat Kec.Abab	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.096.000,00
188	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Sumur Bor Dusun VII Desa Betung Barat Kec.Abab	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	149.956.000,00
189	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Sumur Bor Kantor Kejari Pali	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	4.994.750,00
190	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Tekbok Penahan Tanah Kelurahan Bhayangkara Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.453.000,00
191	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Utilitas Lapangan Gelora	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.317.000,00
192	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan WC Umum di Kawasan POLRES PALI	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	199.863.000,00
193	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembuatan Interior Lobby Mako Brimob oleh CV KILAU MUSI	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	199.100,00
194	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembuatan kolam ikan di desa modong kecamatan tanah abang	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	7.491.650,00
195	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembukaan Jalan RW 05 dan 06 Kel Handayani Mulla	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.870.000,00
196	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembukaan Lahan - Lahan Pertanian & Perkebunan Di Betung Barat Kec.Abab	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	416.282.300,00
197	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembukaan lahan - lahan pertanian dan perkebunan desa betung barat kec.abab	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	178.406.700,00
198	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembukaan Lahan TPU Kel Handayani Mulla	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.773.000,00
199	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pengadaan Dan Pemasangan AC Di Gedung Kejari	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	3.977.317.000,00
200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan KEC. PALI	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	146.450.000,00
201	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pengerasan Jalan Linggihulan KM 10 Kel Handayani Mulya Kec.Tig Ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.578.000,00
202	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pengerasan jalan inharis kel handayani mulya kec.tig ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.566.000,00
203	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pengerasan Jalan Perigi Gol Kel Handayani Mulla	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.689.000,00
204	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	penimbunan halaman belakang kantor kejar pali	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	65.571.100,00
205	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Infrastruktur Sungai Pelelehan Desa Tanjung Baru Kec.Penukal Utara	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	447.540.300,00
206	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Infrastruktur Sungai Pelelehan Di Tj.Baru Kec.Penukal Utara	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	1.044.260.700,00
207	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Jalan Bukit Permai Desa Manglungara Kec.Penukal	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	199.519.000,00
208	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Jalan di Kawasan Bataylan D Saf Brimob	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	124.389.500,00
209	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pengsan Jalan Gang Bina Mitra Depan SMA N 1 Talang Ubi	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	99.632.000,00
210	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Gedung BB Kejari Pali dan Rumah Dinas Kejari Pali	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	4.993.900,00
211	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Masjid Jerambah Kuning Desa Sungai Baung Dusun 7 Kec.Talang Ubi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Rumah Ibadah	4.972.800,00
212	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Revitalisasi Lahan Tidur Menjadi Lahan Pertanian di Kawasan Paye Besok Desa Betung Barat	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	1.490.622.864,00
213	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Struktur Bawah Menara Masjid Berute Darat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Rumah Ibadah	149.715.000,00
214	Dinas Pendidikan	Pengadaan PC (Komputer) untuk MI Nurul Ikhwan Desa Betung	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	198.800.000,00
215	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Buku Umum (Buku Seri Slap Slap Slap Bencana Jilid 8)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	548.460.000,00
216	Dinas Pendidikan	pekerja pemasangan paving block PAUD AL-Hamdi Talang Ubi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	49.997.300,00
217	Dinas Pendidikan	pekerja pemasangan paving SD Dharifis Betung	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	74.933.650,00
218	Dinas Pendidikan	pekerja pemasangan paving block Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Desa Pengubun	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	99.935.750,00
219	Dinas Pendidikan	pekerja pemasangan paving block SD Dafullah Betung	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	4.994.950,00
220	Dinas Pendidikan	pekerja pemasangan paving block SMP PGRI Desa Betung	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	7.494.400,00
221	Dinas Pendidikan	pekerja pemasangan paving block TK Terintegrasi Desa Betung Barat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	4.993.900,00
222	Dinas Pendidikan	pekerja pemasangan paving PAUD Az Zahra Desa Pengubun Timur Kec. Abab	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	99.997.835,00
223	Dinas Pendidikan	pekerja penambahan ruang kelas MTS Nurul Iman Modong	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.998.739,00

No	Nama SKPD	Keterangan	Kode Rekening Anggaran	Kode Rekening Seharusnya	Instansi Penerima Hibah	Nilai Salah Anggaran (Rp)
224	Dinas Pendidikan	Pek. rehab ruang belajar SMP PGRI Desa Betung dan Pembangunan WC/Toilet 2 Unit	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.998.891,00
225	Dinas Pendidikan	Pek. Pembangunan Laboratorium Komputer dan Rehabilitasi ruang laboratorium IPA SMP PGRI Talang Ubi (DAK)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	206.087.837,00
226	Dinas Pendidikan	Pekerjaan pemasangan pagar MI Nurul Ilimi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.983.300,00
227	Dinas Pendidikan	pekerjaan pemasangan paving block di SMP AMANIA Desa Betung Kec. Abab	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.998.641,00
228	Dinas Pendidikan	Pekerjaan pemasangan paving block di SMP PGRI Betung Kec. Abab	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	99.999.000,00
229	Dinas Pendidikan	pekerjaan pemasangan paving block Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Desa Pengabuan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	89.942.175,00
230	Dinas Pendidikan	Pekerjaan pemasangan paving block MI Nurul Ilimi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.998.291,00
231	Dinas Pendidikan	pekerjaan pemasangan paving block PAUD AL-Hamdi Talang Ubi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	49.997.304,00
232	Dinas Pendidikan	pekerjaan pemasangan Paving Block Paud Assyifa Desa Karang Agung Kec.Abab	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	99.976.756,00
233	Dinas Pendidikan	pekerjaan pemasangan paving block Paud Kasih Bunda Persada Desa Talang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	99.999.011,00
234	Dinas Pendidikan	pekerjaan pemasangan paving block SD IT INSAN MULYA Talang Ubi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.938.794,00
235	Dinas Pendidikan	Pekerjaan pemasangan paving block SDN SD IT AL-DHAIFULLAH	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.979.111,00
236	Dinas Pendidikan	pekerjaan pemasangan paving block SMP Amania Abab	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	99.998.573,00
237	Dinas Pendidikan	pekerjaan pemasangan paving block SMP BINA BAKTI DESA BETUNG KEC. ABAB	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.998.700,00
238	Dinas Pendidikan	Pekerjaan pemasangan paving block SMP IT MUSTIKA PALI Talang Ubi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.169.163,00
239	Dinas Pendidikan	Pekerjaan Pemasangan Paving Block SMP PGRI Betung Kec.Abab	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	99.999.000,00
240	Dinas Pendidikan	pekerjaan pemasangan paving block TK AL Hidayah Desa Betung Kec.Abab	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	99.999.318,00
241	Dinas Pendidikan	Pekerjaan Pemasangan Paving Block TK AR Rahman Desa Betung Barat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	99.923.020,00
242	Dinas Pendidikan	pekerjaan pemasangan paving block TK Peritiw Tanjung Kurung	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	99.999.694,00
243	Dinas Pendidikan	pekerjaan pembangunan pagar Porpes Darussalam Tegal Rejo Al Gomari	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.981.300,00
244	Dinas Pendidikan	pekerjaan pembangunan pagar SMP Amania Betung Selatan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.998.300,00
245	Dinas Pendidikan	Pekerjaan Pembangunan Pondok Pesantren Alrozzi Desa Sedupi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.998.691,00
246	Dinas Pendidikan	pekerjaan pembangunan pondok pesantren alrozzi desa sedupi tanah abang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	99.999.356,00
247	Dinas Pendidikan	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Alja KID Talang Ubi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.875.000,00
248	Dinas Pendidikan	pekerjaan pembangunan ruang kelas di pondok pesantren darussalam tegal rejo	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.969.822,00
249	Dinas Pendidikan	pekerjaan pembangunan ruang kelas SD IT Nurul Ilimi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.999.084,00
250	Dinas Pendidikan	Pekerjaan Penambahan Ruang Kelas Kampung Inggris Abri	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.999.088,00
251	Dinas Pendidikan	pekerjaan penambahan ruang kelas pesantren al wari	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.999.084,00
252	Dinas Pendidikan	pekerjaan penambahan ruang kelas pondok pesantren Darussalam	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.999.084,00
253	Dinas Pendidikan	Pekerjaan Penambahan Ruang Kelas SMP PGRI Tanah Abang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.912.310,00
254	Dinas Pendidikan	pekerjaan rehab ruang kelas SMP PGRI Desa Betung	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	149.998.239,00
255	Dinas Pendidikan	pekerjaan rehabilitasi ruang kantor SMP PGRI Tempirai	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.998.802,00
256	Dinas Pendidikan	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas TK Kemala Bhayangkari 10 PALI	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	149.999.098,00
257	Dinas Pendidikan	pasangan paving block madrasah ibtidaiyah nurul iman desa pengabuan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	9.993.575,00
258	Dinas Pendidikan	Pemb.ruang guru/kepala sekolah & pemb.area bermain bsrta APE luar ruang TK Permata Hati Raja (DAK)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	18.504.300,00
259	Dinas Pendidikan	Pemb.ruang guru/kepala sekolah & pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK Permata Hati Raja (DAK)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	92.521.500,00
260	Dinas Pendidikan	Pemb.Ruang kis 2 lokal sekolah Madrasah yopika/umar ruib tempirai selatan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	322.675.600,00
261	Dinas Pendidikan	Pembangunan Laboratorium Komputer dan Rehabilitasi ruang laboratorium IPA SMP PGRI Talang Ubi (DAK)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	480.871.619,00
262	Dinas Pendidikan	Pembangunan ruang guru atau kepala sekolah dan pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK Permata Hati Raja (DAK)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	259.060.200,00
263	Dinas Pendidikan	Pembangunan ruang kelas 2 lokal sekolah Madrasah yopika/umar ruib tempirai selatan berdasarkan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	148.927.200,00
264	Dinas Pendidikan	Pengadaan 19 Unit AC Include Pemasangan SD YKPP Pendopo Kelurahan Talang Ubi Timur	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	199.490.500,00
265	Dinas Pendidikan	Pengadaan BELANJA MODAL BUKU UMUM (BUKU AWAS BAHAYA PEDOFILIA BUKU AWAS BAHAYA PELEGEHAN SEKSUAL SD)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	26.910.000,00
266	Dinas Pendidikan	Pengadaan Belanja Modal Buku Umum (Buku Seri Ensiklopedia Sumatera Selatan Jilid 3)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	179.640.000,00
267	Dinas Pendidikan	pengadaan belanja modal buku umum (Buku seri pembinaan dan pengembangan ekstrakurikuler (dasar) JILID 5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	418.140.000,00
268	Dinas Pendidikan	Pengadaan belanja modal buku umum (Buku Stop Bullying)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	27.630.000,00
269	Dinas Pendidikan	Pengadaan buku seri pembinaan dan pengembangan ekstrakurikuler (SMP) (Jilid 5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	348.600.000,00
270	Dinas Pendidikan	Pengadaan Buku Seri Siap Siaga Bencana SMP Jilid 8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	457.050.000,00
271	Dinas Pendidikan	PENGADAAN BUKU STOP BULLYING STAR LOVING (SMP) (JILID 1)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	178.770.000,00
272	Dinas Pendidikan	Pengadaan Meubelair Sekolah SD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	91.244.320,00
273	Dinas Pendidikan	Pengadaan Unit Laptop Kursus Mengetik Al Azka	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Hibah	Sekolah Swasta	49.850.000,00
274	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Al-Munassir	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Instansi Vertikal	3.674.100.000,00
275	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	pekerjaan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Pengadilan Negeri	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	9.981.050,00
276	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Betung	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Hibah	Pemerintah Desa	90.241.909.418,00

Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dari Belanja Barang dan Jasa

No	SKPD	Kode Rekening Anggaran	Kode Rekening Seharusnya	Keterangan	Nilai Salah Penganggaran
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Sodetan Sungai Penukal Ke Kawasan Danau Burung	997.256.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pembuatan Rumah Genset) Kantor BAPENDA Kab. PALI	19.966.000,00
3	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan Polindes/ Poskesdes Desa Abab	34.770.000,00
4	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja jasa konsultan Pengawasan Rehab Gedung Gudang Farmasi dan Rehab Gedung Poskesdes Ds Beruge darat	29.850.000,00
5	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belnja Jasa Konsultan Pengawasan Arsitektural - Renovasi Bngunan Poskesdes Desa Karang Agung	29.720.000,00
6	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pek Jsa Knsultn Prcanan Rhbiltasi Gdgng Gudng Frmsi & Rhbilti Gdng Pksds Ds.Beruge Darat	29.760.000,00
7	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pek Konsultan Pengwasn Pmsngan Paving Block Polindes Pngbuan Timur Lingkup Dinkes TA 2024	29.520.000,00
8	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Belanja jasa Konsultan Pengawasan Gedung Polindes/ Poskesdes Desa Panta dewa	34.770.000,00
9	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pemasangan Paving Block Puskesmas Abab	29.520.000,00
10	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar pustu Desa Mangku Negara	29.720.000,00
11	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Konsultan Perencanaan Paving Block Puskesmas Abab	29.800.000,00
12	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Polindes/Poskesdes Desa Betung	34.850.000,00
13	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Polindes/Poskesdes Desa Pantadewa	34.850.000,00
14	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Pustu desa Mangku Negara	29.830.000,00
15	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Paving Block Polindes Pengabuan Timur	29.770.000,00
16	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Konsultan Perencanaan Renovasi Bangunan Poskesdes Desa Karang Agung	29.830.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	DED TPST Pendopo Kecamatan Talang Ubi	498.168.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	konsultan Dokumen Lingkungan TPST Pendopo Kecamatan Talang Ubi	99.666.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Konsultan Dokumen Studi Kelayakan TPST Pendopo Kecamatan Talang Ubi	99.578.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Konsultan Pengawas Interior Gedung Paripurna	99.700.200,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Konsultan Pengawasan Gedung OPD dan Rehab Rumah Sakit Tanah Abang	298.312.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konsultan Pengawasan Jalan Talang Baru - Pasar Bhayangkara (BANGUB)	199.078.500,00

No	SKPD	Kode Rekening Anggaran	Kode Rekening Seharusnya	Keterangan	Nilai Salah Penganggaran
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konsultan Pengawasan Jembatan	148.462.500,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konsultan Pengawasan Lanjutan Pemasangan Pipa Transmisi (APBD-P 2024)	99.700.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan RSUD Talang Ubi	99.916.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan Air Deras Kota Baru (BANGUB)	197.802.000,00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	konsultan pengawasan pembangunan kawasan wisma PKK	398.823.000,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Handayani - Talang Anding - Sumberejo (DAK)	296.814.000,00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Penantian - Karang Tanding	347.263.500,00
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Suka Damai - Kota Baru (BANGUB)	99.900.000,00
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Konsultan Pengawasan Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (BANGUB)	199.866.600,00
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Konsultan Pengawasan Rehab Total Rumah Dinas Bupati	99.678.000,00
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Konsultan Perencanaan Kantor BKPSDM	248.418.000,00
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Konsultan Perencanaan Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	199.245.000,00
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Konsultan Perencanaan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	248.251.500,00
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Konsultan Perencanaan Kantor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	248.307.000,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Paket Konsultan Perencanaan Kantor Dinas Kesehatan	248.196.000,00
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Perencanaan Pagar OPD SATPOLPP, BAPPEDA dan DPMPSTP	149.000.000,00
39	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa konsultan Konsultan Pengawasan Paving,Pagar SD	49.561.500,00
40	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa konsultan Konsultan Pengawasan Paving,Pagar SMP	49.561.500,00
41	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) - Tematik 00 SD (DAK)	59.988.840,00
42	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) - Tematik 00 SMP (DAK)	54.866.745,00
43	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa Konsultan Pengawasan Pagar SMPN 1 TU dan UKS	49.617.000,00
44	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa konsultan pengawasan paket 6	49.999.950,00
45	Dinas Pendidikan	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa Konsultan Pengawasan Paving Block	49.883.400,00
46	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa Konsultan Pengawasan Paving Block SD,SMP	99.999.900,00
47	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	jasa Konsultan pengawasan pembangun Ruang Kelas Baru,UKS dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD,SMP 1	198.906.450,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PIFA2AAF.

No	SKPD	Kode Rekening Anggaran	Kode Rekening Seharusnya	Keterangan	Nilai Salah Penganggaran
48	Dinas Pendidikan	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pkr)	99.567.000,00
49	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa konsultan pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru,UKS,dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD,SMP 2	99.567.000,00
50	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa konsultan pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru,UKS,dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD,SMP 3	99.234.000,00
51	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa Konsultan Pengawasan Pokir (Paving,Pagar,Laboratorium,RKB dan Rehab)	98.965.380,00
52	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	jasa konsultan pengawasan RKB, Jamban, dan Pagar	99.999.345,00
53	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa Konsultan Perencanaan Pagar SMPN 1 TU dan UKS	49.617.000,00
54	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	jasa konsultan perencanaan paving block SD,SMP	98.967.600,00
55	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa konsultan Perencanaan Paving,Pagar SD dan SMP	99.456.000,00
56	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa konsultan perencanaan pembangunan ruang kelas baru,UKS dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD, SMP 2	99.456.000,00
57	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa konsultan perencanaan pembangunan ruang kelas baru,UKS dan rehabilitasi ruang kelas SD,SMP 3	99.511.500,00
58	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jasa konsultan perencanaan pembangunan ruang kelas baru,UKS dan rehabilitasi ruang kelas SD,SMP 4	99.678.000,00
59	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	pekerjaan jasa Konsultan pengawasan pembangun Ruang Kelas Baru,UKS dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD,SMP 4	99.123.000,00
60	Dinas Pendidikan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	pekerjaan jasa konsultan pengawasan rehabilitasi ruang kelas sekolah	49.999.950,00
61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Jasa Konsultan Desain Interior Gdng Prpustakaan Daerah	97.957.500,00
62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Belanja jasa konsultan dan pengawasan Gedung Perpustakaan Daerah	178.266.000,00
63	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemasangan Paving Block Polindes Desa Karang Agung	44.895.150,00
64	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembangunan Pagar Kantor Camat Abab	89.838.450,00
65	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembangunan Pagar Puskesmas Abab	99.814.000,00
66	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	DPPT BUMI PERKEMAHAN	49.539.300,00
67	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konsultan Pengawasan Lampu Tenaga Surya	99.017.000,00
68	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan DPPT Tempat Pengelolaan Sampah Desa Pengabuan	49.601.000,00
69	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Jasa	Belanja Modal Tanah	Pekerjaan KJPP Tempat Pengelolaan Sampah Desa Pengabuan	49.548.000,00

No	SKPD	Kode Rekening Anggaran	Kode Rekening Seharusnya	Keterangan	Nilai Salah Penganggaran
70	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemasangan Paving Block Kantor Camat Penukal	199.686.000,00
71	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemasangan Paving Block Kantor Camat Penukal Utara	199.707.000,00
72	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemasangan Paving Block Polindes Desa Karang Agung	54.871.850,00
73	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemasangan Paving Block Puskesmas Desa Tanjung Baru	199.748.000,00
74	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Drainase Lingkungan Kantor Camat Abab	199.584.000,00
75	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan Kantor Camat Abab	199.665.000,00
76	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembangunan Pagar Kantor Camat Abab	109.802.550,00
77	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembangunan Pagar Puskesmas Abab	99.814.000,00
78	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembangunan Paving Block Pelataran Kantor Camat Abab	199.613.000,00
79	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pengecoran Tempat Parkir Rumah Dinas Sekretaris Daerah	9.980.800,00
JUMLAH					10.164.403.460,00

Rincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nama	Jabatan	Honor yang dibayarkan (Net)	Honorarium seharusnya	Kelebihan Pembayaran (Net)
1	Sekretariat DPRD	Skt	PA	39.168.000,00	0,00	39.168.000,00
2	Disdik	APM	PA	43.947.000,00	0,00	43.947.000,00
3	Disdik	SMA	PPTK	42.617.000,00	27.740.000,00	14.877.000,00
4	Disdik	EKu	PPTK	20.064.000,00	16.644.000,00	3.420.000,00
5	Disdik	IFa	PPK	18.513.000,00	0,00	18.513.000,00
6	PUTR	JAz	PA	40.545.000,00	0,00	40.545.000,00
7	PUTR	DKu	KPA	40.413.000,00	36.252.000,00	4.161.000,00
8	PUTR	Rnd	PPTK	38.836.000,00	25.232.000,00	13.604.000,00
9	Perkim	JAz	PA	31.082.500,00	0,00	31.082.500,00
10	Perkim	HHe	KPA	61.379.500,00	43.350.000,00	18.029.500,00
Total						227.347.000,00

Rincian Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Perjalanan Dinas pada Empat SKPD

No	Nama	Bukti Penyeberangan ASDP Tidak Sesuai	Jumlah Hari Tidak Sesuai Surat Tugas	Bukti Penginapan Tidak Sesuai	Uang Representasi Tidak Sesuai	Realisasi UH Fullboard Tidak Sesuai	Lumpsum 30% Penginapan Tidak Sesuai	Total (Rp)
A	Sekretariat DPRD							
	Jumlah (A)	33.390.576,00	34.190.000,00	223.800.364,00	545.000.000,00	-	258.300,00	836.639.240,00
B	Sekretariat Daerah							
1	HPr					1.000.000,00	774.900,00	1.774.900,00
2	TGu					360.000,00	516.600,00	876.600,00
3	Mla					360.000,00	516.600,00	876.600,00
4	TGu					-	258.300,00	258.300,00
	Jumlah (B)	-	-	-	-	1.720.000,00	2.066.400,00	3.786.400,00
C	Dinas Lingkungan Hidup							
	FMN					-	471.300,00	471.300,00
1	Jumlah (C)					-		471.300,00
D	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
1	Spw					-	924.900,00	924.900,00
	Jumlah (D)					-		924.900,00
	Total Jumlah (A-D)	33.390.576,00	34.190.000,00	223.800.364,00	545.000.000,00	1.720.000,00	3.462.600,00	841.821.840,00

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Dilaksanakan ASN

(dalam rupiah)

No	Nama ASN	Jabatan	Gol	Jumlah Biaya Perjalanan
1	Dmw	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembina Utama Muda (IV/c)	9.700.000,00
2	AEI	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Pembina Utama Muda (IV/c)	9.700.000,00
3	Ymw	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembina (IV/a)	9.700.000,00
4	ASa	Kabid Pariwisata	Penata Tingkat I (III/d)	9.700.000,00
5	KSa	Plt. Kepala Dinas Perhubungan	Pembina (IV/a)	9.700.000,00
6	ACHS	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	Penata Tingkat I (III/d)	9.700.000,00
7	ADe	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pembina (IV/a)	9.700.000,00
8	EAn	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda (III/a)	9.700.000,00
9	Hmd	Staf Umum	Pengatur Tingkat I (II/d)	9.700.000,00
10	DES	Pelaksana/Terampil- Pranata Komputer	Pengatur (VII)	9.700.000,00
11	CEd	Arsiparis Ahli Pertama	Penata Muda (IX)	9.700.000,00
12	EES	Ahli Pertama - Perencana	Penata Muda (IX)	9.700.000,00
13	MFH	Dokter Umum	Penata (III/c)	9.700.000,00
14	JSo	Staf Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	Penata Muda Tingkat I (III/b)	9.700.000,00
Total Jumlah Biaya Perjalanan ASN				135.800.000,00

Rincian kelebihan pembayaran Biaya Personel Jasa Konsultansi

NO	Nama Kegiatan	Kontrak				Peran Pada SPK	Nilai (Rp)	Waktu Penugasan	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)	Keterangan
		Nama Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor	Tanggal					
A Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang										
1	Konsultan Perencanaan Kantor Dinas Lingkungan Hidup	CV CBC	248.251.500,00	600/237/KPA02/SPK/KPKDLH/XI/2024	1 November 2024	Ahli Teknik Bangunan Gedung	14.000.000,00	1,50	21.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
2	Konsultan Perencanaan Kantor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	CV. AQCA	248.307.000,00	600/242/KPA02/SPK/KPKPPKB/DP-UTR.PALI/X/2024	31 October 2024	Ahli Struktur	14.000.000,00	1,50	21.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Ahli Arsitektur	14.000.000,00	1,50	21.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
3	DED TPST Pendopo Kecamatan Talang Ubi	CV HMK	498.168.000,00	600/106/KPA.03/SPK/DTPKTU/XI/2024	11 November 2024	team leader	17.000.000,00	1,00	17.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Ahli Geodesi	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Ahli Struktur	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Ahli Struktur	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Ahli Elektrikal/Mekanikal	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Ahli Estimasi Biaya	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Surveyor	7.000.000,00	1,00	7.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Surveyor	7.000.000,00	1,00	7.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Surveyor	7.000.000,00	1,00	7.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
4	Konsultan Perencanaan Kantor Dinas Kesehatan	CV HMK	248.196.000,00	600/232/KPA.02/SPK/KPKDK/XI/2024	1 November 2024	Ahli Struktur	14.000.000,00	1,50	21.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
5	Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Penantian - Karang Tanding	CV PK	347.263.500,00	600/138/KPA.01/SPK/KPPIKT/VI/2024	24 June 2024	Ahli K3 Konstruksi	14.000.000,00	6,00	84.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
6	Konsultan Pengawasan Gedung OPD dan Rehab Rumah Sakit Tanah Abang	CV CBC	298.312.000,00	600/93/KPA.02/SPK/KPGODRRSTA/DP-UTR.PALI/IV/2024	30 April 2024	Tenaga Pendukung	3.000.000,00	6,00	18.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
7	Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Handayani - Talang Anding - Sumberejo (DAK)	CV AMS	296.814.000,00	600/110/KPA.01/SPK/KPPIJHTS/V/2024	16 May 2024	Ahli K3 Konstruksi	14.000.000,00	3	35.000.000,00	Jumlah hari pelaksanaan personel lapangan yang tidak sesuai
						Inspection Engineer	7.000.000,00	5	14.000.000,00	Jumlah hari pelaksanaan personel lapangan yang tidak sesuai
8	Konsultan Pengawasan Pembangunan Kawasan Wisma PKK	CV CBC	398.823.000,00	600/22/KPA.02/SPK/KPPKWPKK/D-PUTR.PALI/III/2024	29 March 2024	Inspection Engineer	7.000.000,00	5	14.000.000,00	Jumlah hari pelaksanaan personel lapangan yang tidak sesuai
						Inspector	7.000.000,00	6	42.000.000,00	Personel yang tidak sesuai dengan persyaratan
9	Konsultan Penagwasan Landscape Kantor Kejaksaan dan Fasilitas Penunjang Lainnya	CV CBC	198.989.000,00	600/122/KPA.02/SPK/KPLKDFPL/DP-UTR.PALI/VII/2024	15 July 2024	Inspector	7.000.000,00	2	14.000.000,00	Personel yang tidak sesuai dengan persyaratan
Total Jumlah A									420.000.000,00	
B Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman										
1	Konsultan Perencanaan Drainase Lingkungan	CV MR	99.600.000,00	028/373/SPK/PT/DPKP/XII/2024	06 Desember 2024	Team Leader	16.000.000,00	0,80	12.800.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Surveyor	6.500.000,00	0,80	5.200.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
2	Konsultan Perencanaan PSU Lainnya	CV MA	99.567.000,00	028/400/SPK/PR/DPKP/XII/2024	03 Desember 2024	Surveyor	9.375.000,00	0,80	7.500.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
3	Konsultan Perencanaan Jalan Lingkungan	CV REK	99.733.000,00	028/395/SPK/ST/DPKP/XI/2024	8-Nov-24	TEAM LEADER	10.000.000,00	2,00	2.000.000,00	Jumlah hari pelaksanaan personel lapangan yang tidak sesuai
						Surveyor	7.000.000,00	2,00	1.400.000,00	Jumlah hari pelaksanaan personel lapangan yang tidak sesuai
						Drafman	3.500.000,00	2,00	700.000,00	Jumlah hari pelaksanaan personel lapangan yang tidak sesuai
						Operator Komputer	3.000.000,00	2,00	600.000,00	Jumlah hari pelaksanaan personel lapangan yang tidak sesuai
						Office Boy	2.000.000,00	2,00	400.000,00	Jumlah hari pelaksanaan personel lapangan yang tidak sesuai
						Assisten Surveyor	3.500.000,00	2,00	700.000,00	Jumlah hari pelaksanaan personel lapangan yang tidak sesuai
						Assisten Surveyor	3.500.000,00	2,00	700.000,00	Jumlah hari pelaksanaan personel lapangan yang tidak sesuai
						Assisten Surveyor	3.500.000,00	2,00	700.000,00	Jumlah hari pelaksanaan personel lapangan yang tidak sesuai
4	Konsultan Perencanaan Sarana dan Prasarana	CV MA	99.456.000,00	028/401/SPK/PR/DPKP/XII/2024	03 Desember 2024	Team Leader	21.250.000,00	0,80	17.000.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
Jumlah B									49.000.000,00	
C Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
Jasa Konsultan Konstruksi										
1	Jasa Konsultansi Perencanaan Sodedan Sungai Penukal Ke Kawasan Danau Burung	CV UPM	997.256.000,00	027/01/SP/BPBD/IV/2024	04 April 2024	Ahli Geodesi	19.500.000,00	3,50	68.250.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Ahli Geoteknik	19.500.000,00	3,50	68.250.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Ahli Estimasi Biaya	19.500.000,00	3,50	68.250.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
						Asisten Ahli Sumber Daya Air	7.950.000,00	3,50	27.825.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
Jasa Konsultan Non Konstruksi										
2	Jasa Konsultasi Data Base Warga yang Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten PALI	CV HMS	398.829.000,00	027/06/SP/BPBD/VII/2024	01 Juli 2024	Ahli Teknik Lingkungan	19.504.000,00	2,5	48.760.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
3	Jasa Konsultasi Data Base Warga yang Terdampak Bencana Banjir di Kecamatan Talang Ubi	CV UPM	398.995.000,00	027/26/SP/BPBD/XI/2024	14 November 2024	Ahli Estimasi Biaya	19.498.000,00	1,5	29.247.000,00	Personel yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
Jumlah C									310.582.000,00	
Jumlah A + B + C									779.582.000,00	

No	Nama Paket Pekerjaan	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Item Pekerjaan	Volume				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
					Volume Kontrak/ Back Up	Volume Fisik yang Terpasang	Selisih	Sat		
19	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun II Desa Mangkunegara	CV RP	199.638.000,00	Beton Jalan Ad, 1;2;3, Semi Mekanis	60,00	57,99	2,01	m3	1.870.713,78	3.760.134,70
				Lapis Pondasi Sirtu	40,00	34,00	6,00	m3	495.897,25	2.975.383,50
										6.735.518,20
20	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tempirai Selatan 2	CV ZHI	199.649.000,00	Beton Jalan Ad, 1;2;3, Semi Mekanis	45,00	39,88	5,12	m3	1.870.713,78	9.582.731,34
				Lapis Pondasi Sirtu	30,00	21,00	9,00	m3	495.897,25	4.463.075,25
										14.045.806,59
21	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mangkunegara Timur	CV FBP	199.591.000,00	Beton Jalan Ad, 1;2;3, Semi Mekanis	60,00	52,50	7,50	m3	1.870.713,78	14.030.353,35
				Lapis Pondasi Sirtu	40,00	35,00	5,00	m3	495.897,25	2.479.486,25
										16.509.839,60
22	Pembangunan Jalan Lingkungan Talang Anyar Desa Purun	CV FBP	199.582.000,00	Beton Jalan Ad, 1;2;3, Semi Mekanis	60,00	56,53	3,47	m3	1.870.713,78	6.482.210,32
										6.482.210,32
23	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Beruge Darat	CV FBP	397.553.000,00	Urugan Sirtu Padat	224,67	162,18	62,49	m3	495.897,25	30.987.974,49
										30.987.974,49
24	Pembangunan Pagar TPU Desa Tanjung Kurung	CV NJ	397.131.000,00	PEKERJAAN PONDASI						-
				Pondasi Batu Bata (8x8x16) cm, 1 Pc: 4 Ps	20,85	12,60	8,25	M3	1.558.128,02	12.854.556,17
				PEKERJAAN BETON						-
				Beton Pondasi Tapak, Ad. 1 Pc : 2 Ps : 3 Sp, Semi-Mekanis	5,10	4,51	0,59	M3	1.850.695,41	1.095.611,68
				Bekisting Pondasi Tapak	27,44	17,89	9,56	M2	246.755,50	2.357.748,80
				Beton Sloof 20/20, Ad. 1 Pc : 2 Ps : 3 Sp, Semi-Mekanis	5,49	4,97	0,52	M3	1.850.695,41	954.366,61
				Bekisting Sloof	27,44	27,07	0,37	M2	259.980,50	95.797,61
				Beton Balok 20/20, Ad. 1 Pc : 2 Ps : 3 Sp, Semi-Mekanis	5,49	4,97	0,52	M3	1.850.695,41	954.366,61
				Bekisting Balok	40,16	39,61	0,55	M2	396.382,00	219.088,26
				PEKERJAAN PEMASANGAN BATA MERAH						-
				- Pekerjaan Pasang Bata Merah (8x8x16) cm Tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 3 Ps	222,40	220,99	1,41	M2	153.007,74	215.434,90
										18.746.970,64
25	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Prabumenang 4	CV RWM	644.923.000,00	Beton Jalan Ad, 1;2;3, Semi Mekanis	202,50	199,42	3,08	m3	1.859.501,52	5.731.913,44
				- Pekerjaan Beton Kolom 20/20, Ad. 1 Pc : 2 Ps : 3 Sp, Semi Mekanis	3,42	3,28	0,14	m3	1.841.929,85	249.765,69
										5.981.679,13
26	Pembangunan Pagar Kantor Kejaksaan	CV AJP	397.166.000,00	- Pekerjaan Beton Balok 15/20, Ad. 1 Pc : 2 Ps : 3 Sp, Semi Mekanis	2,57	2,02	0,55	m3	1.841.929,85	1.007.535,63
										1.007.535,63
27	Pembangunan Jalan Lingkungan Puyang Dusun Tua Desa Tanjung Kurung	CV FBP	496.865.000,00	Timbunan biasa dari sumber galian	216.827,05	55.993,18	160.833,87	m3	1380,83	222.083.428,54
										222.083.428,54
										490.644.128,49

No	Nama Paket Pekerjaan	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Item Pekerjaan	Volume				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
					Volume Kontrak/ Back Up	Volume Fisik yang Terpasang	Selisih	Sat		
B Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan										
1	Rehab Kantor Camat Talang Ubi	CV RP	298.068.000,00	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 20.40 mm, Modul 60x60 cm. untuk Plafond	442,61	270,25	172,36	m2	148.378,75	25.575.154,87
				Pemasangan 1 m2 Langit-langit Papan Gypsum tebal 9 mm.	442,61	270,25	172,36	m2	63.449,33	10.936.380,32
				PEKERJAAN WATER PROOFING						-
				Water Proofing Treatment 2 kali	606,36	424,05	182,31	m2	143.986,71	26.250.217,10
				PEKERJAAN SANITASI						-
				Pemasangan 1 buah closet duduk	2,00	-	2,00	Buah	2.663.569,17	5.327.138,34
					Jumlah					68.088.890,63
2	Rehab Total Rumah Dinas Bupati	CV FRU	1.993.146.000,00	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Uk. 40x40 Cm	148,87	27,96	120,91	m²	301.517,00	36.456.420,47
				Pembuatan 1 m3 Beton Mutu Fc 14,5 Mpa	3,19	2,69	0,50	m³	1.810.135,00	909.592,84
				Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk kolom beton bangunan gedung	56,40	43,00	13,40	m²	422.134,00	5.656.595,60
				Pek. Pemasangan 1 Buah Toren Eksisting	2,00	1,00	1,00	Buah	1.200.000,00	1.200.000,00
				Pemasangan 1 buah Floor Drain	8,00	-	8,00	Buah	71.530,00	572.240,00
					Jumlah					44.794.848,91
					Total Jumlah B					112.883.739,54
					Total Jumlah A + B					603.527.868,03

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

(dalam rupiah)

No	Penyedia	Nama Paket/ Item Pekerjaan	Nilai Kontrak	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Selisih	Harga Satuan	Jumlah Harga	Nilai Kelebihan Bayar
A Pekerjaan Jalan Irigasi Jaringan										
1	CV Gjm	Peningkatan Jalan Handayani - Talang Anding - Sumberejo (DAK)	5.642.287.000,00							122.138.118,49
		Laston Lapis Aus (AC-WC)		Ton	1.939,01	1.886,87	52,14	2.183.075,03	113.825.532,06	
		Laston Antara (AC-BC)		Ton	275,49	271,55	3,94	2.109.793,51	8.312.586,43	
2	PT KJP	Peningkatan Jalan Handayani - Talang Anding - Sumberejo	3.280.956.000,00							357.436.521,57
		Laston Lapis Aus (AC-BC)		Ton	1.331,85	1.170,58	161,27	2.118.339,68	341.629.300,35	
		Koreksi Harga Satuan Atas Density							15.807.221,22	
3	CV Hnb	Peningkatan Jalan Desa Sungai Baung	2.984.806.000,00							44.844.680,97
		Laston Lapis Aus (AC-BC)		Ton	1.209,06	1.187,92	21,14	2.121.297,96	44.844.680,97	
4	CV Hnb	Peningkatan Jalan Simpang 5 Pendopo - Talang Akar - Batas Kabupaten Muba	8.219.881.000,00							237.129.380,74
		Laston Lapis Aus (AC-BC)		Ton	3.394,23	3.338,05	56,18	2.108.215,99	118.437.663,22	
		Koreksi Harga Satuan Atas Density							118.691.717,52	
5	CV Hnb	Peningkatan Jalan Simpang 3 Talang Ojan - Simpang 4 Sungai Ibul - Tanjung Baru	3.765.568.000,00							200.678.520,25
		Laston Lapis Aus (AC-BC)		Ton	1.537,70	1.493,67	44,03	2.108.215,99	92.820.167,97	
		Koreksi Harga Satuan Atas Density							107.858.352,28	
6	CV Knz	Peningkatan jalan dalam kota	3.370.602.000,00							232.933.108,30
		Laston Lapis Aus (AC-WC)		Ton	1.373,73	1.334,13	39,60	2.108.215,99	83.475.072,84	
		Koreksi Harga Satuan Atas Density							149.458.035,46	
7	CV Knz	Peningkatan Jalan Simpang 4 Sungai Ibul - Babat (DAU)	6.176.319.000,00							402.903.957,74
		Laston Lapis Aus (AC-BC)		Ton	2.542,95	2.431,00	111,95	2.108.807,41	236.080.361,96	
		Koreksi Harga Satuan Atas Density							166.823.595,78	
8	CV MS	Lanjutan Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkar Handayani Mulya	2.980.396.000,00							91.173.241,48
		Perkerasan Beton Semen		m ³	426,38	424,10	2,28	2.577.670,01	5.877.087,62	
		Lapis Pondasi Beton Kurus		m ²	284,25	261,57	22,68	1.852.882,06	42.030.230,05	
		Beton Struktur Fc' 20 Mpa		m ³	103,12	101,81	1,31	2.387.570,23	3.127.239,49	
		Beton Fc' 10 Mpa		m ³	24,00	-	24,00	1.672.445,18	40.138.684,32	
9	PT MIB	Peningkatan Jalan Talang Baru - Pasar Bhayangkara (Bangub)	6.714.955.000,00							10.511.917,80
		Perkerasan Beton Semen		m ³	716,25	712,17	4,08	2.579.084,31	10.511.917,80	
10	CV ADV	Pembangunan Jalan dan Drainase Telaga Kembang Kelurahan Handayani Mulya	1.478.299.000,00							135.657.182,10
		Perkerasan Beton Semen		m ³	213,63	213,06	0,57	2.544.188,18	1.451.459,36	
		Lapis Pondasi bawah Beton Kurus		m ³	142,42	130,67	11,75	1.826.475,68	21.456.523,05	
		Koreksi HS atas Hasil Uji Mutu Perkerasan Beton Semen K-250		m ³					112.749.199,69	
11	PT KJP	Peningkatan Jalan Tanah Abang - Purun	5.750.789.000,00							567.964.521,96
		Laston Lapis Aus (AC-BC)		Ton	2.322,73	2.162,41	160,32	2.114.723,99	339.039.867,92	
		Koreksi Harga Satuan Atas Density							228.924.654,04	
12	PT KJP	Peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Tanah Abang	2.970.061.000,00							209.246.302,93
		Laston Lapis Aus (AC-BC)		Ton	672,44	640,39	32,05	2.108.150,01	67.566.459,50	
		Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		Liter	8.394,25	3.128,63	5.265,62	19.640,06	103.417.112,38	
		Koreksi Harga Satuan Atas Density							38.262.731,05	
13	CV RJ	Peningkatan Jalan Simpang Suka Damai - Kota Baru (Bangub)	1.866.823.000,00							327.275.484,28
		Perkerasan Beton Semen		m ³	324,86	302,79	22,07	2.582.145,71	56.996.287,54	
		Lapis Pondasi bawah Beton Kurus		m ³	216,58	151,02	65,56	1.618.300,08	106.088.851,19	
		Koreksi HS atas Hasil Uji Mutu Perkerasan Beton Semen K-250		m ³					164.190.345,54	
14	CV DP	Peningkatan Jalan Penantian - Karang Tanding	8.041.641.000,00							252.004.294,34
		Perkerasan Beton Semen		m ³	1.200,00	1.193,09	6,91	3.016.217,91	20.857.146,85	
		Lapis Pondasi bawah Beton Kurus		m ³	600,00	596,54	3,46	1.618.300,08	5.595.272,53	
		Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal		m ³	840,00	802,72	37,28	755.428,16	28.161.984,09	
		Beton Struktur Fc' 20 Mpa		m ³	194,09	136,53	57,56	2.395.995,24	137.922.111,60	
		Beton Fc' 10 Mpa		m ³	67,09	60,81	6,28	1.673.273,87	10.515.656,17	
		Baja Tulangan Polos B1TP 280		Kg	6.403,82	5.405,02	998,80	22.421,16	22.394.254,61	
		Marka Termoplastik		m ³	267,00	238,76	28,25	158.582,17	4.479.153,39	
		Koreksi HS atas Hasil Uji Mutu Perkerasan Beton Semen K-300		m ³					22.078.715,10	
15	CV DW	Lanjutan Peningkatan Jalan Penantian - Karang Tanding	7.341.672.000,00							703.984.400,10
		Perkerasan Beton Semen		m ³	602,97	593,69	9,28	3.022.470,88	28.039.462,35	
		Lapis Pondasi bawah Beton Kurus		m ³	301,49	288,46	13,03	1.850.830,13	24.112.917,24	
		Laston Lapis Antara (AC-BC)		Ton	1.667,58	1.520,32	147,26	2.107.077,87	310.286.805,49	
		Koreksi HS atas Hasil Uji Mutu Density AC-BC							296.816.756,35	
		Koreksi HS atas Hasil Uji Mutu Perkerasan Beton Semen K-300		m ³					44.728.458,68	
16	CV AJP	Lanjutan Pembangunan Jalan Menuju TPU Talang Pegang	1.081.652.000,00							25.773.883,47
		Lapis Pondasi bawah Beton Kurus		m ³	122,80	108,72	14,08	1.831.107,82	25.773.883,47	
17	SSP	Peningkatan Jalan Simpang 4 Sebadak Desa Kartadewa Kecamatan Talang Ubi	2.968.965.000,00							23.262.049,84
		Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m ³	375,00	364,16	10,84	983.601,53	10.662.243,04	
		Koreksi HS atas Hasil Uji Mutu Perkerasan Beton Semen K-250		m ³					12.599.806,80	
18	CV ASA	Peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Talang Ubi (Aspal)	4.897.103.000,00							419.141.294,11
		Laston Lapis Aus (AC-BC)		Ton	1.942,05	1.828,10	113,95	2.076.804,58	236.650.329,11	
		Koreksi Harga Satuan Atas Density							182.490.965,00	
19	CV NJ	Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkar Swadaya Desa Betung Barat	1.491.652.000,00							113.588.133,63
		Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m ³	180,00	153,48	26,52	995.209,34	26.392.276,20	
		Beton Struktur Fc' 20 Mpa		m ³	82,13	81,08	1,05	2.369.618,05	2.479.094,40	
		Koreksi HS atas Hasil Uji Mutu Perkerasan Beton Semen K-250		m ³					84.716.763,03	
20	CV NU	Peningkatan Jalan Kecamatan Abab	4.776.049.000,00							673.026.620,89
		Laston Lapis Aus (AC-BC)		Ton	2.014,33	1.888,74	125,59	2.005.394,15	251.851.961,72	
		Koreksi Harga Satuan Atas Density							421.174.659,17	
21	AP	Pengerasan Jalan di Kelurahan Handayani Mulya	1.483.295.000,00							19.176.388,31
		Lapisan Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal		m ²	1.575,89	1.550,14	25,75	744.589,77	19.176.388,31	
22	CV IPI	Pengerasan Jalan Lingkar Handayani Mulya - Bernai	695.366.000,00							13.995.356,89
		Lapisan Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal		m ²	430,72	412,14	18,58	753.319,44	13.995.356,89	
23	CV RJ	Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah Kawasan Kantor DPRD PALI	1.787.231.000,00							186.625.775,12
		Beton Struktur Fc' 20 Mpa		m ³	262,91	227,98	34,93	2.386.100,18	83.344.588,30	
		Beton Fc' 10 Mpa		m ³	49,25	42,13	7,12	1.672.813,87	11.906.880,02	
		Baja Tulangan Polos B1TP-280		Kg	15.981,68	14.707,40	1.274,28	22.329,16	28.453.594,34	
		Pasangan Batu		m ³	130,00	87,96	42,04	1.491.026,84	62.682.768,35	
		Galian Biasa		m ³	3.082,13	3.079,31	2,83	84.228,00	237.944,10	
24	CV IPI	Pengerasan Jalan Dusun Sungai Mang Desa Suka Damai	496.492.000,00							6.588.053,10
		Lapisan Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal		m ²	469,34	460,52	8,82	746.690,82	6.588.053,10	
25	PT HAS	Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi	19.699.780.000,00							197.137.921,25
		Perkerasan Beton Semen		m ³	157,17	143,96	13,21	2.027.011,02	26.781.376,35	
		Pekerjaan pengadaan/pemasangan besi IWF 250 x 125		Kg	1.480,00	1.285,00	195,00	39.850,95	7.770.935,25	
		Pengadaan GIP 100 mm		m	32,00	20,80	11,20	350.750,00	3.928.400,00	
		Pemasangan GIP 100 mm		m	32,00	20,80	11,20	96.703,50	1.083.079,20	
		Koreksi HS atas Hasil Uji Mutu Perkerasan Beton Semen K-							157.574.130,54	
26	CV LK	Lanjutan Pembangunan Pipa Transmisi	2.348.533.000,00							116.466.669,78

No	Penyedia	Nama Paket/ Item Pekerjaan	Nilai Kontrak	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Selisih	Harga Satuan	Jumlah Harga	Nilai Kelebihan Bayar
		Perkerasan Beton Semen		m ³	51,67	-	51,67	2.064.379,75	106.666.501,68	
		Lapisan Pondasi Agregat Kelas B		m ³	9,96		9,96	983.952,62	9.800.168,10	
27	CV BSM	Pembangunan Drainase Desa Sungai Baung Kec. Talang Ubi	994.809.000,00							133.504.430,32
		Beton Struktur Fc' 20 Mpa		m ³	201,07	176,25	24,82	2.375.428,73	58.958.141,08	
		Beton Fc' 10 Mpa		m ³	46,35	-	46,35	1.608.334,18	74.546.289,24	
28	CV ASM	Pembangunan Drainase Induk RW 02 dan 03 Kel. Pasar Bhayangkara	596.233.000,00							9.299.695,98
		Galian Biasa		m ³	387,10	379,26	7,84	84.318,94	661.060,49	
		Baja Tulangan (BJTP-280)		m ³	3.390,00	3.281,00	109,00	22.366,66	2.437.965,94	
		Pasangan Batu		m ³	125,45	121,30	4,15	1.494.137,24	6.200.669,55	
29	CV ASMa	Pembangunan Jembatan Mata Panjang Desa Raja Barat	7.424.947.000,00							170.744.166,76
		Beton Struktur Fc' 20 Mpa		m ³	371,00	329,82	41,18	2.881.602,81	118.664.403,72	
		Lapisan Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal		m ³	94,50	20,99	73,51	708.491,09	52.079.763,04	
30	CV DA	Pembangunan Jembatan Air Deras Kota Baru (Bangub)	5.736.786.000,00							807.108.906,67
		Beton Struktur Fc' 20 Mpa		m ³	326,00	158,70	167,30	2.879.109,86	481.687.479,90	
		Beton Struktur Fc' 30 Mpa		m ³	25,84	19,73	6,11	3.065.874,70	18.724.277,87	
		Baja Tulangan Strip		Kg	41.385,00	30.090,07	11.294,93	22.415,41	253.180.496,02	
		Tiang Bor Beton diameter 500 mm		m	360,00	360,00	-	2.617.231,49	-	
		Lapisan Pondasi Agregat Kelas B		m ³	56,70	28,35	28,35	996.780,44	28.258.725,47	
		Lapisan Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal		m ³	70,20	35,10	35,10	719.599,08	25.257.927,71	
		Sondir termasuk laporan		m	36,00	36,00	-	367.950,00	-	
31	CV EDC	Pembangunan Jalan di Kawasan RSUD Talang Ubi	496.134.000,00							17.386.595,71
		Perkerasan Beton Semen		m ³	77,25	76,47	0,78	2.557.158,98	1.996.310,09	
		Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m ³	77,25	62,22	15,03	995.209,34	14.961.387,80	
		Lapis Pondasi Beton Kurus		m ³	25,75	25,49	0,26	1.648.180,68	428.897,82	
32	CV AA	Pembangunan Jalan Lingkar Tempirai	994.316.000,00							27.110.498,01
		Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m ³	75,00	71,66	3,34	994.852,24	3.323.815,10	
		Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal		m ³	633,75	602,11	31,64	751.782,11	23.786.682,91	
33	CV ANM	Drainase Desa Karang Agung	496.375.000,00							9.425.826,52
		Beton Fc' 10 Mpa		m ³	19,95	14,10	5,85	1.610.701,73	9.425.826,52	
34	CV BSM	Pembangunan Drainase Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi	646.152.944,75							25.236.537,06
		Beton Fc' 10 Mpa		m ³	31,87	16,16	15,71	1.606.317,76	25.236.537,06	
35	CV SKB	Pembangunan Drainase Kelurahan Handayani Mulya	497.422.000,00							8.270.396,08
		Beton Fc' 10 Mpa		m ³	25,97	21,02	4,95	1.672.138,31	8.270.396,08	
36	CV RP	Pembangunan Drainase Desa Tanjung Baru Kecamatan Penukal Utara	992.256.000,00							19.511.726,83
		Beton Fc' 10 Mpa		m ³	43,41	34,77	8,64	1.608.643,81	13.900.741,58	
		Beton Fc' 20 Mpa		m ³	199,25	196,89	2,36	2.378.664,98	5.610.985,25	
37	CV KA	Pembangunan Dinding Penahan Tanah Dikelurahan Handayani Mulya	479.149.000,00							17.258.635,67
		Beton Fc' 10 Mpa		m ³	257,98	246,41	11,58	1.491.026,84	17.258.635,67	
38	CV KP	Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah Simpang Raja	496.108.000,00							12.294.729,65
		Beton Fc' 10 Mpa		m ³	15,48	14,76	0,72	1.596.549,94	1.149.515,96	
		Beton Fc' 20 Mpa		m ³	37,92	36,16	1,76	2.368.110,18	4.163.137,70	
		Pasangan Batu		m ³	100,60	95,94	4,66	1.498.299,57	6.982.076,00	
39	CV BSM	Pembangunan Drainase Desa Rejosari	993.489.000,00							14.438.333,18
		Beton Fc' 10 Mpa		m ³	46,24	44,56	1,68	1.606.317,76	2.695.401,20	
		Beton Fc' 20 Mpa		m ³	195,01	190,07	4,94	2.375.428,74	11.742.931,98	
		Jumlah Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Irigasi Jaringan								6.962.254.257,90

No	Penyedia	Nama Paket/ Item Pekerjaan	Nilai Kontrak	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Selisih	Harga Satuan	Jumlah Harga	Nilai Kelebihan Bayar
B. Pekerjaan Gedung dan Bangunan										
1	CV PUL	Pembangunan Pelataran Parkir 3 OPD	1.787.036.000,00							134.718.766,43
		Pembuatan 1 m3 Lantai Kerja beton mutu Fc 7,4 Mpa		m³	223,75	115,94	107,81	1.249.614,63	134.718.766,43	
2	CV DMB	Pematangan Lahan OPD	4.956.633.000,00							849.989.714,16
		Timbunan Biasa Dari Sumber Galian		m³	19.321,91	15.395,38	3.926,54	216.473,23	849.989.714,16	
3	CV DPS	Pembangunan Lapangan Bola Kaki Desa Air Itam	1.978.670.000,00							61.113.848,81
		Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m³	15.810,00	12.480,00	3.330,00	15.950,32	53.114.565,60	
		Pembuatan 1 m3 Beton Mutu F'c 14,5 Mpa		m³	3,60	1,90	1,70	1.805.328,32	3.064.364,29	
		Pembesian 1 Kg dengan Besi Besi Polos atau Besi Ulir		Kg	197,37	104,31	93,06	21.042,12	1.958.162,85	
		Pemasangan 1 m3 Bekisting		M2	24,00	12,68	11,32	263.057,27	2.976.756,07	
4	CV NJ	Lanjutan Pembangunan Gedung SMA N 2	1.979.596.000,00							28.726.219,22
		Pekerjaan Pembuatan Balok		m³	67,56	64,94	2,62	1.870.659,90	4.901.128,94	
		Pekerjaan Bekisting		m³	604,53	581,78	22,75	405.632,79	9.229.160,05	
		Pek. Jendela Bouvenli BV1, Rangka Aluminium		Unit	10,00	8,00	2,00	331.931,40	663.862,80	
		Pek. Jendela Bouvenli BV2, Rangka Aluminium		Unit	2,00	-	2,00	732.195,80	1.464.391,60	
		Penambahan Daya Baru PLN 6.600VA		Unit	-	-	-	-	8.033.187,00	
		Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak Listrik		Unit	21,00	8,00	13,00	191.332,54	2.487.323,02	
		Pek. Pemasangan 1 Buah Lampu TL 2x18 Watt + Kap Penutup		Buah	25,00	24,00	1,00	330.776,19	330.776,19	
		Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda		Buah	7,00	2,00	5,00	77.341,09	386.705,45	
		Pemasangan 1 Buah Stop Kontak Listrik 220 Watt		Buah	21,00	8,00	13,00	94.591,09	1.229.684,17	
5	CV JWP	Pembangunan Pagar TPU Desa Tanjung Baru Kec. Penukal Utara	995.314.000,00							12.474.688,68
		Pemasangan Pondasi Batu Kali 1PC:3PP		m³	103,90	96,51	7,39	1.688.849,75	12.474.688,68	
6	CV API	Lanjutan Pembangunan Gedung Bappeda	2.178.242.000,00							40.284.500,00
		Penambahan Daya Baru PLN 105 KVA		ls	1,00	1,00	-	-	26.053.250,00	
		SLO + NIDI		ls	1,00	1,00	-	-	14.231.250,00	
7	CV TT	Lanjutan Pembangunan Gedung POL PP	2.178.168.000,00							40.284.500,00
		Penambahan Daya Baru PLN 105 KVA		ls	1,00	1,00	-	-	26.053.250,00	
		SLO + NIDI		ls	1,00	1,00	-	-	14.231.250,00	
8	CV TT	Lanjutan Pembangunan Gedung DPMPTSP	2.177.429.000,00							40.284.500,00
		Penambahan Daya Baru PLN 105 KVA		ls	1,00	1,00	-	-	26.053.250,00	
		SLO + NIDI		ls	1,00	1,00	-	-	14.231.250,00	
9	CV FRU	Interior Gedung Paripurna	5.895.447.000,00							57.714.643,80
		Pemasangan 1 m List Tangga		m	202,63	-	202,63	96.466,21	19.546.948,13	
		Stop Kontak AC		Buah	23,00	10,00	13,00	163.591,09	2.126.684,17	
		Pek Railing Stainless		m	62,40	60,04	2,36	1.121.250,00	2.646.150,00	
		Stage (+1.80)		m²	33,57	31,89	1,68	1.909.000,00	3.204.256,50	
		Kolom Elv. 180		m²	75,63	61,16	14,47	1.909.000,00	27.623.230,00	
		Meja Lobby		m²	12,30	11,35	0,95	2.702.500,00	2.567.375,00	
10	CV ADV	Penyelesaian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	9.774.599.000,00							98.832.208,13
		Kloset Duduk			39,00	30,00	9,00	2.928.362,56	26.355.263,04	
		Wastafel			60,00	50,00	10,00	1.443.297,19	14.432.971,90	
		Jet Washer			60,00	30,00	30,00	204.536,53	6.136.095,90	
		Floor drain			66,00	36,00	30,00	71.372,63	2.141.178,90	
		Kran Dinding			25,00	22,00	3,00	195.299,29	585.897,87	
		Lampu TL LED 2 x 16 W / Type RM Cover Acrylic			57,00	46,00	11,00	895.427,72	9.849.704,92	
		Emergency Lamp			10,00	9,00	1,00	578.724,00	578.724,00	
		Saklar Tunggal			78,00	67,00	11,00	71.433,59	785.769,49	
		Saklar Ganda			80,00	54,00	26,00	77.170,94	2.006.444,44	
		Stop Kontak			262,00	153,00	109,00	94.382,99	10.287.745,91	
		Instalasi Stop Kontak			262,00	153,00	109,00	190.911,61	20.809.365,49	
		Socket Outlet Data LAN			45,00	39,00	6,00	96.895,70	581.374,20	
		Titik Instalasi Socket Data, UTP - 6 dalam conduit			45,00	39,00	6,00	611.651,40	3.669.908,40	
		Outlet Telepon			45,00	38,00	7,00	87.394,81	611.763,67	
11	CV SAP	Landscape Kantor Kejari PALI	5.494.848.000,00							530.764.550,00
		Laston Lapis Fondasi (AC-Base)		Ton	227,89	212,06	15,83	2.090.862,15	33.095.381,06	
		Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair/Emulsi		Liter	11.621,14	4.941,33	6.679,81	21.697,20	144.933.195,23	
		Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		Liter	4.867,97	1.729,47	3.138,50	19.642,06	61.646.700,57	
		Pekerjaan Taman							160.904.205,00	
		Pekerjaan Tanaman Pot Hias							250.000,00	
		Penggalian Tanah Biasa sedalam s.d 1 m		m³	77,44	42,68	34,77	104.075,00	3.618.167,38	
		Pembuatan 1 m³ Beton Mutu F'c 9,8 Mpa (K-125)		m³	15,49	8,54	6,96	1.379.815,52	9.596.616,94	
		Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah		m²	247,80	136,56	111,24	219.454,05	24.412.068,52	
		Pemasangan 1 m² Plesteran		m²	247,80	136,56	111,24	92.868,71	10.330.715,30	
		Pekerjaan Grill Penutup Saluran Air		m	319,75	170,70	149,05	550.000,00	81.977.500,00	
		Jumlah Kekurangan Volume Gedung Bangunan								1.895.188.139,23
C. Pekerjaan Peralatan dan Mesin										
1	CV FRU	Mebeler dan AC Gedung Paripurna	2.995.404.000,00							15.356.013,25
		Pemasangan 1 m Kabel NYY 6 mm		m	25,00	-	25,00	64.975,00	3.248.750,00	
		Pemasangan 1 m Kabel NYY 16 mm		m	25,00	-	25,00	70.035,00	3.501.750,00	
		Pemasangan 1 m Kabel NYY 50 mm		m	25,00	-	25,00	75.095,00	3.754.750,00	
		Pemasangan 1 m Kabel NYM 4 x 2,5 mm		m	72,20	22,00	50,20	96.628,75	4.850.763,25	
		Jumlah Kekurangan Volume Peralatan dan Mesin								15.356.013,25
JUMLAH										8.872.798.410,37

Rekapitulasi Ketidaksesuaian Dokumen Kualifikasi Penyedia

No	Persyaratan LDK yang Tidak Terpenuhi oleh Penyedia	Jumlah Pekerjaan dengan Kualifikasi Penyedia yang Tidak Sesuai LDK	Nama Penyedia
1	Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)	2	CV NU CV DP
2	Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir	8	CV NU PT KJP CV Knz CV RJ CV Gjm CV Hnb CV DA
3	Membuat Jadwal Waktu Pelaksanaan (Kurva S)	10	CV NU CV DW PT KJP CV Knz CV RJ CV Hnb
4	Melampirkan surat pernyataan tidak akan menuntut kepada PA/PPK apabila pekerjaan ini dibatalkan, ditinjau kembali atau berkurangnya anggaran dalam DPA	1	CV NU
5	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha sesuai (bidang jasa konstruksi)	8	CV DW PT KJP CV DP CV RJ CV Gjm CV Hnb CV DA
6	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak	1	CV DP
7	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways (SI004) yang masih berlaku dan disahkan oleh lembaga yang berwenang	1	CV DA
8	Memiliki KBLI sesuai Pekerjaan	1	CV DA

Rekapitulasi Ketidaksesuaian Penawaran Penyedia dengan LDP

No	Nama Paket Pekerjaan	Nama Penyedia	Persyaratan LDP yang Tidak Terpenuhi oleh Penyedia
1	Peningkatan Jalan Kecamatan Abab	CV NU	a. Bukti kepemilikan untuk peralatan tandem roller yang disampaikan penyedia berbeda yaitu road roller. b. Bukti kepemilikan peralatan sewa bukan atas nama pemberi sewa untuk dump truck dan asphalt distributor.
2	Lanjutan Peningkatan Jalan Penantian - Karang Tanding	CV DW	a. Bukti kepemilikan untuk peralatan tandem roller yang disampaikan penyedia berbeda yaitu road roller. b. Bukti kepemilikan untuk peralatan concrete vibrator yang disampaikan penyedia berbeda yaitu mixer concrete. c. Tidak melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan untuk Petugas K3 Konstruksi, Pelaksana Lapangan, Tenaga Administrasi/Kuangan. d. Delapan identifikasi bahaya pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penyedia tidak sesuai LDP dan KAK. e. Bukti kepemilikan peralatan sewa bukan atas nama pemberi sewa untuk dump truck, generator set, wheel loader, truck mixer.
3	Peningkatan Jalan Handayani - Talang Anding - Sumberejo	PT KJP	a. Bukti kepemilikan untuk peralatan tandem roller yang disampaikan penyedia berbeda yaitu road roller. b. Bukti kepemilikan peralatan sewa bukan atas nama pemberi sewa untuk dump truck dan asphalt distributor.
4	Peningkatan Jalan Tanah Abang - Purun	PT KJP	a. Bukti kepemilikan untuk peralatan tandem roller yang disampaikan penyedia berbeda yaitu road roller. b. Sertifikat yang dilampirkan untuk Pelaksana Lapangan Jalan tidak sesuai dengan LDP dan KAK yaitu Pelaksana Pemeliharaan Jalan. c. Bukti kepemilikan peralatan sewa bukan atas nama pemberi sewa untuk dump truck dan asphalt distributor.
5	Peningkatan Jalan Penantian - Karang Tanding	CV DP	a. Bukti kepemilikan untuk peralatan tandem roller yang disampaikan penyedia berbeda yaitu road roller. b. Tidak Melampirkan bukti Kepemilikan untuk Thermoplastic spreading machine. c. SKT/SKK Petugas K3 Konstruksi yang disampaikan tidak sesuai yaitu Sertifikat Bimtek SMK3 Konstruksi Tahun 2012. d. 11 identifikasi bahaya pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penyedia tidak sesuai LDP dan KAK. e. Bukti kepemilikan peralatan sewa bukan atas nama pemberi sewa untuk dump truck 3-4 M3, dump truck 6-8 M3, excavator, generator set, wheel loader, tronton, truck mixer.
6	Peningkatan Jalan Simpang 4 Sungai Ibul - Babat (DAU)	CV Knz	a. Bukti kepemilikan untuk peralatan tandem roller yang disampaikan penyedia berbeda yaitu road roller. b. SKT/SKK Petugas K3 Konstruksi yang disampaikan tidak sesuai yaitu Sertifikat Bimtek SMK3 Konstruksi Tahun 2012. c. Pengalaman kerja Petugas K3 Konstruksi yang disampaikan tidak sesuai yaitu pengalaman kerja sebagai Kepala Pengawas. d. Tiga identifikasi bahaya pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penyedia tidak sesuai LDP dan KAK. e. Bukti kepemilikan peralatan sewa bukan atas nama pemberi sewa untuk dump truck, generator set, wheel loader.
7	Peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Tanah Abang	PT KJP	a. Bukti kepemilikan untuk peralatan tandem roller dan tire roller yang disampaikan penyedia berbeda yaitu road roller. b. SKT Pelaksana Lapangan yang disampaikan tidak sesuai yaitu SKT Pelaksana Pemeliharaan Jalan. c. Tidak melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan untuk Tenaga Administrasi/Kuangan. d. Bukti kepemilikan peralatan sewa bukan atas nama pemberi sewa untuk dump truck dan asphalt distributor.
8	Peningkatan Jalan Simpang Suka Damai - Kota Baru (BANGUB)	CV RJ	a. Bukti kepemilikan untuk peralatan track loader yang disampaikan penyedia berbeda yaitu wheel roller. b. Bukti kepemilikan untuk peralatan vibratory roller yang disampaikan penyedia berbeda yaitu tandem roller. c. Tidak ada bukti kepemilikan mesin potong rumput. d. SKT/SKK Petugas K3 Konstruksi yang disampaikan penyedia tidak sesuai yaitu Sertifikat Kemenaker Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menyatakan memenuhi syarat sebagai calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja. e. Sembilan identifikasi bahaya pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penyedia tidak sesuai LDP dan KAK. f. Bukti kepemilikan peralatan sewa bukan atas nama pemberi sewa untuk bulldozer, dump truck, excavator, motor grader, concrete vibrator, water tanker, truk mixer.
9	Peningkatan Jalan Handayani - Talang Anding - Sumberejo (DAK)	CV Gjm	a. Bukti kepemilikan untuk peralatan water tanker 3000-4500 L yang disampaikan penyedia berbeda yaitu tedmon air penguin TB 3000 L. b. Empat identifikasi bahaya pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penyedia tidak sesuai LDP dan KAK. c. Bukti kepemilikan peralatan sewa bukan atas nama pemberi sewa untuk dump truck dan asphalt distributor.
10	Peningkatan Jalan Simpang 5 Pendopo - Talang Akar - Batas Kabupaten MUBA	CV Hnb	a. Satu identifikasi bahaya pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penyedia tidak sesuai LDP dan KAK. b. Bukti kepemilikan peralatan sewa bukan atas nama pemberi sewa untuk dump truck, generator set, wheel loader, asphalt distributor.

No	Nama Paket Pekerjaan	Nama Penyedia	Persyaratan LDP yang Tidak Terpenuhi oleh Penyedia
11	Peningkatan Jalan Simpang 3 Talang Ojan - Simpang 4 Sungai Ibul - Tanjung Baru	CV Hnb	a. Tiga identifikasi bahaya pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penyedia tidak sesuai LDP dan KAK.
12	Peningkatan Jalan Dalam Kota	CV Knz	a. Bukti kepemilikan untuk peralatan tandem roller yang disampaikan penyedia berbeda yaitu road roller. b. Tidak melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan untuk Petugas K3 Konstruksi dan Tenaga Administrasi/Keuangan. c. Dua identifikasi bahaya pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penyedia tidak sesuai LDP dan KAK. d. Bukti kepemilikan peralatan sewa bukan atas nama pemberi sewa untuk dump truck, generator set, wheel loader.
13	Pembangunan Jembatan Air Deras Kota Baru (BANGUB)	CV DA	a. SKA/SKK Ahli K3 Konstruksi yang disampaikan penyedia tidak sesuai yaitu Sertifikat Kemenaker Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menyatakan memenuhi syarat sebagai calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja dan Keputusan Kementerian Tenaga Kerja tentang Penunjukkan Ahli K3 Umum. b. Pendidikan Ahli K3 Konstruksi yang disampaikan tidak sesuai yaitu Sarjana Ekonomi Manajemen. c. Pengalaman kerja Ahli K3 Konstruksi yang disampaikan penyedia tidak sesuai yaitu pengalaman kerja sebagai Ahli K3 Konstruksi pada pekerjaan jalan. d. Pendidikan Pelaksana Lapangan yang disampaikan penyedia tidak sesuai yaitu Sarjana Administrasi Negara. e. Pengalaman kerja Pelaksana Lapangan yang disampaikan tidak sesuai yaitu pengalaman kerja sebagai Pelaksana Lapangan pada pekerjaan jalan. f. Bukti kepemilikan peralatan sewa bukan atas nama pemberi sewa untuk dump truck, excavator, motor grader, wheel loader, vibratory loader, tronton, tandem roller, water tanker, truck mixer.

Rincian Pemahalan Pekerjaan *Landscape* Wisma PKK

No	Item Pekerjaan	Kontrak			Konfirmasi Penyedia		Selisih (Rp)	Nilai Pemahalan (Rp)
		Volume	Harga Satuan	Nilai	Harga Satuan	Nilai		
1	Pek 1 m2 Penanaman Rumput Gajah Mini	1050,49	92.875,15	97.564.416,32	70.000,00	73.534.300,00	22.875,15	24.030.116,32
2	Pek 1 Polybag Tanaman Palm Phoenix	57	2.579.450,00	147.028.650,00	2.000.000,00	114.000.000,00	579.450,00	33.028.650,00
3	Pek 1 Polybag Tanaman Bromelia	297	137.195,00	40.746.915,00	100.000,00	29.700.000,00	37.195,00	11.046.915,00
4	Pek 1 Polybag Tanaman Tanduk Rusa	44	171.695,00	7.554.580,00	140.000,00	6.160.000,00	31.695,00	1.394.580,00
5	Pek 1 Polybag Tanaman Kedaka	37	171.695,00	6.352.715,00	140.000,00	5.180.000,00	31.695,00	1.172.715,00
6	Pek 1 Polybag Tanaman Kucai	6885	58.995,00	406.180.575,00	40.000,00	275.400.000,00	18.995,00	130.780.575,00
7	Pek 1 m2 Penanaman Rumput Gajah Mini Parigata	225	267.675,15	60.226.908,75	190.000,00	42.750.000,00	77.675,15	17.476.908,75
8	Pek 1 Batang Tanaman Tabebuaya	11	751.812,50	8.269.937,50	500.000,00	5.500.000,00	251.812,50	2.769.937,50
9	Pek 1 Batang Tanaman Pule	3	817.937,50	2.453.812,50	600.000,00	1.800.000,00	217.937,50	653.812,50
10	Pek 1 Batang Tanaman Anting Putri	33	1.611.437,50	53.177.437,50	1.500.000,00	49.500.000,00	111.437,50	3.677.437,50
11	Pek 1 Batang Tanaman Beringin	49	1.942.062,50	95.161.062,50	1.700.000,00	83.300.000,00	242.062,50	11.861.062,50
12	Pek 1 Polybag Tanaman Bakung	1169	42.118,75	49.236.818,75	29.000,00	33.901.000,00	13.118,75	15.335.818,75
13	Pek 1 Polybag Tanaman Bromelia Tri Colour	551	138.143,75	76.117.206,25	100.000,00	55.100.000,00	38.143,75	21.017.206,25
JUMLAH				1.050.071.035,07		775.825.300,00		274.245.735,07

Rincian Pemahalan Harga Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	ANALISIS PEMAHALAN												Pemahalan Harga
			Volume Tender 1	Volume Tender 2	Volume CCO Final dan cek fisik	Harga Satuan Tender 1 (HPS 1)	Harga Satuan Tender 2 (HPS 2)	Harga Satuan Kontrak	Nilai Pekerjaan menggunakan Harga Tender 1 (HPS 1) 10 = (6X7)	Nilai Pekerjaan menggunakan Harga Tender 2 (HPS 2) 11 = (6X8)	Nilai Kontrak 12 = (6X9)	Harga setelah penyesuaian kurang volume 13	Selisih Harga 14 = (7-9)	15 = (6X14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	PEKERJAAN STRUKTUR														
1	: Tiang Bor Beton, diameter 500 mm	m'	1.524,00	1.140,00	1.140,00	999.687,18	2.371.581,06	2.371.581,06	1.139.643.385	2.703.602.408	2.703.602.408	1.706.088,20	706.401,02	805.297.162,80	
	LANTAI 1														
	Pekerjaan Pondasi Pile Cap														
2	a. Pembesian	kg	11.102,60	8.344,60	8.344,60	20.116,24	22.089,64	22.012,64	167.861.976	184.329.210	183.686.676		1.896	15.824.699,44	
	Pekerjaan Sloof Uk. 30x50 cm (S1)														
3	a. Pembesian	kg	7.492,38	5.442,17	5.442,17	20.116,24	22.089,64	22.012,64	109.475.998	120.215.576	119.796.529		1.896	10.320.531,19	
4	b. Bekisting Sloof	m2	358,31	259,62	259,62	222.953,50	309.578,50	305.288,50	57.883.188	80.372.770	79.259.000		82.335	21.375.812,70	
	Pekerjaan Sloof Uk. 20x40 cm (S2)														
5	a. Pembesian	kg	663,83	527,16	527,16	20.116,24	22.089,64	22.012,49	10.604.477	11.644.775	11.604.104		1.896	999.627,15	
6	b. Bekisting Sloof	m2	62,54	24,32	24,32	222.953,50	309.578,50	305.288,50	5.422.229	7.528.949	7.424.616		82.335	2.002.387,20	
	Pekerjaan Kolom uk. 40x40 cm (K1)														
7	a. Pembesian	kg	9.495,82	7.293,89	5.831,35	20.116,24	22.089,64	22.012,65	117.304.836	128.812.422	128.363.467		1.896	11.058.630,45	
8	b. Bekisting Kolom	m2	552,00	424,00	381,60	156.898,50	313.797,00	308.352,00	59.872.468	119.744.935	117.667.123		51.454	57.794.655,60	
	Pekerjaan Balok Uk. 30 x 50 cm (B1/BK1) Elv + 5.00														
9	a. Pembesian	kg	11.428,53	8.244,61	7.964,66	20.116,24	22.089,64	22.012,65	160.219.012	175.936.472	175.323.273		1.896	15.104.260,87	
10	b. Bekisting Balok	m2	465,80	356,32	344,14	159.786,00	319.572,00	314.129,64	54.988.754	109.977.508	108.104.574		154.344	53.115.820,27	
	Pekerjaan Balok Uk. 20 x 40 cm (B2/BK2)														
11	a. Pembesian	kg	944,67	944,67	130,04	20.116,24	22.089,64	22.012,74	2.615.916	2.872.537	2.862.537		1.897	246.620,86	
12	b. Bekisting Balok	m2	46,75	46,75	7,60	159.786,00	319.572,00	314.127,00	1.214.374	2.428.747	2.387.365		154.341	1.172.991,60	
	Pekerjaan Balok Uk. 40 x 75 cm (B4) Elv + 4.50 (item baru)														
13	a. Pembesian	kg		750,79	750,79	20.116,24		22.012,74	15.103.072				1.897	1.423.873,24	
14	b. Bekisting Balok	m2		14,82	14,82	159.786,00		314.127,00	2.368.029				154.341	2.287.333,62	
	Pekerjaan Plat. Beton tebal 12 cm Lantai 1														
15	a. Pembesian	kg		3.055,74	9.389,30	20.116,24	22.089,64	22.012,64	188.877.412	207.406.257	206.683.281		1.896	17.805.868,52	
16	b. Bekisting (item baru)	m2			349,26	244.937,00		484.429,00	85.546.697		169.191.673		239.492	83.644.975,92	
	Pekerjaan Tangga														
17	a. Pembesian	kg	1.474,60	1.474,60	2.025,25	20.116,24	22.089,64	22.012,67	40.740.415	44.737.043	44.581.160		1.896	3.840.744,86	
	LANTAI 2														
	Pekerjaan Balok Uk. 30 x 40 cm (B3) + 8.50														
18	a. Pembesian	kg		7.744,24	7.744,24	20.116,24		22.012,77	155.784.990		170.472.174		1.897	14.687.183,49	
19	b. Bekisting Balok	m2		281,82	281,82	159.786,00		314.127,00	45.030.891		88.527.271		154.341	43.496.380,62	
	Pekerjaan Balok Uk. 40 x 75 cm (B4) + 8.50														
20	a. Pembesian	kg			750,79	20.116,24		22.012,85	15.103.072		16.527.028		1.897	1.423.955,82	
21	b. Bekisting Balok	m2		14,82	14,82	159.786,00		314.127,00	2.368.029		4.655.362		154.341	2.287.333,62	
	Pekerjaan Balok Uk. 30 x 50 cm (B5) + 8.50														
22	a. Pembesian	kg			608,80	20.116,24		22.012,62	12.246.767		13.401.283		1.896	1.154.516,14	
23	b. Bekisting Balok	m2		30,02	30,17	159.786,00		314.127,00	4.820.744		9.477.212		154.341	4.656.467,97	
	Pekerjaan Balok Uk. 30 x 65 cm (B6) + 8.50														
24	a. Pembesian	kg			607,78	20.116,24		22.012,62	12.226.248		13.378.830		1.896	1.152.581,84	
25	b. Bekisting Balok	m2		22,43	22,43	159.786,00		314.127,00	3.584.000		7.045.869		154.341	3.461.868,63	
	Pekerjaan Balok Uk. 20 x 40 cm (B7) + 8.50														
26	a. Pembesian	kg			199,10	20.116,24		22.012,62	4.005.143		4.382.713		1.896	377.569,26	
27	b. Bekisting Balok	m2		15,20	15,20	159.786,00		314.127,00	2.428.747		4.774.730		154.341	2.345.983,20	
	Pekerjaan Balok Uk. 15 x 25 cm (B8)														
28	a. Pembesian	kg			648,44	20.116,24	22.089,64	22.012,62	13.044.175	14.323.806	14.273.863		1.896	1.229.688,65	
29	b. Bekisting Balok	m2			41,60	159.786,00	319.572,00	314.127,00	6.647.098	13.294.195	13.067.683		154.341	6.420.585,60	
	Pekerjaan Kolom Uk. 40 x 40 cm (K1)														
30	a. Pembesian	kg	6.610,69	5.077,77	4.356,95	20.116,24	22.089,64	22.012,63	87.645.452	96.243.457	95.907.928		1.896	8.262.476,41	
31	b. Bekisting Kolom	m2	397,44	305,28	305,28	156.898,50	313.797,00	308.352,00	47.897.974	95.795.948	94.133.699		151.454	46.235.724,48	
	Pekerjaan Plat Beton tebal 12 cm ELV.+5														
32	a. Pembesian	kg	8.568,66	5.985,20	11.799,81	20.116,24	22.089,64	22.012,64	237.367.810	260.653.555	259.744.970		1.896	22.377.159,68	
33	b. Bekisting Plat	m2	696,78	372,00	391,76	244.937,00	489.874,00	484.429,00	95.956.519	191.913.038	189.779.905		239.492	93.823.385,92	
	Pekerjaan Pad Beton tebal 12 cm ELV. + 8.50 (item Baru)														
34	a. Pembesian				1.111,77	20.116,24		22.012,64	22.364.632		24.472.993		1.896	2.108.360,63	
35	b. Bekisting Plat	m2			109,34	244.937,00		484.429,00	26.781.412		52.967.467		239.492	26.186.055,28	
IV	PEKERJAAN ATAP														
36	Pek. Pemasangan rangka atap baja ringan	m2	472,35	149,78	166,27	224.681,60	308.963,14	308.956,21	37.357.810	51.371.301	51.370.149		84.275	14.012.339,40	
37	Pek. Pemasangan penutup atap Metal	m2	472,35	149,78	166,27	105.836,50	213.446,56	213.441,73	17.597.435	35.489.760	35.488.956		107.605	17.891.521,59	

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	ANALISIS PEMAHALAN										Pemahalan Harga		
			Volume Tender 1	Volume Tender 2	Volume CCO Final dan cek fisik	Harga Satuan Tender 1 (HPS 1)	Harga Satuan Tender 2 (HPS 2)	Harga Satuan Kontrak	Nilai Pekerjaan menggunakan Harga Tender 1 (HPS 1)	Nilai Pekerjaan menggunakan Harga Tender 2 (HPS 2)	Nilai Kontrak	Harga setelah penyesuaian kurang volume		Selisih Harga	
V	PEKERJAAN ARSITEKTUR													-	
	LANTAI 1													-	
A	PEKERJAAN DINDING													-	
38	Pekerjaan plesteran ad. 1:4	m2	1.321,02	863,12	1.120,94	88.965,36	92.424,74	92.424,74	99.724.831	103.602.588	103.602.588		3.459	3.877.757,42	
39	Pekerjaan acian	m2	1.321,02	863,12	1.120,94	53.405,00	56.093,01	56.093,01	59.863.801	62.876.899	62.876.899		2.688	3.013.097,93	
B	PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA, BOUWVENLY & PARTISI													-	
40	Pas. Kusen, Pintu Kaca type P2A + accessories lengkap terpasang	unit	2,00	2,00	2,00	4.114.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	8.228.000	20.800.000	20.800.000		6.286.000	12.572.000,00	
41	Pas. Kusen, Pintu Kaca type P2B + accessories lengkap terpasang	unit	9,00	8,00	5,00	3.696.000,00	6.435.000,00	6.435.000,00	18.480.000	32.175.000	32.175.000		2.739.000	13.695.000,00	
42	Pas. Kusen Pintu WC (PWC) + Accessories Lengkap Terpasang	unit	8,00	8,00	4,00	1.732.500,00	1.885.000,00	1.885.000,00	6.930.000	7.540.000	7.540.000		152.500	610.000,00	
43	Pas. Bouvenlight + accessories lengkap terpasang	unit	8,00	8,00	4,00	264.000,00	871.000,00	871.000,00	1.056.000	3.484.000	3.484.000		607.000	2.428.000,00	
44	Pas. Kusen, Jendela type J3A + accessories lengkap terpasang	unit	5,00	1,00	2,00	17.820.000,00	25.350.000,00	19.715.000,00	35.640.000	50.700.000	39.430.000		1.895.000	3.790.000,00	
45	Pas. Kusen, Jendela type J3B + accessories lengkap terpasang	unit	1,00	2,00	2,00	8.910.000,00	23.140.000,00	18.000.000,00	17.820.000	46.280.000	36.000.000		9.090.000	18.180.000,00	
C	PEKERJAAN PLAFOND													-	
46	Pek. Rangka Plafond besi hollow galvanis	m2	591,16	372,93	349,26	158.427,50	161.092,64	161.092,64	55.332.389	56.263.215	56.263.215		2.665	930.826,80	
47	Pek. Plafond gypsumboard tebal 9 mm	m2	591,16	372,93	349,26	58.580,50	61.546,08	61.546,08	20.459.825	21.495.584	21.495.584		2.966	1.035.758,47	
D	PEKERJAAN LANTAI													-	
48	Pek. Lantai homogenoustile uk. 60x60 cm polish	m2	731,85	323,49	499,34	316.675,15	355.151,10	355.145,83	158.128.569	177.341.150	177.338.519		38.471	19.209.949,35	
E	PEKERJAAN TANGGA													-	
49	Pek. Pas. Railing tangga bahan pipa stainless steel + kaca 5 mm	m'	178,88	178,88	55,50	909.328,75	2.871.976,25	3.450.038,57	50.467.746	159.394.682	191.477.141		2.540.710	141.009.395,01	
	LANTAI 2													-	
A	PEKERJAAN DINDING													-	
50	Pasangan dinding bata ad. 1:4	m2	461,89	330,99	439,22	153.976,57	159.266,32	159.265,36	67.629.589	69.952.953	69.952.531		5.289	2.322.942,34	
51	Pekerjaan plesteran ad. 1:4	m2	923,78	661,98	878,45	88.965,36	99.255,74	99.255,14	78.151.620	87.191.205	87.190.678		10.290	9.039.057,24	
52	Pekerjaan acian	m2	923,78	661,98	878,45	53.405,00	60.647,01	60.646,64	46.913.622	53.275.366	53.275.041		7.242	6.361.418,66	
C	PEKERJAAN PLAFOND													-	
53	Pek. Rangka Plafond besi hollow galvanis	m2	655,16	537,93	407,76	158.427,50	172.376,73	172.376,73	64.600.397	70.288.335	70.288.335		13.949	5.687.938,02	
54	Pek. Plafond gypsumboard tebal 9 mm	m2	655,16	537,93	407,76	58.580,50	63.823,08	63.823,08	23.886.785	26.024.499	26.024.499		5.243	2.137.714,42	
D	PEKERJAAN LANTAI													-	
55	Pek. Lantai homogenoustile uk. 60x60 cm polish	m2	641,09	508,44	285,26	316.675,15	360.615,90	360.615,90	90.334.753	102.869.292	102.869.292		43.941	12.534.538,35	
	TOTAL PEKERJAAN AKHIR								3.973.649.110,63	5.810.249.438,93	6.407.653.499,55			1.675.342.528,53	

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah

(dalam rupiah)

No	Item Pekerjaan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Selisih	Harga Satuan	Kelebihan Pembayaran
1	Pek. Pelapisan Waterproofing Dak Beton	501,108	0	501,108	232.141,25	116.327.837,51
2	Tiang Bor Beton, diameter 500 mm Casing	1140	0	1140	665.492,86	758.661.860,40
	Struktur Lantai 1					
3	Pekerjaan Plat Beton tebal 12 cm ELV. +4.50 Beton Mutu F'c = 21,7 Mpa (K250) Bekisting Plat	41,911 349,255	36,380964 303,1747	5,530036 46,0803	1.833.286,55 484.429,00	10.138.140,62 22.322.633,65
4	Pekerjaan Tangga Beton Mutu F'c = 21,7 Mpa (K250) Pembesian Bekisting Tangga	30,948 3404,227 116,544	18,41136 2025,2496 71,772	12,53664 1378,977 44,772	1.833.286,55 22.012,67 410.169,28	22.983.253,49 30.354.974,44 18.364.099,00
	Struktur Lantai 2					
5	Pekerjaan Plat Beton tebal 12 cm ELV. +4.50 Beton Mutu F'c = 21,7 Mpa (K250) Bekisting Plat	47,012 391,764	41,222928 343,5244	5,789072 48,2396	1.833.286,55 484.429,00	10.613.027,83 23.368.661,19
6	Pekerjaan Pad Beton tebal 12 cm ELV. +4.50 Beton Mutu F'c = 21,7 Mpa (K250) Bekisting Plat Pekerjaan Acian Pad Beton	13,121 109,344 34,779	5,7504 47,92 26,82	7,3706 61,424 7,959	1.833.782,90 484.429,00 56.093,01	13.516.080,24 29.755.566,90 446.444,27
	Lantai 1					
7	Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, Bouwvenly & Partisi Pas. Kusen, Pintu type P1A + accessories lengkap terpasang	4	0	4	1.001.000,00	4.004.000,00
8	Pek. Pas. Railing tangga bahan pipa stainless steel + kaca 5 mm	56,1	55,5	0,6	3.450.038,57	2.070.023,14
9	Pek. Sanitary Pasang Kaca cermin wastafel Pas. Soap Holder (T. sabun) Pas. Paper Holder (T. tissu)	4 4 4	0 0 0	4 4 4	500.000,00 480.000,00 570.000,00	2.000.000,00 1.920.000,00 2.280.000,00
10	Pek. Instalasi Listrik dan Armature f. Pas. Saklar Ganda g. Pas. Saklar Tunggal	9 5	10 3	-1 2	25.000,00 25.000,00	25.000,00 50.000,00
11	Pengadaan dan Pemasangan APAR Lantai Satu Lantai Dua	4 4	0 0	4 4	1.250.000,00 1.250.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
12	Lantai 2 Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, Bouwvenly & Partisi Pas. Kusen, Pintu type P1A + accessories lengkap terpasang	2	0	2	1.001.000,00	2.002.000,00
13	Pek. Sanitary Pasang Kaca cermin wastafel Pas. Soap Holder (T. sabun) Pas. Paper Holder (T. tissu)	4 4 4	0 0 0	4 4 4	500.000,00 480.000,00 570.000,00	2.000.000,00 1.920.000,00 2.280.000,00
14	Pek. Instalasi Listrik dan Armature b. Pek. Instalasi stopkontak d. Pas. Stop Kontak e. Pas. Stop Kontak AC f. Pas. Saklar Ganda g. Pas. Saklar Tunggal	25 12 13 4 4	17 5 12 2 7	8 7 1 2 -3	472.821,25 26.500,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00	3.782.570,00 185.500,00 55.000,00 50.000,00 75.000,00
JUMLAH						1.091.351.672,69

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Belum Dikapitalisasi ke Aset Induknya

ID Aset	SKPD	Kode Rekening	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)	Masa_Manfaat	Keterangan
04010010013000001	Sekretaris Daerah	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	14-Oct-13	199.800.000	600	Rehab Bagunan Kantor Kepala Desa Tanah Abang Utara
04010010013000002	Sekretaris Daerah	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-13	199.500.000	600	Rehab Bagunan UPTD Kecamatan Penukal
04010010013000003	Sekretaris Daerah	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Nov-13	190.250.000	600	Rehab Bagunan UPTD Pendidikan
04010010013000006	Sekretaris Daerah	TUGU/TANDA BATAS	28-Mar-18	190.580.000	600	PATOK BATAS TANAH 1 PAKET SEKRETARIAT DAERAH T.A 2018
05010010013000001	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-12	197.350.000	600	PEMBANGUNAN KANTOR DAN PAGAR GEDUNG CAMAT ABAB (PU.CK)
05010010013000004	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-10	399.760.000	600	PEMBANGUNAN KANTOR LURAH PASAR BHAYANGKARA (PU.CK)
05010010013000005	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-10	247.500.000	600	REHAB KANTOR KADES BABAT KEC. PENUKAL
05010010013000006	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-10	241.741.000	600	REHAB KANTOR KADES TANJUNG KURUNG (PU.CK)
05010010013000009		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6-Jun-14	64.374.600	600	pengadaan rumah dinas paket skat partisi bangunan gedung kantor dinas PU
05010010013000010	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13-Oct-14	193.519.200	600	pembangunan/peningkatan infrastruktur paket rehab gedung serbaguna dan pengadaan mubiler
05010010013000012	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Dec-11	642.475.000	600	REHAB TOTAL GEDUNG SERBAGUNA KEC. TALANG UBI (PU.CK)
05010010013000020	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	30-Dec-11	199.000.000	600	REHAB RUMAH DINAS CAMAT TANAH ABANG (PU.CK)
05010010013000021	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	31-Dec-10	193.871.000	600	REHAB RUMAH CAMAT PENUKAL (PU.CK)
05020010013000009	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-07	742.735.000	600	Rehab Pasar Pendopo HIBAH TAHAP II M.E.T.A 2017
05020010013000014	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-08	599.107.000	600	Rehab pasar Simpang Babat HIBAH TAHAP II M.E.T.A 2017
05020010013000016	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	31-Dec-07	99.610.000	600	Rehab Rumah Dinas Camat HIBAH TAHAP II M.E.T.A 2017
05020010013000105	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Dec-19	199.600.000	600	SAPRAS KANTOR INSPEKTORAT T.A 2019
05020010013000174	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	TUGU/TANDA BATAS	31-Aug-20	149.500.000	0	PAGAR KANTOR INSPEKTORAT T.A 2020
05020010013000190	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-20	1.388.615.000	600	REHAB TOTAL RUMAH JABATAN T.A 2020
05020010013000197	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	TUGU/TANDA BATAS	8-Nov-21	74.065.408	600	Lanjutan Pembangunan Pagar SMPN 3 Desa Pengabuan Kec. Abab TA. 2021
05030010013000005	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Oct-22	298.375.000	600	REHAB GOR DESA KARTA DEWA DUSUN I KEC.TALANG UBI KAB.PALI APBD T.A 2022
05030010013000010	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20-Dec-22	499.833.499	600	PENAMBAHAN RUANG DAN GUDANG GEDUNG KANTOR INSPEKTORAT TA.2022
05030010013000011	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15-Dec-22	1.115.184.015	600	PEMBANGUNAN INTERIOR RUMAH ADAT KAB.PALI TA.2022
05030010013000020	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-22	199.722.500	600	PEMBUATAN SEKAT RUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL T.A 2022
05030010013000023	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15-Dec-22	1.120.944.600	600	PEMBANGUNAN INTERIOR GEDUNG DEKRANASDA KAB.PALI T.A 2022
05030010013000036	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	16-Dec-22	988.394.318	600	REHAB GEDUNG ADMINSTRASI,JGD,R.OBAT RS PRATAMA TANAH ABANG TA.2022
05030010013000043	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Dec-23	199.571.000	600	REHAB GEDUNG BALAI WARGA KELURAHAN TALANG UBI BARAT KEC. TALANG UBI T.A 2023
05030010013000054	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	19-Dec-23	199.901.000	600	REHAB PLAFOND DAN JARINGAN LISTRIK RUMAH SAKIT TALANG UBI T.A 2023
05030010013000055	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	16-Nov-23	199.871.000	600	Rehab Atap Rumah Sakit Umum Bhayangkara Talang Ubi T.A 2023
05030010013000057	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	19-Dec-23	149.767.000	600	REHAB BALAI WARGA DI SUMBERJO KEL.TALANG UBI UTARA KEC. TALANG UBI KAB.PALI T.A 2023
05030010013000061	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	14-Aug-24	1.979.596.000	600	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG SMAN 2 TALANG UBI T.A 2024
05030010013000075	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Dec-24	199.667.000	600	Pemeliharaan Kantor DPRD PALI
05030010013000076	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3-Dec-24	99.724.000	600	Lanjutan Pembangunan Pagar Inspektorat
05030010013000077	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	16-Dec-24	199.656.000	600	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WISMA PALI
05030010013000078	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	16-Dec-24	149.666.000	600	PEMASANGAN INTERIOR RUANG INSPEKTUR KANTOR INSPEKTORAT KAB PALI
05030010013000080	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	23-Dec-24	5.895.447.000	600	Interior Gedung Paripurna
05030010013000081	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	17-Dec-24	149.501.000	600	REHAB KANTOR LURAH HANDAYANI MULIA
05030010013000082	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	23-Dec-24	1.993.146.000	600	REHAB TOTAL RUMAH DINAS BUPATI
05030010013000086	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	TUGU/TANDA BATAS	8-Jul-24	199.414.000	600	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 3 KECAMATAN ABAB (LANJUTAN) T.A 2024
05030010013000087	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15-Jul-24	199.317.000	600	Pembangunan Utilitas Lapangan Gelora T.A 2024

ID Aset	SKPD	Kode Rekening	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)	Masa_Manfaat	Keterangan
05030010013000088	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Jun-24	595.855.000	600	REHAB RUMAH SAKIT PRATAMA TANAH ABANG DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA T.A 2024
07010010013000015	Dinas Kesehatan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-12	203.700.000	600	SUNGAI BAUNG REHAP TOTAL PUSTU SUNGAI BAUNG
07010010013000126	Dinas Kesehatan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-13	792.000.000	600	PENAMBAHAN RUANG UGD DAN REHAB BERAT RUMAH DINAS PARAMEDIS 1 UNIT PUSKESMAS (KEC.TANAH ABANG) HIBAH TAHAP II M.E TA.2017
07010010013000138	Dinas Kesehatan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	17-Dec-18	445.011.000	600	REHAB POSKESDES TANAH ABANG UTARA KEC.TANAH ABANG DINKES T.A 2018
07010010013000139	Dinas Kesehatan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Nov-18	439.185.000	600	REHAB POSKESDES MUARA DUA KEC.TANAH ABANG DINKES T.A 2018
07010010013000187	Dinas Kesehatan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13-Jun-24	406.236.000	600	Renovasi Bangunan Poskesdes Desa Karang Agung Dinkes T.A 2024
07010070013000001	PKM TANAH ABANG	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18-Dec-24	38.950.000	600	Backdrop PKM.Tanah Abang Dana JKN T.A 2024
07020010013000002	Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Dec-11	280.454.000	600	BAGUNAN ATAU GEDUNG KANTOR (TIMBAL)
07020010013000004	Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-09	258.442.330	600	PENGADAAN BANGUNAN SELARAS RUMAH SAKIT
07020010013000016	Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Dec-16	42.219.320	600	ATAP/KENOPI INCENERATOR (BLUD) T.A 2016
07020010013000023	Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	29-Dec-17	520.455.389	600	REHAB BERAT INSTALASI GAWAT DARURAT RSUD T.A 2017
07020010013000024	Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	29-Dec-17	583.114.000	600	REHAB BERAT INSTALASI RAWAT JALAN RSUD T.A 2017
07020010013000039	Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	16-Apr-20	194.115.500	600	Penambahan saran&prasarana gedung RS (Pembangunan Ruangan Isolasi Covid-19) di RSUD Talang Ubi Kab.Pali dg T.A 2020
07020010013000040	Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	25-Jan-21	48.076.000	0	BELANJA MODAL BLUD PENAMBAHAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG RSUD (MATERIAL YANG DIGUNAKAN UNUTK RUANGAN UGD(DINDING) DAN COR LANTAI TRIASE) T.A 2021
07020010013000041	Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	25-Jan-21	35.000.000	0	PENAMABAHAN SARANA DAN PRASARANA ATAP PARKIRAN RSUD (BLUD T.A 2021)
07020010013000043	Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-21	180.201.742	600	Pembangunan pendukung pengadaan alat instalasi pengelola limbah medis rsud tl ubi T.A 2021
08010010013000005	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-09	186.200.300	600	Rehap Perumahan Guru 1 Unit Kec. Tanah Abang
08010010013000012	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-09	181.752.000	600	Rehab Perumahan Guru satu Unit SMAN 2 Talang Ubi
08010010013000029	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28-May-14	341.160.000	600	Rehap berat SDN 12 Talang Ubi Kec.Talang Ubi
08010010013000030	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	11-Jun-14	660.995.680	666	Rehap Berat SDN 8 Abab di Desa Batu Tugu
08010010013000065	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-12	287.882.000	600	Bangunan 2 Lokal
08010010013000131	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-06	353.811.200	600	Rehab Total SDN 14 Talang Ubi
08010010013000176	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20-Mar-14	104.500.000	600	Rehap Ringan SMPN 1 Tanah Abang
08010010013000177	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20-Mar-14	382.834.700	681	Rehap bangunan Gedung SMP N 1 Penukal
08010010013000302	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-12	409.416.000	600	Rehab Total SDN 2 Abab 1 Unit (3 lokal + kantor + gudang/WC)
08010010013000350	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28-Oct-14	199.300.000	600	Pengadaan atas Pekerjaan Pembangunan Lapangan/Gedung Olahraga Pali(Pembangunan Tribun Mini di KEL.TLG UBI Selatan)
08010010013000352	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Jul-14	188.800.000	600	pengadaan atas pekerjaan rehabilitasi lapangan sepak bola desa gunung menang
08010010013000353	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Jul-14	188.800.000	600	pengadaan atas pekerjaan rehabilitasi lapangan sepak bola desa karta dewa
08010010013000354	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Aug-14	188.800.000	600	pengadaan atas pekerjaan rehabilitasi lapangan sepak bola kec. abab
08010010013000355	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13-Oct-14	199.000.000	600	Pengadaan atas pekerjaan rehab lapangan/gedung olah raga di PALI
08010010013000356	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28-Oct-14	199.200.000	600	Pengadaan atas pekerjaan rehabilitasi gedung lapangan volly dan lapangan bulu tangkis desa modong
08010010013000362	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	31-Dec-12	113.200.000	600	Rehab sedang / berat rumah dinas guru SDN 30 Talang Ubi 1 unit
08010010013000368	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	31-Dec-12	113.200.000	600	Rehab sedang/berat rumah dinas guru SDN 30 Talang Ubi 1 Unit
08020010013000162	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Dec-18	1.063.257.000	600	RENOVASI SDN 4 TALANG UBI HIBAH KEMDIKBUD PADA DISDIK T.A 2018
08020010013000269	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-20	279.018.071	600	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SDN 8 Tanah Abang T.A 2020
08020010013000568	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Jul-23	347.884.000	600	REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 1 PENUKAL APBD DISDIK TAHUN 2023
08020010013000569	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Jul-23	297.014.000	600	REHABILITASI RUANG KELAS SDN 12 PENUKAL UTARA APBD T.A 2023
08020010013000570	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	23-Aug-23	298.460.992	600	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 7 Penukal [3 Ruang] APBD T.A 20233

ID Aset	SKPD	Kode Rekening	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)	Masa_Manfaat	Keterangan
08020010013000571	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Jul-23	347.510.947	600	REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 1 TALANG UBI APBD TAHUN 2023
08020010013000572	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20-Dec-23	387.528.000	600	Pek. Rehabilitasi Ruang Kelas dgn tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDN 14 Tanah Abang DAK DISDIK TAHUN 2023
08020010013000573	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6-Dec-23	199.821.700	600	pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 10 Penukal Utara Desa Tanjung Baru APBD-P DISDIK TAHUN 2023
08020010013000633	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	9-Sep-24	199.999.251	600	pembangunan Mushola dan Rehab WC SDN 2 Abab
08020010013000663	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18-Dec-24	199.824.156	600	rehabilitasi ruang kelas SDN 9 Penukal
08020010013000678	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	11-Dec-24	199.921.664	600	pemasangan paving block SMPN 1 Penukal
08020010013000692	Dinas Pendidikan	TUGU/TANDA BATAS	31-May-24	199.970.871	600	rehab pagar dan gerbang SDN 1 Abab (Pkr) tahun anggaran 2024
08020010013000695	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7-Oct-24	446.804.000	600	Rehabilitasi ruang kelas sekolah SMPN 1 Penukal Utara
08020010013000696	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7-Oct-24	446.776.000	600	Rehabilitasi ruang kelas sekolah SDN 30 Talang Ubi
08020010013000697	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	16-Oct-24	397.477.000	600	Rehab Ruang Kelas SDN 12 Talang Ubi
08020010013000700	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	19-Sep-24	447.315.480	600	rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Talang Ubi
08020010013000704	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13-Dec-24	199.996.643	600	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 27 Talang Ubi
08020010243000001	SMKN 1 PENUKAL	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-13	210.000.000	600	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (RKB 2 Lokal APBN-P)/SMKN 1 Penukal HIBAH TAHAP II M.E.T.A 2017
08020011033000001	SDN 2 TALANG UBI	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-13	486.989.000	600	Rehab Total Bangunan SDN 2 TI.Ubi HIBAH TAHAP II M.E.T.A 2017
09020010013000005	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	24-Nov-15	179.150.000	600	Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Air Itam Kecamatan Penukal
09020010013000006	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26-Nov-15	179.120.000	600	Rehabilitasi Balai Desa Tanding Marga Kecamatan Penukal Utara
09020010013000010	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Aug-17	139.475.000	600	REHAB BALAI DESA TANJUNG KURUNG KEC. ABAB KAB.PALI T.A 2017
09020010013000011	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	11-Aug-17	139.746.000	600	REHAB KANTOR KEPALA DESA RAJA KEC.TANAH ABANG
09020010013000012	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18-Aug-17	139.668.000	600	REHAB BALAI DESA CURUP KEC.TANAH ABANG KAB.PALI
09030010013000001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2-Nov-20	22.770.000	600	Pengadaan Gudang RAK T.A 2020
11010010013000001	Dinas Pertanian	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1-Nov-12	157.656.000	600	Rehab rumah potong hewan
12020010013000007	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Dec-11	145.275.000	600	REHAB PASAR INPRES TANAH ABANG TH 2011
21010010013000002	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	23-Dec-14	19.500.000	600	Bangunan Gedung Kantor Permanen Tahun 2014
Total				39.589.447.076		

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang Belum Dikapitalisasi ke Aset Tetap Induknya

ID Aset	Kode Rekening	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)	Masa_Manfaat	Keterangan
A. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang					
05010010014000015	JALAN	4/23/2014	525.068.352,00	120	REHAB SARANA DAN PRASARANA RUTIN JALAN DAN BANGUNAN 164.043.351,00 + UPAH 361.025.000,00 (00944/SP2D-LS/1.03.01.01/2014)
05010010014000016	JALAN	4/25/2014	641.403.351,00	120	KEGIATAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA RUTIN JALAN DAN BANGUNAN + UPAH 477.360.000,00 (00626/SP2D-LS/1.03.01.01/2014)
05010010014000017	JALAN	4/25/2014	300.581.373,00	120	KEGIATAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA RUTIN JALAN DAN BANGUNAN + UPAH 190.125.000,00 (00627/SP2D-LS/1.03.01.01/2014)
05010010014000018	JALAN	4/28/2014	164.043.351,00	120	pengadaan bahan barang kegiatan rehabilitasi dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan Kab Pali
05010010014000019	JALAN	4/28/2014	199.071.393,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000020	JALAN	4/30/2014	110.456.373,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000021	JALAN	4/30/2014	182.144.321,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000022	JALAN	5/26/2014	151.891.992,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000023	JALAN	5/28/2014	151.891.992,00	120	pengadaan bahan barang kegiatan rehabilitasi dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan Kab Pali
05010010014000024	JALAN	5/28/2014	151.891.992,00	120	pengadaan bahan/barang paket kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000025	JALAN	5/30/2014	167.798.722,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000026	JALAN	5/30/2014	115.058.722,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000027	JALAN	6/2/2014	75.407.075,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000076	JALAN	6/27/2014	173.156.871,00	120	pengadaan bahan barang kegiatan rehabilitasi dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan Kab Pali
05010010014000077	JALAN	6/30/2014	116.592.838,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000078	JALAN	6/30/2014	114.618.768,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000079	JALAN	7/1/2014	116.592.838,00	120	pengadaan bahan barang kegiatan rehabilitasi dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan Kab Pali
05010010014000080	JALAN	7/21/2014	184.519.164,00	120	pengadaan bahan barang kegiatan rehabilitasi dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan Kab Pali
05010010014000081	JALAN	7/23/2014	109.362.234,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan bangunan
05010010014000082	JALAN	7/23/2014	147.275.164,00	120	pengadaan bahan barang kegiatan rehabilitasi dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan Kab Pali
05010010014000083	JALAN	7/23/2014	72.390.514,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000084	JALAN	7/24/2014	109.362.234,00	120	pengadaan bahan barang kegiatan rehabilitasi dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan Kab Pali
05010010014000085	JALAN	7/24/2014	147.275.164,00	120	pengadaan bahan barang kegiatan rehabilitasi dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan Kab Pali
05010010014000086	JALAN	8/20/2014	136.024.978,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000087	JALAN	8/25/2014	98.413.353,00	120	pengadaan bahan/barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000088	JALAN	8/25/2014	136.024.978,00	120	pengadaan bahan barang kegiatan rehabilitasi dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan Kab Pali
05010010014000089	JALAN	8/26/2014	55.074.067,00	120	pengadaan bahan / barang kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan bangunan kab. Pali
05010010014000090	JALAN	8/29/2014	136.024.978,00	120	pengadaan bahan barang kegiatan rehabilitasi dan prasarana infrastruktur rutin jalan dan bangunan Kab Pali
05010010014000092	JALAN	10/21/2014	1.188.470.000,00	120	pekerjaan peningkatan jalan Handayani,Pahlawan,Simpang 4 kebun sayur, dan stadion glora cs
05010010014000134	JALAN	12/31/2012	148.685.000,00	120	Rehab Jalan Setapak Ds.I-II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi (pu.ck)
05010010014000139	JALAN	12/31/2012	99.050.000,00	120	Rehab Jalan Setapak Rejosari Kelurahan Talang Ubi Utara (pu.ck)
05010010014000341	JEMBATAN	12/31/2006	38.950.000,00	600	Pemeliharaan Rutin Jembatan Pipa Besi Air Epit Ruas Jalan Tempirai - Prabumenang
05010010014000342	JEMBATAN	12/31/2006	85.000.000,00	600	Pemeliharaan/Perbaikan Lantai Jembatan Jalan Lingkar Kota tanah abang kec.tanah abang
05010010014000343	JEMBATAN	12/31/2007	1.438.500.000,00	600	Penggantian Jembatan Beton Air Sentoman Ruas Jalan Air Itam - Tempirai
05010010014000344	JEMBATAN	12/31/2007	2.750.347.000,00	600	Penggantian Jembatan Beton Desa Lunas Jaya
05010010014000345	JEMBATAN	12/31/2009	1.463.315.000,00	600	Pembangunan Jembatan Beton Air Lebung sade ruas jalan Tempirai - Prabu menang
05010010014000346	JEMBATAN	12/31/2010	3.884.397.000,00	600	Penggantian Jembatan Beton air itam desa air itam
05010010014000347	JEMBATAN	12/31/2010	1.176.502.000,00	600	Penggantian Jembatan Beton desa Prambatan
05010010014000348	JEMBATAN	12/30/2005	78.000.000,00	600	JEMBATAN SEKAYU-BENAKAT MINYAK
05010010014000349	JEMBATAN	12/30/2005	97.500.000,00	600	JEMBATAN PEBIL-BENAKAT MINYAK
05010010014000350	JEMBATAN	12/30/2005	52.000.000,00	600	JEMBATAN NANGGAL-BENAKAT MINYAK

ID Aset	Kode Rekening	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)	Masa_Manfaat	Keterangan
05010010014000351	JEMBATAN	12/31/2008	989.100.000,00	600	Pemeliharaan Jembatan Pipa Besi air sebagai jalan lingkar desa babat
05010010014000352	JEMBATAN	12/31/2011	99.500.000,00	600	Perbaikan Jembatan Gantung Desa Tanjung baru dan suka raja
05010010014000353	JEMBATAN	12/31/2011	59.780.000,00	600	Perbaikan Jembatan pipa besi air sentoman desa air itam
05010010014000354	JEMBATAN	12/31/2005	44.505.000,00	600	Jembatan Gantung Penang - Talang Ubi
05010010014000355	JEMBATAN	12/31/2007	85.000.000,00	600	Pemeliharaan / Perbaikan Lantai Jembatan Jalan lingkar kota tanah abang kecamatan tanah abang
05010010014000366	BANGUNAN AIR IRIGASI	12/31/2010	334.185.000,00	600	Perbaikan Cek dam Desa Raja Jaya
05010010014000383	BANGUNAN AIR KOTOR	12/31/2012	99.180.000,00	480	Rehab Siring Lingkungan Rejosari Kelurahan Talang Ubi Utara (pu.ck)
05020010014000756	BANGUNAN AIR KOTOR	12/31/2021	99.340.000,00	480	Rehab Drainase Desa Gunung Menang T.A 2021
05030010014000286	JALAN	12/31/2020	1.086.115.000,00	120	PENINGKATAN JALAN PUTAT PAYUNG DESA TEMPIRAI TIMUR
05030010014000287	JALAN	12/31/2020	1.945.746.000,00	120	PENINGKATAN JALAN DESA MAJU JAYA
05030010014000291	JALAN	5/26/2017	198.543.000,00	120	PEKERJAAN PERBAIKAN 3 UNIT BOXCULVERT PADA RUAS JLN MENUJU DS AIR ITAM KAB.PALI TA 2017
05030010014000292	JALAN	5/26/2017	135.345.000,00	120	PEKERJAAN PERBAIKAN 1 UNIT CULVERT UK.1x1x7M&TEMBOK PENAHAN DIRUAS PAYE TELANG KAB.PALI TA 2017
05030010014000293	JALAN	5/26/2017	93.873.000,00	120	PEKERJAAN PERBAIKAN 1 UNIT DOUBLE BOX CULVERT 2x2x6M DIRUAS JALAN DS PURUN KAB.PALI TA 2017
05030010014000294	JALAN	5/26/2017	198.342.000,00	120	BELANJA MODAL PENGADAAN PEKERJAAN PERBAIKAN 2 UNIT BOX CULVERT UK.1x1x7M PADA RUAS JLN TL.OJAN KAB.PALI TA 2017
05030010014000295	JALAN	6/6/2017	105.874.000,00	120	BELANJA MODAL PENGADAAN PEKERJAAN PERBAIKAN 1 UNIT BOX CULVERT 1x1x7M TEMBOK PENAHAN JLN TJ.KURUNG-KARANG AGUNG KAB.PALI TA 2017
05030010014000300	JALAN	12/29/2017	74.180.000,00	120	PEKERJAAN PERBAIKAN 1 UNIT BOX CULVERT DI DESA CURUPNKEC.TANAH ABANG T.A 2017
05030010014000301	JALAN	12/29/2017	78.620.000,00	120	PEKERJAAN PERBAIKAN BOX CULVERT PAYE SEPAT DESA BETUNG KEC.ABAB T.A 2017
05030010014000303	JALAN	12/29/2017	123.274.000,00	120	PEKERJAAN PERBAIKAN 2 UNIT BOX CULVERT DI KEL.HANDAYANI KEC.TALANG UBI T.A 2017
05030010014000304	JALAN	12/29/2017	98.716.000,00	120	PEKERJAAN PERBAIKAN BOX CULVERT DI DESA TAMBAK KEC.PENUKAL UTARA T.A 2017
05030010014000314	JALAN	5/26/2017	151.379.000,00	120	PERBAIKAN TEMBOK PENAHAN TANAH DALAM DESA PEKERJAAN PERBAIKAN TEMBOK PENAHAN TANAH DALAM DESA PURUN KAB.PALI TA 2017
05030010014000316	JALAN	5/30/2017	199.248.000,00	120	PERBAIKAN PARIT PASANGAN PADA RUAS JLN DS TANAH ABANG TA 2017
05030010014000317	JALAN	5/26/2017	172.200.000,00	120	PERBAIKAN 2 UNIT BOX CULVERT UK.1x1x7M PADA RUAS JLN TAMBAK TLG OJAN KAB.PALI TA 2017
05030010014000321	JALAN	6/6/2017	111.832.000,00	120	PERBAIKAN PONDASI JALAN LONGSOR SUNSANG KAB.PALI T.A 2017
05030010014000354	JALAN	6/5/2017	193.949.000,00	120	PERBAIKAN DINDING PENAHAN TANAH LONGSOR PADA JALAN DESA PANDAN KAB.PALI TA 2017
05030010014000373	JALAN	7/31/2017	40.000.000,00	120	PENINGKATAN JALAN COR BETON MENUJU PAUD DS SP.TAIS TA 2017.
05030010014000455	JALAN	12/29/2017	1.051.782.500,00	240	JALAN KABUPATEN (PENINGKATAN) MENUJU SMA 2 MANGKUNEGARA KEC. PENUKAL DPU T.A 2017 (K.070)
05030010014000472	JALAN	12/29/2017	558.325.250,00	240	PEKERJAAN PERBAIKAN DUA UNIT BOX CORVERT UKURAN 2,5 M X 3 X 6 M. PADA RUAS JALAN TALANG KULIT KEC. TALANG UBI TA 2017
05030010014000485	JALAN	12/29/2017	98.376.000,00	120	PEKERJAAN PERBAIKAN PARIT DI DESA PURUN KAB.PALI TA 2017.
05030010014000486	JALAN	12/29/2017	59.349.000,00	120	PEKERJAAN PERBAIKAN PLAT DUEKER PASAR BETUNG ABAB TA 2017.
05030010014000489	JALAN	12/29/2017	98.567.000,00	120	PEKERJAAN PERBAIKAN PARIT DI DESA JERAMBAH BESI KAB.PALI
05030010014000525	JALAN	12/31/2020	360.370.890,00	120	PENINGKATAN JALAN LINGKAR DESA BETUNG BARAT
05030010014000598	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	12/18/2018	987.155.000,00	120	Rehab Drainase Sp.4 Kebun Sayur Kel.Tlg Ubi Timur PU T.A 2018
05030010014000843	JALAN	8/20/2019	1.107.542.333,00	120	PENINGKATAN JALAN MENUJU SMA MANGKU NEGARA K.070 T.A 2019 (996.600.000 + 110.942.333 = FISIK + JASA)
05030010014000848	JALAN	12/31/2020	2.045.690.831,00	120	Peningkatan Jalan Peternakan Ibrahim Mahbor (FISIK 1.987.736.000 + JASA KONSULTASI 78.364.000) T.A 2020
05030010014000849	JALAN	12/31/2020	1.055.692.975,00	120	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Pengabuan Timur (FISIK 992.593.000 + JASA PENGAWASAN 78.364.000) T.A 2020
05030010014000850	JALAN	12/31/2020	1.053.035.705,00	120	Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Simpang Raja NON STATUS (FISIK 991.972.000 + JASA PENGAWASAN 78.345.668) T.A 2020
05030010014000851	JALAN	12/31/2020	1.061.176.071,00	120	Peningkatan Jalan Beracung Gucci - Handayani NON STATUS (FISIK 992.312.000 + JASA PENGAWASAN 76.068.668) T.A 2020
05030010014000852	JALAN	12/31/2020	492.967.000,00	120	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Pandan NON STATUS (FISIK 397.674.000 + JASA PENGAWASAN 95.293.000) T.A 2020
05030010014000853	JALAN	12/31/2020	4.282.136.000,00	138	Peningkatan Jalan Betung Barat Menuju Menang I NON STATUS (FISIK 3.977.538.000 + JASA PENGAWASAN 90.486.000) T.A 2020
05030010014000854	JALAN	12/31/2020	986.558.898,00	120	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Tanjung Baru Kec. Penukal Utara P 28 (FISIK 994.689.000 + JASA PENGAWASAN 45.628.000) T.A 2020
05030010014000855	JALAN	12/31/2020	1.833.328.000,00	120	Peningkatan Jalan Desa Pers. Tanding Jaya (Lanjutan) P32 FISIK 1.787.700.000 + JASA PENGAWASAN 45.628.000) T.A 2020
05030010014000856	JALAN	12/31/2020	4.610.484.960,00	120	Peningkatan Jalan Desa Pengabuan - Pengabuan Timur P13 (FISIK 4.470.941.000 + JASA PENGAWASAN 191.771.250) T.A 2020

ID Aset	Kode Rekening	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)	Masa_Manfaat	Keterangan
05030010014000857	JALAN	12/31/2020	746.313.542,00	120	Peningkatan Jalan setapak Untuk Akses Produksi perkebunan Penduduk Dusun 3 Talang Beton Desa Pers. Marga Mulya P27 (FISIK 987.490.000+ JASA PENGAWASAN 74.304.334) T.A 2020
05030010014000858	JALAN	12/31/2020	440.719.000,00	120	Peningkatan Jalan Simpang Solar (lanjutan) NON STATUS (FISIK 397.922.000 + JASA PENGAWASAN 42.797.000) T.A 2020
05030010014000859	JALAN	12/31/2020	837.592.500,00	120	Peningkatan Jalan Tanah Abang Timur Menuju Posyandu NON STATUS (FISIK 794.841.000 + JASA PENGAWASAN 42.751.500) T.A 2020
05030010014000876	JALAN	12/31/2020	1.231.964.562,00	120	peningkatan jalan dikec. Tanah Abang dan Kec. Penukal Utara TA.2020 NON STATUS
05030010014000877	JALAN	12/31/2020	297.629.000,00	120	peningkatan jalan lunoas jaya-sukaraja TA.2020 NON STATUS
05030010014000878	JALAN	12/31/2020	1.568.579.362,00	120	peningkatan jalan tempirai - air itam TA.2020 NON STATUS
05030010014000885	BANGUNAN AIR KOTOR	6/28/2021	116.754.000,00	480	PERBAIKAN 2 UNIT BOX CULVERT PENUKAL UTARA T.A 2021
05030010014000902	JALAN	7/30/2021	4.428.874.823,15	120	PENINGKATAN JALAN DUSUN 3 KUKUI - DESA SUNGAI IBUL (NS) (FISIK 495.076.000 + JASA PENGAWASAN 83.237.000) T.A 2021
05030010014000903	JALAN	8/24/2021	388.807.000,00	120	PENINGKATAN JALAN LINGKAR LANJUTAN (NS) (FISIK 297.214.000 + JASA PENGAWASAN 91.593.000) T.A 2021
05030010014000904	JALAN	7/7/2021	571.413.000,00	120	PENINGKATAN JALAN IBRAHIM MAHBOR SUNGAI LIMPAH (NS) (FISIK 488.176.000 + JASA PENGAWASAN 83.237.000) T.A 2021
05030010014000906	JALAN	12/8/2021	4.647.429.858,48	120	Peningkatan Jalan SD 12 Menuju Tebing Dilema RT Bpk Rustam Tlg Subur Kec.Tlg Ubi (NS) (FISIK 4.221.430.000 + JASA PENGAWASAN 102.941.000) T.A 2021
05030010014000910	JALAN	11/1/2021	1.972.655.947,36	120	Peningkatan Jalan Menuju Air Siku Ds Kertadewa (FISIK 1.889.724.000 + JASA PENGAWASAN 99.915.200) T.A 2021
05030010014000914	JALAN	10/17/2021	598.238.000,00	120	Peningkatan Jalan Lingkar Lubuk Tampui Kec.Penukal Utara (NON STATUS) (FISIK 541.533.000 + JASA PENGAWASAN 56.705.000) T.A 2021
05030010014001875	JALAN	10/18/2022	497.835.000,00	120	PENINGKATAN JALAN SETAPAK MENUJU SMP NEGERI 4 DESA TEMPIRAI SELATAN TA. 2022
05030010014001903	JALAN	9/7/2022	771.768.344,24	120	PENINGKATAN JALAN LINGKAR POLSEK PENUKAL ABAB KE DUSUN VII (PERKERASAN BETON SEMEN) APBD T.A 2022
05030010014001923	JALAN	12/7/2022	1.383.980.000,00	120	PENINGKATAN JALAN MENUJU EMBUNG BENAKAT MINYAK TA.2022
05030010014001933	JALAN	12/23/2022	1.707.613.086,87	120	PENINGKATAN JALAN MENUJU PERSAWAHAN DESA PENGABUAN (BETON) T.A 2022
05030010014002298	JALAN	5/23/2023	605.746.176,37	120	[K12] Lanjutan Peningkatan Jalan Talang Tumbur-Talang Puyang T.A 2023
05030010014002511	JALAN	9/16/2024	2.970.061.000,00	120	PENINGKATAN JALAN DALAM KECAMATAN TANAH ABANG T.A 2024
05030010014002519	JALAN	10/17/2024	4.897.103.000,00	120	PENINGKATAN JALAN DALAM KECAMATAN TALANG UBI (ASPAL) T.A 2024
05030010014002531	JALAN	8/23/2024	992.962.000,00	120	PENIMBUNAN JALAN LINGKAR PANTA DEWA KEC.TALANG UBI KAB.PALI T.A 2024
05030010014002532	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10/9/2024	988.922.000,00	120	PEMBANGUNAN DRAINASE DAN PLAT DEUKER KEL.HANDAYANI MULIA T.A 2024
05030010014002533	JALAN	8/15/2024	397.152.000,00	120	PEMBANGUNAN JALAN DUSUN V DESA HARAPAN JAYA KEC.TANAH ABANG TA 2024
05030010014002534	JALAN	10/30/2024	1.491.801.000,00	120	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SUNGAI PELEBIHAN DESA TANJUNG BARU KEC.PENUKAL UTARA T.A 2024
05030010014002568	JALAN	4/26/2024	1.485.057.000,00	120	PENINGKATAN JALAN LINGKAR DESA RAJA - RS. PRATAMA T.A 2024
05030010014002570	JALAN	12/30/2024	6.714.955.000,00	120	Peningkatan Jalan Talang Baru - Pasar Bhayangkara (Bangub) T.A 2024
05030010014002575	JALAN	12/27/2024	4.776.049.000,00	120	Peningkatan Jalan Kecamatan Abab Kab.Pali T.A 2024
B. Dinas Kesehatan					
07010010014000017	INSTALASI GARDU LISTRIK	10/18/2016	4.300.000,00	480	PENAMBAHAN DAYA PKM SUNGAI BAUNG TA 2016
Total			93.382.772.767,47		

Rincian Aset Tetap Tanah yang Belum Didukung dengan Informasi Sertifikat Kepemilikan

ID Aset	SKPD	Harga (Rp)	Penggunaan
04010010011000001	Sekretaris Daerah	75.000.000,00	Tanam Tumbuh untuk pembangunan Areal Perkantoran
04010010011000002	Sekretaris Daerah	35.000.000,00	Tanam Tumbuh untuk pembangunan Areal Perkantoran
04010010011000003	Sekretaris Daerah	20.000.000,00	Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Areal Perkantoran
04010010011000004	Sekretaris Daerah	73.000.000,00	Tanam tumbuh untuk pembangunan Areal Perkantoran
04010010011000005	Sekretaris Daerah	55.000.000,00	Tanam Tumbuh Untuk Areal Perkantoran
04010010011000007	Sekretaris Daerah	117.750.000,00	Gedung Farmasi
04010010011000023	Sekretaris Daerah	127.200.000,00	Pintu Gerbang
04010010011000028	Sekretaris Daerah	213.100.000,00	MADRASAH
04010010011000035	Sekretaris Daerah	410.095.180,00	TPU Desa Tempirai
04010010011000049	Sekretaris Daerah	1.278.530.491,50	Tanah Perkantoran
04010020011000022	Bagian Pemerintahan Umum	308.205.402,00	Jalan Desa
04510010011000002	Kecamatan Talang Ubi	88.400.000,00	Tanah Bangunan Instalasi
04510010011000003	Kecamatan Talang Ubi	52.000.000,00	Tanah Bangunan Instalasi
04510010011000004	Kecamatan Talang Ubi	7.500.000,00	Tanah Pemindahan Sungai
04510030011000001	Kelurahan Talang Ubi Barat	7.400.000,00	KANTOR LURAH
05020010011000001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	851.500.000,00	TPA
05020010011000002	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	717.552.001,00	TANAH RUMAH KHUSUS
05020010011000004	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	572.485.304,00	Tanah Untuk Kompi B
05020010011000005	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.054.213.530,00	
05020010011000006	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	484.684.737,00	TPA
05020010011000007	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	450.406.686,00	TPA
05020010011000009	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.749.444.000,00	Korlantas
05020010011000011	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	184.648.000,00	
05020010011000012	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	239.439.000,00	
05020010011000013	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	644.522.000,00	Lapangan Sepak Bola
05020010011000014	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	574.550.000,00	Lapangan Olah Raga
05020010011000015	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	23.040.000,00	Fasilitas Umum
05020010011000016	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	272.640.000,00	Fasilitas Umum
05020010011000019	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.963.546.000,00	
05020010011000020	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	514.548.000,00	TPS
05020010011000021	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	810.000.000,00	
05030010011000009	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.009.414.230,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000010	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	53.600.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000011	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.670.180.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000012	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	237.500.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000013	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	276.500.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000014	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.337.000.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000015	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	225.000.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000016	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	666.000.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000017	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.566.650.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000018	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	861.000.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000019	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	839.500.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000020	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.222.750.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000021	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.962.182.750,00	TANAH BADAN JALAN

ID Aset	SKPD	Harga (Rp)	Penggunaan
05030010011000022	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.395.200.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000023	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.452.250.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.834.700.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000025	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	809.060.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000026	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.448.265.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000027	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	793.800.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000028	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.525.547.410,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000029	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	78.984.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000030	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	48.510.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000031	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	280.000.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000032	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	196.000.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000033	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11.928.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000034	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	226.471.875,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000035	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	796.200.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000036	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	157.893.750,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000037	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	679.100.000,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000038	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.065.643.640,00	TANAH BADAN JALAN
05030010011000039	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	858.500.000,00	TANAH BADAN JALAN
06010010011000001	Dinas Perhubungan	2.502.000.000,00	Perkantoran
07010010011000002	Dinas Kesehatan	1.000.000,00	POLINDES
07010010011000003	Dinas Kesehatan	1.000.000,00	POLINDES
07010010011000005	Dinas Kesehatan	1.000.000,00	PUSTU
07010010011000010	Dinas Kesehatan	3.000.000,00	POLINDES
07010010011000012	Dinas Kesehatan	103.412.640,00	PUSKESMAS
07010010011000013	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	RSUD Bhanyangkara
07010010011000015	Dinas Kesehatan	3.000.000,00	POLINDES
07010010011000017	Dinas Kesehatan	3.000.000,00	POLINDES
07010010011000018	Dinas Kesehatan	2.000.000,00	POLINDES
07010010011000035	Dinas Kesehatan	2.276.000,00	POLINDES
07010010011000043	Dinas Kesehatan	1.000.000,00	POLINDES
07010010011000046	Dinas Kesehatan	2.000.000,00	POLINDES
07010010011000048	Dinas Kesehatan	800.000,00	POLINDES
07010010011000050	Dinas Kesehatan	3.000.000,00	POLINDES
07010010011000053	Dinas Kesehatan	2.000.000,00	PUSTU
07010010011000058	Dinas Kesehatan	1.000.000,00	PUSTU
07010010011000060	Dinas Kesehatan	37.120.001,00	PUSKESMAS
08010010011000002	Dinas Pendidikan	4.000.000,00	GEDUNG KANTOR UPTD ABAB
08010010011000019	Dinas Pendidikan	91.000.000,00	SDN 5 TANAH ABANG
08010010011000020	Dinas Pendidikan	18.000.000,00	SDN 6 TANAH ABANG
08010010011000021	Dinas Pendidikan	11.700.000,00	SDN 7 TANAH ABANG
08010010011000029	Dinas Pendidikan	49.000.000,00	SDN 15 TANAH ABANG
08010010011000030	Dinas Pendidikan	145.000.000,00	SDN 16 TANAH ABANG
08010010011000038	Dinas Pendidikan	44.000.000,00	SDN 37 TALANG UBI
08010010011000039	Dinas Pendidikan	190.000.000,00	SDN 1 TALANG UBI
08010010011000040	Dinas Pendidikan	24.000.000,00	SDN 2 TALANG UBI
08010010011000055	Dinas Pendidikan	59.000.000,00	SDN 21 TALANG UBI
08010010011000061	Dinas Pendidikan	68.000.000,00	SDN 27 TALANG UBI
08010010011000063	Dinas Pendidikan	151.000.000,00	SDN 29 TALANG UBI
08010010011000065	Dinas Pendidikan	104.000.000,00	SDN 31 TALANG UBI
08010010011000069	Dinas Pendidikan	193.000.000,00	SMPN 1 TALANG UBI
08010010011000084	Dinas Pendidikan	28.000.000,00	GEDUNG SEKOLAH
08010010011000103	Dinas Pendidikan	140.000.000,00	BANGUNAN CANDI BUMI AYU
08020010011000004	Dinas Pendidikan	915.080.000,00	SMAN 2 ABAB
08020010011000006	Dinas Pendidikan	641.328.000,00	SMKN 2 PENUKAL
08020010011000007	Dinas Pendidikan	417.890.885,00	SMPN 7 PENUKAL
08020010011000008	Dinas Pendidikan	808.250.930,00	SMKN 1 TANAH ABANG
08020010011000011	Dinas Pendidikan	143.000.000,00	SMKN PENUKAL
08020010011000012	Dinas Pendidikan	37.445.800,00	SMAN TEMPIRAI
08020010011000013	Dinas Pendidikan	280.000.000,00	SMPN KARANG AGUNG
08020010011000014	Dinas Pendidikan	280.000.000,00	SMAN ABAB
08020010011000022	Dinas Pendidikan	767.745.410,00	SKB
08020010011000023	Dinas Pendidikan	613.362.660,00	SMAN 2 TALANG UBI
08020010011000024	Dinas Pendidikan	367.200.000,00	SMAN 6 TALANG UBI
08020010011000027	Dinas Pendidikan	303.990.001,00	SMPN 11 TALANG UBI
08020010011000031	Dinas Pendidikan	313.125.000,00	SD,SMP -Satap
08020010011000032	Dinas Pendidikan	60.000.000,00	SDN 15 PENUKAL UTARA

ID Aset	SKPD	Harga (Rp)	Penggunaan
08020010011000033	Dinas Pendidikan	34.000.000,00	Tanah Jalan Akses SDN 15 P.U
08020010011000036	Dinas Pendidikan	270.000.000,00	SDN 43 TALANG UBI
10020010011000005	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	10.800.000,00	Gudang Alkon
11010010011000001	Dinas Pertanian	14.000.000,00	Rumah Potong Hewan
11010010011000003	Dinas Pertanian	88.500.000,00	BP3K Talang Ubi
11010010011000004	Dinas Pertanian	111.720.000,00	Bangunan Kantor
12020010011000001	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	617.000.000,00	Bangunan Pasar
12020010011000002	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.501.000.000,00	Bangunan Pasar Lama Tl.Ubi
12020010011000003	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	Bangunan Pasar
12020010011000005	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	263.400.001,00	Bangunan Pasar
12020010011000008	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.000.000,00	Los
12020010011000016	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	528.479.001,00	Bangunan Pasar
12020010011000017	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	201.600.001,00	Bangunan Pasar
15010010011000001	Sekretaris Daerah	273.202.000,00	Kantor Inspektorat
17010010011000001	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	280.000.001,00	Gedung Tempat Olahraga
17020010011000001	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19.995.000,00	Candi Bumi Ayu
17020010011000002	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	58.890.000,00	Candi Bumi Ayu
Total		62.978.044.317,50	

Rincian Aset Tetap Kendaraan Dinas yang Belum Didukung dengan Informasi Nomor Rangka/Nomor Mesin/Nomor Polisi/Nomor BPKB

ID Aset	SKPD	Harga (Rp)	Tanggal Perolehan	Type	Nomor_Rangka	Nomor_Mesin	Nomor_Polisi	Nomor_BPKB
04520010012000003	Kecamatan Penukal Utara	9.800.000	12/31/2003	HONDA			BG 5925 DZ	
07010010012000015	Dinas Kesehatan	15.000.000	12/31/2005	RX KING	MH33KA0156K807390	3KA-781399	BG 6132 DZ	-
07010010012000021	Dinas Kesehatan	11.360.000	12/31/2012	VEGA ZR/Putih	MH33500019J009013	350-009056	BG 2416 DZ	-
07010010012000034	Dinas Kesehatan	11.360.000	12/31/2008	VEGA R	3579	5880	BG 6828 DZ	-
07010010012000039	Dinas Kesehatan	15.000.000	12/30/2005	RX KING	807476	780721	BG 6137 DZ	-
07010010012000066	Dinas Kesehatan	11.360.000	12/31/2008	VEGAR R / Putih	MH33P9028K054900	3P9-055217	BG 6839 DZ	-
07010010012000074	Dinas Kesehatan	11.360.000	12/31/2008	VEGA R	MH33P0028K054818	3P9-054784	BG 6968 DZ	-
07010010012000079	Dinas Kesehatan	11.360.000	12/31/2008	VEGA R/Putih	MH33P90028K056002	3P9-056169	BG 6879 DZ	-
07010010012000082	Dinas Kesehatan	11.360.000	12/31/2008	VEGA R		3P9-	BG	-
070200100120007853	Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	1.048.000.000	11/29/2024	HIACE COMMUTER -RANSUS AMBULANCE /PUTIH	JTFST22P8R0046900	1KD-B190935	BG 9014 PZ	-
08010010012000012	Dinas Pendidikan	14.625.000	12/31/2011	Jupiter MX	MH3555001BK052273	555-052292	BG 4648 DZ	-
08010010012000021	Dinas Pendidikan	15.455.000	12/31/2006	GL 160	KC11116K036705	KC11E1036622	BG 6306 DZ	-
08010010012000034	Dinas Pendidikan	14.625.000	12/31/2011	JUPITER MX	MH3555001BK056576	555-056587	BG 4643 DZ	-
08010010012000040	Dinas Pendidikan	19.001.500	12/3/2012	GL15RR MEGA PRO	MH1KC31120K260377	KC31E-1260058	BG 2789DZ	-
09030010012000237	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.648.000.000	11/30/2016	DAMKAR	MJEF08JIGJB11291	811LW020A	BG 8079 XR	-
09050010012000593	Dinas Sosial	19.175.000	4/3/2024	MIO M3 -SE88 / MERAH	MH35E88H0J576076	E3R2E-3546902	BG 2837PAZ	-
11010010012000003	Dinas Pertanian	11.000.000	11/1/2005	YAMAHA YT	-	-	BG 5371 NZ	-
11010010012001262	Dinas Pertanian	6.200.000	12/31/2005	YT 115 CC/SPORT -HITAM			BG 6189DZ	-
11010010012001263	Dinas Pertanian	15.000.000	12/31/2005	YT 115 CC /SPORT -HITAM			BG 6183 DZ	-
11010010012001264	Dinas Pertanian	6.200.000	12/31/2005	YT 115 CC /SPORT - HITAM			BG 6206 DZ	-
11010010012001265	Dinas Pertanian	11.000.000	12/31/2006	GL 150 D /HITAM			BG 6238 DZ	-
11010010012001266	Dinas Pertanian	6.200.000	12/31/2005	YT 115 CC /SPORT -HITAM			BG 6167 DZ	-
11010010012001267	Dinas Pertanian	15.000.000	12/31/2004	GL M II /HITAM			BG 6085 DZ	-
11010010012001268	Dinas Pertanian	15.455.000	12/31/2006	GL 160 D /HITAM			BG 6316 DZ	-
11010010012001269	Dinas Pertanian	15.455.000	12/31/2006	GL 160 D /HITAM			BG 6246 DZ	-
11010010012001270	Dinas Pertanian	12.000.000	12/31/2005	YT 115 CC /SPORT -HITAM			BG 5372 NZ	-
11010010012001445	Dinas Pertanian	423.000.000	11/20/2023	HILUX DC 2.4 E (4x4) DSL M/T -HITAM METALIK	MROD88CD9P0130752	2GDD306859	BG 8836 PZ	-
12020010012001155	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	304.100.000	12/5/2024	1.5 S A/T GR SPORT -Silver Metalik	MHKE8FB3JRK103723	2NR-4D46913	-	-
13040010012000290	Badan Pendapatan Daerah	469.600.000	11/3/2023	ZENIX 2.0 V CVT - DARK ORAY MICA	MHFAAAAA3P0021373	M20AN818911	-	-
18020010012000005	Satuan Polisi Pamong Praja	7.300.000	10/14/2014	Acecoris Motor Patwal				
18020010012000006	Satuan Polisi Pamong Praja	7.300.000	10/14/2014	Acecoris Motor Patwal				

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Belum Didukung dengan Informasi Lokasi

No	ID Aset	SKPD	Kode Rekening	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)
1	04010060013000004	Bagian Umum	TUGU/TANDA BATAS	31-Dec-15	100.000.000
2	05020010013000047	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26-Dec-18	1.096.109.500
3	05020010013000070	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-18	59.400.000
4	05020010013000071	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	17-Dec-18	59.400.000
5	05020010013000074	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	17-Dec-18	59.400.000
6	05020010013000171	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Dec-19	59.400.000
7	05020010013000172	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Dec-19	59.400.000
8	05020010013000182	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28-Dec-20	99.395.000
9	05020010013000190	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-20	1.388.615.000
10	05030010013000089	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Aug-24	199.439.000
11	07010030013000002	PKM TALANG UBI	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28-Nov-24	5.877.000
12	07010030013000003	PKM TALANG UBI	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28-Nov-24	11.757.000
13	07010070013000001	PKM TANAH ABANG	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18-Dec-24	38.950.000
14	08010010013000035	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20-Mar-14	268.238.450
15	08010010013000348	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Oct-14	198.874.900
16	08010010013000349	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Oct-14	199.800.000
17	08010010013000350	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28-Oct-14	199.300.000
18	08010010013000352	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Jul-14	188.800.000
19	08010010013000353	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Jul-14	188.800.000
20	08010010013000354	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Aug-14	188.800.000
21	08010010013000355	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13-Oct-14	199.000.000
22	08010010013000356	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28-Oct-14	199.200.000
23	08020010013000003	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	403.571.786
24	08020010013000004	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	403.571.786
25	08020010013000005	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	23-Nov-15	403.571.786
26	08020010013000006	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	403.571.786
27	08020010013000007	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	24-Nov-15	403.571.784
28	08020010013000008	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-15	403.571.786
29	08020010013000009	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-15	50.014.307
30	08020010013000010	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	50.014.307
31	08020010013000011	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	50.014.305
32	08020010013000012	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	50.014.307
33	08020010013000013	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	502.232.778
34	08020010013000014	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-15	268.757.000
35	08020010013000015	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	14-Dec-15	85.805.667
36	08020010013000020	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18-Dec-15	121.845.553
37	08020010013000033	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	403.571.786
38	08020010013000034	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	403.571.786
39	08020010013000035	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	85.805.667
40	08020010013000037	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-15	129.662.064
41	08020010013000038	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	129.662.064
42	08020010013000039	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	129.662.064
43	08020010013000040	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	14-Dec-15	129.662.064
44	08020010013000041	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-15	129.662.064
45	08020010013000042	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	129.662.064
46	08020010013000043	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-15	129.662.058
47	08020010013000044	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	14-Dec-15	129.662.064
48	08020010013000045	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	129.662.064
49	08020010013000046	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	129.662.064
50	08020010013000047	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-15	129.662.064
51	08020010013000048	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-15	129.662.064
52	08020010013000049	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-15	272.175.462
53	08020010013000059	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20-Sep-16	418.086.600
54	08020010013000060	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6-Oct-16	418.086.600
55	08020010013000061	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26-Sep-16	418.086.600
56	08020010013000062	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Oct-16	418.086.600
57	08020010013000063	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26-Sep-16	418.086.600
58	08020010013000064	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Nov-16	157.193.100
59	08020010013000065	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	16-Nov-16	157.052.100
60	08020010013000066	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15-Nov-16	157.192.100
61	08020010013000067	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Aug-16	157.265.100
62	08020010013000068	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-16	938.174.300
63	08020010013000069	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Dec-16	868.567.300
64	08020010013000070	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7-Dec-16	373.858.300
65	08020010013000077	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2-Nov-17	982.429.300
66	08020010013000080	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28-Dec-17	305.686.100
67	08020010013000081	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15-Dec-17	212.600.600
68	08020010013000082	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Dec-17	515.620.100
69	08020010013000083	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4-Jun-18	79.016.922

No	ID Aset	SKPD	Kode Rekening	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)
70	08020010013000084	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4-Jun-18	79.790.922
71	08020010013000085	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4-Jun-18	78.940.072
72	08020010013000101	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Dec-18	371.518.334
73	08020010013000102	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Dec-18	371.518.332
74	08020010013000103	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Dec-18	371.518.332
75	08020010013000104	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	18-Jun-18	78.880.922
76	08020010013000105	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	6-Jun-18	78.884.922
77	08020010013000106	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	22-Jun-18	78.890.922
78	08020010013000107	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	25-Jun-18	79.015.922
79	08020010013000108	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	25-Jun-18	78.890.922
80	08020010013000109	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	6-Jun-18	78.775.072
81	08020010013000110	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	23-Jul-18	78.940.922
82	08020010013000111	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	18-Jul-18	79.780.922
83	08020010013000112	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	31-Jul-18	78.830.922
84	08020010013000113	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6-Nov-18	1.944.423.000
85	08020010013000114	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	12-Nov-18	1.964.471.000
86	08020010013000115	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	19-Nov-18	1.968.960.000
87	08020010013000116	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	19-Nov-18	1.933.308.000
88	08020010013000117	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Nov-18	199.770.000
89	08020010013000118	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	16-Nov-18	81.258.083
90	08020010013000119	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6-Dec-18	185.772.500
91	08020010013000120	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	21-Nov-18	81.428.083
92	08020010013000121	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Dec-18	157.132.272
93	08020010013000122	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Dec-18	201.172.500
94	08020010013000123	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	21-Nov-18	81.368.083
95	08020010013000124	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Dec-18	186.082.500
96	08020010013000125	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Dec-18	156.932.272
97	08020010013000126	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	22-Nov-18	81.258.083
98	08020010013000127	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	21-Nov-18	81.203.083
99	08020010013000128	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	23-Nov-18	81.313.083
100	08020010013000129	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	22-Nov-18	81.228.083
101	08020010013000130	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	16-Nov-18	81.028.083
102	08020010013000131	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	23-Nov-18	81.528.083
103	08020010013000132	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	19-Nov-18	81.528.083
104	08020010013000133	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6-Dec-18	185.672.500
105	08020010013000134	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Dec-18	199.200.000
106	08020010013000135	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7-Dec-18	744.187.338
107	08020010013000136	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6-Dec-18	157.072.272
108	08020010013000137	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	21-Nov-18	81.028.083
109	08020010013000138	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3-Dec-18	156.732.272
110	08020010013000139	Dinas Pendidikan	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	21-Dec-18	81.340.087
111	08020010013000140	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Dec-18	156.907.280
112	08020010013000141	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	25-Dec-18	1.406.700.000
113	08020010013000142	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Aug-18	204.465.936
114	08020010013000145	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	17-Dec-18	547.636.342
115	08020010013000146	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-18	899.048.332
116	08020010013000147	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Dec-18	899.048.332
117	08020010013000148	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Dec-18	371.875.723
118	08020010013000149	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3-Dec-18	371.875.721
119	08020010013000150	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-18	336.718.332
120	08020010013000151	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	17-Dec-18	494.938.000
121	08020010013000152	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-18	336.809.999
122	08020010013000153	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	22-Nov-18	494.937.999
123	08020010013000159	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Dec-18	1.766.023.000
124	08020010013000160	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Dec-18	80.000.000
125	08020010013000161	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Dec-18	153.450.000
126	08020010013000162	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Dec-18	1.063.257.000
127	08020010013000163	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Dec-18	153.450.000
128	08020010013000164	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Dec-18	153.450.000
129	08020010013000165	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Dec-18	184.641.000
130	08020010013000247	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7-Dec-20	494.363.540
131	08020010013000248	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	24-Dec-20	182.730.055
132	08020010013000249	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	17-Dec-20	182.730.055
133	08020010013000251	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	16-Dec-20	182.730.055
134	08020010013000252	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	17-Dec-20	182.730.055
135	08020010013000253	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-20	614.448.500
136	08020010013000254	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3-Dec-20	387.323.332
137	08020010013000255	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1-Dec-20	387.323.336
138	08020010013000256	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7-Dec-20	387.323.332
139	08020010013000257	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1-Dec-20	336.890.055
140	08020010013000258	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15-Dec-20	336.890.055
141	08020010013000259	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	17-Dec-20	336.890.055
142	08020010013000260	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7-Dec-20	336.890.060
143	08020010013000261	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1-Dec-20	437.711.666
144	08020010013000262	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15-Dec-20	437.711.666
145	08020010013000263	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7-Dec-20	437.711.668
146	08020010013000264	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	29-Dec-20	183.937.750
147	08020010013000265	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	29-Dec-20	217.800.750
148	08020010013000266	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	29-Dec-20	332.800.750
149	08020010013000267	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	16-Dec-20	197.963.334

No	ID Aset	SKPD	Kode Rekening	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)
150	08020010013000270	Dinas Pendidikan	TUGU/TANDA BATAS	17-Dec-20	158.935.550
151	08020010013000271	Dinas Pendidikan	TUGU/TANDA BATAS	11-Dec-20	59.339.550
152	08020010013000272	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Nov-20	28.600.000
153	08020010013000273	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6-Sep-21	208.797.190
154	08020010013000274	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	9-Sep-21	208.975.190
155	08020010013000275	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	11-Aug-21	86.714.190
156	08020010013000276	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	9-Sep-21	208.914.190
157	08020010013000277	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7-Oct-21	208.759.190
158	08020010013000278	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Oct-21	209.129.190
159	08020010013000279	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Oct-21	208.909.190
160	08020010013000280	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Oct-21	209.129.190
161	08020010013000281	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Oct-21	208.909.190
162	08020010013000282	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Oct-21	208.909.190
163	08020010013000283	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Dec-21	137.385.190
164	08020010013000284	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18-Aug-21	86.514.190
165	08020010013000285	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13-Sep-21	208.579.190
166	08020010013000286	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13-Sep-21	209.030.190
167	08020010013000287	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13-Aug-21	86.314.190
168	08020010013000288	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	11-Aug-21	86.574.190
169	08020010013000289	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13-Aug-21	86.514.190
170	08020010013000290	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3-Sep-21	142.560.000
171	08020010013000291	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	18-Nov-21	218.634.030
172	08020010013000292	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6-Sep-21	208.714.190
173	08020010013000293	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Aug-21	137.156.190
174	08020010013000294	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	17-Nov-21	601.638.690
175	08020010013000295	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	29-Nov-21	218.443.030
176	08020010013000296	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	29-Sep-21	208.909.190
177	08020010013000297	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Aug-21	137.014.190
178	08020010013000298	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Dec-21	1.594.415.145
179	08020010013000299	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-21	807.065.845
180	08020010013000303	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Aug-21	109.414.000
181	08020010013000304	Dinas Pendidikan	TUGU/TANDA BATAS	13-Dec-21	405.627.030
182	08020010013000305	Dinas Pendidikan	TUGU/TANDA BATAS	19-Oct-21	215.543.030
183	08020010013000306	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	19-Oct-21	128.843.030
184	08020010013000307	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Dec-22	206.704.585
185	08020010013000308	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2-Sep-22	155.153.381
186	08020010013000309	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6-Sep-22	134.635.388
187	08020010013000310	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Oct-22	134.788.568
188	08020010013000311	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28-Sep-22	203.874.610
189	08020010013000312	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6-Sep-22	134.788.568
190	08020010013000313	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7-Oct-22	205.350.169
191	08020010013000314	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26-Sep-22	134.788.568
192	08020010013000315	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Oct-22	203.874.610
193	08020010013000316	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10-Oct-22	134.788.568
194	08020010013000317	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	25-Nov-22	203.874.609
195	08020010013000318	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Sep-22	134.788.568
196	08020010013000319	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Oct-22	203.564.140
197	08020010013000320	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Sep-22	134.788.568
198	08020010013000321	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26-Oct-22	204.012.010
199	08020010013000322	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Sep-22	134.788.568
200	08020010013000323	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6-Oct-22	203.874.610
201	08020010013000324	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28-Sep-22	134.788.567
202	08020010013000325	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Sep-22	204.109.265
203	08020010013000326	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	17-Oct-22	134.733.201
204	08020010013000327	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	14-Oct-22	561.591.527
205	08020010013000328	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Oct-22	134.707.289
206	08020010013000329	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28-Dec-22	550.586.642
207	08020010013000330	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18-Oct-22	556.344.109
208	08020010013000331	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18-Oct-22	561.126.886
209	08020010013000332	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	14-Dec-22	199.634.800
210	08020010013000333	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	14-Dec-22	199.994.900
211	08020010013000334	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15-Dec-22	99.950.000
212	08020010013000335	Dinas Pendidikan	TUGU/TANDA BATAS	12-Dec-22	99.918.200
213	08020010013000336	Dinas Pendidikan	TUGU/TANDA BATAS	12-Dec-22	99.979.800
214	08020010013000337	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15-Sep-22	85.575.220
215	08020010013000338	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Sep-22	85.561.769
216	08020010013000339	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20-Oct-22	83.950.591
217	08020010013000340	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Sep-22	85.557.530
218	08020010013000341	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26-Sep-22	85.519.729
219	08020010013000342	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26-Sep-22	85.574.825
220	08020010013000343	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20-Oct-22	85.601.992
221	08020010013000344	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26-Sep-22	85.557.530
222	08020010013000345	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20-Oct-22	85.557.520
223	08020010013000346	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	9-Dec-22	83.994.991
224	08020010013000347	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18-Nov-22	85.557.489
225	08020010013000348	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20-Sep-22	85.557.531
226	08020010013000349	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20-Oct-22	206.678.797
227	08020010013000350	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Oct-22	206.705.104
228	08020010013000351	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Sep-22	206.755.864
229	08020010013000352	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Sep-22	206.750.589

No	ID Aset	SKPD	Kode Rekening	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)
230	08020010013000353	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15-Dec-22	163.145.590
231	08020010013000354	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15-Sep-22	163.116.750
232	08020010013000355	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Dec-22	79.995.000
233	08020010013000366	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	11-Apr-23	149.954.000
234	08020010013000373	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2-May-23	149.946.800
235	08020010013000376	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	11-Apr-23	149.929.000
236	08020010013000377	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2-May-23	149.989.000
237	08020010013000381	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	11-Apr-23	149.983.800
238	08020010013000396	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-May-23	149.900.000
239	08020010013000398	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30-Mar-23	74.992.400
240	08020010013000430	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	23-May-23	149.999.460
241	08020010013000431	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	27-Jun-23	149.999.461
242	08020010013000441	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	9-May-23	149.995.000
243	08020010013000447	Dinas Pendidikan	TUGU/TANDA BATAS	23-Jun-23	149.998.000
244	08020010013000461	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13-Jun-23	199.914.700
245	08020010013000464	Dinas Pendidikan	TUGU/TANDA BATAS	4-Jul-23	149.997.900
246	08020010013000488	Dinas Pendidikan	TUGU/TANDA BATAS	4-Jul-23	149.982.300
247	08020010013000510	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Dec-23	495.022.000
248	08020010013000527	Dinas Pendidikan	TUGU/TANDA BATAS	5-Dec-23	199.828.500
249	08020010013000562	Dinas Pendidikan	TUGU/TANDA BATAS	19-Dec-23	149.774.000
250	08020010013000568	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5-Jul-23	347.884.000
251	08020010013000569	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Jul-23	297.014.000
252	08020010013000570	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	23-Aug-23	298.460.992
253	08020010013000571	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4-Jul-23	347.510.947
254	08020010013000684	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	14-Nov-24	199.451.400
255	08020010013000685	Dinas Pendidikan	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8-Dec-24	199.991.801
256	09030010013000001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2-Nov-20	22.770.000
257	11010010013000012	Dinas Pertanian	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-16	35.000.000
258	11010010013000013	Dinas Pertanian	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	31-Dec-16	75.000.000
259	11010010013000015	Dinas Pertanian	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	29-Nov-16	289.919.000
260	12010010013000001	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21-Nov-18	204.320.000
261	13010010013000008	Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	31-Dec-13	639.943.000
Total					71.142.949.572

Rekapitulasi Aset Tetap Jaringan, Irigasi, dan Jaringan yang Tidak Didukung dengan Informasi Lokasi

No	SKPD	Jumlah ID Aset	Jumlah dari Harga	Jenis Aset	Tahun perolehan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	15.337.577.835,65	Instalasi Gardu Listrik, Bangunan Air dan Bangunan Pengaman Sungai	2019-2023
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	30.000.000,00	Instalasi Gardu Listrik	2015
3	Dinas Kesehatan	41	370.524.800,00	Instalasi Gardu Listrik, Instalasi Air Bersih dan Jaringan Listrik	2016-2023
4	Dinas Lingkungan Hidup	3	1.004.255.650,00	Jaringan Listrik	2015
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2591	226.382.915.537,41	Jalan, Bangunan Air Irigasi, Bangunan Pengaman Sungai, Instalasi Gardu Listrik, Jembatan, Jaringan Listrik, Bangunan Pengembangan Sumber Air, Bangunan Pengembangan Rawa, Bangunan Air Bersih dan Bangunan Air Kotor	2005-2024
6	Dinas Pendidikan	28	3.278.643.764,00	Air Bersih dan Bangunan Air Kotor	2016-2020
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	46.000.000,00	Instalasi Gardu Listrik	2018
8	Dinas Perhubungan	23	917.700.000,00	Jaringan Listrik	2024
9	Dinas Pertanian	1	17.500.000,00	Instalasi Gardu Listrik	2015
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	246	65.485.522.905,16	Bangunan Pengaman Sungai, Bangunan Pengaman Rawa, Bangunan Air Kotor, Jalan, Jembatan, Bangunan Air Bersih, Bangunan Air Kotor, Instalasi Gardu Listrik, Jaringan Listrik dan Instalasi Jaringan Kotor,	2015-2022
11	PKM AIR ITAM	1	458.000.000,00	Instalasi Pengolahan Sampah	2024
12	PKM TANAH ABANG	1	27.876.550,00	Jaringan Listrik	2019
13	Sekretaris Daerah	6	479.538.336,00	Jaringan Gas, Jaringan Listrik, Instalasi Air Bersih dan Instalasi Gardu Listrik	2019-2019
Total Keseluruhan		2948	313.836.055.378,22		

Rincian Aset Tetap Kendaraan Dinas yang Tidak Hadir saat Pemeriksaan Kendaraan

No	ID Aset	Harga (Rp)	Tanggal Perolehan	Merk	Type	Nomor Rangka	Nomor Polisi
	A. Sekretariat Daerah						
1	04010060012000018	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066204	BG 2126PAZ
2	04010060012000019	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066201	BG 2127PAZ
3	04010060012000021	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066181	BG 2129PAZ
4	04010060012000022	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066179	BG 2130PAZ
5	04010060012000024	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066178	BG 2131PAZ
6	04010060012000025	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066176	BG 2132PAZ
7	04010060012000026	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066175	BG 2133PAZ
8	04010060012000027	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066170	BG 2134PAZ
9	04010060012000029	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066160	BG 2136PAZ
10	04010060012000030	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066157	BG 2137PAZ
11	04010060012000031	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066156	BG 2138PAZ
12	04010060012000046	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066149	BG 2154PAZ
13	04010060012000054	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064392	BG 2162PAZ
14	04010060012000056	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064373	BG 2164PAZ
15	04010060012000059	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ063413	BG 2167PAZ
16	04010060012000062	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062933	BG 2170PAZ
17	04010060012000063	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062862	BG 2171PAZ
18	04010060012000065	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062500	BG 2173PAZ
19	04010060012000066	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062496	BG 2174PAZ
20	04010060012000068	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066171	BG 2176PAZ
21	04010060012000069	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ059950	BG 2177PAZ
22	04010060012000070	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ058955	BG 2178PAZ
23	04010060012000071	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ058957	BG 2179PAZ
24	04010060012000074	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062816	BG 2182PAZ
25	04010060012000076	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062886	BG 2184PAZ
26	04010060012000078	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062970	BG 2186PAZ
27	04010060012000081	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064314	BG 2189PAZ
28	04010060012000084	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066714	BG 2192PAZ
29	04010060012000085	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066716	BG 2193PAZ
30	04010060012000086	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066720	BG 2194PAZ
31	04010060012000089	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066745	BG 2197PAZ
32	04010060012000091	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066763	BG 2199PAZ
33	04010060012000108	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066174	BG 2216PAZ
34	04010060012000110	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066774	BG 2218PAZ
35	04010060012000112	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066882	BG 2220PAZ
36	04010060012000118	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ068502	BG 2226PAZ
37	04010060012000127	20.376.500	11/17/2015	HONDA	MEGA PRO CW FI -Hitam	MH1KC6114FK037263	BG 2246PAZ

No	ID Aset	Harga (Rp)	Tanggal Perolehan	Merk	Type	Nomor Rangka	Nomor Polisi
38	04010060012000132	20.376.500	11/17/2015	HONDA	MEGA PRO CW FI -Hitam	MH1KC6119FK037260	BG 2240PAZ
39	04010060012000133	12.541.500	12/31/2015	Honda	NF11T11C10 Revo - Hitam	MH1JBK115FK278143	BG 2278PAZ
40	04010060012000134	12.541.500	12/31/2015	Honda	NF11T11C10 Revo - Hitam	MH1JBK116FK268236	BG 2282PAZ
41	04010060012000137	12.541.500	12/31/2015	Honda	NF11T11C10 Revo - Hitam	MH1JBK117FK254491	BG 2286PAZ
42	04010060012000138	12.541.500	12/31/2015	Honda	NF11T11C10 Revo - Hitam	MH1JBK11XFK254520	BG 2284PAZ
43	04010060012000143	12.541.500	12/31/2015	Honda	NF11T11C10 Revo - Hitam	MH1JBK114FK267151	BG 2287PAZ
44	04010060012000144	12.541.500	12/31/2015	Honda	NF11T11C10 Revo - Hitam	MH1JBK119FK250801	BG 2280PAZ
45	04010010012000003	215.500.000	8/20/2013	ISUZU PHANTER	TBR 54F TURBO LM/PERAK METALIK	MHCTBR54FDK319866	BG 1420 PZ
46	04010010012000005	215.500.000	8/20/2013	ISUZU PHANTER	TBR 54F TURBO LM/PERAK METALIK	MHCTBR54FDK319868	BG 1408 PZ
47	04010010012000006	215.500.000	8/20/2013	ISUZU PHANTER	TBR 54F TURBO LM/PERAK METALIK	MHCTBR54FDK319869	BG 1445 PZ
48	04010010012000016	349.883.750	2/13/2014	MITSUBISHI	Strada Triton 2.5 A DC EXCEED (4x4) -HITAM MIKA	MMBJNB40ED016435	BG 8046 PZ
49	04010010012000024	252.720.000	9/19/2014	TOYOTA	KIJANG INNOVA G M/T - HITAM METALIK	MHFXW42GXE2297857	BG 1485 PZ
50	04010010012000028	215.500.000	8/20/2013	ISUZU PHANTER	TBR 54F TURBO LM - PERAK METALIK	MHCTBR54FDK319864	BG 1416 PZ
51	04010010012000029	311.000.000	8/20/2013	ISUZU	NHR 55 CD Microbus E2-1 - SILVER	MHCNHR55EDJ051312	BG 7012 PZ
52	04010010012000030	501.350.000	8/27/2014	TOYOTA	DYNA 130 XT MERAH	MHFC1JU43E5111615	BG 7011 PZ
53	04010010012000047	19.178.500	8/27/2013	Honda	MEGA PRO CW 150 /HITAM	MH1KC3110DK303793	BG 3072 DZ
54	04010010012000048	19.178.500	8/27/2013	Honda	MEGA PRO CW 150 /HITAM	MH1KC3114DK301416	BG 3077 DZ
55	04010010012000053	19.178.500	8/27/2013	Honda	MEGA PRO CW 150 /HITAM	MH1KC3111DK294117	BG 2074PAZ
56	04010010012000054	19.178.500	8/27/2013	Honda	MEGA PRO CW 150 /HITAM	MH1KC3112DK303794	BG 2073PAZ
57	04010010012000069	25.000.000	10/8/2013	KAWASAKI	LX 150C KLX 150S/TRAIL - HITAM	MH4LX150CDK91732	BG 2323 DZ
58	04010010012000072	25.000.000	10/8/2013	KAWASAKI	LX 150C KLX 150S/TRAIL - HITAM	MH4LX150CDK91783	BG 2030PAZ
59	04010010012000082	26.100.000	8/18/2014	KAWASAKI	LX150C KLX150S /PUTIH	MH4LX150CEJP16387	BG 2104PAZ
60	04010010012002706	378.550.000	4/15/2016	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T -SILVER METALIK	MHFAW8EM6G0201813	BG 1541 PZ
61	04010010012002709	382.410.000	4/15/2016	TOYOTA	ALL NEW HILUX DC 2.5 G (4x4) M/T -Hitam Metalik	MR0KS8CD6F1032407	BG 8052 PZ
62	04010010012006798	412.087.500	4/17/2017	ISUZU	D MAX DC V-GS VIN/HITAM	MPATFS86JGT011379	BG 9032 PZ
63	04010010012006811	31.750.000	4/17/2017	KAWASAKI	KLX 150 HIJAU	MHLX150GHJP39513	BG 2319PAZ
64	04010010012006815	66.850.000	4/17/2017	KAWASAKI	KLX 250S -HIJAU	JKALX250SHDA25494	BG 2326 PZ
65	04010010012006816	66.850.000	4/17/2017	KAWASAKI	KLX 250S -HIJAU	JKALX250SHDA25488	BG 2327 PZ
66	04010010012007013	17.095.000	12/15/2017	YAMAHA	NEW FINO PREMIUM 125 BLUECORE	MH3SE88DOHJ011068	BG 2358PAZ
67	04010010012007708	400.000.000	4/10/2018	ISUZU D-MAX	DC (4X4) 2.5 L VGS M/T - PUTIH	MPATFS86JIT005258	BG 9048 PZ
68	04010010012007709	400.000.000	4/10/2018	ISUZU D-MAX	DC (4X4) 2.5 L VGS M/T - PUTIH	MPATFS86JIT005259	BG 9049 PZ
69	04010010012007711	400.000.000	4/10/2018	ISUZU D-MAX	DC (4X4) 2.5 L VGS M/T - PUTIH	MPATFS86JIT005257	BG 9051 PZ
70	04010010012008635	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240JJ039398	BG 2402PAZ
71	04010010012008637	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / MERAH	MH3UE1240JJ039660	BG 2404PAZ
72	04010010012008638	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / MERAH	MH3UE1240JJ039610	BG 2405PAZ
73	04010010012008639	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / MERAH	MH3UE1240JJ039629	BG 2406PAZ

No	ID Aset	Harga (Rp)	Tanggal Perolehan	Merk	Type	Nomor Rangka	Nomor Polisi
74	04010010012008644	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240JJ039505	BG 2413PAZ
75	04010010012008657	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240JJ038539	BG 2426PAZ
76	04010010012008663	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240JJ039530	BG 2399PAZ
77	04010010012010143	511.778.000	12/5/2022	FORD RANGER	2.2L XL 4WD (4x4) DC - Hitam Metalik	MNBMLFF80NW217023	BG 8816 PZ
78	04010010012010145	293.900.000	11/16/2022	TOYOTA NEW VELOZ	1.5 Q CVT- Hitam Metalik	MHFAB1BY9N0045392	BG 1645 PZ
79	04010010012010146	381.500.000	11/16/2022	TOYOTA KIJANG INNOVA	2.4 G M/T DSL -Hitam Metalik	MHFJB8EM6N1106466	BG 1646 PZ
80	06010010012000001	171.040.000	8/4/2014	TOYOTA	NEW AVANZA G 1.5 M/T	MHKM1CA3JEK017629	BG 1458 PZ
81	09020010012000001	176.110.000	8/21/2014	TOYOTA	NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T -SILVER METALIK	MHKM1CA4JEK081802	BG 1491 PZ
82	10010010012000002	168.920.000	8/25/2014	TOYOTA	NEW AVANZA G 1.3 M/T -SILVER METALIK	MHKM1BH3JEJ073433	BG 1496 PZ
83	12020010012000005	176.110.000	4/30/2014	TOYOTA	NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T	MHKM1CA4JEK069998	BG 1461 PZ
84	19010010012000001	171.040.000	9/11/2014	TOYOTA	NEW AVANZA 1.5G M/T - HITAM METALIK	MHKMICA3JEK017378	BG 1495 PZ
B. Dinas Lingkungan Hidup							
85	16010010012000013	34.245.000	3/16/2015	VIAR	VR 150 3R	MGRVR15TAFLO000636	BG 2260PAZ
86	16010010012000558	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001216	BG 2552PAZ
87	16010010012000571	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001253	BG 2576PAZ
Total		7.848.810.382					

Rincian Aset Tetap yang Hilang dan Tidak Diketahui Keberadaannya

No	ID Aset	SKPD	Harga (Rp)	Tanggal Perolehan	Merk	Type	Nomor Rangka	Nomor Polisi	Keterangan	Catatan
1	08010010012000012	Dinas Pendidikan	14.625.000,00	12/31/2011	Yamaha	Jupiter MX	MH355S001BK052273	BG 4648 DZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak diketahui keberadaannya
2	08010010012000017	Dinas Pendidikan	3.500.000,00	12/31/2005	Honda		MHIKE-000PPK008552	BG 7076 LZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak diketahui keberadaannya
3	08010010012000019	Dinas Pendidikan	2.500.000,00	12/31/2005	Suzuki	A 100	MHRC100PPJ	BG 73151 L	Hibah dari Muara Enim	Tidak diketahui keberadaannya
4	08010010012000020	Dinas Pendidikan	3.500.000,00	12/31/2005	Suzuki	A 100	MHDA100VXVJ-274067	BG 7306 LZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak diketahui keberadaannya
5	08010010012000023	Dinas Pendidikan	13.281.250,00	12/31/2008	HONDA	NF 100 TD	MH1HB62138K550289	BG 2307 DZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak diketahui keberadaannya
6	08010010012000027	Dinas Pendidikan	1.500.000,00	12/31/2005	Honda	MCB	MHAHBA11WK023412	BG 5536 DZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak diketahui keberadaannya
7	08010010012000034	Dinas Pendidikan	14.625.000,00	12/31/2011	YAMAHA	JUPITER MX	MH355S001BK056576	BG 4643 DZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak diketahui keberadaannya
8	08010010012000036	Dinas Pendidikan	3.500.000,00	12/31/2005	HONDA	GL-M. II	MH1UABEIX3K025650	BG 5997 DZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak diketahui keberadaannya
9	08010010012000038	Dinas Pendidikan	2.500.000,00	12/31/2005	Suzuki	A100		BG 7306 LZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak diketahui keberadaannya
10	08010010012000040	Dinas Pendidikan	19.001.500,00	12/3/2012	HONDA GL15A1RR//T MERAH HITAM	GL15RR MEGA PRO	MH1KC31120K260377	BG 2789DZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak diketahui keberadaannya
11	11010010012000003	Dinas Pertanian	11.000.000,00	11/1/2005	YAMAHA	YAMAHA YT	-	BG 5371 NZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak Diketahui Keberadaannya
12	11010010012001262	Dinas Pertanian	6.200.000,00	12/31/2005	YAMAHA	YT 115 CC/SPORT -HITAM		BG 6189DZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak Diketahui Keberadaannya
13	11010010012001263	Dinas Pertanian	15.000.000,00	12/31/2005	YAMAHA	YT 115 CC /SPORT -HITAM		BG 6183 DZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak Diketahui Keberadaannya
14	11010010012001266	Dinas Pertanian	6.200.000,00	12/31/2005	YAMAHA	YT 115 CC /SPORT -HITAM		BG 6167 DZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak Diketahui Keberadaannya
15	11010010012001268	Dinas Pertanian	15.455.000,00	12/31/2006	HONDA	GL 160 D /HITAM		BG 6316 DZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak Diketahui Keberadaannya
16	11010010012001269	Dinas Pertanian	15.455.000,00	12/31/2006	HONDA	GL 160 D /HITAM		BG 6246 DZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak Diketahui Keberadaannya
17	11010010012001270	Dinas Pertanian	12.000.000,00	12/31/2005	YAMAHA	YT 115 CC /SPORT -HITAM		BG 5372 NZ	Hibah dari Muara Enim	Tidak Diketahui Keberadaannya
18	18010010012000004	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.635.000,00	3/23/2015	YAMAHA	35D VEGA RR -HITAM	MH335D007EJ055239	BG 2228PAZ	MOTOR HILANG (ADA SURAT KETERANGAN)	Sudah Penetapan TPTGR
19	04010060012000017	Bagian Umum	13.125.000,00	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066206	BG 2125PAZ	Tidak Hadir	Sudah Penetapan TPTGR
20	04010060012000103	Bagian Umum	13.125.000,00	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064913	BG 2211PAZ	Tidak Hadir	Sudah Penetapan TPTGR
21	07010010012000046	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	12/31/2008	YAMAHA	VEGA R	MH33P90028K054917	BG 6875 DZ		Sudah Penetapan TPTGR
22	04010010012000062	Sekretaris Daerah	19.178.500,00	8/27/2013	Honda	MEGA PRO CW 150/HITAM	MH1KC3117DK30760	BG 2078PAZ	Tidak Hadir	Sudah Penetapan TPTGR
23	09030010012001177	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.700.000,00	11/12/2020	Yamaha WR 155 CC	Trail / Warna Hitam	MH3DG3710LK007708	BG 2670 PAZ	Hilang Tahun 2022, AN. YUS ERNA	Belum Penetapan TPTGR
24	11010010012001359	Dinas Pertanian	18.467.011,00	12/2/2022	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Merah Hitam	MH1JM812XNK168581	BG 2751PAZ	Surat Tanda Penerimaan Laporan an. Marini Citra Dwi atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa Motor Honda BG 2751 PAS Nomor Rangka MH1JMB12XNK168581 Nomor Mesin JM81E2168267	Belum Penetapan TPTGR
25	09050010012000004	Dinas Sosial	30.000.000,00	5/7/2015	Kawasaki	KLX 150 E CKD / Hijau	MH4LX150EFJP20942	BG 2107 PZ	Aset Hilang	Belum Penetapan TPTGR
26	04510040012000002	Kelurahan Talang Ubi Timur	17.246.000,00	12/30/2011	HONDA MEGA PRO		MH1KC2119BK049791	BG 2677 DZ	Hilang Tahun 2018	Belum Penetapan TPTGR
Total			332.679.261,00							

Rincian Aset Tetap Kendaraan Dinas yang Masa Pinjam Pakai Kendaraan Telah Habis

No	ID Aset	SKPD	Harga (Rp)	Tanggal Perolehan	Merk	Type	Nomor_Rangka	Nomor_Polisi	Masa Berlaku s.d
1	04010060012000002	Bagian Umum	306.270.000	10/5/2015	TOYOTA	KIJANG INNOVA V A/T - PUTIH	MHFHW43G9F4093409	BG 1531 PZ	01 Maret 2024
2	04010060012000018	Bagian Umum	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066204	BG 2126PAZ	08 Desember 2022
3	04010060012000089	Bagian Umum	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066745	BG 2197PAZ	07 Februari 2024
4	04010060012000119	Bagian Umum	20.376.500	11/17/2015	HONDA	MEGA PRO CW FI -Hitam	KC6111FK037253	BG 2252PAZ	01 Maret 2024
5	04010060012000120	Bagian Umum	20.376.500	11/17/2015	HONDA	MEGA PRO CW FI -Hitam	KC6115FK037255	BG 2247PAZ	01 Maret 2024
6	04010060012000121	Bagian Umum	20.376.500	11/17/2015	HONDA	MEGA PRO CW FI -Hitam	KC6117FK037273	BG 2109PAZ	01 Maret 2024
7	04010060012000122	Bagian Umum	20.376.500	11/17/2015	HONDA	MEGA PRO CW FI -Hitam	KC6116FK037281	BG 2253PAZ	01 Maret 2024
8	04010060012000123	Bagian Umum	20.376.500	11/17/2015	HONDA	MEGA PRO CW FI -Hitam	KC6118FK037282	BG 2254PAZ	01 Maret 2024
9	04010060012000124	Bagian Umum	20.376.500	11/17/2015	HONDA	MEGA PRO CW FI -Hitam	MH1KC6112FK037259	BG 2108PAZ	01 Maret 2024
10	04010060012000125	Bagian Umum	20.376.500	11/17/2015	HONDA	MEGA PRO CW FI -Hitam	MH1KC6115FK037269	BG 2249PAZ	01 Maret 2024
11	04010060012000132	Bagian Umum	20.376.500	11/17/2015	HONDA	MEGA PRO CW FI -Hitam	MH1KC6119FK037260	BG 2240PAZ	7 Februari 2024
12	04010060012000133	Bagian Umum	12.541.500	12/31/2015	Honda	NF11T11C10 Revo - Hitam	MH1JBK115FK278143	BG 2278PAZ	16 Maret 2024
13	04010060012000138	Bagian Umum	12.541.500	12/31/2015	Honda	NF11T11C10 Revo - Hitam	MH1JBK111FK254520	BG 2284PAZ	11 Desember 2022
14	01010010012000010	Dinas Kesehatan	311.190.000	9/12/2014	TOYOTA	KIJANG INNOVA A/T - HITAM METALIK	MHFHW43G1E4088798	BG 1501 PZ	03 Januari 2025
15	07010010012007944	Dinas Kesehatan	238.008.000	9/27/2018	APV GL SILVER	APV GL /Abu-Abu	MHYGDN42VJ401094	BG 9139 DZ	3 Januari 2025
16	07010010012011124	Dinas Kesehatan	435.600.000	11/17/2022	TOYOTA HILUX 2.4 G	DOUBLE CABIN 4x4 M/T MODEL PICKUP -ABU-ABU METALIK	MR0KB8CD9N1135075	BG 8806 PZ	03 Januari 2025
17	07010010012011295	Dinas Kesehatan	430.000.000	9/30/2022	mitsubishi xpander	AMBULANCE DELUXE 1.5i gls-1 4x2 M/T- PUTIH	MK2NCLMANN000855	BG 9073 PZ	
18	07010010012012007	Dinas Kesehatan	410.300.000	10/12/2023	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL -HITAM METALIK	MHFJB8EM3P1118075	BG 1082 PZ	28 Desember 2024
19	16010010012000009	Dinas Lingkungan Hidup	34.245.000,00	3/16/2015	VIAR	VR 150 3R	MGRVR15TAFLO00634	BG 2256PAZ	23 Maret 2023
20	16010010012000010	Dinas Lingkungan Hidup	34.245.000,00	3/16/2015	VIAR	VR 150 3R	MGRVR15TAFLO00639	BG 2257PAZ	01 Maret 2025
21	16010010012000013	Dinas Lingkungan Hidup	34.245.000	3/16/2015	VIAR	VR 150 3R	MGRVR15TAFLO00636	BG 2260PAZ	01 Maret 2025
22	16010010012000523	Dinas Lingkungan Hidup	35.120.000,00	3/27/2018	VIAR V 30 R Sampah New Karya 300 cc / Kuning	BAK TERBUKA	MGRVR30TAJL100280	BG 2375 PZ	01 Maret 2025
23	16010010012000526	Dinas Lingkungan Hidup	35.120.000,00	3/27/2018	VIAR V 30 R Sampah New Karya 300 cc / Kuning	BAK TERBUKA	MGRVR30TAJL100284	BG 2378 PZ	01 Maret 2025
24	16010010012000546	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001255	BG 2531PAZ	01 Maret 2025
25	16010010012000547	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001256	BG 2582PAZ	01 Maret 2025
26	16010010012000551	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001202	BG 2542PAZ	01 Maret 2025
27	16010010012000552	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001191	BG 2581PAZ	01 Maret 2025
28	16010010012000553	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001251	BG 2537PAZ	01 Maret 2025
29	16010010012000555	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001200	BG 2555PAZ	23 Maret 2023
30	16010010012000558	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001216	BG 2552PAZ	01 Maret 2025
31	16010010012000559	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001252	BG 2532PAZ	01 Maret 2025
32	16010010012000560	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001205	BG 2580PAZ	23 Maret 2023
33	16010010012000564	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001242	BG 2550PAZ	01 Maret 2025
34	16010010012000568	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001183	BG 2545PAZ	23 Maret 2023
35	16010010012000569	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001208	BG 2578PAZ	01 Maret 2025
36	16010010012000572	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001189	BG 2574PAZ	01 Maret 2025
37	16010010012000573	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001258	BG 2568PAZ	01 Maret 2025
38	16010010012000580	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001186	BG 2540PAZ	01 Maret 2025
39	16010010012000582	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001187	BG 2563PAZ	01 Maret 2025
40	16010010012000584	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001218	BG 2573PAZ	01 Maret 2025
41	16010010012000585	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001206	BG 2569PAZ	01 Maret 2025
42	16010010012000587	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001217	BG 2558PAZ	06 November 2025
43	16010010012000588	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001243	BG 2557PAZ	01 Maret 2025
44	16010010012000589	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001207	BG 2565PAZ	01 Maret 2025
45	16010010012000590	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001215	BG 2566PAZ	01 Maret 2025
46	16010010012000591	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001193	BG 2559PAZ	01 Maret 2025
47	16010010012000592	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001221	BG 2560PAZ	01 Maret 2025
48	16010010012000596	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001244	BG 2534PAZ	23 Maret 2023
49	16010010012000597	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.068	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001182	BG 2533PAZ	01 April 2025
50	16010010012000630	Dinas Lingkungan Hidup	161.000.000	11/30/2022	SUZUKI NEW CARRY	AEV415W CX 2 (4x2) M/T - PICK UP /ABU-ABU METALIK	MHYHDC61TNJ253669	BG 8814 PZ	06 Desember 2024
51	04010010012010144	Dinas Pemadam Kebakaran dan	599.500.000	12/5/2022	FORD RANGER	2.2L XL 4WD (4x4) DC - Merah	MNBLMFF80NW220462	BG 8817 PZ	16 Desember 2024

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PIFA2AAF.

No	ID Aset	SKPD	Harga (Rp)	Tanggal Perolehan	Merk	Type	Nomor_Rangka	Nomor_Polisi	Masa Berlaku s.d
52	14010010012000196	Inspektorat Kabupaten	309.300.000	7/24/2017	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.0 G A/T-PUTIH	MHFJW8EM9H2324789	BG 1557 PZ	03 April 2025
53	01010010012002401	Sekretariat DPRD	24.085.000	4/1/2019	YAMAHA AEROX	MATIC 155 /MERAH	MH3SJ4610J177082	BG 2587PAZ	15 Januari 2025
54	04010010012000005	Sekretaris Daerah	215.500.000	8/20/2013	ISUZU PHANTER	TBR 54F TURBO LM/PERAK METALIK	MHCTBR54FDK319868	BG 1408 PZ	11 Desember 2022
55	04010010012000013	Sekretaris Daerah	168.580.000	8/23/2013	TOYOTA	NEW AVANZA 1,3 G M/T SILVER METALIK	MHKM1BA3JD034001	BG 1421 PZ	01 Maret 2024
56	04010010012000016	Sekretaris Daerah	349.883.750	2/13/2014	MITSUBISHI	Strada Triton 2.5 A DC EXCEED (4x4) -HITAM MIKA	MMBJNKB40ED016435	BG 8046 PZ	14 Maret 2024
57	04010010012000019	Sekretaris Daerah	176.110.000	6/25/2014	TOYOTA	NEW AVANZA VELOS 1.5 M/T -HITAM METALIK	MHKM1CA4JEK076032	BG 1457 PZ	05 April 2024
58	04010010012000021	Sekretaris Daerah	164.420.000	10/21/2014	TOYOTA	AVANZA 1,3 G M/T HITAM METALIK	MHKM1BA3JEJ094260	BG 1488 PZ	01 Maret 2024
59	04010010012000023	Sekretaris Daerah	252.720.000	9/19/2014	TOYOTA	KIJANG INNOVA G M/T - HITAM METALIK	MHFJW42G8E2297632	BG 1486 PZ	01 Maret 2024
60	04010010012000024	Sekretaris Daerah	252.720.000	9/19/2014	TOYOTA	KIJANG INNOVA G M/T - HITAM METALIK	MHFJW42GXE2297857	BG 1485 PZ	31 Maret 2024
61	04010010012000027	Sekretaris Daerah	348.690.000	6/13/2014	TOYOTA	Hilux DC M/T Diesel -PUTIH	MR0FR22G7E0780417	BG 9006 PZ	01 Maret 2024
62	04010010012000034	Sekretaris Daerah	331.341.350,00	9/17/2013	ISUZU	Double Cabin TFS6X D-MAX RODEO ABU-ABU	MPATFS86JDT005630	BG 9028 DZ	01 Maret 2024
63	04010010012000054	Sekretaris Daerah	19.178.500	8/27/2013	Honda	MEGA PRO CW 150 /HITAM	MH1KC3112DK303794	BG 2073PAZ	08 Desember 2022
64	04010010012007711	Sekretaris Daerah	400.000.000	4/10/2018	ISUZU D-MAX	DC (4x4) 2.5 L VGS M/T - PUTIH	MPATFS86JIT005257	BG 9051 PZ	10 Maret 2024
65	04010010012008635	Sekretaris Daerah	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240JJ039398	BG 2402PAZ	26 Januari 2024
66	04010010012008636	Sekretaris Daerah	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240JJ039384	BG 2403PAZ	26 Januari 2024
67	04010010012008641	Sekretaris Daerah	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240JJ038915	BG 2408PAZ	26 Januari 2024
68	04010010012008645	Sekretaris Daerah	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / MERAH	MH3UE1240JJ039665	BG 2414PAZ	26 Januari 2024
69	04010010012008648	Sekretaris Daerah	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / MERAH	MH3UE1240JJ039649	BG 2417PAZ	26 Januari 2024
70	04010010012008663	Sekretaris Daerah	14.925.000	7/9/2018	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240JJ039530	BG 2399PAZ	26 Januari 2024
71	04010010012009087	Sekretaris Daerah	189.500.000	12/5/2018	ISUZU PANTHER	PICK UP FD VIN 2018/HITAM	MHCTBR54FJK178249	BG 8039 PZ	01 Maret 2024
72	04010010012010143	Sekretaris Daerah	511.778.000	12/5/2022	FORD RANGER	2.2L XL 4WD (4x4) DC - Hitam Metalik	MNBLMFF80NW217023	BG 8816 PZ	16 Desember 2024
73	04010010012010146	Sekretaris Daerah	381.500.000	11/16/2022	TOYOTA KIJANG INNOVA	2.4 G M/T DSL -Hitam Metalik	MHFJB8EM6N1106466	BG 1646 PZ	16 Desember 2024
74	06010010012000001	Sekretaris Daerah	171.040.000	8/4/2014	TOYOTA	NEW AVANZA G 1.5 M/T	MHKM1CA3JEK017629	BG 1458 PZ	23 Agustus 2024
75	10010010012000002	Sekretaris Daerah	168.920.000	8/25/2014	TOYOTA	NEW AVANZA G 1.3 M/T - SILVER METALIK	MHKM1BH3JEJ073433	BG 1496 PZ	01 Maret 2024
Total			8.919.796.318						

Rincian Aset Tetap Kendaraan Dinas Pinjam Pakai di Luar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

No	ID Aset	Harga (Rp)	Tanggal Perolehan	Merk	Type	Nomor Rangka	Nomor Polisi	Masa Berlaku s.d
A. Sekretariat Daerah								
1	04010060012000019	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066201	BG 2127PAZ	12 Agustus 2026
2	04010060012000020	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066182	BG 2128PAZ	12 Agustus 2026
3	04010060012000021	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066181	BG 2129PAZ	12 Agustus 2026
4	04010060012000023	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066218	BG 2146PAZ	12 Agustus 2026
5	04010060012000024	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066178	BG 2131PAZ	12 Agustus 2026
6	04010060012000025	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066176	BG 2132PAZ	12 Agustus 2026
7	04010060012000026	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066175	BG 2133PAZ	12 Agustus 2026
8	04010060012000028	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066161	BG 2135PAZ	12 Agustus 2026
9	04010060012000029	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066160	BG 2136PAZ	12 Agustus 2026
10	04010060012000030	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066157	BG 2137PAZ	12 Agustus 2026
11	04010060012000031	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066156	BG 2138PAZ	12 Agustus 2026
12	04010060012000032	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066153	BG 2139PAZ	12 Agustus 2026
13	04010060012000033	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066151	BG 2140PAZ	12 Agustus 2026
14	04010060012000034	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066150	BG 2141PAZ	12 Agustus 2026
15	04010060012000035	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066145	BG 2142PAZ	12 Agustus 2026
16	04010060012000038	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066142	BG 2145PAZ	12 Agustus 2026
17	04010060012000039	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062085	BG 2147PAZ	12 Agustus 2026
18	04010060012000041	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066158	BG 2150PAZ	12 Agustus 2026
19	04010060012000042	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066162	BG 2149PAZ	12 Agustus 2026
20	04010060012000043	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066155	BG 2151PAZ	12 Agustus 2026
21	04010060012000044	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066154	BG 2152PAZ	12 Agustus 2026
22	04010060012000071	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ058957	BG 2179PAZ	12 Agustus 2026
23	04010060012000075	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062819	BG 2183PAZ	12 Agustus 2026
24	04010060012000076	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062886	BG 2184PAZ	12 Agustus 2026
25	04010060012000077	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062964	BG 2185PAZ	12 Agustus 2026
26	04010060012000078	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062970	BG 2186PAZ	12 Agustus 2026
27	04010060012000079	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ063397	BG 2187PAZ	12 Agustus 2026
28	04010060012000080	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ063402	BG 2188PAZ	12 Agustus 2026
29	04010060012000081	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064314	BG 2189PAZ	12 Agustus 2026
30	04010060012000082	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064325	BG 2190PAZ	12 Agustus 2026
31	04010060012000089	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066745	BG 2197PAZ	07 Februari 2024
32	04010060012000109	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066742	BG 2217PAZ	18 November 2026
33	04010060012000116	13.125.000	3/23/2015	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066880	BG 2224PAZ	12 Agustus 2026
34	04010060012000138	12.541.500	12/31/2015	Honda	NF11T11C10 Rev0 - Hitam	MH1JBK11XFK254520	BG 2284PAZ	11 Desember 2022
35	04010010012000019	176.110.000	6/25/2014	TOYOTA	NEW AVANZA VELOS 1.5 M/T - HITAM METALIK	MHKM1CA4JEK076032	BG 1457 PZ	05 April 2024
B. Dinas Lingkungan Hidup								
1	16010010012000009	34.245.000,00	3/16/2015	VIAR	VR 150 3R	MGRVR15TAFLO00634	BG 2256PAZ	23 Maret 2023
2	16010010012000010	34.245.000,00	3/16/2015	VIAR	VR 150 3R	MGRVR15TAFLO00639	BG 2257PAZ	01 Maret 2025
3	16010010012000013	34.245.000	3/16/2015	VIAR	VR 150 3R	MGRVR15TAFLO00636	BG 2260PAZ	01 Maret 2025
4	16010010012000523	35.120.000,00	3/27/2018	VIAR V 30 R Sampah New Karya 300 cc / Kuning	BAK TERBUKA	MGRVR30TAL100280	BG 2375 PZ	01 Maret 2025
5	16010010012000526	35.120.000,00	3/27/2018	VIAR V 30 R Sampah New Karya 300 cc / Kuning	BAK TERBUKA	MGRVR30TAL100284	BG 2378 PZ	01 Maret 2025
6	16010010012000546	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001255	BG 2531PAZ	01 Maret 2025
7	16010010012000547	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001256	BG 2582PAZ	01 Maret 2025
8	16010010012000551	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001202	BG 2542PAZ	01 Maret 2025
9	16010010012000552	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001191	BG 2581PAZ	01 Maret 2025
10	16010010012000553	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001251	BG 2537PAZ	01 Maret 2025
11	16010010012000555	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001200	BG 2555PAZ	23 Maret 2023
12	16010010012000558	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001216	BG 2552PAZ	01 Maret 2025
13	16010010012000559	42.915.066,00	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001252	BG 2532PAZ	01 Maret 2025
14	16010010012000560	42.915.066,00	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001205	BG 2580PAZ	23 Maret 2023
15	16010010012000564	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001242	BG 2550PAZ	01 Maret 2025
16	16010010012000568	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001183	BG 2545PAZ	23 Maret 2023
17	16010010012000569	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001208	BG 2578PAZ	01 Maret 2025
18	16010010012000571	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001253	BG 2576PAZ	Tidak ada masa pinjam pakai, tidak ada perjanjian, hanya ada Berita Acara Serah Terima tanggal 11 Februari 2019
19	16010010012000572	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001189	BG 2574PAZ	01 Maret 2025
20	16010010012000573	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001258	BG 2568PAZ	01 Maret 2025
21	16010010012000580	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001186	BG 2540PAZ	01 Maret 2025
22	16010010012000582	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001187	BG 2563PAZ	01 Maret 2025
23	16010010012000584	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001218	BG 2573PAZ	01 Maret 2025
24	16010010012000585	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001206	BG 2569PAZ	01 Maret 2025
25	16010010012000587	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001217	BG 2558PAZ	06 November 2025
26	16010010012000588	42.915.066,00	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001243	BG 2557PAZ	01 Maret 2025
27	16010010012000589	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001207	BG 2565PAZ	01 Maret 2025
28	16010010012000590	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001215	BG 2566PAZ	01 Maret 2025
29	16010010012000591	42.915.066	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001193	BG 2559PAZ	01 Maret 2025
30	16010010012000592	42.915.066,00	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001221	BG 2560PAZ	01 Maret 2025
31	16010010012000596	42.915.066,00	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAL001244	BG 2534PAZ	23 Maret 2023

No	ID Aset	Harga (Rp)	Tanggal Perolehan	Merk	Type	Nomor Rangka	Nomor Polisi	Masa Berlaku s.d
32	16010010012000597	42.915.068	12/7/2018	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001182	BG 2533PAZ	01 April 2025
33	16010010012000630	161.000.000	11/30/2022	SUZUKI NEW CARRY	AEV415W CX 2 (4x2) M/T - PICK UP /ABU-ABU METALIK	MHYHDC61TNJ253669	BG 8814 PZ	06 Desember 2024
34	16010010012000639	165.900.000	12/6/2023	SUZUKI	NEW CARRY PICK UP WD AC (4X2) M - PUTIH	MHYHDC61TPJ235697	BG 8841 PZ	04 November 2025
C. Dinas Kesehatan								
1	07010010012011295	430.000.000	9/30/2022	MITSUBISHI XPANDER	AMBULANCE DELUXE 1.5I g/s-I 4x2 M/T- PUTIH	MK2NCLMANNJ000855	BG 9073 PZ	
2	07010010012012008	410.300.000	10/12/2023	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL -ABU-ABU METALIK	MHFJB8EM0P1119880	BG 1079 PZ	02 Januari 2026
Total		3.120.658.284						

Rincian Aset Kendaraan yang Belum Dibayar Pajak dan STNK Hilang

No	ID Pemda	SKPD	Harga (Rp)	Merk	Type	Nomor_Rangka	Nomor_Polisi
1	04010060012000007	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	193.270.000	TOYOTA	NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T - PUTIH	MHKM1CB4FK041844	BG 211 PZ
2	19010010012000004	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.445.200	Honda Verza	GL15BICFI M/T	MH1KC5210EK206718	BG 2064PAZ
3	09030010012000606	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.525.000	YAMAHA JUPITER Z CW F1	Z CW F1 RACING/HITAM	MH3UE1120HJ162727	BG 2364PAZ
4	09030010012000607	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.525.000	YAMAHA JUPITER Z CW F1	Z CW F1 RACING/HITAM	MH3UE1120HJ143121	BG 2362PAZ
5	09030010012001887	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.800.000	KAWASAKI	LX150 G -HIJAU	MH4KL150GMJP89810	B 3171 PIQ
6	09030010012001888	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.800.000	KAWASAKI	LX150 G -HIJAU	MH4XL150GMJP89778	B 3172 PIQ
7	01010010012001282	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	351.520.000	TOYOTA	NEW KIJANG INOVA V M/T DIESEL VIN	MHFGB8EMXG0403713	BG 1545 PZ
8	04010010012000017	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	349.883.750,00	Mitsubishi	Strada Troton Double Cabin/Hitam Mika	MM8JNKB40ED009602	BG 9052 PZ
9	13010010012000010	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	17.472.000	HONDA	MEGAPRO GL 160 D/Hitam	MH1KC1114AK265761	BG 2469 DZ
10	13010010012000014	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.348.300	HONDA VERZA 150	GL15B1DF M/T PUTIH	MH1KC111XEK031251	BG2018 PAZ
11	15010010012000246	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	396.750.000	TOYOTA HILUX	DC 2.5 (4X4) MT -Hitam	MROKS8CD3H1104943	BG 9038 PZ
12	04010060012000002	Bagian Umum	306.270.000	TOYOTA	KIJANG INNOVA V A/T -PUTIH	MHFXXW43G9F4093409	BG 1531 PZ
13	04010060012000003	Bagian Umum	193.270.000	TOYOTA	AVANZA VELOZ HITAM METALIK 1.5 A/T	MHKM1CB4FK040561	BG 1518 PZ
14	04010060012000005	Bagian Umum	321.270.000	TOYOTA KIJANG INNOVA	V A/T -HITAM METALIK	MHFXXR43G4F1015855	BG 16 PZ
15	04010060012000013	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066229	BG 2121PAZ
16	04010060012000045	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066152	BG 2153PAZ
17	04010060012000047	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066148	BG 2155PAZ
18	04010060012000048	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066168	BG 2156PAZ
19	04010060012000049	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064384	BG 2157PAZ
20	04010060012000050	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064381	BG 2158PAZ
21	04010060012000051	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064378	BG 2159PAZ
22	04010060012000052	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064359	BG 2160PAZ
23	04010060012000053	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064323	BG 2161PAZ
24	04010060012000055	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064390	BG 2163PAZ
25	04010060012000057	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064374	BG 2165PAZ
26	04010060012000058	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064323	BG 2166PAZ
27	04010060012000060	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ063361	BG 2168PAZ
28	04010060012000061	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062937	BG 2169PAZ
29	04010060012000067	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062430	BG 2175PAZ
30	04010060012000072	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ059510	BG 2180PAZ
31	04010060012000073	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ059570	BG 2181PAZ
32	04010060012000075	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ062819	BG 2183PAZ
33	04010060012000083	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064398	BG 2191PAZ
34	04010060012000088	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066738	BG 2196PAZ
35	04010060012000093	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ066820	BG 2201PAZ
36	04010060012000096	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ058959	BG 2204PAZ
37	04010060012000097	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ058897	BG 2205PAZ
38	04010060012000101	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064994	BG 2209PAZ
39	04010060012000104	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ064997	BG 2212PAZ
40	04010060012000106	Bagian Umum	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB - Hitam	MH35D9307FJ065680	BG 2214PAZ
41	04010060012000135	Bagian Umum	12.541.500	Honda	NF11T11C10 Revo - Hitam	MH1JBK1116FK267166	BG 2288PAZ
42	04010060012000136	Bagian Umum	12.541.500	Honda	NF11T11C10 Revo - Hitam	MH1JBK1117FK278161	BG 2281PAZ
43	04010060012000140	Bagian Umum	12.541.500	Honda	NF11T11C10 Revo - Hitam	MH1JBK1117FK285888	BG 2283PAZ
44	04010060012000141	Bagian Umum	12.541.500	Honda	NF11T11C10 Revo - Hitam	MH1JBK1117FK240364	BG 2285PAZ
45	04010010012000065	Dinas Kesehatan	19.178.500	HONDA	MEGA PRO CW 150	MH1KC311DK0303895	BG 2081PAZ
46	07010010012000001	Dinas Kesehatan	354.790.000	TOYOTA HILUX	2.5 G DC (4X4) M/T /HITAM METALIK	MROFR22G1E0780783	BG 8049 PZ
47	07010010012000004	Dinas Kesehatan	195.000.000,00	MITSUBISHI	L300 BC (4x2) M/T MBL AMBULANCE	MHML0W399K0003736	BG 7035 DZ
48	07010010012000006	Dinas Kesehatan	256.250.500	SUZUKI	APV DLX MBL AMBULANCE PUTIH	MHYGDN42VBJ-354833	BG 1044 DZ
49	07010010012000008	Dinas Kesehatan	405.000.000,00	HYUNDAI	STAREX MOVER CRDI M/T /PUTIH	MHXM6F31JLE000751	BG 1477 PZ
50	07010010012000011	Dinas Kesehatan	120.000.000,00	TOYOTA	TOYOTA KIJANG STANDART KF 80/PUTIH	MHF11KF8020072663	BG 2100 DZ
51	07010010012000014	Dinas Kesehatan	545.500.000	MITSUBISHI STRADA	TRITON 2.5 L DC ADX	MMBJNKL30GH031865	BG 7002 PZ
52	07010010012000015	Dinas Kesehatan	15.000.000	YAMAHA	RX KING	MH33KA0156K807390	BG 6132 DZ
53	07010010012000016	Dinas Kesehatan	12.965.022	YAMAHA	5D9 VEGA ZR PUTIH	MH35D9205CJ726374	BG 2766 DZ
54	07010010012000017	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	3P9 VEGA R BIRU	MH33P90026K054861	BG 6853 DZ
55	07010010012000018	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	3P9 VEGA R BIRU	MH33P90028K054868	BG 6870 DZ
56	07010010012000019	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	3P9 VEGA R BIRU	MH33P90028K054970	BG 6851 DZ
57	07010010012000020	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	35D VEGA ZR PUTIH	MH35D0019J008811	BG 2377 DZ
58	07010010012000021	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGA ZR/PUTIH	MH35S00019J009013	BG 2416 DZ
59	07010010012000026	Dinas Kesehatan	14.825.000	YAMAHA	31B JUPITER Z PUTIH	MH331B0038J799614	BG 2603 DZ
60	07010010012000028	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	3P9 VEGA-R BIRU	MH33P90028K054944	BG 6850 DZ
61	07010010012000029	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	YAMAHA	3P9-VEGA R BIRU	MH33P90028K055594	BG 6837 DZ
62	07010010012000030	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	3P9 VEGA-R BIRU	MH33P90028K055766	BG 6832 DZ
63	07010010012000031	Dinas Kesehatan	12.965.022	YAMAHA	5D9 VEGA-ZR PUTIH	MH35D9205CJ726540	BG 2760 DZ
64	07010010012000032	Dinas Kesehatan	12.965.022	YAMAHA	5D9 VEGA-ZR PUTIH	MH35D9205CJ726534	BG 2784 DZ
65	07010010012000033	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	3P9 VEGA-R BIRU	MH33P90028K054825	BG 6998 DZ
66	07010010012000037	Dinas Kesehatan	3.500.000,00	SUZUKI	BRAVO	MHDCRLDPDSJ184511	BG 5676 DZ
67	07010010012000038	Dinas Kesehatan	3.800.000,00	SUZUKI	A 100	MHDA100VXTJ305495	BG 5699 DZ
68	07010010012000039	Dinas Kesehatan	15.000.000	YAMAHA	RX KING	MH33KA0156K807476	BG 6137 DZ
69	07010010012000041	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGA R BIRU	MH33P90028K054437	BG 6993 DZ
70	07010010012000042	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGA R BIRU	MH33P90028K055604	BG 6979 DZ
71	07010010012000043	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	YAMAHA	VEGA R	MH33P90028K055575	BG 6826 DZ
72	07010010012000045	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGA R	MH33P90028K054956	BG 6897 DZ
73	07010010012000047	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGA R	MH33S0019J0090002	BG 2437 DZ
74	07010010012000048	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	YAMAHA	VEGA R	MH33S0019J0090003	BG 2439 DZ
75	07010010012000049	Dinas Kesehatan	14.825.000,00	YAMAHA	31B JUPITER Z	MH331B0038J781173	BG 2610 DZ
76	07010010012000050	Dinas Kesehatan	12.965.022	YAMAHA	VEGA ZR	MH35D9205CJ727567	BG 2783 DZ
77	07010010012000051	Dinas Kesehatan	12.965.022	YAMAHA	VEGA ZR	MH35D9205CJ727552	BG 2758 DZ
78	07010010012000054	Dinas Kesehatan	3.800.000,00	HONDA WIN		MHIHAB00TTK10359	BG 5838 DZ
79	07010010012000055	Dinas Kesehatan	10.300.000	VEGA R		MH34S2105K042171	BG 6146 DZ
80	07010010012000057	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGAR R BIRU	MH33P90028K054994	BG 6996 DZ
81	07010010012000058	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGAR R	MH33P90028K054827	BG 6995 DZ
82	07010010012000059	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGAR R BIRU	MH33P90028K054826	BG 6965 DZ
83	07010010012000060	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGAR R BIRU	MH33P90028K056226	BG 6949 DZ
84	07010010012000063	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGAR R BIRU	MH33P90028K055005	BG 6900 DZ
85	07010010012000064	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	YAMAHA	VEGAR R	MH33P90028K054881	BG 6871 DZ
86	07010010012000065	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	YAMAHA	VEGAR R BIRU	MH33P90028K055586	BG 6878 DZ

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PIFA2AAF.

No	ID Pemda	SKPD	Harga (Rp)	Merk	Type	Nomor_Rangka	Nomor_Polisi
87	0701001001200066	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	Yamaha	VEGAR R / Putih	MH33P9028K054900	BG 6839 DZ
88	0701001001200068	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	YAMAHA	VEGAR R	MH335D0019J009004	BG 2450 DZ
89	0701001001200071	Dinas Kesehatan	15.000.000	Yamaha RX King	Yamaha RX King/Putih	MH33KA0156K807451	BG 6139 DZ
90	0701001001200073	Dinas Kesehatan	10.750.000,00	HONDA	SUPRA /Putih	HBA1E1770091	BG 6335 DZ
91	0701001001200074	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	YAMAHA	VEGA R	MH33P0028K054818	BG 6968 DZ
92	0701001001200075	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGA R BIRU	MH33P90028K054694	BG 6966 DZ
93	0701001001200076	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGA R	MH33P90028K05598	BG 6854 DZ
94	0701001001200077	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	YAMAHA	VEGA R BIRU	MH33P90028K054870	BG 6973 DZ
95	0701001001200078	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGA R BIRU	MH33P90028K054854	BG 6974 DZ
96	0701001001200079	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	Yamaha	VEGA R/Putih	MH33P90028K056002	BG 6879 DZ
97	0701001001200080	Dinas Kesehatan	11.360.000	YAMAHA	VEGA R BIRU	MH33P90028K054838	BG 6997 DZ
98	0701001001200083	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	YAMAHA	VEGA ZR PUTIH	MH335D0019J009006	BG 2418 DZ
99	0701001001200084	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	YAMAHA	VEGA ZR	MH335D0019J009013	BG 2432 DZ
100	0701001001200085	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	YAMAHA	VEGA ZR PUTIH	MH335D0019J009017	BG 2411 DZ
101	0701001001200086	Dinas Kesehatan	11.360.000,00	YAMAHA	VEGA ZR	MH335D0019J009028	BG 2440 DZ
102	0701001001200087	Dinas Kesehatan	14.825.000	YAMAHA	JUPITER Z	MH331B00383801001	BG 2614 DZ
103	07010010012005327	Dinas Kesehatan	250.897.193	ISUZU	NHR 55 CC BOX ALUMINIUM VIN STANDART/PUTIH	MHCNHR55EHJ072703	BG 8022 PZ
104	07010010012007084	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/HITAM	MH3UE1210J029930	BG 2467 PZ
105	07010010012007085	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J027920	BG 2486 PZ
106	07010010012007086	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J030061	BG 2465 PZ
107	07010010012007087	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/HITAM	MH3UE1210J028154	BG 2493 PZ
108	07010010012007089	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/HITAM	MH3UE1210J029925	BG 2481 PZ
109	07010010012007090	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J030003	BG 2480 PZ
110	07010010012007091	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J027910	BG 2479 PZ
111	07010010012007092	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/HITAM	MH3UE1210J024254	BG 2466 PZ
112	07010010012007093	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/HITAM	MH3UE1210J028140	BG 2497 PZ
113	07010010012007094	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J024144	BG 2473 PZ
114	07010010012007095	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/HITAM	MH3UE1210J024260	BG 2492 PZ
115	07010010012007096	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J026524	BG 2491 PZ
116	07010010012007097	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J026705	BG 2490 PZ
117	07010010012007098	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/HITAM	MH3UE1210J026228	BG 2489 PZ
118	07010010012007100	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/HITAM	MH3UE1210J029730	BG 2488 PZ
119	07010010012007101	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/HITAM	MH3UE1210J029755	BG 2482 PZ
120	07010010012007103	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J030042	BG 2461 PZ
121	07010010012007104	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J030623	BG 2458 PZ
122	07010010012007105	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J030646	BG 2459 PZ
123	07010010012007106	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J030013	BG 2472 PZ
124	07010010012007107	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/HITAM	MH3UE1210J025999	BG 2471 PZ
125	07010010012007108	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/HITAM	MH3UE1210J026004	BG 2470 PZ
126	07010010012007110	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J028082	BG 2468 PZ
127	07010010012007111	Dinas Kesehatan	16.400.000	YAMAHA VEGA VORCE	VEGA VORCE DB CW VIN 2018/MERAH	MH3UE1210J027932	BG 2477 PZ
128	07010010012007113	Dinas Kesehatan	287.250.000	DAIHATSU LUXIO	AMBULANCE/ 1.5 M/T MC/PUTIH	MHKW3CA31J022072	BG 9007 PZ
129	07010010012007338	Dinas Kesehatan	644.313.450	ISUZU	NMR71T HD 5,8 4x2 M/T/ PUTIH	MHCNMR71HJ087623	BG 8029 PZ
130	07010010012007339	Dinas Kesehatan	644.313.450	ISUZU	NMR71T HD 5,8 4x2 M/T / PUTIH	MHCNMR71HJ087622	BG 8028 PZ
131	07010010012007340	Dinas Kesehatan	194.040.000	TOYOTA	HILUX 2.0 M/T -SILVER METALIK	MR0EW88B9J02066261	BG 8143 PZ
132	07010010012007341	Dinas Kesehatan	538.250.000	TOYOTA HI ACE COMMUTER	2.5 (4X2) M/T AMBULANCE TRANSPORT AKMA VIN 2017	JTFSS22P8J0175453	BG 9924 PZ
133	07010010012007342	Dinas Kesehatan	538.250.000	TOYOTA HI ACE COMMUTER	2.5 (4X2) M/T AMBULANCE TRANSPORT AKMA VIN 2017	JTFSS22P8J0175198	BG 9923 PZ
134	07010010012007343	Dinas Kesehatan	538.250.000	TOYOTA HI ACE COMMUTER	2.5 (4X2) M/T AMBULANCE TRANSPORT AKMA VIN 2017	JTFSS22P7J0175976	BG 9925 PZ
135	07010010012007944	Dinas Kesehatan	238.008.000	APV GL SILVER	APV GL /Abu-Abu	MHYGDN42VJ401094	BG 9139 DZ
136	07010010012007945	Dinas Kesehatan	463.820.000	TOYOTA HI ACE	COMMUTER MANUAL VIN 2019/PUTIH	JTFSS22P4K0183969	BG 7010 PZ
137	07010010012007948	Dinas Kesehatan	18.150.000	YAMAHA JUPITER Z1	CW FI /Hitam	MH3UE1120KJ213111	BG 2476PAZ
138	07010010012007951	Dinas Kesehatan	18.150.000	YAMAHA JUPITER Z1	CW FI /Hitam	MH3UE1120KJ214914	BG 2477PAZ
139	07010010012007953	Dinas Kesehatan	18.150.000	YAMAHA JUPITER Z1	CW FI /Hitam	MH3UE1120KJ215064	BG 2382PAZ
140	07010010012007956	Dinas Kesehatan	24.085.000	YAMAHA AEROX	AEROX 155 VVA VIN 2018/Hitam	MH3SG4610J183727	BG 2473PAZ
141	07010010012007957	Dinas Kesehatan	24.085.000	YAMAHA AEROX	AEROX 155 VVA VIN 2018/Hitam	MH3SG4610J183735	BG 2479PAZ
142	07010010012007965	Dinas Kesehatan	24.085.000	YAMAHA AEROX	AEROX 155 VVA VIN 2018/Hitam	MH3SG4610J178058	BG 2377PAZ
143	07010010012008060	Dinas Kesehatan	516.861.999,50	Cvrolet	Corolado 2.5 LT FL1 (4x4) Double Gardan/Putih	MMM148FL0KH612856	BG 9060 PZ
144	07010010012008169	Dinas Kesehatan	248.265.000	SUZUKI APV DLX	APV Ambulance /Putih	MHYGDN42VKJ401960	BG 9210 DZ
145	07010010012008171	Dinas Kesehatan	370.000.000	Daihatsu Luxio	1.5 X M/T Ransius Ambulance /Putih	MHKW3CA31J024883	BG 9063 PZ
146	07010010012008661	Dinas Kesehatan	737.251.000	MITSUBISHI NEW TRITON	2.5L SC HDX (4x4) M/T- AMBULANCE /PUTIH	MMBENKL30KH057673	BG 9068 PZ
147	07010010012009410	Dinas Kesehatan	483.989.000	TOYOTA KIJANG INNOVA	2.0 G M/T RANSUS AMBULANCE - PUTIH	MHFJW8EM4M2393044	BG 9002 PZ
148	07010010012011295	Dinas Kesehatan	430.000.000	MITSUBISHI XPANDER	AMBULANCE DELUXE 1.5i gls-1 4x2 M/T- PUTIH	MK2NCLMANNJ000855	BG 9073 PZ

No	ID Pemda	SKPD	Harga (Rp)	Merk	Type	Nomor_Rangka	Nomor_Polisi
149	07010010012012007	Dinas Kesehatan	410.300.000	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL - HITAM METALIK	MHFJB8EM3P118075	BG 1082 PZ
150	07010010012012009	Dinas Kesehatan	410.300.000	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL - HITAM METALIK	MHFJB8EM1P118401	BG 1081 PZ
151	11020010012000001	Dinas Ketahanan Pangan	230.000.000	SUZUKI PANTHER	TBR 54F TURBO LV -PERAK METALIK	MHCTBR54FEK324397	BG 451 PZ
152	11050010012000088	Dinas Ketahanan Pangan	17.525.000	YAMAHA	JUPITER Z CW FI 2017	MH3UE1120HJ151561	BG2334 PAZ
153	11050010012000089	Dinas Ketahanan Pangan	17.525.000	YAMAHA	JUPITER Z CW FI 2017	MH3UE1120HJ145233	BG2335 PAZ
154	04010010012000002	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	215.500.000	SUZUKI PHANTER	TBR 54F TURBO LM/PERAK METALIK	MHCTBR54FDK319865	BG 483 PZ
155	12010010012000001	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	230.000.000,00	SUZUKI PHANTER	TBR 54 F TURBO LV	MHCTBR54FEK324418	BG 1481 PZ
156	12010010012000214	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	408.730.000	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 V A/T -HITAM METALIK	MHFGB8EM1K0426578	BG 35 PZ
157	04010010012000070	Dinas Lingkungan Hidup	25.000.000,00	Trail Kawasaki KLX 150 S	KLX 150	MH4XL150CDKP92037	BG 2027PAZ
158	16010010012000010	Dinas Lingkungan Hidup	34.245.000,00	VIAR	VR 150 3R	MGRVR15TAFLO00639	BG 2257PAZ
159	16010010012000523	Dinas Lingkungan Hidup	35.120.000,00	VIAR V 30 R Sampah New Kuning	BAK TERBUKA	MGRVR30TAJL100280	BG 2375 PZ
160	16010010012000545	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001246	BG 2579PAZ
161	16010010012000546	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001255	BG 2531PAZ
162	16010010012000547	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001256	BG 2582PAZ
163	16010010012000548	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001188	BG 2556PAZ
164	16010010012000549	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001245	BG 2539PAZ
165	16010010012000550	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001249	BG 2541PAZ
166	16010010012000554	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001247	BG 2530PAZ
167	16010010012000555	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001200	BG 2555PAZ
168	16010010012000556	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001195	BG 2553PAZ
169	16010010012000557	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001184	BG 2554PAZ
170	16010010012000561	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001220	BG 2538PAZ
171	16010010012000562	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001192	BG 2577PAZ
172	16010010012000563	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001254	BG 2551PAZ
173	16010010012000564	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001242	BG 2550PAZ
174	16010010012000565	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001248	BG 2549PAZ
175	16010010012000566	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001250	BG 2548PAZ
176	16010010012000567	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001219	BG 2547PAZ
177	16010010012000569	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001208	BG 2578PAZ
178	16010010012000570	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001209	BG 2575PAZ
179	16010010012000572	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001189	BG 2574PAZ
180	16010010012000573	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001258	BG 2568PAZ
181	16010010012000574	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001199	BG 2570PAZ
182	16010010012000575	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001204	BG 2572PAZ
183	16010010012000576	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001214	BG 2571PAZ
184	16010010012000577	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001213	BG 2546PAZ
185	16010010012000578	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001185	BG 2544PAZ
186	16010010012000579	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001223	BG 2543PAZ
187	16010010012000581	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001194	BG 2562PAZ
188	16010010012000584	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001218	BG 2573PAZ
189	16010010012000585	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001206	BG 2569PAZ
190	16010010012000586	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001224	BG 2567PAZ
191	16010010012000587	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001217	BG 2558PAZ
192	16010010012000588	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001243	BG 2557PAZ
193	16010010012000589	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001207	BG 2565PAZ
194	16010010012000590	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001215	BG 2566PAZ
195	16010010012000592	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001221	BG 2560PAZ
196	16010010012000593	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001196	BG 2561PAZ
197	16010010012000594	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001222	BG 2536PAZ
198	16010010012000595	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001257	BG 2535PAZ
199	16010010012000596	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.066,00	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001244	BG 2534PAZ
200	16010010012000597	Dinas Lingkungan Hidup	42.915.068	VIAR KARYA 150	HIDROLIK MATIC OTOMATIS	MGRVR15TAJL001182	BG 2533PAZ
201	05010010012000015	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	361.790.000	TOYOTA	HILUX 2.5G DC 4X4 M/T - HITAM METALIK	MR0FR22G6E0781248	BG 8153 PZ
202	05030010012000135	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16.247.000	HONDA	BEAT SPORTY CBS ISS VIN 2018/MERAH PUTIH	MHJ1JM116IGK955245	BG 2507PZ
203	04010010012010144	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	599.500.000	FORD RANGER	2.2L XL 4WD (4x4) DC -Merah	MNBLMFF80N2W20462	BG 8817 PZ
204	09030010012000001	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.345.300.000	HINO	HINO/WU342R-HKMTJD3(130 HD)	MJC1JG43E5-109332	BG 8004 PZ
205	09030010012000002	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.345.300.000	HINO	HINO/WU342R-HKMTJD3(130 HD)	MJC1JG43E5-109333	BG 8003 PZ
206	09030010012000003	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	22.691.500	HONDA	HONDA CB150R STREET FIRE	MH1KC4114EK325173	BG 2111PAZ
207	09060010012000186	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	16.570.000	YAMAHA MIO Z	MIO Z 125 CW -MERAH	MH3SE8890HJ243755	BG 2393PAZ
208	09060010012000187	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	16.570.000	YAMAHA MIO Z	MIO Z 125 CW -MERAH	MH3SE8890HJ243924	BG 2392PAZ
209	04010060012000128	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.376.500	HONDA	MEGA PRO CW FI	MH1KC6110FK037289	BG 2239PAZ
210	08010010012000010	Dinas Pendidikan	10.950.000	YAMAHA	4D7 VEGA R	MH34D70028J836760	BG 6798 DZ
211	08010010012000013	Dinas Pendidikan	10.950.000	Yamaha	4D7 Vega R	MH34D70028J836718	BG 6790 DZ
212	08010010012000014	Dinas Pendidikan	10.950.000	Yamaha	4D7 Vega R	MH34D70028J836745	BG 6805 DZ
213	08010010012000015	Dinas Pendidikan	10.950.000	Yamaha	4D7 Vega R	MH34D70028J836692	BG 6772 DZ
214	08010010012000026	Dinas Pendidikan	10.950.000	YAMAHA	4D7 Vega R	MH3D70028J836753	BG 6814 DZ
215	08010010012000028	Dinas Pendidikan	10.950.000	Yamaha	4D7 Vega R	MH34D70028J836752	BG 6775 DZ
216	08010010012000030	Dinas Pendidikan	14.625.000	Yamaha	Jupiter MX	MH355S001DK052468	BG 4636 DZ
217	08010010012000031	Dinas Pendidikan	10.950.000	YAMAHA 4D7	VEGA R	MH34D70028J836751	BG 6794 DZ
218	08010010012000032	Dinas Pendidikan	10.950.000	YAMAHA/4D7	VEGA R	MH34D70028J836729	BG 6769 DZ
219	08010010012000039	Dinas Pendidikan	10.950.000	Yamaha	4D7 Vega R	MH4D70028J836724	BG 6791 DZ
220	21010010012000002	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	372.753.000	SUZUKI	TF56E DM SC4X4 25LMI	MPATF586IE7011229	B 9075 PQV
221	21010010012000003	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.560.500	Honda Verza Spoke	GL 15B1DF M/T ,PUTIH	MH1KCS115EK036678	BG 2063PAZ
222	21010010012000179	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	398.460.390	TOYOTA HILUX	HILUX 2.0	MR0EW88B6H0204378	B 9915 PQV
223	04010010012008640	Dinas Pertanian	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J038779	BG 2407PAZ
224	04010010012008650	Dinas Pertanian	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J039562	BG 2419PAZ
225	04010010012008652	Dinas Pertanian	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J039524	BG 2421PAZ
226	04010010012008655	Dinas Pertanian	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J039316	BG 2424PAZ
227	04010010012008659	Dinas Pertanian	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J038590	BG 2428PAZ
228	04010010012008664	Dinas Pertanian	14.925.000	YAMAHA VEGA	FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J039527	BG 2685PAZ
229	04010010012009077	Dinas Pertanian	32.850.000	KAWASAKI KLX 150	TRAIL KLX 150/HITAM	MH4XL150GJHP67173	BG 2432PAZ
230	04010010012009078	Dinas Pertanian	32.850.000	KAWASAKI KLX 150	TRAIL KLX 150/HITAM	MH4XL150GJHP67175	BG 2438PAZ

No	ID Pemda	SKPD	Harga (Rp)	Merk	Type	Nomor_Rangka	Nomor_Polisi
231	04010010012009079	Dinas Pertanian	32.850.000	KAWASAKI KLX 150	TRAIL KLX 150/HITAM	MH4XL150GJIP67176	BG 2439PAZ
232	04010010012009080	Dinas Pertanian	32.850.000	KAWASAKI KLX 150	TRAIL KLX 150/HITAM	MH4XL150GJIP67178	BG 2431PAZ
233	04010010012009081	Dinas Pertanian	32.850.000	KAWASAKI KLX 150	TRAIL KLX 150/HITAM	MH4XL150GJIP67179	BG 2440PAZ
234	04010010012009082	Dinas Pertanian	32.850.000	KAWASAKI KLX 150	TRAIL KLX 150/HITAM	MH4XL150GJIP67186	BG 2433PAZ
235	04010010012009083	Dinas Pertanian	32.850.000	KAWASAKI KLX 150	TRAIL KLX 150/HITAM	MH4XL150GJIP67189	BG 2437PAZ
236	04010010012009084	Dinas Pertanian	32.850.000	KAWASAKI KLX 150	TRAIL KLX 150/HITAM	MH4XL150GJIP67237	BG 2436PAZ
237	04010010012009085	Dinas Pertanian	32.850.000	KAWASAKI KLX 150	TRAIL KLX 150/HITAM	MH4XL150GJIP67276	BG 2435PAZ
238	04010010012009086	Dinas Pertanian	32.850.000	KAWASAKI KLX 150	TRAIL KLX 150/HITAM	MH4XL150GJIP67279	BG 2434PAZ
239	04010010012009088	Dinas Pertanian	33.600.000	KAWASAKI KLX 150 G	KLX 150 G	MH4XL150GJIP72968	BG 2461PAZ
240	11010010012000001	Dinas Pertanian	348.690.000	TOYOTA HILUX 2.5 G	DOUBLE CABIN 4X4 M/T /HITAM METALIK	MR0FR22G6E0782156	BG 8165 PZ
241	11010010012000005	Dinas Pertanian	13.613.500	Honda	Revo CW F1	MH1JBK316EK069800	BG 2090PAZ
242	11010010012000006	Dinas Pertanian	13.613.500	Honda	Revo CW F1	MH1JBK314EK069844	BG 2091PAZ
243	11010010012000007	Dinas Pertanian	13.613.500	Honda	Revo CW F1	MH1JBK311EK068599	BG 2094PAZ
244	11010010012000346	Dinas Pertanian	35.000.000	KAWASAKI KLX 150	KLX 150 /HIJAU	MH4XL150GJIP07481	BG 2289PAZ
245	11010010012000348	Dinas Pertanian	35.000.000	KAWASAKI	KLX 150/ HIJAU	MH4XL150GJIP07356	BG 2291PAZ
246	11010010012001294	Dinas Pertanian	214.400.000	TOYOTA	AVANZA 1.3 VELOZ M/T - HITAM METALIK	MHKM5EA4J1K028524	BG 49 PZ
247	11010010012001295	Dinas Pertanian	140.138.472	SUZUKI APV/PUTIH	PICK UP WD AC PS (GC41ST)VIN 2018	MHYGDN41TJ1431719	BG 9053 PZ
248	11010010012001296	Dinas Pertanian	28.150.000	YAMAHA AEROK/PUTIH	AEROK 155 VVA S -VERSION VIN 2018	MH3SG4640J041150	BG 2484 PZ
249	11010010012001347	Dinas Pertanian	280.900.000	TOYOTA AVANZA	1.5 G CVT TSS - PUTIH	MHKAB1BY8NK010512	BG 1659 PZ
250	11010010012001348	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Biru Hitam	MH1JM8124NK161948	BG 2745PAZ
251	11010010012001349	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Biru Hitam	MH1JM8129NK161928	BG 2748PAZ
252	11010010012001350	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Biru Hitam	MH1JM8122NK159874	BG 2753PAZ
253	11010010012001351	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Biru Hitam	MH1JM8124NK159858	BG 2741PAZ
254	11010010012001352	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Biru Hitam	MH1JM8127NK159899	BG 2742PAZ
255	11010010012001353	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Biru Hitam	MH1JM8120NK159856	BG 2754PAZ
256	11010010012001354	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Biru Hitam	MH1JM8126NK159876	BG 2752PAZ
257	11010010012001355	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Merah Hitam	MH1JM8126NK162390	BG 2749PAZ
258	11010010012001356	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Merah Hitam	MH1JM8123NK162315	BG 2744PAZ
259	11010010012001357	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Merah Hitam	MH1JM8121NK162331	BG 2743PAZ
260	11010010012001358	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Merah Hitam	MH1JM812XNK162392	BG 2746PAZ
261	11010010012001360	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Merah Hitam	MH1JM812XNK162313	BG 2747PAZ
262	11010010012001361	Dinas Pertanian	18.467.011	Honda Beat Sporty CBS	Beat Sporty CBS/AT -Merah Hitam	MH1JM8124NK162386	BG 2750PAZ
263	11010010012001362	Dinas Pertanian	38.423.850	Kawasaki KLX 150 BF	LX150F M/T Trail -Hijau	MH4XL150FNJPD4543	BG 2767PAZ
264	11010010012001363	Dinas Pertanian	38.423.850	Kawasaki KLX 150 BF	LX150F M/T Trail -Hijau	MH4XL150FNJPD4111	BG 2766PAZ
265	11010010012001364	Dinas Pertanian	38.423.850	Kawasaki KLX 150 BF	LX150F M/T Trail -Hijau	MH4XL150FNJPD4109	BG 2765PAZ
266	11010010012001365	Dinas Pertanian	38.423.850	Kawasaki KLX 150 BF	LX150F M/T Trail -Hijau	MH4XL150FNJPD4545	BG 2764PAZ
267	11010010012001366	Dinas Pertanian	38.423.850	Kawasaki KLX 150 BF	LX150F M/T Trail -Hijau	MH4XL150FNJPD4534	BG 2763PAZ
268	11010010012001367	Dinas Pertanian	38.423.850	Kawasaki KLX 150 BF	LX150F M/T Trail -Hijau	MH4XL150FNJPD4108	BG 2762PAZ
269	11010010012001368	Dinas Pertanian	38.423.850	Kawasaki KLX 150 BF	LX150F M/T Trail -Hijau	MH4XL150FNJPD4104	BG 2771PAZ
270	11010010012001369	Dinas Pertanian	38.423.850	Kawasaki KLX 150 BF	LX150F M/T Trail -Hijau	MH4XL150FNJPD4539	BG 2770PAZ
271	11010010012001370	Dinas Pertanian	38.423.850	Kawasaki KLX 150 BF	LX150F M/T Trail -Hijau	MH4XL150FNJPD4549	BG 2769PAZ
272	11010010012001371	Dinas Pertanian	38.423.850	Kawasaki KLX 150 BF	LX150F M/T Trail -Hijau	MH4XL150FNJPD4533	BG 2768PAZ
273	11010010012001444	Dinas Pertanian	251.600.000	TOYOTA	AVANZA 1.5 G M/T [W01GM/T00] -HITAM METALIK	MHKAB1BY3PK071057	BG 1083 PZ
274	11010010012001445	Dinas Pertanian	423.000.000	TOYOTA	HILUX DC 2.4 E (4x4) DSL M/T - HITAM METALIK	MR0DB8C8D9P1030752	BG 8836 PZ
275	11010010012001474	Dinas Pertanian	164.000.000	SUZUKI Carry	PICK UP AC PS -PUTIH	MHYHDC61TP1253989	BG8152PZ
276	11020010012000003	Dinas Pertanian	21.440.625	YAMAHA	V-IXION /HITAM	MH33C1205C0052342	BG 2740 DZ
277	11020010012000004	Dinas Pertanian	21.440.625	YAMAHA	V-IXION /HITAM	MH33C1205C0052869	BG 2733 DZ
278	11020010012000007	Dinas Pertanian	15.279.000	HONDA	VARIO AT1121B01 A/T -WHITE RED	MH1JFH115FK436813	BG 2665PAZ
279	11040010012000001	Dinas Pertanian	230.000.000	ISUZU PANTHER	LV FF (HITAM)	MHC8TR54FEK324420	BG 1482 PZ
280	11040010012000002	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP14540	BG2033PAZ
281	11040010012000003	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP14507	BG2043PAZ
282	11040010012000005	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP14545	BG2042PAZ
283	11040010012000006	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP14539	BG2038PAZ
284	11040010012000008	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP14543	BG2044PAZ
285	11040010012000009	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP14542	BG2047PAZ
286	11040010012000010	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP14546	BG2054PAZ
287	11040010012000012	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP14531	BG2050PAZ
288	11040010012000013	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP14529	BG2048PAZ
289	11040010012000015	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP14532	BG2051PAZ
290	11040010012000016	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP13912	BG2039PAZ
291	11040010012000017	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP13887	BG2041PAZ
292	11040010012000018	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (HIJAU)	MH4XL150CEJP13890	BG2040PAZ
293	11040010012000019	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (PUTIH)	MH4XL150CEJP14573	BG2055PAZ
294	11040010012000020	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (PUTIH)	MH4XL150CEJP14569	BG2058PAZ
295	11040010012000021	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (PUTIH)	MH4XL150CEJP14492	BG2056PAZ
296	11040010012000022	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (PUTIH)	MH4XL150CEJP14491	BG2053PAZ
297	11040010012000023	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (PUTIH)	MH4XL150CEJP14571	BG2059PAZ
298	11040010012000024	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (PUTIH)	MH4XL150CEJP14566	BG2057PAZ
299	11040010012000026	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (PUTIH)	MH4XL150CEJP14552	BG2060PAZ
300	11040010012000027	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (PUTIH)	MH4XL150CEJP14554	BG2045PAZ
301	11040010012000028	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (PUTIH)	MH4XL150CEJP14555	BG2037PAZ
302	11040010012000029	Dinas Pertanian	26.100.000	Kawasaki	KLX 150 (PUTIH)	MH4XL150CEJP14564	BG2036PAZ
303	11040010012000275	Dinas Pertanian	29.950.000	Kawasaki	KLX 150 New	MH4XL150GGJP22650	BG 2500 PZ
304	11040010012000276	Dinas Pertanian	29.950.000	Kawasaki	KLX 150 New	MH4XL150GGJP22827	BG 2499 PZ
305	11040010012000277	Dinas Pertanian	29.950.000	Kawasaki	KLX 150 New	MH4XL150GGJP22638	BG 2501 PZ
306	11040010012000278	Dinas Pertanian	29.950.000	Kawasaki	KLX 150 New	MH4XL150GGJP22871	BG 2498 PZ
307	11040010012000288	Dinas Pertanian	16.863.500	HONDA NEW SUPRA	NEW SUPRA X 125 FI CW	MH1JB112GK429521	BG2295PAZ
308	11040010012000289	Dinas Pertanian	16.863.500	HONDA NEW SUPRA	NEW SUPRA X 125 FI CW	MH1JB114GK429441	BG2296PAZ
309	11040010012000290	Dinas Pertanian	16.863.500	HONDA NEW SUPRA	NEW SUPRA X 125 FI CW	MH1JB11XGK408125	BG2293PAZ
310	11040010012000291	Dinas Pertanian	16.863.500	HONDA NEW SUPRA	NEW SUPRA X 125 FI CW	MH1JB114GK420058	BG2294PAZ
311	05020010012000230	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	365.620.000	KIJANG TOYOTA INNOVA	KIJANG INNOVA	MHFGB8EM6H0412930	BG 1561 PZ

No	ID Pemda	SKPD	Harga (Rp)	Merk	Type	Nomor_Rangka	Nomor_Polisi
312	05020010012000275	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	194.040.000	TOYOTA HILUX	SC 2.0 L M/T SILVER METALIK	MR0EW8BB4J0205860	BG 9043 PZ
313	16010010012000457	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	551.500.000	TOYOTA DYNA SKYFLIT BIRU	DYNA 6R CHASIS 110M NEW ET PS VIN 2017	MJEC1JU41H5158901	BG 8023 PZ
314	09050010012000002	Dinas Sosial	30.000.000	Kawasaki	KLX 150 E CKD / Hijau	MH4LX150EJP21568	BG 2104 PZ
315	09050010012000003	Dinas Sosial	30.000.000	Kawasaki	KLX 150 E CKD / Hijau	MH4LX150EJP22942	BG 2106 PZ
316	04500010012000002	Kecamatan Penukal	17.246.000	HONDA MEGAPRO	GL15AID/HITAM ABU-ABU	MH1KC2119BK041313	BG 2572 DZ
317	04500010012000003	Kecamatan Penukal	14.150.000,00	SUZUKI THUNDER	HITAM	MH8EN125A8J502472	BG 6750 DZ
318	04010060012000009	Kecamatan Talang Ubi	13.125.000	Yamaha	Vega RR DB	MH35D9307FJ066167	BG 2117PAZ
319	04510010012000762	Kecamatan Talang Ubi	23.470.000	YAMAHA	FREEGO 125 STANDARD -MERAH	MH35E910P032944	BG 2799PAZ
320	04510040012000001	Kelurahan Talang Ubi Timur	7.500.000,00	HONDA GL PRO	GLM.II /HITAM	MH1UABE1X3K025695	BG 5999 DZ
321	01010010012000007	Sekretaris Daerah	177.110.000	TOYOTA	NEW AVANZA VELOS 1.5 M/T - HITAM METALIK	MHKM1CA4JEK088256	BG 1502 PZ
322	01010010012000011	Sekretaris Daerah	177.110.000	TOYOTA	NEW AVANZA VELOS 1.5 M/T - HITAM METALIK	MHKM1CAJEK083990	BG 1506 PZ
323	01010010012002344	Sekretaris Daerah	666.364.663	mitsubishi pajero sport 2.4 L DAKAR-H	(4x4) 8 A/T-VIN 2018/ABU ABU TUA METALIK	MK2KSWPNUJ000677	BG 1589 PZ
324	01010010012002345	Sekretaris Daerah	512.962.250	mitsubishi pajero sport 2.4 L DAKAR-H	(4x2) 8 A/T-VIN 2018 /HITAM MIKA	MK2KRWPNUIJ13898	BG 1590 PZ
325	04010010012000008	Sekretaris Daerah	298.860.000	TOYOTA KIJANG	INNOVA G - SILVER METALIK	MHF5X43GXD4010434	BG 1635 PZ
326	04010010012000010	Sekretaris Daerah	168.580.000	TOYOTA	NEW AVANZA 1,3 G M/T SILVER METALIK	MHKM1BA3JDK169000	BG 1418 PZ
327	04010010012000012	Sekretaris Daerah	168.580.000	TOYOTA	NEW AVANZA 1,3 G M/T SILVER METALIK	MHKM1BA 3JDJ033838	BG 1446 PZ
328	04010010012000013	Sekretaris Daerah	168.580.000	TOYOTA	NEW AVANZA 1,3 G M/T SILVER METALIK	MHKM1BA3JDJ034001	BG 1421 PZ
329	04010010012000014	Sekretaris Daerah	168.580.000	TOYOTA NEW AVANZA	1.3 G M/T - SILVER METALIK	MHKM1BA3JDK168415	BG 66 PZ
330	04010010012000020	Sekretaris Daerah	501.647.500	mitsubishi	PAJERO SPORT Dakar 2.5 (4x4) A/T -HITAM MIKA	MMBGYKH40ED025036	BG 1474 PZ
331	04010010012000027	Sekretaris Daerah	348.690.000	TOYOTA	Hilux DC M/T Diesel -PUTIH	MR0FR22G7E0780417	BG 9006 PZ
332	04010010012000032	Sekretaris Daerah	177.250.000	TOYOTA	HILUX PICK UP 2.5 DSL M/T - PUTIH	MR0AS12G7E0014680	BG 8050 PZ
333	04010010012000046	Sekretaris Daerah	12.592.973	YAMAHA	VEGA RR - HITAM	MH35D9206DJ897767	BG 2007PAZ
334	04010010012000055	Sekretaris Daerah	19.178.500	Honda	MEGA PRO CW 150	MH1KC3112DK294675	BG 2071PAZ
335	04010010012000060	Sekretaris Daerah	19.178.500	Honda	MEGA PRO CW 150 /HITAM	MH1KC3118DK303850	BG 2067PAZ
336	04010010012000078	Sekretaris Daerah	26.100.000	KAWASAKI	LX150C KLX150S /PUTIH	MH4LX150CEPJ16394	BG 2100PAZ
337	04010010012002705	Sekretaris Daerah	378.550.000	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T -HITAM METALIK	MHFAW8EM9G0202525	BG 1540 PZ
338	04010010012007700	Sekretaris Daerah	385.220.000	TOYOTA ALL NEW KIJANG INNOVA	2.4 V A/T - HITAM METALIK	MHFG88EM2J0418391	BG 13 PZ
339	04010010012007701	Sekretaris Daerah	385.220.000	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 V A/T - HITAM METALIK	MHFG88EM1J0417351	BG 1572 PZ
340	04010010012007702	Sekretaris Daerah	385.220.000	TOYOTA ALL NEW KIJANG INNOVA	2.4 V A/T - HITAM METALIK	MHFG88EMJ0418428	BG 12 PZ
341	04010010012007703	Sekretaris Daerah	385.220.000	TOYOTA KIJANG INNOVA	2.4 A/T - HITAM METALIK	MHFG88EM8J0417861	BG 11 PZ
342	04010010012007704	Sekretaris Daerah	521.840.000	TOYOTA	ALL NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T -HITAM METALIK	MHFGX8GS2H0503674	BG 1568 PZ
343	04010010012007705	Sekretaris Daerah	521.840.000	TOYOTA	ALL NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T -ABU ABU METALIK	MHFGX8GS9H0503879	BG 1569 PZ
344	04010010012008634	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	VEGA FORCE DB SW / MERAH	MH3UE1240J039664	BG 2401PAZ
345	04010010012008636	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J039384	BG 2403PAZ
346	04010010012008643	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / MERAH	MH3UE1240J039639	BG 2410PAZ
347	04010010012008645	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / MERAH	MH3UE1240J039665	BG 2414PAZ
348	04010010012008646	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / MERAH	MH3UE1240J039656	BG 2415PAZ
349	04010010012008648	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / MERAH	MH3UE1240J039649	BG 2417PAZ
350	04010010012008649	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / MERAH	MH3UE1240J039668	BG 2418PAZ
351	04010010012008651	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J039554	BG 2420PAZ
352	04010010012008654	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J039390	BG 2423PAZ
353	04010010012008656	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J038584	BG 2425PAZ
354	04010010012008660	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J039559	BG 2429PAZ
355	04010010012008661	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J039566	BG 2430PAZ
356	04010010012008662	Sekretaris Daerah	14.925.000	YAMAHA VEGA	YAMAHA VEGA FORCE DB SW / HITAM	MH3UE1240J038579	BG 2398PAZ
357	04010010012010661	Sekretaris Daerah	792.000.000	HYUNDAI	IONIQ 5 Prime Exn (4x2) A/T - HITAM	MF3KM81AUPJ005144	BG 1727 PZ
358	04010010012010844	Sekretaris Daerah	24.230.000	YAMAHA	FAZZIO NEO 125 -HIJAU	MH35E710PJ175052	BG 2792PAZ
359	04010010012010845	Sekretaris Daerah	24.230.000	YAMAHA	FAZZIO NEO 125 - HIJAU	MH35E710PJ200791	BG 2792PAZ
360	04010010012011021	Sekretaris Daerah	281.900.000	TOYOTA VELOZ	1.5 M/T HITAM METALIK	MHFAB18Y4P0079064	BG 1097 PZ
361	13010010012000006	Sekretaris Daerah	174.680.000	TOYOTA	AVANZA 1.3 G M/T	MHKM1BA3JFK220583	BG 1515 PZ
362	15010010012000001	Sekretaris Daerah	177.110.000	TOYOTA	AVANZA VELOZ 1.5M/T -HITAM METALIK	MHKM1CA4JEK085065	BG 1466 PZ
363	18010010012000002	Sekretaris Daerah	171.040.000	TOYOTA	NEW AVANZA 1.5 G M/T -HITAM METALIK	MHKM1CA3JEK0017342	BG 1511 PZ
Total			34.988.488.301				

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Uraian	Jumlah	Keterangan
Gudang Pemda Handayani		
Lemari Kaca	1	Rumah Bupati
Lemari Kabinet Kaca	1	Rumah Bupati
Kulkas 4 Pintu merk GEA G4D-404.R	2	Pengadaan 2024 belum dibuka
Kulkas 2 Pintu Merk GEA G2D-472.R	2	Pengadaan 2024 belum dibuka
Kulkas 2 Pintu Polytron PRS 451 Y	2	Pengadaan 2024 belum dibuka
Microwave oven merk Sharp R-223 DA-BK	2	
steamer cooking color DA 32x13cm	2	Pengadaan 2024 belum dibuka
Gelas Kaki Merk Torino	36 (Kotak)	Pengadaan 2024 belum dibuka
glass pitcher merk delicia	6	Pengadaan 2024
pisau roti merk elegant	6 pack isi 6	Pengadaan 2024
sendok the merk elegant	6 pack isi 6	Pengadaan 2024
garpu kue merk elegant	6 pack isi 6	Pengadaan 2024
filling kabinet merk modera	1	Bupati
kursi kerja warna putih	1	Bupati
kursi kerja warna hitam	1	Bupati
ambal/karpet	2	bupati
kipas angin warna hitam merk krisbow LB-FS-50	1	bupati
kipas angin warna hitam merk maspion	1	bupati
dispenser warna putih merk miyako MD 389 HC	1	bupati
kursi makan jati	5	bupati
meja jati	4	bupati
peralatan makan (piring, mangkok, tempat sendok, cangkir teh)		bupati
meja kerja	1	bupati
lemari pakaian jati	1	bupati
pot bunga		
sofa set warna kuning	1	
lemari baju (kayu) 3 pintu		rumah wabup
sofa 1 set hitam	1	wabup
meja makan marmer	1	wabup
lemari kabinet kayu	1	
hordeng abu metalik	1	bupati
1 set prasmanan merk sunnex	7	wabup
Ex Kontrakan Wabup		
air coller merk sharp	1	
smart board merk panasonic	1	
meja kerja kaca atas	1	
coffe table	1	
buffet	1	bupati
lemari kaca jati	1	bupati
kulkas 2 pintu merk LG JN-B372SLCL	1	bupati
kulkas 2 pintu merk panasonic NR-6291GYT	1	bupati
kursi makan krem	6	bupati
kursi tamu ukir 1 set warna putih + meja kaca	3	bupati
kursi tamu warna putih+meja kaca	2	
sofa warna putih 1 set + meja	3	bupati
meja makan kayu jati warna krem	1	bupati
Ajudan rumah kayu		
lemari pakaian 3 pintu sliding	1	bupati
kasur springbed	2	
lemari tv	1	rusak
dispenser merk miyako	1	
tempat tidur springbed sefta estate	2	
dispenser polytron	1	
kipas angin krisbow	1	rusak
filling kabiner 4 pintu merk modena		
tempat tidur springbed bigland	1	

Uraian	Jumlah	Keterangan
meja kerja kayu + kaca	1	
meja kayu	1	
lemari pakaian 5 pintu warna putih ukur	1	
kompas + oven modena	1	rusak
panggang roti merk sharp	1	rusak
panggang roti merk turbo	1	rusak
1 set pecah belah (piring makan, piring kue, oval kecil, piring kue oval, besar, tatakan gelas teh)	1	
gelas kaki kedang	1 lusin 2 kotak	
gelas rolaex	6	
frezer box merk modena	1	
lemari sudut jati	3	
lemari hias jati	2	
lemari rias jati	2	
lemari pakaian jati 2 pintu	2	
lemari pakaian jati 3 pintu	1	
dipan	2	
jam jati	1	
kulkas 2 pintu merk SHARP SJP-570NLVSL	1	
lemari piring kayu	1	
kursi makan jati	8	wabup
kursi tamu warna putih	1	
meja tamu	1	
kursi makan jati motif bolong	1	
kasur biasa	1	wabup

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2 Palembang 30137

Telp. 0711-410549

<https://sumsel.bpk.go.id/>

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PIFA2AAF.